



WALI KOTA MAGELANG

SURAT EDARAN WALI KOTA MAGELANG
TENTANG
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA OPD
TAHUN 2019

NOMOR : 050 / 135 / 410

TANGGAL : 30 Januari 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

Magelang, 30 - Jan - 2018

Nomor : 050 / 135 / 410
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) bendel
Perihal : Penyusunan Rancangan
Renja OPD Tahun 2019

Kepada
Yth. Kepala Organisasi Perangkat
Daerah
se-Kota Magelang
di

M A G E L A N G

SURAT EDARAN

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2019 yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2019, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bersama ini kami sampaikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2019 sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kota Magelang Tahun 2019.

Penyusunan Rancangan Renja OPD Tahun 2019 tersebut diharapkan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Renja OPD Tahun 2019, adalah sebagai berikut:
 - a. Mengacu pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2019, yang

digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD Tahun 2019, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2019 (sebagaimana Lampiran 1).

b. Mengacu pada RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 khususnya pada tahun perencanaan 2018, sesuai yang diatur dalam Bab VI yaitu dengan Tema Produktif Bersama Mitra yang secara rinci sebagai berikut :

- 1) Tema ini sebagai dasar perencanaan pembangunan yang disusun tahun 2018 untuk diimplementasikan melalui RKPD Kota Magelang Tahun 2019. Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya eksekusi kemitraan antar pelaku pembangunan untuk menyiapkan Kota Magelang sebagai Kota Jasa yang Modern dan Cerdas dilandai masyarakat sejahtera dan religius. Fokus kinerja yang dicapai adalah rancangan produktivitas bersama mitra berlandaskan kreativitas-inovasi yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan selanjutnya. Pada tahun 2018 diasumsikan:
 - a) sudah terbentuk sistem basis data terpadu untuk perencanaan pembangunan, pelaksanaan rencana aksi daerah dan pengukuran kinerja terintegrasi.
 - b) sudah terbentuk kesediaan kerjasama kemitraan: dengan dunia usaha, media, forum warga masyarakat.
- 2) Fokus prioritas tahap ini, sebagaimana tercantum dalam Bab VI RPJMD Kota Magelang 2016-2021, adalah:
 - a) Penambahan aktor swasta dalam penyelenggaraan:
 - lapangan usaha dan kegiatan ekonomi,
 - pendidikan,
 - kesehatan
 - b) Operasionalisasi ruang komunikasi, informasi, dan promosi kota secara rutin melalui media massa, media tradisional, maupun jurnalisme warga
 - c) Awal pelembagaan konsultasi publik rutin antara SKPD dengan forum warga komunitas
 - d) Pelembagaan tindak lanjut hasil inovasi dan kreasi masyarakat Kota Magelang menjadi produk terapan yang diimplementasikan.

- e) Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa tengah
 - f) Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja ekonomi masyarakat Kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah
 - g) review akurasi dan kecocokan dokumen perencanaan pembangunan dan produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman.
- 3) Arah kebijakan pembangunan sebagaimana termuat dalam Bab VI RPJMD Kota Magelang 2016-2021, dirancang untuk menjawab pencapaian prioritas pembangunan fokus pada:
- a) Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya;
 - b) Penataan organisai perangkat daerah (SOTK) yang efektif dan efisien dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur;
 - c) Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran daerah;
 - d) Pencegahan pelanggaran hukum berbasis partisipasi masyarakat;
 - e) Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat;
 - f) Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi;
 - g) Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi;
 - h) Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i) Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset dan profesionalitas aparatur pengelola aset;

- j) Meningkatkan akses informasi, komunikasi, partisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota;
- k) Peningkatan kemitraan pemerintah-swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan yang PAUD, Dasar, non-formal, dan perpustakaan daerah/wilayah;
- l) Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat;
- m) Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan;
- n) Peningkatan sarana prasarana pelayanan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan;
- o) Pengembangan pola sinergitas kebijakan dan program pembangunan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan pemukiman, pemberdayaan masyarakat, persampahan, penanggulangan bencana untuk menghasilkan lingkungan sehat, aman, berkelanjutan;
- p) Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan;
- q) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan;
- r) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan PMKS, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengarusutamaan gender;
- s) Pengembangan sistem Komunikasi, informasi dan edukasi pada semua komponen pemerintah dan masyarakat untuk membangun kesadaran pelestarian nilai seni budaya dan daya saing pariwisata;
- t) Penguatan model kemitraan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban lingkungan mengantisipasi resiko bencana konflik SARA, sosial, ekonomi, dan politik.

Perbedaan arah kebijakan perencanaan tahun 2018 dengan sebelumnya adalah pada tahapan aksi pencapaian kinerja sasaran. Tahun 2019 sudah mulai dengan pelaksanaan rencana kegiatan yang merupakan implementasi aksi yang dihasilkan pada tahun 2018.

- 4) Prioritas urusan yang mendukung arah kebijakan perencanaan tahun 2018 untuk diimplementasikan tahun 2019 adalah:
 - a) Fungsi penunjang urusan pemerintahan;
 - b) Urusan pendidikan;
 - c) Urusan kesehatan
 - d) Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e) Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - f) Urusan sosial;
 - g) Urusan penanaman modal;
 - h) Urusan komunikasi dan informatika;
 - i) Urusan perdagangan;
 - j) Urusan perindustrian;
 - k) Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - l) Urusan kebudayaan;
 - m) Urusan pariwisata;

- 5) Program unggulan sebagai prioritas pada perencanaan tahun 2018 untuk dilaksanakan tahun 2019 adalah:
 - a) Program peningkatan kualitas sumber daya pemerintah;
 - b) Program peningkatan daya saing daerah;
 - c) Program kota cerdas;
 - d) Program pemerintahan responsif dan partisipatif;
 - e) Program pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan;
 - f) Program pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan;
 - g) Program penguatan pertumbuhan ekonomi;
 - h) Program perluasan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
 - i) Program masyarakat religius menuju masyarakat madani.

c. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi

kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja OPD Tahun 2019, serta dapat menjawab berbagai isu-isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

- d. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan OPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja OPD Tahun 2019 mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD Tahun 2019.
 - e. Substansi pada matriks rancangan Renja OPD Tahun 2019 memuat:
 - 1) program dan kegiatan;
 - 2) lokasi kegiatan;
 - 3) indikator kinerja;
 - 4) kelompok sasaran; dan
 - 5) pagu indikatif dan prakiraan maju tahun.
 - f. Penyusunan Renja OPD Tahun 2019 bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
 - g. Penyusunan program dan kegiatan OPD Tahun 2019 memasukkan rencana program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Provinsi Tahun 2019.
 - h. Penyusunan program dan kegiatan OPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan IKU (Indikator Kinerja Utama) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dengan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
2. Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2019 merupakan pelaksanaan Renja tahun ketiga Renstra OPD Kota Magelang Tahun 2016-2021.
 3. Mengacu Rancangan Awal RKPD Kota Magelang Tahun 2019 sebagaimana lampiran 1 Surat Edaran ini atau bisa di download di website "www.bappeda.magelangkota.go.id".
 4. Mengakomodir hasil-hasil Fokus Group Discussion (FGD) terkait prioritas yang akan dilaksanakan oleh OPD Tahun 2019.
 5. Memperhatikan Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) sebagaimana

terlampir sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan harapan agar dapat memberikan koridor dan standar format baik dari segi cakupan substansi maupun tingkat kedetailan dokumen Renja-OPD sehingga dapat memudahkan proses penelaahan dalam rangka penyusunan Rancangan RKPD Kota Magelang Tahun 2019.

6. Untuk mendukung akuntabilitas dari program-kegiatan yang diusulkan dalam Renja OPD, maka Renja OPD dimaksud harus dilengkapi dengan Pra RKA dengan mengimplementasikan Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Magelang .
7. Menyiapkan program kegiatan yang akan disusun dengan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), yaitu :
 - a. Program/kegiatan berdampak langsung bagi masyarakat, mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender serta Indeks Pemberdayaan Gender;
 - b. Program/Kegiatan utama dari masing-masing OPD sesuai urusan yang menjadi kewenangannya sesuai Indikator Kinerja Kunci, Indikator SPM dan Indikator Kinerja Utama OPD yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada Indeks Pembangunan Gender;
 - c. Program/kegiatan yang sifatnya terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau kelembagaan;
 - d. Program/kegiatan pada huruf a dan b merupakan program/kegiatan yang berkelanjutan, dan masing-masing OPD minimal 1 Program dan 2 Kegiatan strategis responsive gender;
 - e. Menyusun Gender Budget Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari (pra) RKA OPD Responsif Gender Tahun 2019.
 - f. GBS harus dilampirkan dan akan diverifikasi bersamaan dengan verifikasi Rancangan Renja OPD Tahun 2019.

Selanjutnya hardcopy Rancangan Renja OPD yang telah disusun agar dapat disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dan OPD melakukan input ke: sippd.magelangkota.go.id paling lambat tanggal 19 Pebruari 2018 pukul 23.59 untuk disinkronkan dengan program kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dalam Forum OPD.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

WALIKOTA MAGELANG



Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

Tembusan :

1. Wakil Walikota Magelang;
2. Ketua DPRD Kota Magelang;
3. Sekretaris Daerah Kota Magelang;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang;
5. Inspektur Kota Magelang.



RANCANGAN AWAL R.K.P.D RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
2018

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	BAB I - 1
1.1.1 Proses Penyusunan	BAB I - 2
1.1.2 Prinsip dan Pendekatan Penyusunan	BAB I - 6
1.2 Landasan Hukum.....	BAB I - 8
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	BAB I - 9
1.3.1 RPJM Nasional.....	BAB I - 10
1.3.2 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019.....	BAB I - 11
1.3.3 RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah	BAB I - 11
1.3.4 RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031.....	BAB I - 19
1.3.5 RPJMD Kota Magelang.....	BAB I - 19
1.3.6 Rencana Pembangunan Sektoral.....	BAB I - 21
1.3.7 Renja – OPD.....	BAB I - 21
1.4 Maksud dan Tujuan.....	BAB I - 22
1.4.1 Maksud.....	BAB I - 22
1.4.2 Tujuan.....	BAB I - 22
1.5 Sistematika RKPD.....	BAB I - 22

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	BAB II - 1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	BAB II - 1
2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah.....	BAB II - 1
2.1.1.2 Topografi.....	BAB II - 3
2.1.1.3 Geologi.....	BAB II - 4
2.1.1.4 Hidrologi.....	BAB II - 5
2.1.1.5 Klimatologi.....	BAB II - 5
2.1.1.6 Penggunaan Lahan.....	BAB II - 6
2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah.....	BAB II - 8
2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana.....	BAB II - 13

2.1.1.9	Aspek Demografi.....	BAB II - 14
2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	BAB II - 20
2.1.2.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	BAB II - 20
2.1.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial.....	BAB II - 29
2.1.2.3	Fokus Seni Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Agama.....	BAB II - 35
2.1.3	Aspek Layanan Umum.....	BAB II - 40
2.1.3.1	Fokus Urusan Pelayanan Wajib.....	BAB II - 40
2.1.3.2	Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan.....	BAB II - 122
2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah.....	BAB II - 133
2.1.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	BAB II - 134
2.1.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur.....	BAB II - 141
2.1.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi.....	BAB II - 156
2.1.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia.....	BAB II - 159
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan - Realisasi RPJMD.....	BAB II - 162
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	BAB II - 176
2.3.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	BAB II - 176
2.3.2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	BAB II - 179
2.4	Isu Strategis	BAB II - 191

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2019

3.1	Kondisi Ekonomi Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018.....	BAB III - 1
3.1.1	Kondisi Perekonomian Nasional	BAB III - 1
3.1.2	Kondisi Perekonomian Jawa Tengah	BAB III - 3
3.1.3	Deskripsi Umum Prediksi Perekonomian Kota Magelang	BAB III - 3
3.2	Tantangan Dan Prospek Perekonomian Kota Magelang Tahun 2019.....	BAB III - 6
3.2.1	Tantangan Perekonomian Kota Magelang 2018.....	BAB III - 6
3.2.2	Prospek Perekonomian Kota Magelang Tahun 2019.....	BAB III - 7
3.4	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	BAB III - 7
3.4.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	BAB III - 10
3.4.2	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	BAB III - 11

3.4.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	BAB III - 24
3.4.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	BAB III - 29

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Visi Misi Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Jangka Menengah	BAB IV - 1
4.1.1 Visi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021.....	BAB IV - 1
4.1.2 Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021.....	BAB IV - 2
4.1.3 Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021.....	BAB IV - 5
4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2019.....	BAB IV - 19
4.2.1 Tema Pembangunan Tahun 2019.....	BAB IV - 19
4.2.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2019.....	BAB IV - 20
4.3 Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target SDGs Kota Magelang.....	BAB IV - 34
4.3.1 Sustainable Development Goals (SDGs).....	BAB IV - 34
4.3.2 Pendekatan Kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs).....	BAB IV - 35
4.4 Arah Pengembangan Wilayah Terpadu Kota Magelang.....	BAB IV - 37
4.4.1 Arah Pengembangan Eksternal Wilayah.....	BAB IV - 37
4.4.2 Arah Pengembangan Internal Wilayah.....	BAB IV - 39
4.4.2.1 Bagian Wilayah Kota I (BWK I).....	BAB IV - 40
4.4.2.2 Bagian Wilayah Kota II (BWK II).....	BAB IV - 42
4.4.2.3 Bagian Wilayah Kota III (BWK III).....	BAB IV - 44
4.4.2.4 Bagian Wilayah Kota IV (BWK IV).....	BAB IV - 45
4.4.2.5 Bagian Wilayah Kota V (BWK V).....	BAB IV - 47
4.5 Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	BAB IV - 48

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kategorisasi Rencana Program Prioritas.....	BAB V - 1
5.1.1 Program Prioritas I.....	BAB V - 1
5.1.1.1 Program Prioritas Tema Perencanaan Tahun 2019.....	BAB V - 1
5.1.1.2 Akomodasi Hasil Musrenbang.....	BAB V - 4
5.1.1.3 Prioritas Program Hasil FGD.....	BAB V - 4

5.1.1.4	Prioritas Program Akomodasi Pokok Pokok Pikiran DPRD.....	BAB V - 26
5.1.2	Program Prioritas II.....	BAB V - 26
5.1.3	Program Prioritas III.....	BAB V - 26
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....		BAB VI-1
BAB VII PENUTUP		
7.1	Penutup.....	BAB VII - 1

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah secara proses dan hasil seharusnya mampu memberikan dampak pada sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat. Dengan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah yang efektif dan efisien, hasil pelaksanaan pembangunan ini sudah semestinya tercermin dalam berbagai aspek baik ekonomi maupun sosial seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah salah satunya adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta makin baiknya Indeks Pembangunan Manusia serta indikator indikator lainnya yang terukur.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, pada hakekatnya bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan bagi masyarakat sangat diperhatikan. Sedangkan daerah juga diberi keleluasaan dalam mengembangkan muatan lokal dan kekhasan daerah.

Dalam manajemen pembangunan daerah terdapat tiga fase yang harus dilalui untuk mendapatkan dampak yang signifikan secara publik yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap pengendalian monitoring evaluasi dan pelaporan. Ketiga tahapan tersebut memiliki bobot dengan proporsi dan kontribusi yang saling berkaitan. Perencanaan pembangunan yang baik akan mendorong hasil capaian pembangunan sebagaimana yang ditargetkan dalam peran pengendalian, monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan.

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional dan terutama bagi daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur dan mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Merujuk pada regulasi teknis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan rencana Pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka Menengah daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPd, dan Renja OPD menjadi pijakan formal sebagai pijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Mengacu seluruh regulasi baik undang-undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Magelang telah menyusun dokumen RPJPD Kota Magelang 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009. Untuk dokumen RPJMD Tahap I (2005-2010) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2005, sedang RPJMD Tahap II (2011-2015) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015. Sementara itu RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Magelang No 1 Tahun 2016 .

1.1.1 Proses Penyusunan

RKPD Kota Magelang Tahun 2019 ini merupakan tahun ketiga perencanaan tahap III RPJMD 2016-2021. Proses penyusunan dokumen ini dilaksanakan melalui tahapan yang sudah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Tahapan penyusunan dilaksanakan secara runtut dalam 6 (enam) tahapan yaitu : persiapan penyusunan RKPd; penyusunan rancangan awal RKPd; penyusunan rancangan RKPd, pelaksanaan musrenbang RKPd, perumusan rancangan akhir RKPd, dan penetapan RKPd. Tahap pertama yang dilakukan adalah tahap persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPd, orientasi mengenai RKPd, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyusunan RKPd Kota Magelang Tahun 2019, Tim penyusun terdiri dari personil lintas OPD di jajaran OPD yang dipandang mampu untuk memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan daerah. Sementara itu untuk memudahkan koordinasi penyusunan, dilakukan melalui rapat rapat koordinasi serta memanfaatkan media sosial melalui group Tim Penyusunan RKPd Kota Magelang Tahun 2019. Hal ini merupakan terobosan teknokratis yang cukup memberikan kemudahan dan kecepatan koordinasi kerja tim.

Penyusunan RKPd diawali dengan perumusan rancangan awal RKPd untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD untuk menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif maupun politis, termasuk mengkomodir proses telaahan Pokok pokok pikiran DPRD.

Untuk menjamin perbaikan berkesinambungan (continues improvement) baik aspek kualitas dan rentang cakup agar substansi RKPd Kota Magelang semakin efektif, maka berbagai terobosan dan inovasi baik inovasi

proses perencanaan maupun inovasi pada tataran kebijakan telah dilakukan yang melibatkan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom up/top down maupun politis.

Tahapan selanjutnya adalah Merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja OPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Untuk menjaga harmoni dan konektivitas perencanaan perlu melakukan evaluasi Rancangan Awal RKP dan RKPD Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan provinsi yang digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana.

Dengan memperhatikan relevansinya kebijakan, maka sebuah kebijakan menjadi relevan dan dapat dipedomani bagi suatu daerah karena beberapa karakteristik:

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

Sementara itu kebijakan lainnya juga dipertimbangkan memiliki dampak strategis bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik:

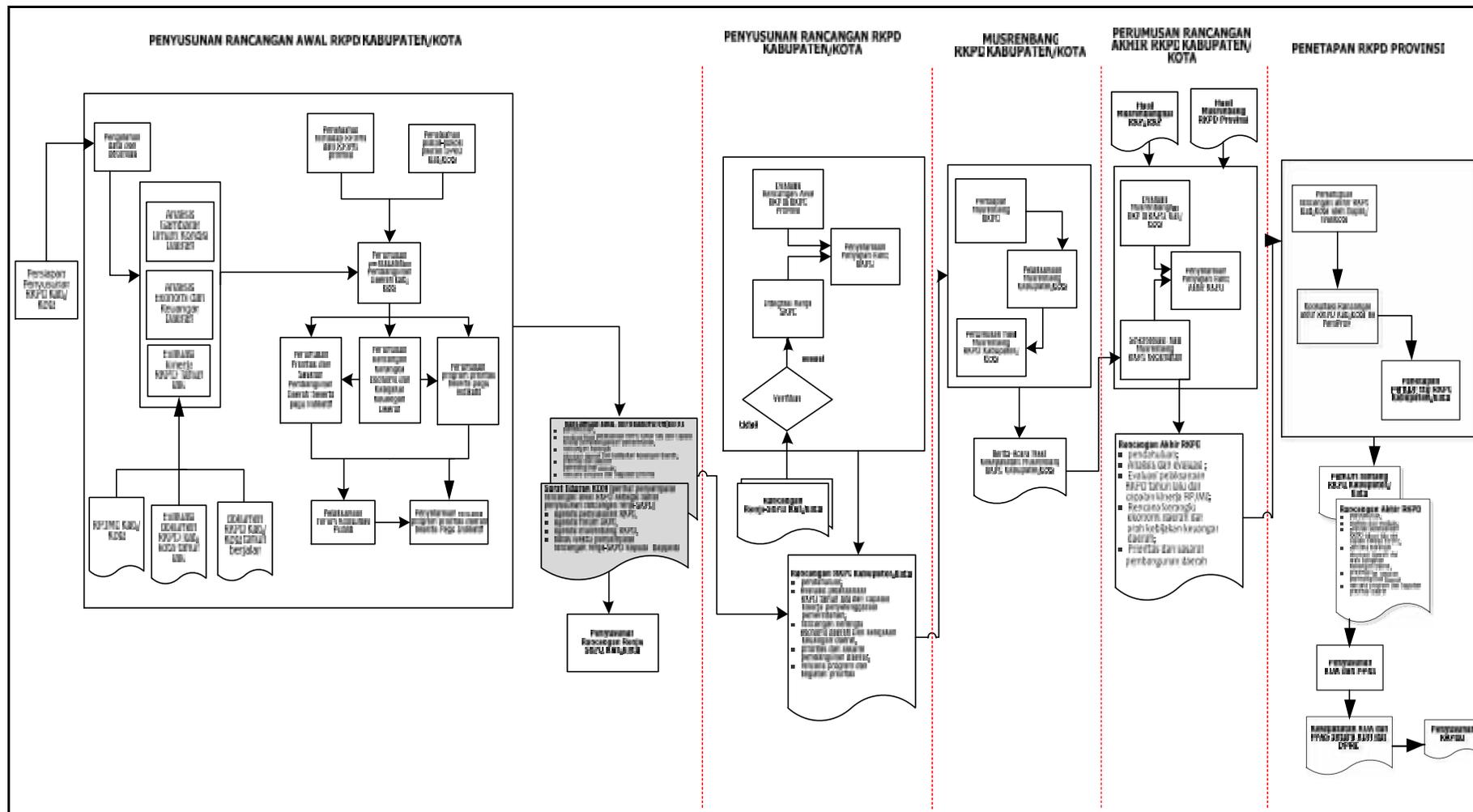
1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.

Sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2019, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jbaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah.

Tahapan pelaksanaan Forum OPD dilaksanakan dengan mengkombinasikan hasil Musrenbang Kecamatan sekaligus mengkonfirmasi hasil FGD yang diakomodir oleh OPD terkait sesuai Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan dan Berita Acara Hasil FGD menjadi langkah selanjutnya yang ditempuh. Setelah itu dilakukan Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap OPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja OPD pada OPD terkait.

Dokumen rancangan RKPD ini dijadikan sebagai bahan dalam Musrenbang tingkat Kota Magelang yang merupakan forum konfirmasi atas keseluruhan hasil Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan serta hasil rancangan Renja OPD yang telah terverifikasi.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang kemudian dilakukan penyelarasan Rancangan Akhir RKPD dengan memperhatikan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah dan Rancangan RKP pada saat Musrenbang Nasional dan hasil konsultasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Hasil Penyelarasan Akhir ini kemudian dilakukan konsultasi kepada TAPD sebelum ditetapkan melalui Peraturan Walikota. Proses perumusan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut:



Gambar 1-1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKP Kota Magelang Tahun 2019

1.1.2 Prinsip dan Pendekatan Penyusunan

Proses penyusunan RKPD Kota Magelang tahun 2019 dilaksanakan sesuai regulasi dan disusun dengan metode swakelola. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa RKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan publik, sehingga menjadi kewajiban aparat pemerintah daerah untuk menyusun dan mengimplementasikannya.

Dalam rentang kendali untuk memastikan bahwa output hasil penyusunan yang berkualitas, taat regulasi dan operasional, maka pendekatan dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Magelang Tahun 2019 melibatkan beberapa prinsip sebagai berikut :

Tabel 1-1
Prinsip Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019

PRINSIP	INDIKATOR
KETERKAITAN	Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kota Magelang 2019 yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD
	Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
KONSISTENSI	Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Magelang Tahun 2017 dengan isu strategis
	Terwujudnya konsistensi antara isu strategis dengan prioritas pembangunan
	Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2019 dengan pagu anggaran OPD
	Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2019 dengan program/kegiatan OPD
KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN	Tersedianya kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan Tahun 2019
	Tersedianya kerangka kebijakan keuangan daerah Tahun 2019
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan manusia
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan sektor unggulan
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya
	Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan tata kelola dan reformasi birokrasi
KETERUKURAN	Tersedianya rumusan sasaran pembangunan daerah, hasil program, dan output kegiatan tahun 2019 dengan indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja) – berdasarkan matrik
	Tersedianya prakiraan maju anggaran tahun berikutnya
INOVASI KEBIJAKAN	Tersedianya kebijakan pembangunan yang inovatif yang ditunjukkan oleh penerapan konsep holistik- tematik, integratif, dan spasial dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
	Tersedianya informasi usulan dan justifikasi penetapan hasil pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dalam lingkup Kota Magelang

Dalam aspek yang lain penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 dilakukan dengan beberapa pendekatan proses penyusunan yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom up/top down serta politik. Detil konfigurasi pendekatan proses penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1-2
Pendekatan Proses Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019

KRITERIA	PARAMETER
DARI BAWAH (BOTTOM-UP)	1. Usulan dari Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019
	2. Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019
DARI ATAS (TOP-DOWN)	3. Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2019 dan Prioritas Nasional dalam RKP 2019
	4. Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2019, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dan RKP Tahun 2019
TEKNOKRATIK	5. dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah
	6. Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019
	7. Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD Kota Magelang Tahun 2019
PARTISIPATIF	8. dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan
POLITIK	9. dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD
	10. Pertimbangan dan Pendapat DPRD Kota Magelang dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019
	11. Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019

Sedangkan dalam pendekatan substansi, RKPD Kota Magelang Tahun 2019 memperhatikan hal sebagai berikut :

Tabel 1-3
Pendekatan Substansi RKPD Kota Magelang Tahun 2019

PENDEKATAN	PARAMETER
HOLISTIK-TEMATIK	dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya
INTEGRATIF	menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah
SPASIAL	dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 ini adalah:

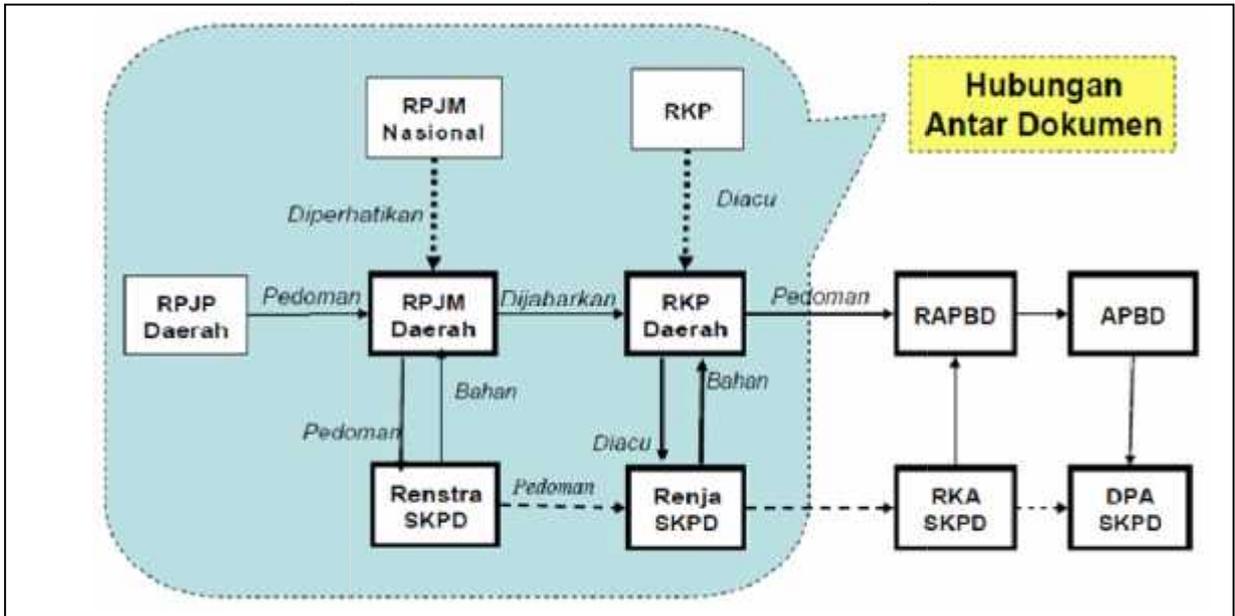
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
20. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2019;
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025;
27. Peraturan daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/019604 Tanggal 27 Desember 2017 perihal Arah Kebijakan Penyusunan RKPD Tahun 2019

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam melaksanakan core businessnya sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, Rancangan awal RKPD Kota yang berpedoman pada RPJMD Kota tersebut juga mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. Oleh karena itu, RKPD Kota Magelang tahun 2019 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021, mengacu pada RPJMD Provinsi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2019, serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019.

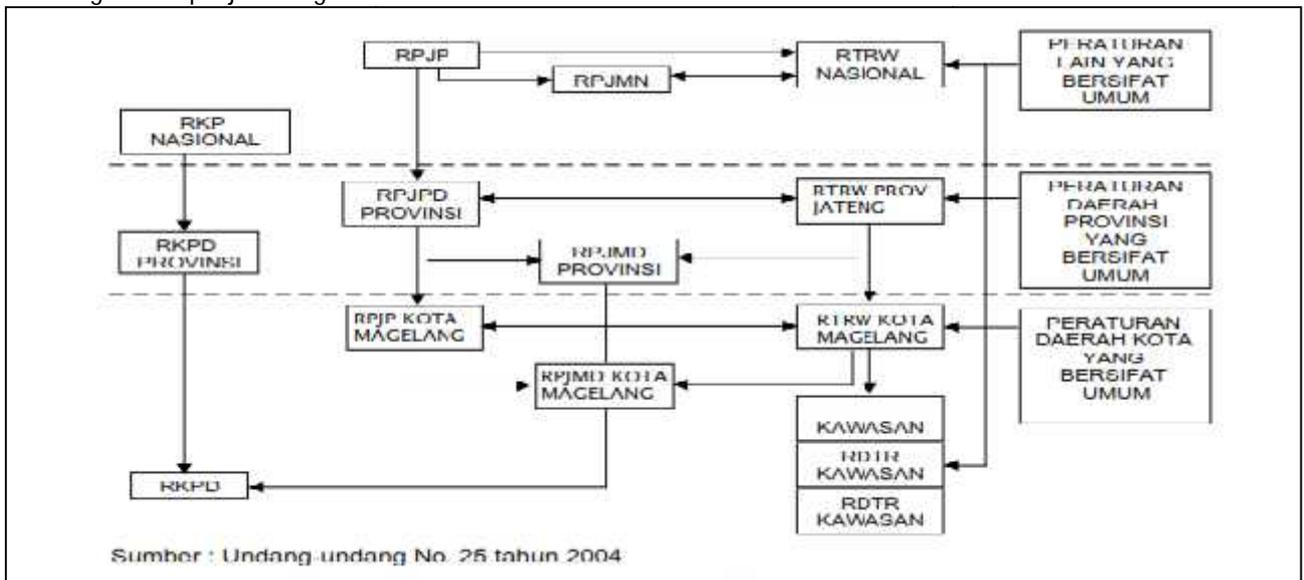
Dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Magelang Tahun 2019 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang), yaitu sebagai berikut:



Sumber : UU No 25 Tahun 2004

Gambar 1-2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya

Selain itu penyusunan RPKD Kota Magelang tidak terlepas dari dokumen tata ruang wilayah sebagaimana penjelasan gambar berikut ini :



Sumber : Undang-undang No. 25 tahun 2004

Gambar 1-3 Kedudukan Dokumen RPKD Kota Magelang dengan Dokumen Perencanaan dan Spasial

Secara lengkap penjelasan masing masing dokumen yang terkait dengan penyusunan RPKD Kota Magelang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1.3.1 RPJM Nasional

Rujukan penting lainnya adalah RPJM Nasional yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Ada 3 (tiga) dokumen sebagai lampiran dari Perpres Nomor 2 Tahun 2015, yaitu: (i) Buku I dengan judul: "Agenda

Pembangunan Nasional”, (ii) Buku II dengan judul: “Agenda Pembangunan Bidang”, dan (iii) Buku III dengan judul: “Agenda Pembangunan Wilayah”.

Sebagai penjabaran normatif perencanaan tahun ke tiga RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021, dan dengan demikian mengacu pada agenda agenda prioritas nasional, agenda prioritas bidang serta agenda pembangunan kewilayahan, diharapkan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 akan dapat ikut mewarnai pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019.

1.3.2 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019

RKPD Kota Magelang Tahun 2019 juga merujuk pada RKP Tahun 2019. Hal ini merupakan manifestasi dari upaya mewujudkan sinergitas kebijakan dan dukungan pembangunan daerah Kota Magelang dengan kebijakan nasional. Pemerintah Kota Magelang berupaya semaksimal mungkin agar target target pembangunan nasional dapat tercapai dengan kontribusi yang diberikan dari pembangunan di Kota Magelang Tahun 2019.

1.3.3 RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dokumen rujukan lain adalah RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang telah dilakukan perubahan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/019604 Tanggal 27 Desember 2017 perihal Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2019, diharapkan setiap daerah agar Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3.3.1 Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah

Beberapa kebijakan umum perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sebagai berikut :

1. Mepedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Mepedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2018, guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/ kota, maka untuk penyusunan RKPD Tahun 2019 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada arah kebijakan pembangunan provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi serta memperhatikan capaian dan kendala pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

4. Rencana pembangunan disusun dalam program/kegiatan yang fokus pada prioritas dan sasaran, bermanfaat langsung bagi masyarakat, terpadu lintas sektor, menyelesaikan permasalahan pembangunan, berorientasi pada output, outcome, benefit dan impact yang terukur.
5. Meningkatkan kualitas belanja berbasis kinerja/ money follow programme priority yang efektif dan efisien untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
6. Mengutamakan penanganan isu-isu strategis yang meliputi kemiskinan, pengangguran, kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, daya saing perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, infrastruktur, kesenjangan wilayah dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
7. Meningkatkan inovasi dan kreasi dalam setiap program/kegiatan dengan mendasarkan hasil penelitian dan pengembangan sebagai upaya terobosan dalam penanganan isu strategis pembangunan daerah.
8. Pembangunan berbasis kewilayahan dengan meningkatkan potensi dan keunggulan daerah, serta memperhatikan kondisi sosial, budaya dan ekonomi di setiap wilayah.
9. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan dari sumber Non Pemerintah (diantaranya kerjasama/ kemitraan/ keperantaraan dengan pihak swasta, masyarakat, Perguruan Tinggi atau lembaga pendanaan lainnya) untuk percepatan pencapaian sasaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
10. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
11. Menjaring aspirasi publik seluas-luasnya dengan membuka informasi dan komunikasi publik melalui pelibatan seluruh stakeholder termasuk partai politik, gender dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus/kelompok rentan dengan mendorong peran aktif dan menjamin hak masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
12. Pemerintah Kabupaten/Kota agar meneruskan dan mensosialisasikan Surat Edaran Gubernur ini pada unsur Pemerintahan di bawahnya (Kecamatan, Desa dan Kelurahan).

1.3.3.2 Arah dan Prioritas Pembangunan Daerah

1.3.3.2.1 Isu Strategis Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019

Mendasarkan berbagai permasalahan pembangunan di Jawa Tengah, maka isu strategis pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019 dirumuskan sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi isu pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019, mengingat sampai dengan bulan Maret Tahun 2017 persentase kemiskinan Jawa Tengah masih cukup tinggi sebesar 13,01% dan masih di atas rata-rata nasional sebesar 10,64%, akan tetapi tren penurunan kemiskinan Jawa Tengah lebih baik (0,39%/tahun dalam periode 2013-2017) dibanding tren penurunan tingkat kemiskinan Nasional (0,26%/tahun dalam periode 2013-2017).

Apabila dilihat dari posisi relatif tingkat kemiskinan, terdapat 15 kab dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata Provinsi dan Nasional yang didominasi masyarakat miskin di wilayah perdesaan dengan pekerjaan utama di sektor pertanian. Perlu langkah-langkah percepatan dan strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan kompetensi dan ketrampilan petani, penciptaan nilai tambah hasil pertanian dengan hilirisasi/industrialisasi sektor pertanian dari on farm oriented menuju off farm oriented berbasis teknologi tepat

guna dan potensi keunggulan lokal desa (local wisdom), mendorong terciptanya corporate farming dan mix farming, menciptakan berbagai inovasi di sektor pertanian dan pendampingan petani secara berkelanjutan.

2. Daya saing ekonomi

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2016 tumbuh sebesar 5,28 % dan sampai dengan triwulan III tahun 2017 perekonomian Jawa Tengah tercatat tumbuh sebesar 5,13%. Industri yang tumbuh masih didominasi oleh industri padat karya dengan tingkat serapan buruh berpendidikan dan ketrampilan rendah, serta mengolah bahan baku impor dan barang modal impor; Investasi yang mendasarkan ketersediaan buruh dengan upah kerja yang murah masih mendominasi, investasi pada sektor jasa, pariwisata dan pengolahan atas sumber daya alam serta berteknologi tinggi masih rendah, sektor produksi masih didominasi pada skala UMKM dengan kondisi kurang efisien, lemah pada akses permodalan dan daya saing produk UMKM di pasar; kesenjangan wilayah dan antar kelompok yang masih belum baik.

3. Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia

IPM Jawa Tengah Tahun 2016 sebesar 69,98 Angka ini masih dibawah angka nasional sebesar 70,18. Kondisi ini terutama ditunjukkan dari komponen rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita (yang disesuaikan). Kondisi ini berkaitan juga dengan kualitas dan daya serap tenaga kerja yang terbesar adalah lulusan SD. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar kerja global.

Isu lain berkaitan sumber daya manusia adalah tantangan bonus demografi dimana usia produktif akan lebih besar dibandingkan usia non produktif. Tantangannya selain terkait dengan kualitas SDM juga terkait isu radikalisme, terorisme, dan ancaman NAPZA ancaman terbesarnya adalah penduduk usia produktif. Sehingga perlu upaya antisipasi melalui perkuatan mental dan spiritual masyarakat

4. Kedaulatan Pangan dan Energi

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Tantangannya tidak hanya terkait dengan ketersediaan dan kecukupan pangan utama, tetapi juga bagaimana meningkatkan keberagaman konsumsi pangan masyarakat, agar tercukupi kebutuhan gizi masyarakat. Tantangan lain adalah bagaimana menyiapkan produk pangan kita berorientasi ekspor, dan mampu bersaing di pasar global nasional, baik produk pangan mentah maupun olahan.

Penyediaan energi untuk industri, perlu penguatan kehandalan sistem dan sistem pasokan bagi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam upaya mendorong investasi dan perlunya pemerataan ketersediaan listrik utamanya untuk Rumah Tangga Miskin, serta peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan yang masih rendah

5. Kesenjangan Wilayah

Wilayah Jawa Tengah saat ini perkembangannya belum merata, yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson sebesar 0,6 di tahun 2016. Daerah Kabupaten di bagian selatan Jawa Tengah dan Kabupaten yang berada di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur dan Jawa Barat relatif kurang maju dibanding wilayah Pantura dan Pusat Pemerintahan di Semarang dan Pusat pertumbuhan Surakarta. Untuk itu membuka akses antar

wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa. Penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan, dilengkapi dengan transportasi publik yang memadai. Selain itu tantangan lain adalah penyediaan sarana dasar seperti rumah layak huni, dengan dilengkapi fasilitas sanitasi, air bersih layak, dan listrik.

6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang cukup penting. Karena isu sumberdaya alam dan lingkungan hidup ini sudah menjadi isu global dan nasional, terutama terkait dengan isu perubahan iklim. Selain itu, kerusakan ekosistem pesisir dan laut perlu menjadi perhatian, untuk mempertahankan keberlanjutan pembangunan. Isu yang saat ini mencuat antara lain pencemaran lingkungan, pertambangan ilegal dan dampaknya, kerusakan hutan dan lahan, konflik pengelolaan hutan, krisis air, sekaligus bencana kekeringan, dan lainnya.

7. Tata kelola Pemerintahan

Tuntutan peningkatan kualitas profesionalisme dan pengembangan kompetensi SDM aparatur, sistem informasi manajemen pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online yang terintegrasi dan paperless, peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi dalam rangka good governance dan clean government, peningkatan ketahanan ideologi Pancasila, pencegahan intoleransi umat beragama, radikalisme, terorism, hate speech dan hoax news dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondusivitas wilayah Jawa Tengah

1.3.3.2.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019

Arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019 ditujukan untuk “Pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Jawa Tengah berlandaskan pada sumber daya manusia yang semakin berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas dan kondusivitas wilayah yang makin mantap serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan”, dengan prioritas meliputi :

1. Penanggulan kemiskinan, dengan fokus pada :

- a. Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan : akses rumah layak, layanan akses dasar menyeluruh air bersih, sanitasi, listrik; penanganan kawasan permukiman kumuh; akses pendidikan, kesehatan, dan pangan; perlindungan sosial bagi masyarakat; dan fasilitasi kepemilikan sertifikat lahan.
- b. Penguatan sustainable livelihood melalui : fasilitasi akses terhadap aset, modal, manajemen dan pasar; peningkatan start up wirausaha baru; peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- c. Perkuatan basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan swasta dan pihak lainnya dalam mengatasi kemiskinan.

2. Penguatan daya saing ekonomi daerah, dengan fokus pada :

- a. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan melalui: peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah; pemberian bibit, benih, pupuk; asuransi petani; penyediaan alsintan; peningkatan prasarana irigasi; pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perkebunan; pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (corporate farming),

- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui: peningkatan keterampilan nelayan; penyediaan prasarana dan sarana perikanan tangkap (kapal, TPI); pemberian benih dan pakan ikan; dan penyediaan lahan budidaya perikanan.
 - c. Optimalisasi potensi sumber daya hutan melalui : peningkatan kualitas tata kelola kehutanan; penerapan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dan SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu); peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha kehutanan (hutan tanaman rakyat, hutan adat, hutan rakyat); penyediaan bibit tanaman hutan; peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengolahan hasil hutan; serta pemanfaatan sumber daya hutan non kayu.
 - d. Meningkatkan produksi dan produktivitas industri kecil, mikro, dan menengah melalui: peningkatan nilai tambah diversifikasi produk; mengembangkan inovasi teknologi; memfasilitasi akses modal dari perbankan dan lembaga keuangan non perbankan; peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi; pengembangan industri besar dengan pengembangan kawasan industri, serta kemitraan UMKM dan industri besar; peningkatan infrastruktur jaringan distribusi perdagangan antar daerah provinsi di Indonesia serta fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk UMKM.
 - e. Mendorong pariwisata berbasis masyarakat melalui : perbaikan prasarana dan sarana, serta manajemen pengelolaan daerah wisata, dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata; meningkatkan promosi wisata; meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata; meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata.
 - f. Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif melalui: pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan); perbaikan sistem dan layanan perijinan; kebijakan investasi padat karya; pengembangan digital investment promotion; pengembangan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan kabupaten/kota; mendorong perwujudan investasi hijau.
3. Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM, dengan fokus pada :
- a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui : peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan; pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude; pengembangan learning culture; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi standar nasional dan/atau standar internasional; meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik; meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan; mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan; mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan; pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan; dan peningkatan pengembangan pendidikan inklusi.
 - b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif lebih diprioritaskan, di samping tetap memperbaiki upaya kuratif dan rehabilitatif melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan serta peningkatan capaian wilayah Open Defecation Free (tidak buang air besar sembarangan).
 - c. Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui : penguatan program pendidikan link and match berbasis demand-driven; mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi); sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan/atau internasional bagi lulusan pendidikan vokasi; memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung demand tenaga kerja ke depan; mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru; mengembangkan budaya inovatif; dan mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal.

4. Pengelolaan Sumberdaya Alam – Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, dengan fokus pada :
 - a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui : pengelolaan hutan dan lahan dengan rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, konservasi daerah hulu dan tangkapan air; pengembangan kelembagaan KTH (Kelompok Tani Hutan) dan perkuatan LMDH; Pengelolaan air dengan konservasi sumber air, pengendalian banjir, pengendalian pemanfaatan air tanah; pengelolaan Minerba dengan reklamasi lahan bekas pertambangan, perijinan dan pengawasan usaha pertambangan; pengendalian pencemaran tanah; pengelolaan wilayah pesisir dengan rehabilitasi kawasan mangrove, terumbu karang dan pesisir; pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara, pengelolaan limbah secara komunal berbasis kawasan dan masyarakat, serta peningkatan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Meningkatkan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas dalam menghadapi resiko bencana dan menurunnya kerentanan bencana alam dengan memperkuat kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana, pengembangan sistem informasi penanggulangan bencana, penanganan tematik rawan bencana, efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta mengembangkan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.
5. Ketahanan Pangan dan Energi, dengan fokus pada :
 - a. Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dan daya saing pangan melalui: peningkatan ketersediaan pangan dengan mempertahankan luasan lahan pertanian, penyediaan infrastruktur pengolahan, penyimpanan, meningkatkan kewirausahaan, manajemen dan bisnis petani serta distribusi pangan; peningkatan aksesibilitas pangan dengan menjaga stabilitas harga dan pasokan; peningkatan konsumsi pangan yang bergizi, beragam dan berimbang dengan pengembangan diversifikasi pangan, membangun kesadaran masyarakat terhadap pangan beragam, serta peningkatan kuantitas, nilai tambah dan keragaman produk pangan; peningkatan mutu pangan yang berkualitas serta memenuhi standar, sertifikat aman dan layak pasar; pengembangan dan penerapan inovasi teknologi paska panen.
 - b. Mewujudkan pemerataan akses energi dan listrik melalui penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dengan meningkatkan koordinasi dengan PLN sebagai penyedia jaringan listrik dan pengembangan listrik perdesaan; Pengembangan Listrik Murah dan Hemat; Pengembangan Energi Baru Terbarukan dengan pemanfaatan biogas, biomassa, gas rawa, mikro hidro dan tenaga surya.
6. Kesenjangan Wilayah, dengan fokus pada :
 - a. Penguatan infrastruktur konektivitas melalui: peningkatan kehandalan dan keselamatan jalan - jembatan yang menghubungkan pantura – pansela dan daerah perbatasan; pengembangan angkutan umum lintas regional, perkotaan - perdesaan; peningkatan sarana prasarana simpul dan pepaduan moda transportasi (terminal, pelabuhan, bandara, dan stasiun).
 - b. Pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi melalui penyediaan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah; peningkatan jaringan air minum layak berbasis kawasan dan masyarakat; meningkatkan kualitas dan kapasitas pasar, pusat perdagangan, dan pusat jasa lainnya.
 - c. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan, barat dan timur yang diwujudkan dengan penetapan kawasan peruntukan industri baru wewenang provinsi dalam RTRWP dan dukungan dana untuk pengembangannya serta meningkatkan peran dan fungsi perkotaan yang semula PKL menjadi PKWp.

- d. Mengoptimalkan potensi kelautan dengan penerapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)
7. Tata kelola pemerintahan, dengan fokus pada :
- a. Peningkatan pelayanan publik dengan membangun pemerintah yang melayani melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik;
 - b. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan ASN yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP; meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan perda; meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;
 - c. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi; peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja; peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya - upaya clean and clear government dan menerapkan “keperantaraan dan enterpreuneur” dalam tata kelola pemerintahan.
 - d. Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondusivitas wilayah Jawa Tengah.

1.3.3.2.3 Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Skenario sasaran makro pembangunan Jawa Tengah tahun 2019 yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi diharapkan mencapai angka 5,4% dengan rentang nilai antara 5,2 – 5,6%. Kebijakan ekonomi di Jawa Tengah difokuskan pada upaya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi dan dapat memberikan pemerataan antar golongan pendapatan dan wilayah dengan membangun dan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru berbasis sumberdaya lokal di daerah melalui : Peningkatan infrastruktur pendukung sektor pertanian, kelautan dan perikanan; Optimalisasi pengelolaan Sub Terminal Agribisnis (STA); Pengembangan dan revitalisasi pasar desa dan kab./kota; Pengembangan berbagai kawasan industri yang didukung realisasi investasi yang menyerap tenaga kerja; Pengembangan destinasi pariwisata potensial kab./kota. Hal tersebut juga perlu didukung dengan fasilitasi jaringan pemasaran produk unggulan daerah melalui kerjasama antar daerah kab/kota di provinsi dan antar daerah provinsi di Indonesia. Di samping itu juga dioptimalkan pendorongan ekspor pada produk unggulan daerah yang berdaya saing, penumbuhan sektor ekonomi riil dan menjaga tingkat pendapatan masyarakat.
2. Kemiskinan diharapkan dapat menurun pada angka 12,01%, yang akan diupayakan melalui sinergitas dan keberantaraan program antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat dengan prioritas dan fokus penanganan pada wilayah kabupaten dan desa dengan tingkat kemiskinan tinggi atau masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah dengan didukung Basis Data Terpadu dan Data Sektoral yang komprehensif.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan turun menjadi sebesar 4,52%, dengan tantangan yang perlu diperhatikan adalah bonus demografi yang harus diimbangi dengan kualitas SDM utamanya usia produktif dan belum optimalnya serapan tenaga kerja. Kontribusi dari masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir.
4. Indeks Pembangunan Manusia diharapkan mencapai sebesar 71,60 melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan pendapatan masyarakat.

1.3.3.2.4 Pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah, sektor dan sistem pembangunan di Jawa Tengah serta sebagai upaya pemerataan pembangunan, maka OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam perencanaan program pembangunan agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sinergi program/kegiatan, sasaran dan lokus dalam upaya pengurangan kemiskinan berdasarkan basis data terpadu utamanya di 15 Kabupaten (Blora, Grobogan, Purworejo, Demak, Cilacap, Sragen, Klaten, Banyumas, Banjarnegara, Pemalang, Rembang, Purbalingga, Brebes, Kebumen dan Wonosobo).
- 2) Pembangunan kewilayahan berpedoman pada potensi serta rencana tata ruang dan wilayah, antara lain :
 - a. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi :
 - Pengembangan kawasan agropolitan : Mangga Emas (Pemalang, Purbalingga, Brebes, Banyumas; Girisuka (Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar); Semar Boyong (Semarang, Boyolali, Magelang); Sobo Banjar (Wonosobo, Banjarnegara).
 - Kawasan Industri terpadu : Rembang, Demak – Semarang - Kendal, Brebes, Cilacap, Kebumen.
 - Pengembangan industri kerajinan berbasis potensi lokal.
 - b. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya: Kawasan Keraton Surakarta, Masjid Agung Demak, Candi Gedong Songo, Candi Dieng dan Candi Suku - Cetho.
 - c. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup : Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu, Dataran Tinggi Dieng, Rawa Pening, Sindoro - Sumbing, Gunung Lawu dan Gunung Slamet.
 - d. Peruntukan Pertambangan : Kawasan Majengan, Serayu - Pantai Selatan, Gunung Slamet, Sumbing - Sindoro - Sumbing, Merapi - Merbabu - Ungaran, Gunung Muria – Pantai Utara, Kawasan Rembang, Kendeng, Lawu, Pegunungan Selatan dan Serayu - Pantai Utara.
 - e. Kawasan Peruntukan Wisata : Destinasi Pariwisata Nusakambangan - Baturraden dan sekitarnya, Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya, Solo -Sangiran dan sekitarnya, Borobudur - Dieng dan sekitarnya, Tegal -Pekalongan dan sekitarnya, Rembang - Blora dan sekitarnya.
 - f. Pengembangan infrastruktur diarahkan guna percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan disparitas wilayah Utara – Selatan sesuai potensi wilayah.
- 3) Keterpaduan dan dukungan penanganan terhadap proyek strategis nasional di Jawa Tengah.
- 4) Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa diprioritaskan diantaranya pada :
 - a. Diarahkan pada kegiatan-kegiatan langsung bermanfaat bagi masyarakat/daerah/wilayah, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, dapat mendorong perkonomian dan mempercepat pencapaian program strategis Provinsi/Nasional serta mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan selesai pada tahun berkenaan.
 - b. Lokasi kegiatan diutamakan berada pada kawasan perbatasan lintas Provinsi, kawasan perbatasan lintas Kabupaten/Kota, kawasan rawan bencana alam, kawasan pasca bencana alam, kawasan pariwisata, perdesaan, kawasan kumuh, kawasan padat perkotaan, kawasan nelayan, kawasan pertanian, kawasan peternakan dan kawasan perkebunan.
 - c. Peningkatan ruas jalan perbatasan, ruas jalan yang mempunyai akses langsung atau merupakan jalur alternatif jalan nasional/provinsi, peningkatan aksesibilitas daerah terisolir dan kemiskinan tinggi, ruas jalan pendukung sektor pariwisata, industri dan pertanian, serta Pengembangan sistem transportasi massal pada daerah perkotaan.
 - d. Pemenuhan peningkatan kualitas, kapasitas dan jangkauan pelayanan kesehatan berupa pembangunan/rehabilitasi puskesmas, rumah sakit dan sarpras kesehatan lainnya.

- e. Peningkatan daya tarik/amenitas di obyek pariwisata unggulan dan pembangunan sarpras ekonomi kerakyatan berupa pasar tradisional.
 - f. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa.
- 5) Sinergitas kabupaten/kota dalam pencapaian skenario sasaran makro Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, khususnya untuk Kota Magelang diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 5,71%, angka kemiskinan pada posisi 8,55% serta Tingkat pengangguran terbuka dalam kisaran 4,7%

1.3.4 RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 86 Tahun 2017, bahwa dalam penyusunan RKPD yang berorientasi pada substansi, salah satunya melalui pendekatan spasial. Oleh karena itu penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 secara konsisten diupayakan untuk memperhatikan RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031 guna mewujudkan pembangunan yang komprehensif, berwawasan lingkungan dengan ketaatan terhadap tata dan pola ruang. Dengan demikian pengendalian terhadap pelanggaran dan penggunaan lahan tetap terjaga. Pada akhirnya tujuan-tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan tetap berwawasan lingkungan dan mampu mengurangi kesejangan antar wilayah di Kota Magelang.

1.3.5 RPJMD Kota Magelang

Tema Tahun perencanaan 2018 yang merupakan tahun ketiga RPJMD Kota Magelang adalah Produktif Bersama Mitra. Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya eksekusi kemitraan antar pelaku pembangunan guna menyiapkan Kota Magelang sebagai Kota Jasa Modern dan Cerdas yang dilandai masyarakat yang sejahtera dan religius. Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah rancangan kreativitas dan inovasi yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan selanjutnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2018-2019 diasumsikan bahwa :

- a. sudah terbentuk sistem basis data terpadu untuk perencanaan pembangunan, pelaksanaan rencana aksi daerah dan pengukuran kinerja terintegrasi.
- b. sudah terbentuk kesediaan kerjasama kemitraan: dengan dunia usaha, media, forum warga masyarakat.

Sedangkan fokus prioritas tahap ini:

- 1) Penambahan aktor swasta dalam penyelenggaraan:
 - a. lapangan usaha dan kegiatan ekonomi,
 - b. pendidikan,
 - c. kesehatan
- 2) Operasionalisasi ruang komunikasi, informasi, dan promosi kota secara rutin melalui media massa, media tradisional, maupun jurnalisme warga.
- 3) Awal pelembagaan konsultasi publik rutin antara OPD dengan forum warga komunitas.
- 4) Pelembagaan tinjau lanjut hasil inovasi dan kreasi masyarakat Kota Magelang menjadi produk terapan yang diimplementasikan.

- 5) Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah.
- 6) Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja ekonomi masyarakat Kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah.
- 7) Review akurasi dan kecocokan dokumen perencanaan pembangunan dan produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Arah kebijakan pembangunan tahap ini untuk menjawab pencapaian prioritas pembangunan fokus pada:

- 1) Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya.
- 2) Penataan organisai perangkat daerah (SOTK) yang efektif dan efisien dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur.
- 3) Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran daerah.
- 4) Pencegahan pelanggaran hukum berbasis partisipasi masyarakat.
- 5) Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat.
- 6) Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi teknologi informasi.
- 7) Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi teknologi informasi.
- 8) Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 9) Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset dan profesionalitas aparatur pengelola asset.
- 10) Meningkatkan akses informasi, komunikasi, partisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota.
- 11) Peningkatan kemitraan pemerintah - Swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan yang PAUD, Dasar, non formal, dan perpustakaan daerah/wilayah.
- 12) Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat.
- 13) Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan.
- 14) Peningkatan sarana prasarana pelayanan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan.
- 15) Pengembangan pola sinergitas kebijakan dan program pembangunan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan pemukiman, pemberdayaan masyarakat, persampahan, penanggulangan bencana untuk menghasilkan lingkungan sehat, aman, berkelanjutan.
- 16) Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan.
- 17) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan.
- 18) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan PMKS, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengarusutamaan gender.
- 19) Pengembangan sistem komunikasi, informasi dan edukasi pada semua komponen pemerintah dan masyarakat untuk membangun kesadaran pelestarian nilai seni budaya dan daya saing pariwisata.
- 20) Penguatan model kemitraan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban lingkungan mengantisipasi resiko bencana konflik SARA, sosial, ekonomi, dan politik.

Perbedaan arah kebijakan perencanaan tahun 2018 dengan tahun sebelumnya adalah pada tahapan aksi pencapaian kinerja sasaran. Tahun 2019 sudah mulai dilakukan eksekusi program kegiatan yang merupakan implementasi rencana aksi yang dihasilkan pada tahun 2018.

Prioritas urusan yang mendukung arah kebijakan perencanaan tahun 2018 untuk diimplementasikan tahun 2019 adalah:

- a. Fungsi penunjang urusan pemerintahan;
- b. Urusan pendidikan;
- c. Urusan kesehatan
- d. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- f. Urusan sosial;
- g. Urusan penanaman modal;
- h. Urusan komunikasi dan informatika;
- i. Urusan perdagangan;
- j. Urusan perindustrian;
- k. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. Urusan kebudayaan;
- m. Urusan pariwisata;

Sedangkan Program unggulan sebagai prioritas pada perencanaan tahun 2018 untuk dilaksanakan tahun 2019 adalah:

- a. Program peningkatan kualitas sumber daya pemerintah;
- b. Program peningkatan daya saing daerah;
- c. Program kota cerdas;
- d. Program pemerintahan responsif dan partisipatif;
- e. Program pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan;
- f. Program pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan;
- g. Program penguatan pertumbuhan ekonomi;
- h. Program perluasan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
- i. Program masyarakat religius menuju masyarakat madani.

1.3.6 Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan RKPd Kota Magelang Tahun 2019 juga memperhatikan beberapa dokumen pembangunan sektoral baik di tingkat nasional, provinsi maupun di Kota Magelang. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di maksud antara lain : Masterplan Kota Sejuta Bunga, Blueprint Universal Design, Pencapaian SDGS, Grand Design Reformasi Birokrasi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah, RAD Pengurangan Resiko Bencana dan Pedoman PUG di Jawa Tengah.

1.3.7 Renja – OPD

Di level OPD, dokumen Renja OPD di susun dalam basis tahunan. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2019 sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kota Magelang Tahun 2019.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2019 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019.
- b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2019.

1.4.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2019 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5 Sistematika RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

PERATURAN WALIKOTA

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KOTA MAGELANG TAHUN 2017 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Berisi Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

- BAB III** **RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**
- Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2017, prediksi 2018 dan proyeksi tahun 2019, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
- BAB IV** **PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**
- Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2017 dan capaian kinerja yang direncanakan, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
- Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan usulan OPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD Tahun 2018.
- BAB V** **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**
- Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.
- BAB VI** **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**
- Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
- BAB VII** **PENUTUP**
- Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Kota Magelang, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kota Magelang merupakan salah satu Kota terkecil di wilayah Propinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah Kota Magelang 1.812 Ha (18,12 km²) dan secara administratif terbagi atas 3 kecamatan (Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Tengah dan Kecamatan Magelang Selatan) dan 17 kelurahan dengan yang rata-ratanya luas wilayah per kelurahan tidak lebih dari 2 km². Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, wilayah Kota Magelang mendapatkan luasan wilayah terkait dengan perluasan batas wilayah Kota Magelang seluas 0.03 km². Total luasan wilayah Kota Magelang saat ini seluas 1.854 Ha (18,54 km²). Kedudukan Kota Magelang di Propinsi Jawa Tengah di gambarkan pada peta berikut :



Sumber : Dokumen Perencanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Magelang, 2013

Gambar 2 - 1 Peta Kedudukan Kota Magelang terhadap Jawa Tengah

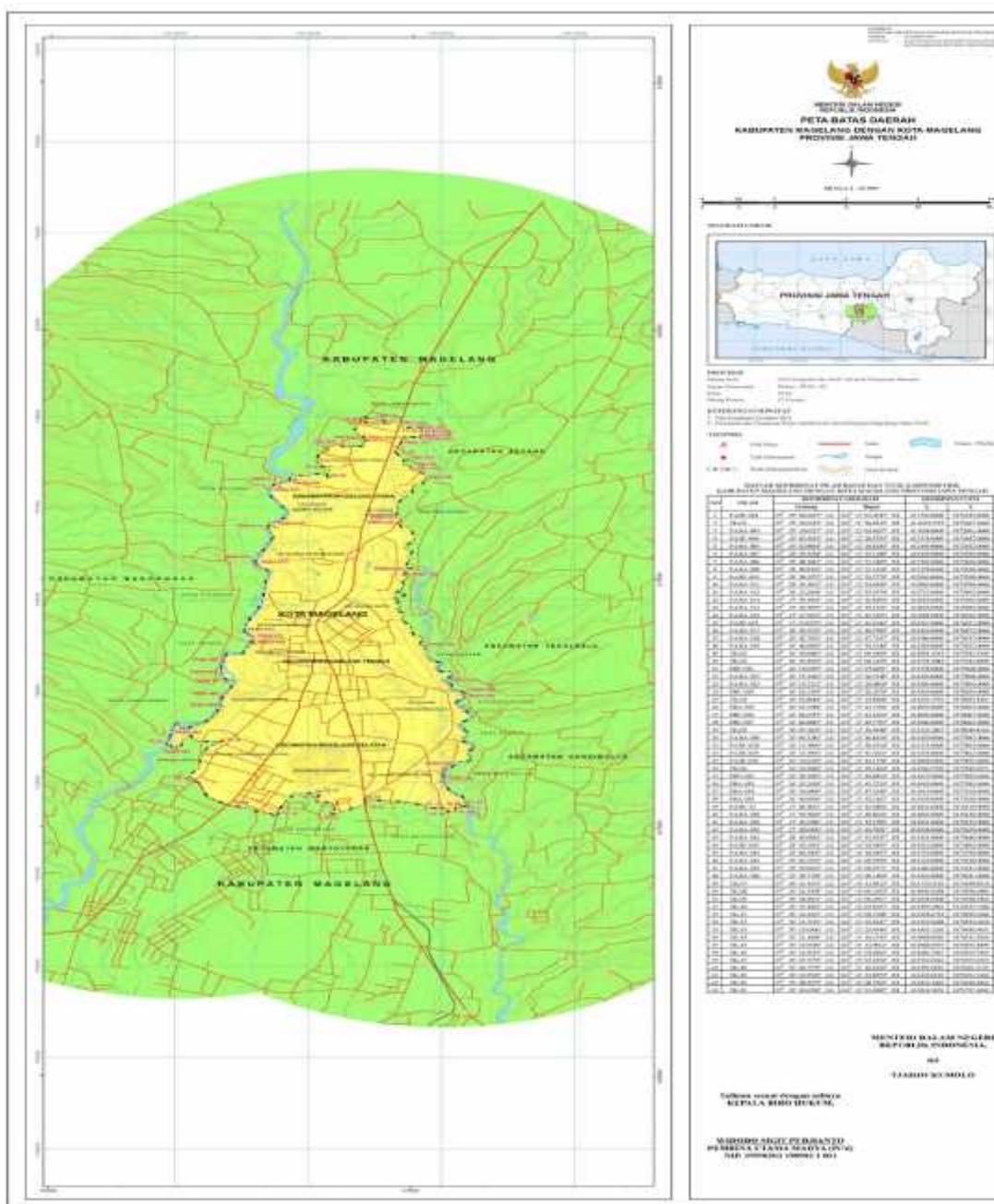
Secara geografis Kota Magelang terletak di tengah-tengah Kabupaten Magelang dengan batas wilayah administratif sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan desa Jambewangi, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang; sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Elo/Kecamatan Tegarrejo Kabupaten Magelang; sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang; sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Progo/ Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. (belum mengakomodir, batas wilayah baru- menyusul, data sedang dimintakan DPUPR)

Posisi Kota Magelang yang strategis di jalur persilangan lalu lintas ekonomi dan transportasi antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Temanggung dan pada persimpangan jalur wisata lokal dan regional antara Yogyakarta-Borobudur-Kopeng-Ketep Pass- dataran tinggi Dieng menjadikannya sebagai kota kecil dengan nilai strategis dalam katagori sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Kawasan Purwomanggung (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, dan Kabupaten Magelang dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi. Gambaran secara rinci luas tiap kecamatan/ kelurahan di Kota Magelang Tahun 2015, dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2 - 1
Luas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magelang

No.	Kecamatan dan Kelurahan	Luas / Area (Km2)	Persentase (%)
01.	KEC. MAGELANG SELATAN	6,89	38,01
	1. Kel. Jurangombo Utara	0,58	3,17
	2. Kel. Jurangombo Selatan	2,26	12,49
	3. Kel. Magersari	1,38	7,60
	4. Kel. Tidar Utara	0,97	5,35
	5. Kel. Tidar Selatan	1,27	7,00
	6. Kel. Rejowinangun Selatan	0,43	2,39
02.	KEC. MAGELANG TENGAH	5,10	28,17
	1. Kel. Magelang	1,25	6,88
	2. Kel. Kemirirejo	0,88	4,86
	3. Kel. Cacaban	0,83	4,56
	4. Kel. Rejowinangun Utara	0,99	5,48
	5. Kel. Panjang	0,35	1,90
	6. Kel. Gelangan	0,81	4,49
03.	KEC. MAGELANG UTARA	6,13	33,82
	1. Kel. Wates	1,17	6,47
	2. Kel. Potrobangsari	1,30	7,17
	3. Kel. Kedungsari	1,33	7,36
	4. Kel. Kramat Utara	0,86	4,77
	5. Kel. Kramat Selatan	1,46	8,05
	JUMLAH	18,12	100,00

Sumber: Data Strategis Kota Magelang Tahun 2017.



Sumber: Permendagri Nomor 64 Tahun 2017

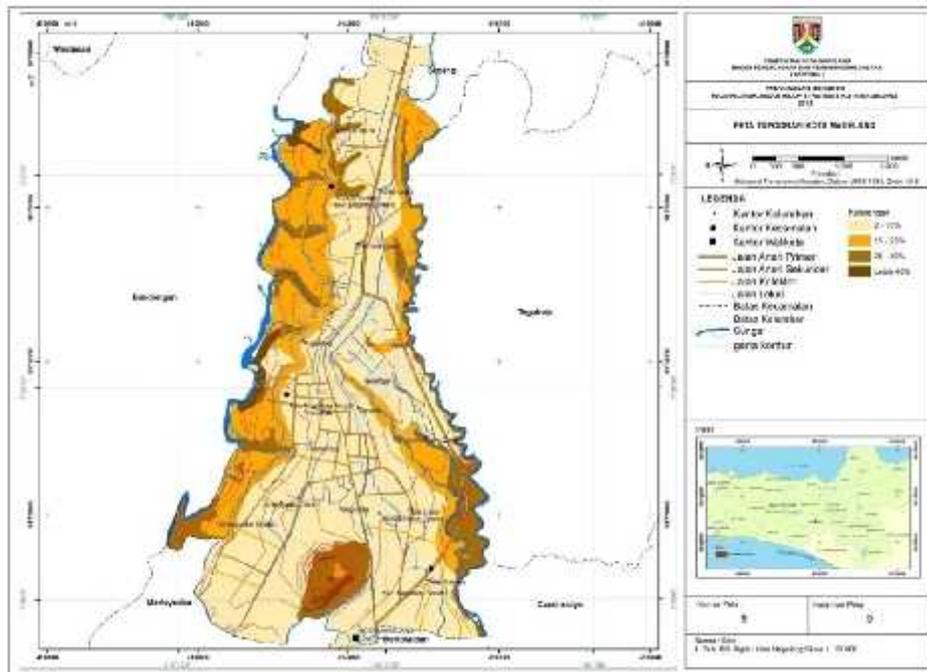
Gambar 2 - 2 Batas Wilayah Kota Magelang sesuai dengan Permendari 64 Tahun 2017

2.1.1.2 Topografi

Secara topografi dan fisiografis, Kota Magelang merupakan wilayah dataran yang di kelilingi oleh Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro dan Sumbing, Pegunungan Gianti, Menoreh, Andong dan Telomoyo. Kota Magelang termasuk dataran rendah dengan sudut kemiringan relatif bervariasi. Kemiringan topografi yang terjal berada di bagian barat (sepanjang Sungai Progo) dan di sebelah timur (di sekitar Sungai Elo) sampai dengan kemiringan 15-30%. Di sekitar daerah timur kompleks AKMIL ke Utara hingga daerah di sekitar RSJ Magelang, dengan kemiringan 2–5%.

Morfologi pendataran antar gunung api, medannya landai, ber relief sedang-halus. Dilihat dari ketinggiannya, Kota Magelang berada di ketinggian antara 375–500 mdpl dengan titik ketinggian tertinggi pada Gunung Tidar yaitu 503 mdpl. Keberadaan Gunung Tidar selain sebagai kawasan lindung dengan kemiringan hingga 30–40% ini berada di sebelah timur kompleks AKMIL, berfungsi sebagai paru-paru kota yang menjadikan iklim Kota Magelang selalu berhawa sejuk .

Bentuk fisik Kota Magelang saat ini relatif memanjang mengikuti jaringan jalan arteri. Dengan kondisi fisik tersebut, kecenderungan pertumbuhan alamiah Kota Magelang adalah ke arah utara dan selatan dengan dominasi area terbangun di daerah yang mempunyai topografi relatif datar.



Sumber : Dokumen Perencanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Magelang, 2013

Gambar 2 - 3 Gambar Peta Topografi Kota Magelang

2.1.1.3 Geologi

Kondisi geologi Kota Magelang tidak bisa dilepaskan dari keberadaannya di tengah wilayah Kabupaten Magelang, dimana secara umum wilayah tersebut tersusun dari 4 formasi batuan, yaitu batuan sedimen, batuan gunung api ,batuan beku trobosan serta batuan endapan alluvial. Dalam klasifikasi tersebut, formasi batuan di Kota Magelang termasuk batuan gunung api, sehingga litologi yang menempati Kota Magelang sebagian besar batu pasir tufaan (lepas) dan breksi.

Potensi kandungan tanah Kota Magelang sebagian besar berupa batu pasir lepas dan konglomerat hasil produksi gunung berapi yang merupakan endapan kwarter yang mempunyai sifat sangat poreous (kelulusan air tinggi), serta penurunan terhadap beban kecil, mendekati nol (0). Daya dukung terhadap bangunan berkisar antara 5kg/ cm2 – 19 kg/ cm2. Ditinjau dari satuan morfologi, pendataran alluvium tersebar sampai di bagian selatan dan tempat-tempat di pinggir Sungai Progo dan Sungai Elo. Tersusun oleh batuan hasil rombakan batuan yang lebih tua, yang bersifat lepas.

Umumnya berada pada ketinggian antara 250 – 350 m, berelief halus dengan kemiringan sebesar 3-8 %. Daerah ini dialiri oleh Sungai Progo dan Sungai Elo yang mengalir dengan pola Sum Meander.

Kewaspadaan pada resiko bencana terutama pada pembangunan yang dilakukan di daerah bantaran sungai dengan kelerengan curam adalah tanah longsor mengingat sebagian besar tanah berupa batuan pasir dan breksi/konglomerat yang memiliki kelulusan air yang tinggi serta tingkat kelerengan alam yang cukup curam. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah terkait pengaturan pembuangan limbah agar tidak mencemari lingkungan mengingat porositas tanah yang cukup tinggi

2.1.1.4 Hidrologi

Sumber air di Kota Magelang dapat digolongkan dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan merupakan air limbah dan air hujan. Potensi air hujan perlu dilestarikan dengan membuat sumur resapan. Sedangkan potensi air tanahnya juga tergantung pada pelestarian pemanfaatan air permukaan yaitu air hujan. Air tanah di Kota Magelang kurang menguntungkan jika dikembangkan mengingat air tanah yang ada mayoritas cukup dalam dengan aquifer yang dangkal, sehingga sulit untuk dikembangkan (dipompa).

Untuk kebutuhan air bersih Kota Magelang sampai saat ini bergantung pada sumber-sumber air yang ada di luar wilayah Kota Magelang yaitu dari mata air yang berada di wilayah Kabupaten Magelang dan satu-satunya mata air yang berada di Kawasan Kota Magelang adalah Mata Air Tuk Pecah. Di kawasan Kota Magelang juga terdapat 2 (dua) saluran air yaitu: (i) Kali Bening (Kali Kota), dan (ii) Kali Progo Manggis. Berdasarkan data pemakaian air minum pada tahun 2016 sebesar 7.606.319 m³ . Apabila di bandingkan dengan data tahun 2015 sebesar 7.434.942 m³ maka terjadi kenaikan kebutuhan dari penggunaan air PDAM di Kota Magelang. Sementara data tahun 2017 penggunaan air PDAM sebanyak 7.434.942 liter/ tahun Apabila perkiraan kebutuhan air bersih perorangan adalah sebesar 60 liter/hari maka jika dikalikan dengan jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2017 kapasitas mata air yang tersedia masih mampu untuk mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Magelang walaupun masih mengandalkan sumber air yang berasal dari kabupaten Magelang.

2.1.1.5 Klimatologi

Kota Magelang termasuk wilayah beriklim sejuk. Data klimatologi pada tahun 2016 menurut Badan Pengelolaan Sumber Daya Air, dalam kurun waktu Tahun 2016 total curah hujan sepanjang tahun sebanyak 257.85 mm, Jumlah ini relatif lebih tinggi apabila di bandingkan dengan data pada tahun 2015 sebanyak 181.99 mm. Berdasarkan data iklim rata-rata curah hujan bulanan di kawasan Kota Magelang dalam jangka waktu lima tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 2

Rata-Rata Curah Hujan Per Hari Kota Magelang (mm) Tahun 2012-semester 1 Tahun 2017

Bulan	2012	2013	2014	2015	2016	Semester 1 2017
01. Januari	22.58	19.04	16.61	16.92	6.86	29.21
02. Februari	23.44	18.63	22.05	27.76	20.09	19.57
03. Maret	24.69	22.00	19.21	22.09	16.66	26.00

Bulan	2012	2013	2014	2015	2016	Semester 1 2017
04. April	20.28	15.74	23.47	22.50	19.05	25.71
05. Mei	11.89	17.94	17.77	6.63	15.86	28.10
06. Juni	20.40	10.44	8.25	44.67	39.27	12.70
07. Juli	10.00	17.00	13.57	0.00	19.09	na
08. Agustus	0.00	0.00	5.40	0.00	25	na
09. September	0.00	2.00	2.33	0.00	28.89	na
10. Oktober	16.80	20.44	16.91	0.00	25.25	na
11. November	20.42	13.00	12.56	12.87	24.2	na
12. Desember	17.70	14.25	23.12	28.55	17.63	na
Jumlah	188.20	170.48	170.59	181.99	257.85	141.29
Rata-rata	15.68	14.21	14.22	15.17	21.49	23.55

Sumber: Data Strategis Kota Magelang Tahun 2017 Diskominsta Kota Magelang. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air.

Curah hujan dalam semester pertama tahun 2017, memiliki kecenderungan lebih tinggi apabila di dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. Rata – rata curah hujan dalam enam bulan pertama di tahun 2017 sebesar 23.55 mm/hari. Rata – rata ini lebih tinggi apabila di bangikan dengan tahun 2016, di mana rata – rata curah hujan per tahunnya sebesar 21.49 mm/hari. Curah hujan pada tahun 2016 lebih tinggi di dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan merupakan rata-rata curah hujan tertinggi dalam lima tahun terakhir ini. Curah hujan tertinggi pada semester pertama 2017 biasanya terjadi pada bulan – bulan tertentu seperti bulan Januari, Pebruari, Maret dan April, di mana hari hujannya sekitar 20an hari hujan. Hari hujan tertinggi terjadi di bulan Januari dan Pebruari sebanyak 24 hari hujan dan 23 hari hujan. Tingginya curah hujan pada bulan – bulan tertentu di sepanjang tahun 2016 membawa akibat seperti banjir di beberapa ruas jalan yang disebabkan karena resapan yang kurang, bencana yang di sebabkan karena adanya pohon yang tumbang tumbang dan bencana longsor.

Kondisi Topografi, geologi, hidrologi dan klimatologi Kota Magelang serta posisi Kota Magelang yang dikelilingi oleh sungai dengan kontur wilayah yang curam dan memiliki kemiringan relatif tinggi sehingga Ke depan hal ini menjadi perhatian serta menjadi kewaspadaan terhadap bencana yang mungkin timbul karena cuaca ekstrim dan tingginya curah hujan seperti bencana longsor, banjir atau bencana lain seperti wabah penyakit perlu diantisipasi sejak dini terutama pada daerah - daerah dengan kelerengn curam serta sifat tanah yang memiliki kelulusan air yang tinggi.

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Tata guna lahan di Kota Magelang sesuai dengan karakteristik perkotaan banyak di dominasi oleh pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman. Tingginya kebutuhan akan lahan untuk rumah tinggal, perumahan, pekarangan, gudang maupun untuk kegiatan ekonomi seperti ruko dan rumah makan berpengaruh pada tingginya alih fungsi lahan pertanian. Salah satu sisi lain yang perlu diperhatikan terkait menurunnya tingkat dan fungsi tanah menjadi lahan kritis, menurunnya daya dukung lingkungan dan ketidaktercapaian target 30% dari Ruang Terbuka Hijau di Kota

Magelang serta keterbatasan kebutuhan penyediaan air bersih dan fasilitas umum seiring dengan pertumbuhan bangunan di kota Magelang.

Gambaran penggunaan lahan di Kota Magelang dari tahun 2011 hingga tahun 2017, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 - 3
Luas Tanah (Ha) Menurut Penggunaannya Tahun 2011-2017

No	Jenis Sawah	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	TANAH SAWAH	201.42	199.96	197.64	194.20	191.76	185.23	183.67
	Pengairan Teknis	201.42	199.96	197.64	194.20	191.76	185.23	183.67
	Pengairan ½ Teknis	-	-	-	-	-	-	-
	Tadah Hujan	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
2.	TANAH KERING	1,610.58	1,612.03	1,614.35	1,617.79	1,620.23	1,626.76	1,628.33
	Pekarangan/lahan Untuk Bangunan dan Halaman	1.339.31	1.341.48	1.344.45	1.348.13	1.351.14	1.358,85	1.360.75
	Tegal/kebun/Ladang/Huma	10.11	9.25	8.60	8.36	7.79	6.39	6.05
	Tambak	-	-	-	-	-	-	-
	Kolam/Tebat/Empang	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68
	Perkebunan/Hutan Rakyat	99.56	99.56	99.56	99.56	99.56	99.78	99.78
	Industri	51.97	51.97	51.97	51.97	51.97	51.97	51.97
	Lainnya (Makam dll)	102.95	103.09	103.09	103.09	103.09	103.09	103.09
	JUMLAH	1,812.00						

Sumber: Data Strategis Kota Magelang Tahun 2017 Diskominsta Kota Magelang data diolah.

Dari luas lahan secara keseluruhan di Kota Magelang pada tahun 2017, terdiri dari lahan untuk penggunaan Tanah Sawah sekitar 183.67 Ha dan Tanah Bukan Sawah (Tanah Kering) sekitar 1.628,33 Ha. Apabila di dibandingkan dengan data – data tahun sebelumnya maka alih fungsi lahan pada tahun 2016 relatif lebih kecil. Data dari kantor BPN Magelang mencatat adanya perubahan alih fungsi lahan di tahun 2016 seluas 1.8430 Ha sementara tahun sebelumnya sebesar 7.9331 Ha. Adapun alih fungsi lahan pada tahun 2016 dengan rincian alih fungsi lahan sawah seluas 1.559 Ha dan tegal/ kebun seluas 0.34 Ha. Kebutuhan terbesar alih fungsi lahan pertanian di dominasi oleh alih fungsi lahan menjadi perumahan/halaman/ bangunan seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan permukiman dan fasilitas umum di Kota Magelang. Data dari BPN Kota Magelang mencatat bahwa tanah yang beralih fungsi menjadi perumahan/ halaman/ bangunan seluas 1.897 Ha Ha. Tingginya Alih fungsi lahan pertanian tersebut bisa dilihat dari beberapa tahun terakhir ini. Data Luas lahan pengairan teknis pada tahun 2011 seluas 201.42 Ha menjadi 183.67 Ha pada tahun 2017 atau mengalami penyusutan setiap tahunnya rata-rata seluas ±2.54 Ha. sementara untuk alih fungsi lahan

tegal/kebun/lading/huma berkurang dari 10.11 Ha pada tahun 2011 menjadi 4.06 Ha di tahun 2016 atau mengalami penyusutan sebesar rata-rata seluas ± 0.58 Ha setiap tahunnya

Ke depan Pemerintah Kota Magelang harus berupaya lebih keras dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian selain upaya – upaya yang telah dilakukan selama ini misalnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan – kawasan permukiman yang padat penduduk. selain itu perlu pula lebih cermat terkait dengan perijinan pembangunan yang harus sesuai dengan peruntukkan penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Pengembangan wilayah di Kota Magelang, sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Magelang Tahun 2005-2025 dan juga dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang Tahun 2011-2031 akan lebih diarahkan untuk menjadi kota jasa. Faktor pendukung sebagai kota jasa, adalah posisi strategis kota yang berada pada simpul jalur ekonomi dan wisata regional yang dipadukan dengan penataan fisik wajah kota, akan menjadi potensi yang dominan dalam mempertegas fungsi kota sebagai kota jasa.

Kedudukan Kota Magelang menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Kota Magelang mempunyai kedudukan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Kota Magelang menjadi PKW untuk Kawasan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung yang diistilahkan sebagai Kawasan PURWOMANGGUNG.

Kota Magelang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut :

- a) Pusat pelayanan keuangan/bank yang melayani beberapa kabupaten;
- b) Pusat pengolahan/pengumpul barang yang melayani beberapa kabupaten;
- c) Simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten;
- d) Pusat pemerintahan yang melayani beberapa kabupaten;
- e) Pusat pendidikan yang melayani beberapa kabupaten;
- f) Pusat kesehatan yang melayani beberapa kabupaten; dan
- g) Pusat Perdagangan dan Jasa umum lain yang melayani beberapa kabupaten

Rencana pengembangan struktur ruang wilayah Kota Magelang meliputi rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana sistem perkotaan terdiri dari beberapa sistem, yakni pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota dan pusat lingkungan, sedangkan rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kota Magelang meliputi rencana sistem prasarana utama dan rencana sistem prasarana lainnya. Sistem pusat-pusat pelayanan terdapat dalam tiap-tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) yang mana masing-masing mempunyai fungsi tertentu.

Potensi Pengembangan Kota Magelang sebagaimana terdapat dalam Rencana Pola Ruang Kota Magelang adalah sebagai berikut :

a. Kawasan Lindung

Arahan penggunaan lahan kawasan lindung Kota Magelang berdasarkan Kota Magelang Tahun 2011-2031 adalah:

- Kawasan Perlindungan Setempat meliputi : sempadan sungai dan ruang terbuka hijau (hutan kota). Kota Magelang memiliki kawasan hutan lindung dan hutan wisata yang keberadaannya penting untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau kota, yaitu kawasan konservasi Gunung Tidar.
- Kawasan Rawan Bencana Longsor merupakan kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana longsor. Daerah-daerah yang termasuk kawasan rawan bencana longsor di Kota Magelang meliputi daerah yang terdapat di sekitar DAS Progo dan Elo.

b. Kawasan Budidaya

Arahan penggunaan lahan kawasan budidaya Kota Magelang berdasarkan RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031 adalah :

- Kawasan Permukiman
Pengembangan kawasan permukiman diarahkan menyebar di seluruh unit lingkungan atau BWK yang ada di wilayah Kota Magelang dengan luas keseluruhan $\pm 701,36$ ha. Secara eksisting perumahan di Kota Magelang memiliki kepadatan yang sangat tinggi, sehingga pengembangannya dimasa mendatang diarahkan secara vertikal. Kawasan yang masih memungkinkan adanya pengembangan permukiman, BWK III dan V.
- Kawasan Perdagangan/Jasa
Pengembangan kawasan perdagangan/jasa diarahkan di sekitar jalan arteri primer di BWK IV khusus untuk perdagangan/jasa skala regional, jalan arteri sekunder di BWK I, BWK II, BWK IV dan BWK V dan jalan lokal primer/sekunder di BWK I dengan luas keseluruhan $\pm 120,86$ ha.
- Kawasan Perkantoran
Fasilitas perkantoran utama yang diarahkan untuk dikembangkan di kawasan perkantoran antara lain meliputi perkantoran pusat pemerintahan, kantor dinas/instansi pemerintahan Kota Magelang, kantor instansi vertikal di Kota Magelang, kantor pemerintahan kecamatan, maupun sarana perkantoran niaga. Fasilitas/ kegiatan lain yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan ekonomi, sosial dan budaya yang layak dan dapat dikembangkan di kawasan perkantoran antara lain meliputi kantor pemerintah kelurahan, kantor niaga dan perbankan, koperasi, kantor jasa, gedung pertemuan, museum, fasilitas kesehatan skala lokal, peribadatan skala lokal, rekreasi/olahraga skala lokal, dan kegiatan-kegiatan lain yang layak peruntukannya. Pengembangan kawasan perkantoran diarahkan di seluruh unit lingkungan atau BWK yang ada di wilayah Kota Magelang dengan luas keseluruhan $\pm 48,76$ ha.
- Kawasan Pendidikan
Pengembangan fasilitas pendidikan diarahkan menyebar di seluruh unit lingkungan atau BWK yang ada di wilayah Kota Magelang agar sistem pelayanan kepada masyarakat merata. Luas keseluruhannya $\pm 107,92$ ha.
- Kawasan Kesehatan
Rencana pengembangan fasilitas kesehatan diarahkan tersebar pada seluruh wilayah perkotaan guna pemeratakan sistem pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan kawasan kesehatan diarahkan di BWK I, BWK II, BWK III dan BWK V dan luas keseluruhan $\pm 42,46$ ha.
- Kawasan Peribadatan
Ketersediaan fasilitas peribadatan di Kota Magelang jika dilihat pada kondisi eksisting yang ada saat ini sudah sangat mencukupi. Sehingga dalam pengembangannya hanya berorientasi pada perbaikan atau peningkatan

kondisi dari fasilitas peribadatan yang ada. Pengembangan kawasan peribadatan penting diarahkan di seluruh unit BWK dengan luas keseluruhan $\pm 2,80$ ha.

- Kawasan Rekreasi / Olah Raga

Rencana pengembangan kawasan rekreasi di Kota Magelang diarahkan dalam dua bentuk, yaitu rekreasi terbuka dan rekreasi tertutup. Untuk rekreasi terbuka direncanakan dengan memanfaatkan arena olahraga, lapangan dan taman-taman kota yang direncanakan ada di setiap pusat kawasan. Untuk rekreasi yang tertutup direncanakan berbentuk sarana rekreasi bioskop, tempat olahraga, arena permainan dan sebagainya. Fasilitas rekreasi tersebut berada pada kawasan pusat kota dan sub pusat kota, serta kawasan perdagangan terutama yang berupa pasar swalayan.

Fasilitas dan/atau kegiatan lain yang mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang layak dan dapat dikembangkan di kawasan rekreasi / olahraga antara lain fasilitas rekreasi / olah raga skala lokal, kesehatan skala lokal, peribadatan skala lokal, gedung pertemuan, gedung kesenian / pertunjukan, dan kegiatan-kegiatan lain yang layak peruntukannya. Pengembangan kawasan rekreasi olah raga diarahkan di BWK II, BWK III dan BWK V dengan luas keseluruhan $\pm 89,39$ ha.

- Kawasan Industri / Perdagangan

Dalam penataan ruang untuk industri, diprioritaskan untuk industri sedang dan industri kecil/rumah tangga yang rata-rata berkembang di kawasan permukiman, sehingga perlu diatur dengan dukungan penyediaan prasarana sarana seperti pengelolaan limbah dan showroom sekaligus outlet sebagai sarana promosi dan pemasaran. Pengembangan kawasan industri/ perdagangan diarahkan di BWK IV dengan luas keseluruhan $\pm 68,03$ ha.

- Kawasan Militer

Sebagaimana kondisi yang ada saat ini, di luar kawasan-kawasan milik TNI yang pemanfaatannya untuk fungsi non kemiliteran lain (seperti lapangan golf, gedung pertemuan A. Yani, dan lainnya) berada di BWK II, BWK III dan BWK V. Luas keseluruhan $\pm 151,05$ ha.

- Kawasan Pertanian

Pengembangan kawasan pertanian diarahkan di BWK II, BWK III, BWK IV dan BWK V dengan luas keseluruhan $\pm 185,56$ ha.

- Kawasan Terbuka Non Hijau

Adapun RTNH yang ada di Kota Magelang, meliputi : plaza, parkir, lapangan olahraga, tempat bermain dan rekreasi, pembatas (median jalan), dan koridor rumah. Pengembangan RTNH merupakan salah satu alternatif untuk pengganti RTH yang bisa di terapkan pada kawasan-kawasan padat Kota.

- Kawasan Transportasi (Terminal)

Sarana (fasilitas) terminal yang diarahkan untuk dikembangkan di kawasan terminal antara lain meliputi terminal regional, terminal angkutan kota dan terminal barang. Fasilitas dan/atau kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dikembangkan di kawasan terminal antara lain fasilitas perdagangan skala lokal (kios), kesehatan skala lokal, peribadatan skala lokal, dan kegiatan-kegiatan lain yang layak peruntukannya. Pengembangan kawasan terminal diarahkan di BWK I, BWK II dan BWK IV dengan luas keseluruhan $\pm 4,85$ ha.

- Kawasan Pemakaman
Kawasan pemakaman merupakan kawasan budidaya yang mempunyai fungsi utama dan satu-satunya sebagai tempat pemakaman umum ataupun taman makam pahlawan. Pengembangan kawasan pemakaman diarahkan di seluruh unit lingkungan atau BWK yang ada dengan luas keseluruhan ± 35,65 ha.
- Kawasan Khusus Sektor Informal
Pengembangan kawasan khusus sektor informal untuk PKL secara umum dapat dikembangkan di daerah-daerah yang merupakan simpul-simpul perdagangan, memiliki tingkat aksesibilitas untuk dijangkau dengan berjalan kaki, ruang terbuka aktif, daerah-daerah yang memiliki tingkat keramaian dan merupakan area bebas yang cukup luas dan memiliki potensi untuk dikunjungi penduduk sebagai lokasi untuk bersantai dan melepas lelah. Arah pengembangan kawasan khusus sektor informal untuk PKL dapat dikembangkan dan ditata di kawasan Jalan Jenggolo dengan melakukan penutupan akses di malam hari di Jalan Pajajaran dan Jalan Pajang. Kawasan khusus ini diperuntukkan bagi pedagang kuliner khas Kota Magelang dan sekitar (yang berupa makanan unggulan). Pengembangan PKL di sebelah utara Kota Magelang akan diakomodasi di Kawasan Armada Estate dengan membuka waktu jualan di siang dan malam hari di sekitar tanah kosong milik Armada Estate.

Rencana Tata Ruang Kota Magelang secara umum membagi Kota Magelang menjadi 5 (lima) Bagian Wilayah Kota (BWK) selain itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang juga memuat adanya kebijakan dan strategi dalam penataan ruang yaitu adanya Kawasan strategis kota artinya wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Rencana pengembangan kawasan strategis Kota:

- a. Kawasan strategis untuk pertahanan dan keamanan;
- b. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
- c. Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- d. Kawasan strategis sosial budaya.

Skenario pengembangan Kota Magelang adalah dengan menciptakan pusat-pusat kegiatan baru yang berfungsi sebagai generator pertumbuhan ekonomi dalam skala kawasan yang lebih luas yang masuk dalam kategori berpotensi dalam pengembangan pusat pelayanan perekonomian, kesehatan, dan pendidikan yang mempunyai jangkauan pelayanan skala kota / regional. Potensi pengembangannya pada masa-masa mendatang sebagai berikut, yaitu :

- a. Kawasan Sidotopo sebagai pusat pelayanan pendidikan, perdagangan dan jasa, pada kawasan ini direncanakan untuk memwadahi pendirian perguruan tinggi negeri;
- b. Kawasan Sukarno Hatta sebagai pusat pelayanan kegiatan transportasi dan perdagangan jasa, pada kawasan ini sudah disiapkan sebidang lahan untuk pembangunan pasar induk yang dipadukan dengan pergudangan;
- c. Kawasan Kebonpolo sebagai pusat pelayanan kegiatan transportasi dan perdagangan;
- d. Kawasan Alun-alun sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dan perkantoran, Kawasan Alun-Alun juga sebagai kawasan pusat kota yang memwadahi kegiatan rekreasi masyarakat;

- e. Kawasan GOR Samapta sebagai pusat pelayanan rekreasi dan olahraga, saat ini sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan Stadion Madya Moch. Soebroto, dengan kapasitas 15.000 penonton. Selain itu nanti juga akan dibangun kolam renang dengan standar internasional;
- f. Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dan kesehatan;
- g. Kawasan Objek Wisata Taman Kyai Langgeng sebagai kawasan pusat pelayanan rekreasi dan olahraga, dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kawasan, maka pada lokasi sekitar Taman Kyai Langgeng telah dibangun Showroom Mudalrejo yang mewadahi pemasaran hasil-hasil UMKM Kota Magelang.

Rencana sistem perkotaan terdiri dari sistem pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan. Struktur atau sistem pusat pelayanan merupakan kegiatan-kegiatan fungsional yang mendukung pengembangan Kota Magelang. Kegiatan fungsional sebagai elemen pengisi ruang kawasan diarahkan pengembangannya agar mampu mendukung fungsi-fungsi pengembangan kawasan. Bagian ini akan menjelaskan sistem pusat pelayanan yang ada dalam struktur ruang Kota Magelang. Sistem pusat-pusat pelayanan Kota Magelang memiliki cakupan sebagai berikut:

- a) Pusat Pelayanan Kota Magelang, mempunyai cakupan pelayanan seluruh wilayah Kota Magelang dan Regional yaitu Kawasan PURWOMANGGUNG sebagai hinterland. Mempunyai makna sebagai fungsi pelayanan eksternal. Pusat pelayanan Kota ditetapkan di BWK I yang terdapat di sebagian Kelurahan Cacaban, sebagian Kelurahan Panjang, sebagian Kelurahan Kemirirejo, dan sebagian Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, yaitu Kawasan Alun-alun Kota Magelang, delineasi kawasan ada dalam peta pembagian BWK Kota Magelang.
- b) Subpusat Pelayanan Kota Magelang, direncanakan mempunyai cakupan pelayanan subwilayah kota dan terutama mempunyai skala pelayanan kota atau sebagai pengungkapan fungsi kawasan dalam memberikan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kawasan atau masing-masing bagian wilayah kota (fungsi pelayanan internal) adapun pembagian sub pusat pelayanan Kota Magelang meliputi :
 - 1) Sub Pusat Pelayanan Kota BWK II yaitu Kawasan Kebonpolo terdapat di Kelurahan Wates dan Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara.
 - 2) Sub Pusat Pelayanan Kota BWK III yaitu Kawasan Taman Kyai Langgeng terdapat di Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah dan Kelurahan Jurangombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan.
 - 3) Sub Pusat Pelayanan Kota BWK IV yaitu Kawasan Sukarno-Hatta, terdapat di Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan.
 - 4) Sub Pusat pelayanan kota di BWK V terdapat di Kelurahan Kramata Utara, Kecamatan Magelang Utara yaitu Kawasan Sidotopo.
- c) Pusat Lingkungan mempunyai cakupan pelayanan skala lingkungan wilayah di Kota Magelang. Pusat lingkungan merupakan pusat pelayanan skala lingkungan di Bagian Wilayah Kota, meliputi:
 - 1) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK I
 - kesatu yaitu Kawasan Karesidenan yang terdapat Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah dan
 - kedua yaitu Kawasan Rejowinangun terdapat di Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan.
 - 2) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK II:

- kesatu yaitu Kawasan Tuguran yang terdapat di Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara.
 - kedua yaitu Kawasan Urip Sumohardjo terdapat di Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara.
- 3) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK III:
- kesatu yaitu Kawasan Taman Parkir yang terdapat di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan.
 - kedua yaitu Kawasan Karet terdapat di Kelurahan Jurangombo Selatan.
- 4) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK IV:
- kesatu yaitu Kawasan Soka yang terdapat di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan.
 - kedua yaitu Kawasan Canguk terdapat di Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah.
- 5) Pusat Pelayanan Lingkungan di BWK V:
- kesatu yaitu Kawasan Menowo yang terdapat di Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara.
 - kedua yaitu Kawasan Sambung yang terdapat di Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara

2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan kondisi topografi, geologi, hidrologi, dan klimatologi Kota Magelang, perlu kewaspadaan terhadap bencana seperti longsor atau bencana lain khususnya pada daerah dengan ketererangan curam. Bentuk-bentuk bencana yang sering terjadi di Kota Magelang pada umumnya adalah bencana tanah longsor. Kondisi tersebut terutama disebabkan karena sebagian wilayah Kota Magelang termasuk dalam wilayah dengan tingkat ketererangan yang cukup tinggi dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Data yang ada menunjukkan bahwa terdapat wilayah khusus rawan bencana longsor karena sifat ketererangan tanah dan persungai, yaitu:

- a. Wilayah Barat Kota Magelang dalam lingkup Daerah Aliran Sungai Progo meliputi Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Jurangombo Utara, Kelurahan Potrobangsari, Kelurahan Magelang, Kelurahan Cacaban;
- b. Wilayah Timur Kota Magelang dalam lingkup Daerah Aliran Sungai Elo meliputi Kelurahan Kedungsari, Rejowinangun Utara dan Kelurahan Wates.

Hal yang perlu diwaspadai terkait dengan bencana banjir perkotaan adalah banjir yang diakibatkan banjir limpasan atau limpahan air drainase karena hujan dan drainase tersumbat. Alih fungsi lahan menjadi bangunan rumah tinggal, ruko dan fasilitas umum berkontribusi terhadap meluapnya air hujan ketika curah hujan tinggi. Hal ini disebabkan karena berkurangnya daya tampung dan daya serap tanah tanah yang sudah tidak maksimal menyerap air hujan karena tertutup oleh bangunan. Penyebab kedua adalah banjir bandang atau banjir kiriman melanda wilayah tepi sungai Progo dan Elo. Wilayah-wilayah yang memiliki potensi rawan bencana banjir karena faktor air melimpah antara lain adalah: Potrobangsari, Cacaban, Kemirirejo, Panjang, Tidar Utara, Rejowinangun Utara.

Selain Bencana longsor dan banjir, perlu juga di waspadai terkait dengan bahaya kebakaran terutama pada pemukiman yang padat penduduk dengan jalan sempit menyulitkan evakuasi dan pemadaman bencana kebakaran. Kelurahan yang memiliki potensi (rawan) bencana kebakaran karena faktor kepadatan penduduk dan jaringan jalan yang sempit (3-6 meter) yaitu: Kramat Utara dan Selatan, Potrobangsari, Cacaban, Panjang, Kemirirejo, Rejowinangun Utara, Rejowinangun Selatan. Bencana Kebakaran yang terjadi di sepanjang tahun 2015 sebanyak 6 kejadian dengan kerugian

materiil sebanyak 1 rumah dan 5 bangunan lainnya dengan total kerugian sebesar Rp. 291.300.000, 00. Jumlah lokasi bencana yang terjadi di Kota Magelang sepanjang tahun 2016 sebanyak 22 lokasi. Dengan kerugian sebesar Rp. 355.000.000,00

Hal lain yang perlu mendapat perhatian terkait dengan limbah industri atau jasa yang meresap dalam air bawah tanah serta air permukaan (selokan, kolam dan pemukiman), pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga dan sampah yang tidak tertangani dengan baik.

Bencana lain yang perlu mendapat perhatian dan identik dengan wilayah perkotaan adalah bencana sosial seperti pertikaian antar warga di wilayah Kota Magelang, pertikaian pelajar dan tindak kriminalitas. Indikator penentu prioritas pencegahan dan penanganan bencana sosial perlu dilakukan pada wilayah yang memiliki: pusat perdagangan dan tujuan pergerakan atau transportasi; wilayah dengan tingkat sosial ekonomi yang berada di level pra-sejahtera; wilayah dengan kondisi pemukiman belum tertata atau kumuh, perkembangan kawasan yang kurang sehat dengan tingkat kepadatan tinggi.

2.1.1.9 Aspek Demografi

Salah satu permasalahan terkait dengan kependudukan adalah masalah ketimpangan distribusi penduduk karena distribusi penduduk yang tidak merata akan menyebabkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk pada suatu wilayah karena tiap parsial kewilayahan mengalami jumlah penduduk yang tidak merata dan berimbang jumlahnya. Wilayah dengan jumlah penduduk yang padat akan memiliki permasalahan yang cukup kompleks seperti masalah pengangguran, kemiskinan, permasalahan akan kebutuhan lahan, kebutuhan akan fasilitas umum dan kebutuhan dasar masyarakat yang memadai seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan masalah – masalah sosial lainnya.

Terkait dengan Kota Magelang yang dengan wilayah relatif sangat kecil, masalah distribusi penduduk tidak membawa masalah sosial yang relatif besar namun tetap saja hal ini perlu mendapatkan perhatian terkait dengan pemerataan pembangunan di Kota Magelang. Jumlah penduduk pada tahun 2017 berdasarkan data proyeksi BPS sebanyak 121.673 jiwa dengan wilayah Kota Magelang seluas 18,12 km², kepadatan penduduk pada tahun 2017 sebanyak 6.715 jiwa/km². Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 jumlah ini lebih tinggi sebanding dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Magelang (menunjukkan tren meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk). Kepadatan penduduk tahun 2016 sebanyak 6.694 jiwa/ km². . Semakin tinggi kepadatan penduduk mengindikasikan tingkat kerapatan penggunaan lahan kawasan terbangun, sehingga bisa dikatakan semakin tinggi beban lingkungan hidup serta menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama untuk menyediakan sarana dan prasarana pemukiman seperti drainase, sanitasi, air bersih yang layak dan terpenuhi merata bagi penduduk di atas lahan yang terbatas .

Tabel 2 - 4

Kepadatan Penduduk di Kota Magelang Tahun 2011- 2017

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa / km²)
--------------	--	---

2011	119.210	6.579
2012	119.647	6.603
2013	120.158	6.631
2014	120.615	6.656
2015	120.952	6.675
2016	121.293	6.694
2017	121.673	6.715

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kota Magelang 2010 – 2020 (proyeksi menggunakan data dasar hasil sensus Penduduk 2010)

Kepadatan penduduk yang relatif tinggi ini merupakan salah satu permasalahan bagi pemerintah terkait dengan penataan ruang dan kota serta pemenuhan pelayanan dan kebutuhan dasar masyarakat. Keterbatasan lahan untuk permukiman merupakan masalah yang khas bagi wilayah perkotaan terutama bagi Kota Magelang yang merupakan kota kecil dengan wilayah yang terbatas. Dengan wilayah yang hanya 18.12 km² dan jumlah penduduk yang menunjukkan trend yang meningkat setiap tahun. Hal ini sangat umum terjadi di semua wilayah di Jawa Tengah. Bertambahnya jumlah penduduk dapat disebabkan karena kelahiran atau juga urbanisasi. Kepadatan penduduk di Kota Magelang yang relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah Kota dan Kabupaten lain di Jawa Tengah, menunjukkan bahwa wilayah perkotaan memiliki potensi dan daya tarik yang cukup tinggi.

Terkait dengan hal tersebut maka Pemerintah di minta untuk lebih tanggap dalam membuat kebijakan terkait pemenuhan pelayanan dan kebutuhan dasar bagi masyarakat, pemenuhan sarana prasarana umum, serta kebijakan terkait tata ruang lahan kota yang terbatas. Selain itu Pemerintah juga harus bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat timbul akibat meningkatnya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk seperti bencana sosial yang biasa terjadi pada wilayah perkotaan.

Data kepadatan penduduk Kota Magelang berdasarkan DispendukCapil Kota Magelang menyebutkan bahwa pada tahun 2016 dengan jumlah penduduk sebanyak 132.662 jiwa, kepadatan penduduk Kota Magelang pada tahun tersebut sebesar 7.321 jiwa/km². Sementara pada tahun 2015 dengan jumlah penduduk sebanyak 132.261 jiwa, kepadatan penduduk Kota Magelang sebesar 7.299 jiwa/km². Data kepadatan penduduk secara lebih rinci per kelurahan akan ditampilkan pada tabel di bawah ini

Tabel 2 - 5
Kepadatan Penduduk per Kelurahan di Kota Magelang Tahun 2013 - 2017

Kecamatan / Kelurahan	2013		2014		2015		2016		2017	
	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km ²)								
MAGELANG SELATAN										

Kecamatan / Kelurahan	2013		2014		2015		2016		2017	
	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km ²)	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km ²)	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km ²)	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km ²)	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa /km ²)
Jurangombo Utara	3.848	6.691	4.302	7.482	4.337	7.478	7.198	3.185	4.333	7.471
Jurangombo Selatan	7.821	3.468	6.951	3.070	7.056	3.122	8.582	8.847	7.246	3.206
Magersari	7.834	5.689	8.780	6.376	8.816	6.388	4.328	7.462	8.873	6.430
Tidar Utara	7.672	7.909	8.493	8.756	8.540	8.804	5.837	4.596	8.624	8.891
Tidar Selatan	5.569	4.388	5.748	4.530	5.787	4.567	8.860	6.420	5.868	4.620
Rejowinangun Selatan	7.767	17.938	8.986	20.753	8.965	20.849	8.873	20.635	8.844	20.567
MAGELANG TENGAH										
Magelang	6.963	5.588	7.913	6.351	7.913	6.330	7.992	6.394	8.039	6.431
Kemirirejo	4.993	5.674	6.026	12.606	6.190	7.034	12.563	12.690	6.119	6.953
Cacaban	7.768	9.404	8.214	9.944	8.231	9.917	6.182	7.025	8.253	9.943
Rejowinangun Utara	10.566	10.640	12.518	12.606	12.514	12.640	8.214	9.896	12.545	12.672
Panjang	5.722	16.596	6.766	19.612	6.809	19.454	6.834	19.526	8.818	19.480
Gelangan	7.344	9.022	8.250	10.135	8.298	10.244	8.335	10.290	8.337	10.293
MAGELANG UTARA										
Wates	7.921	6.753	9.188	7.833	9.202	7.865	9.242	7.899	9.237	7.895
Potrobangsari	7.988	6.149	8.992	6.922	8.966	6.897	8.887	6.836	8.920	6.862
Kedungsari	7.191	5.391	7.475	1.334	7.533	5.664	7.605	5.718	7.640	5.744
Kramat Utara	5.730	6.632	4.860	5.625	4.955	5.763	4.966	5.774	4.998	5.812
Kramat Selatan	7.480	5.130	8.061	5.529	8.148	5.581	8.164	5.592	8.217	5.628

Sumber: Data Strategis Kota Magelang Tahun 2017 Diskominsta Kota Magelang (sumber data : DispendukCapil)

Sex ratio adalah perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di atas, maka sex ratio Kota Magelang Tahun 2017 sebesar $(59.864 / 61.809 \times 100) = 96.85$, artinya setiap 100 perempuan dalam suatu kawasan di Kota Magelang, akan terdapat pula sebanyak 97 pria di dalamnya. Rasio perbandingan penduduk antara laki-laki dan perempuan di Kota Magelang bisa di katakan cukup seimbang.

Tabel 2 - 6

Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kota Magelang Tahun 2010-2017 (dalam jiwa dan persen)

Jenis Kelamin	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Jenis Kelamin	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Laki-Laki	58.445	58.686	58.905	59.160	59.384	59.591	59.662	59.864
Perempuan	60.268	60.524	60.742	60.998	61.231	61.361	61.631	61.809
Jumlah Total	118.713	119.210	119.647	120.158	120.615	120.952	121.293	121.673
Sex Ratio	96,98	96,96	96,98	96,99	96,98	97,12	96,81	96,85
Laju Pertumbuhan (%)		0.42	0.37	0.43	0.38	0.28	0.28	0.31

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk 2010-2017 (menggunakan data dasar hasil sensus Penduduk 2010)

Tabel 2 - 7

Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kota Magelang 2010-Semester 1 Tahun 2017 (dalam jiwa dan persen)

Jenis Kelamin	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Semester 1 2017
Laki-Laki	63.185	63.898	64.569	64.462	64.865	65.185	65.375	65.513
Perempuan	65.012	65.658	66.386	66.374	66.838	67.076	67.287	67.398
Jumlah Total	128.197	129.556	130.955	130.836	131.703	132.261	132.662	132.911
Laju Pertumbuhan (%)	-1.91	1.06	1.08	-0.09	0.66	0.42	0.30	0.19

Sumber: Data Strategis Kota Magelang 17. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang

Tabel 2 - 8

Banyak Rumah Tangga dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga di Kota Magelang (Tahun 2010-2016)

Tahun	Jumlah Penduduk	Rumah Tangga	Rata-rata Anggota RT
2010	128.197	38.490	3
2011	129.556	39.672	3
2012	130.955	40.623	3
2013	130.836	41.246	3
2014	131.703	41.853	3
2015	132.261	42.433	3

2016	132.662	43.026	3
Semester 1 2017	132.911	43.328	3

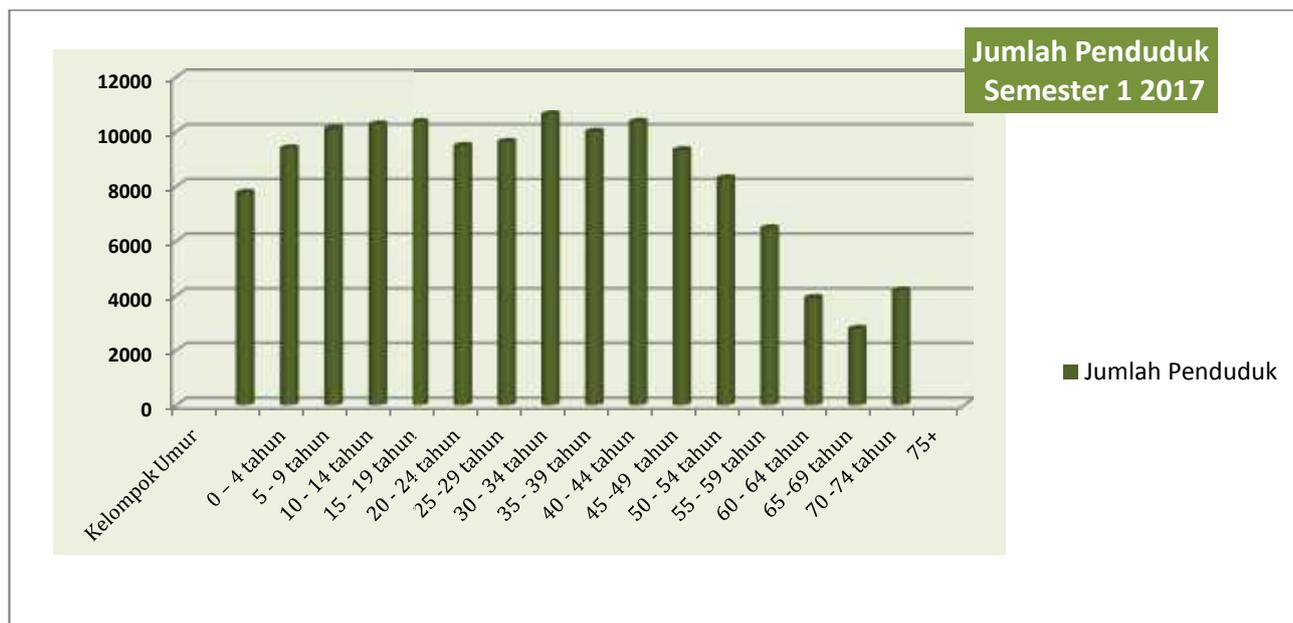
Sumber: Data Strategis Kota Magelang 2009-2016. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang-sumber Dispendukcapil

Data penduduk berdasarkan kelompok umur di Kota Magelang memperlihatkan bahwa komposisi terbesar penduduk pada usia produktif 15 tahun sampai dengan 64 tahun adalah pada kelompok umur antara usia 15 tahun sampai dengan 49 tahun. Hal ini merupakan modal Sumber Daya bagi Kota Magelang apabila Pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan berbagai kebijakan dan program kegiatan yang dapat mengoptimalkan sumber daya manusianya menjadi sumber daya yang berkualitas dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2 - 9
Banyak Penduduk berdasarkan Kelompok Umur di Kota Magelang Tahun 2011-2017

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0 - 4 tahun	8.690	8.732	8.246	8.154	7.968	7.893	7.760
5 - 9 tahun	9.173	9.213	9.601	9.528	9.529	9.395	9.385
10 - 14 tahun	9.524	9.564	10.101	10.234	10.061	10.062	10.111
15 - 19 tahun	10.573	10.621	10.263	10.221	10.365	10.305	10.262
20 - 24 tahun	9.079	9.128	9.954	10.076	10.170	10.333	10.348
25 -29 tahun	9.522	8.566	9.532	9.322	9.338	9.388	9.475
30 - 34 tahun	9.092	9.134	10.962	10.806	10.390	9.866	9.625
35 - 39 tahun	9.103	9.141	10.364	10.410	10.429	10.521	10.627
40 - 44 tahun	9.252	9.288	10.485	10.274	10.180	10.052	9.993
45 -49 tahun	8.724	8.763	9.833	10.158	10.115	10.251	10.357
50 - 54 tahun	7.769	7.803	9.127	9.082	9.241	9.377	9.324
55 - 59 tahun	5.949	3.974	7.431	7.746	7.978	8.133	8.288
60 - 64 tahun	3.710	3.724	5.150	5.618	6.000	6.302	6.463
65 -69 tahun	3.240	3.252	3.207	3.381	3.523	3.758	3.916
70 -74 tahun	2.527	2.533	2.983	2.897	2.880	2.911	2.787
75+	2.878	2.892	3.597	3.796	4.094	4.115	4.190

Sumber: Data Strategis Kota Magelang 2009-2017. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang-sumber Dispendukcapil



Gambar 2.4 Penduduk menurut Kelompok Umur di Kota Magelang Tahun 2017

Mata pencaharian penduduk Kota Magelang cukup beragam ,seperti halnya fenomena yang banyak terjadi di daerah perkotaan, jumlah penduduk bermata pencaharian sebagai petani relatif kecil. Penduduk Kota Magelang pada umumnya sebagaimana mata pencaharian penduduk di perkotaan, sebagian besar bergerak di bidang perdagangan dan usaha.

:

Tabel 2 - 4
Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kota Magelang Tahun 2011-2017

Mata Pencaharian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Semester 1 tahun 2017		
							Jumlah	%	+/-
Pertanian	206	215	215	217	215	195	194	0.18	(1)
Buruh Tani	54	60	60	61	66	73	71	0.07	(3)
Pengusaha	12.762	12.680	12.476	12.349	12.209	12.275	12.267	11.84	(8)
Buruh Industri	23.074	23.599	23.682	24.248	24.835	25.541	25.917	25.02	376
Buruh Bangunan	8.932	9.058	9.006	9.096	9.138	9.226	9.219	8.90	(7)
Pedagang	3.022	3.040	3.002	2.978	2.935	2.136	2.121	2.05	(15)
Angkutan	220	227	233	240	251	252	245	0.24	(7)
PNS/TNI/Polri	5.909	5.925	5.825	5.810	5.772	5.696	5.648	5.45	(48)
Guru/ Dosen	1.442	1.436	1.447	1.452	1.473	1.473	1.451	1.40	(22)
Pensiunan	3.813	3.772	3.667	3.608	3.601	3.570	3.535	3.41	(35)
Lain Lainnya	53.961	52.890	53.376	53.962	53.947	54.244	42.931	41.44	(11.313)

Mata Pencaharian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Semester 1 tahun 2017		
							Jumlah	%	+/-
JUMLAH	113.922	112.902	112.989	114.021	114.442	119.156	103.599	100	

Sumber: Data Strategis Kota Magelang 2009-2017. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang-sumber Dispendukcapil

Mata pencaharian terbesar ada di beberapa sektor seperti sektor industri, perdagangan dan perkantoran. Mata pencaharian tertinggi adalah sebagai buruh industri yaitu sebanyak 25.917 jiwa (25.02%), Pengusaha 12.267 jiwa (11.84%), Sedangkan mata pencaharian paling kecil adalah sebagai petani yaitu sebanyak 194 (0,18%) dan buruh tani 71 (0,07%).

Kondisi Kota Magelang relatif kondusif . Konflik antar umat beragama di Kota Magelang nyaris tidak pernah terjadi di Kota Magelang. Masyarakat hidup berdampingan secara damai dalam keaneka ragaman agama yang mereka peluk. Kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing – masing yang di akui Pemerintah menjadi prioritas Pemerintah dalam menjamin hak asasi masyarakat dalam berkeyakinan. Hal ini menjadi Modal dasar bagi Pemerintah Kota Magelang dalam mencanangkan Kota Religius dalam periode lima tahun ke depan. Statistik penduduk Kota Magelang berdasarkan agama dan keyakinan yang dipeluk di sajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 5
Penduduk Berdasarkan Agama dan Keyakinan yang Dipeluk Tahun 2011-2017 di Kota Magelang

Agama /Keyakinan	Jumlah Pemeluk Agama dan Keyakinan						
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Islam	107.627	109.678	109.841	110.856	111.610	112.135	112.442
Kristen	12.904	12.923	12.770	12.711	12.616	12.566	12.519
Katholik	7.525	7.517	7.397	7.232	7.241	7.165	7.162
Hindu	149	146	145	149	150	143	141
Budha	658	664	658	639	620	628	623
Konghuchu	9	8	8	8	7	8	8
Lainnya	23	19	17	17	17	17	24

Sumber : Data Strategis Kota Magelang 2009-2017. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang-sumber Dispendukcapil

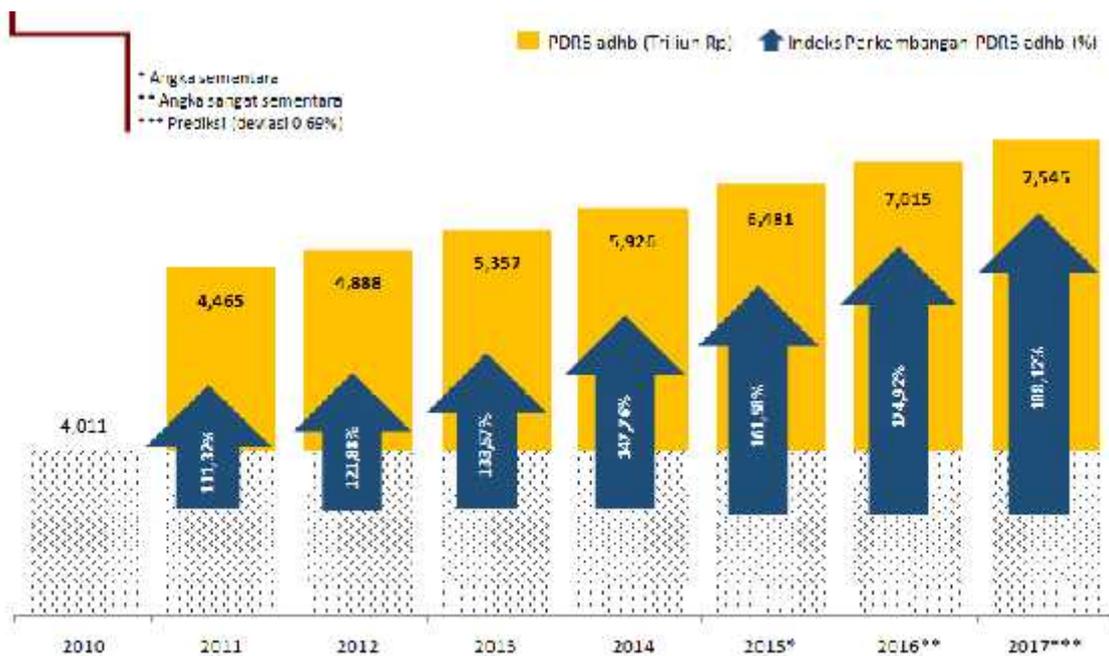
2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.1.2.1.1 PDRB atas Dasar Harga Berlaku

Perekonomian makro Kota Magelang di tahun 2016 tumbuh 8,25% (atas dasar harga berlaku), sedikit melambat dari tahun 2015 yang berada pada angka 9,35%. Besarnya nominal nilai tambah barang dan jasa yang diperoleh di tahun 2016 mencapai 7,015 triliun Rupiah, berkembang hampir 1,75 kali lipat dibandingkan kondisi ekonomi di

tahun 2010. Pertumbuhan tertinggi berasal dari kegiatan ekonomi pada lapangan usaha Jasa Perusahaan (13,32%), Jasa Keuangan dan Asuransi (13,2%) dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (11,42%). Meski merupakan sektor andalan di Kota Magelang, namun lapangan usaha Industri Pengolahan, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan serta lapangan usaha Informasi dan Komunikasi masih memiliki pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan PDRB secara umum di tahun 2016. Khusus untuk Transportasi dan Pergudangan, lapangan usaha ini memiliki prospek yang sangat baik untuk dapat terus dioptimalkan perannya dalam tahun-tahun mendatang, mengingat lapangan usaha ini merupakan sektor ekonomi penunjang utama bagi pariwisata dan perdagangan yang merupakan sektor unggulan di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2.5. PDRB dan Indeks Perkembangan PDRB Kota Magelang Atas Dasar Harga Berlaku, 2010-2017
 Sumber: BPS Kota Magelang, 2017 (diolah)
 Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

Kinerja perekonomian makro skala kota untuk tahun 2017 secara resmi belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Namun demikian diprediksi kondisi ekonomi makro Kota Magelang di tahun 2017 akan terus mengalami pertumbuhan positif dengan perolehan PDRB mencapai 7,545 triliun rupiah (deviasi 0,69%). Di tahun 2017 diprediksi tidak ada pergeseran peran lapangan usaha yang cukup signifikan dalam struktur perekonomian Kota Magelang. Hampir seluruh lapangan usaha diprediksi tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya dan Jasa Pendidikan diprediksi akan memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan lapangan usaha lain di tahun 2017.

Tabel 2-12.
 PDRB Kota Magelang Atas Dasar harga Berlaku (Juta Rp) Menurut Lapangan Usaha
 Tahun 2016 dan Prediksi Tahun 2017

Lapangan Usaha	2016*	2017**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	135.991,13	142.454,49
Industri Pengolahan	1.128.331,29	1.239.730,46
Pengadaan Listrik dan Gas	20.361,13	21.160,19

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.979,24	9.601,96
Konstruksi	1.163.178,22	1.262.362,53
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.006.288,45	1.060.825,03
Transportasi dan Pergudangan	471.954,33	504.756,85
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	422.789,76	442.114,98
Informasi dan Komunikasi	334.082,07	367.432,79
Jasa Keuangan dan Asuransi	366.184,95	380.534,04
Real Estate	224.952,98	236.820,26
Jasa Perusahaan	24.810,72	27.892,68
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	842.640,29	873.126,67
Jasa Pendidikan	529.008,56	604.377,80
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	195.466,24	215.370,07
Jasa lainnya	140.360,73	156.238,91
PDRB	7.015.380,09	7.544.799,70

* Angka sangat sementara ** Angka prediksi (deviasi 0,69%)

Sumber: BPS Kota Magelang, 2017 (diolah)

Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

Dari sisi konsumsi, PDRB Kota Magelang di tahun 2016 didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencapai 4,017 triliun Rupiah. Tren perlambatan sebagaimana lapangan usaha juga terjadi dalam penggunaan PDRB. Pada kelompok konsumsi, pertumbuhan konsumsi tertinggi tetap berasal dari konsumsi pemerintah sebesar 7,58%, melambat dari tahun 2015 yang mampu mencapai 14,56%. Konsumsi rumah tangga tumbuh 6,8% sedikit lebih cepat dibandingkan lembaga NPRT yang hanya tumbuh 6,07%. Secara proporsi, peran komponen penggunaan terhadap PDRB di tahun 2017 diprediksi tidak berubah secara signifikan.

Tabel 2-13.
PDRB Kota Magelang Atas Dasar harga Berlaku (Juta Rp) Menurut Pengeluaran
Tahun 2016 dan Prediksi Tahun 2017

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,017,143.51	4,290,309.27
Pengeluaran Konsumsi LNPR	89,900.37	95,357.32
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,431,080.68	1,539,556.60
Pengeluaran PMTB	3,459,854.74	3,683,361.36
Pengeluaran Perubahan Inventori	153,174.70	167,302.24
Pengeluaran Ekspor	3,562,619.90	3,758,600.12
Pengeluaran Impor	5,698,393.82	5,989,687.21
PDRB	7.015.380,09	7.544.799,70

* Angka sangat sementara ** Angka prediksi (deviasi 0,69%)

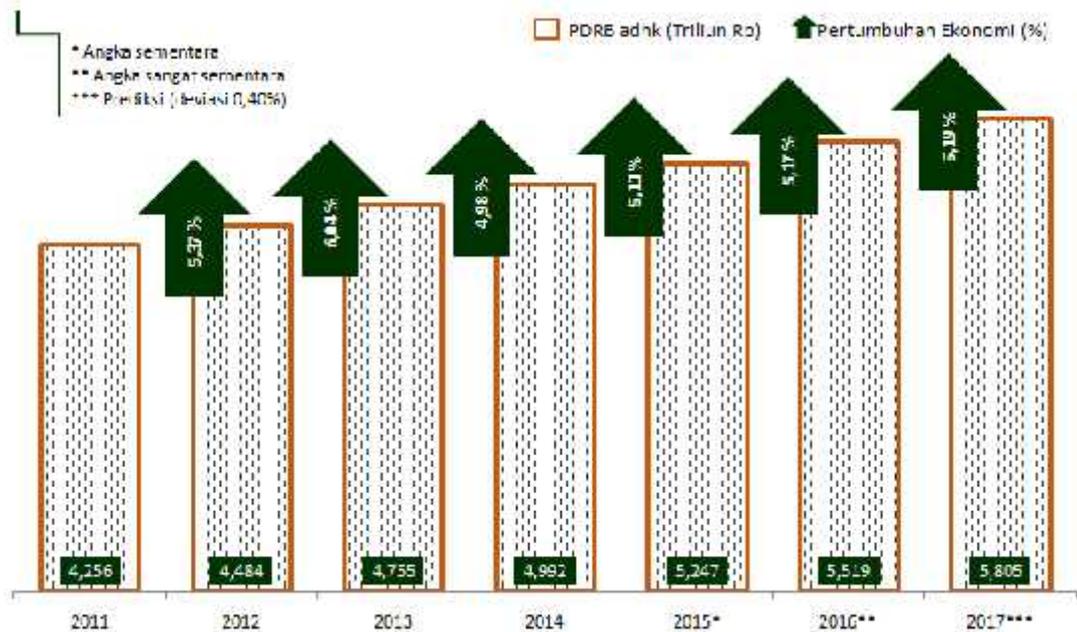
Sumber: BPS Kota Magelang, 2017 (diolah)

Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

2.1.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Diteropong dari sisi riil, PDRB Kota Magelang atas dasar harga konstan merepresentasikan pertumbuhan ekonomi dari seluruh hasil produksi barang dan jasa di Kota Magelang pada tahun berkenaan. Pada tahun 2016 Kota Magelang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebesar 5,17% setelah di tahun sebelumnya hanya mencapai 5,11%. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional (5,02%), namun masih di bawah pertumbuhan ekonomi pada skala provinsi Jawa Tengah yang pada tahun tersebut mencapai 5,28%. Berdasar tahun dasar 2010, secara riil

PDRB Kota Magelang tahun 2016 mencapai 5,517 triliun rupiah dengan pertumbuhan ekonomi level sektoral dialami oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi (9,46%), Jasa Perusahaan (8,82%) dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (7,75%). Merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Magelang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan dan sektor andalan karena dari data historis sektor-sektor ini masih tumbuh relatif lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kota secara umum.



Gambar 2.6 PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang, 2011-2017

Sumber: BPS Kota Magelang, 2017 (diolah)

Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

Stabilnya perkembangan harga, akselerasi laju produktivitas di berbagai sektor ekonomi dan kondusifnya iklim investasi sepanjang tahun 2017 memberikan hasil prediksi yang cukup optimis bagi perekonomian Kota Magelang. Sampai dengan akhir tahun 2017, diprediksi pertumbuhan ekonomi Kota Magelang mampu mencapai target RPJMD (4,79%-5,29%) dan berada pada angka 5,19% (deviasi 0,40%).

2.1.2.1.3 Kontribusi Sektor Perekonomian Terhadap PDRB

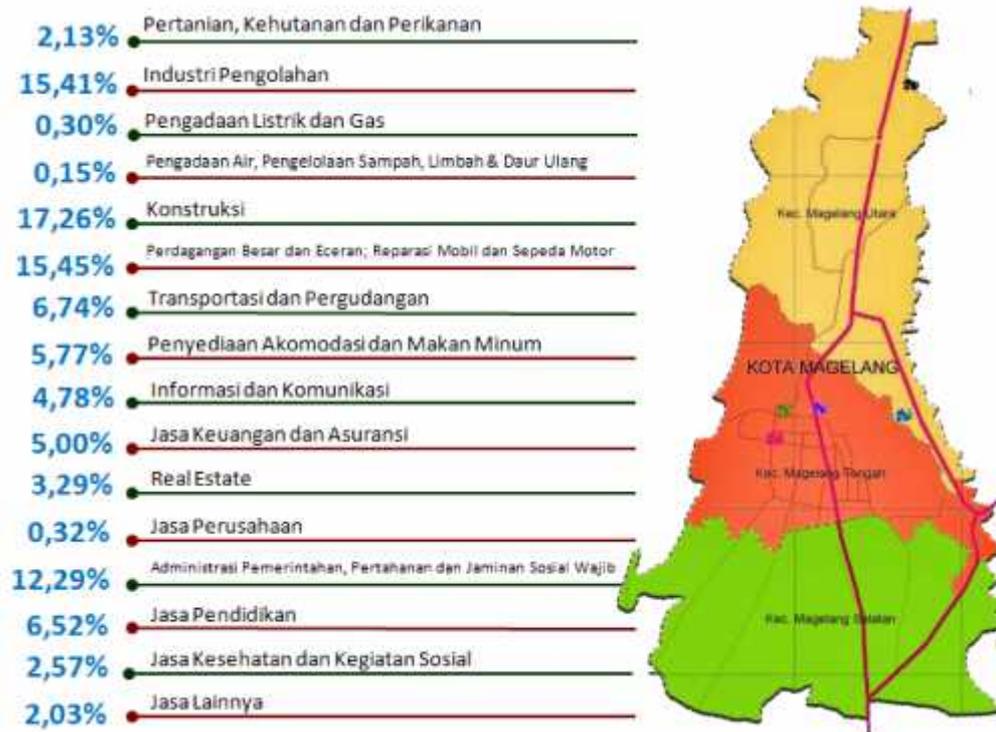
Beberapa pergeseran peran lapangan usaha ditilik dari kontribusinya terhadap perekonomian makro Kota Magelang terjadi dalam lima tahun terakhir. Transformasi struktur perekonomian terjadi sejak tahun 2014 dimana lapangan usaha Industri Pengolahan mampu memiliki kontribusi terbesar kedua dalam PDRB Kota Magelang, menggeser peran lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Di tahun 2016 transformasi kembali terjadi setelah melorotnya peran Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kota Magelang dalam menyumbang nilai tambah produksi barang/jasa dan tergantikan oleh lapangan usaha Jasa Lainnya. Sementara itu, komposisi sektor andalan dan unggulan cenderung konstan dari tahun ke tahun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.14.

Sektor Unggulan dan Sektor Andalan Perekonomian Kota Magelang, 2010-2016

1. Industri Pengolahan	1. Informasi dan Komunikasi
2. Transportasi dan Pergudangan	2. Jasa Pendidikan
3. Informasi dan Komunikasi	3. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
4. Jasa Pendidikan	

Sumber: Analisis Indikator Makro Ekonomi Kota Magelang Tahun 2017



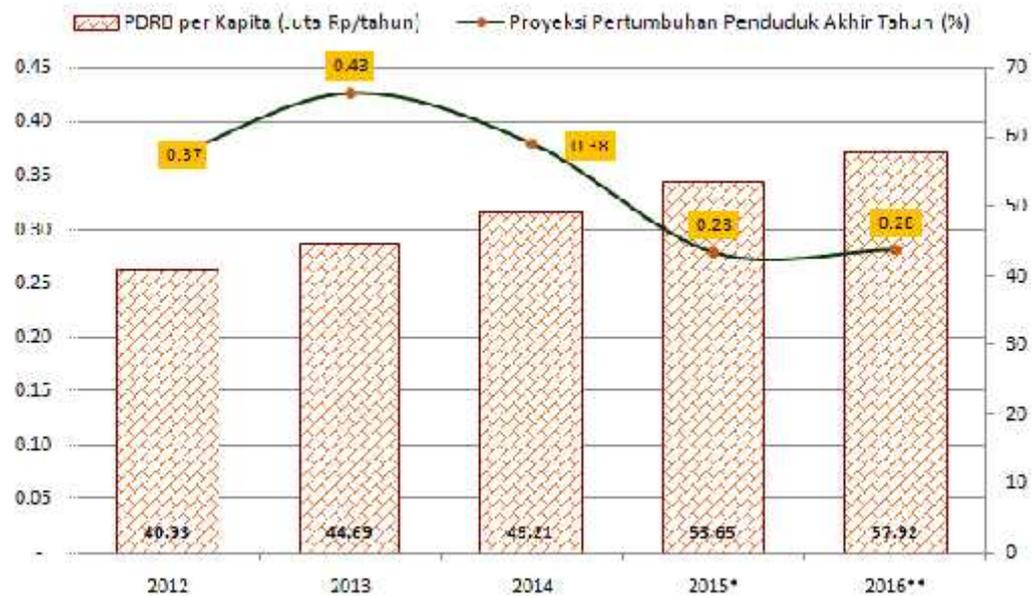
Gambar 2.7. Rata-rata Distribusi Lapangan Usaha Pembentuk PDRB Kota Magelang (adhb), 2010-2016
Sumber: BPS Kota Magelang, 2017 (diolah)

Ketergantungan aktivitas ekonomi Industri pengolahan khususnya dalam pasokan sumber daya input yang masih dicukupi dari hasil impor dari daerah sekitar merupakan salah satu penyebab mengapa lapangan usaha ini meskipun berkontribusi cukup signifikan dalam pembentukan PDRB Kota Magelang, namun belum cukup kompetitif dalam skala yang lebih luas yaitu provinsi, sehingga belum mampu menjadi sektor andalan. Di tahun 2017 struktur perekonomian Kota Magelang diprediksi memiliki komposisi yang sama dengan tahun 2016 dengan peningkatan persentase peran di setiap lapangan usaha.

2.1.2.1.4 PDRB Per Kapita

Indikator kesejahteraan masyarakat yang terukur salah satunya dari PDRB per kapita di Kota Magelang mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 dengan proyeksi penduduk tengah tahun sebesar 121.112 jiwa, besarnya PDRB per kapita tercatat sebesar 4,827 juta/bulan (atas dasar harga berlaku). Optimalisasi indikator ini dapat dilakukan antara lain melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan produktivitas ekonomi di sektor-sektor potensial. Di tahun 2017, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Kota Magelang pada level

5,19% dan prediksi total penduduk tengah tahun sebesar 121.474 jiwa, maka PDRB per kapita Kota Magelang (atas dasar harga berlaku) diprediksi mampu terus tumbuh mencapai 58,92 juta/tahun.



Gambar 2.8. PDRB per Kapita (adhb) dan Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Akhir Tahun Kota Magelang, 2012-2016

* Angka sementara ** Angka sangat sementara

Sumber: BPS Kota Magelang, 2017 (diolah)

Tabel 2.15. PDRB per Kapita Kota Magelang Tahun 2016 dan Prediksi Tahun 2017

Uraian	2016	2017
PDRB atas dasar harga berlaku (Juta Rupiah)	7.015.380,09*	7.478.570,29**
PDRB atas dasar harga konstan (Juta Rupiah)	5.518.684,55*	5.804.917,24**
Proyeksi penduduk tengah tahun (jiwa)	121.112,00	121.474,00
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (Juta Rp/kapita/tahun)	57,92*	58,92**

* Angka sangat sementara ** Angka prediksi (derivatif)

Sumber: BPS Kota Magelang, 2017 (diolah)

Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

Mengingat indikator kesejahteraan ini memiliki beberapa kelemahan, maka dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan ekonomi (khususnya dalam bidang pemerataan pendapatan) yang lebih komprehensif, Kota Magelang juga memperhitungkan statistik kesejahteraan yang lain, diantaranya yaitu berupa indeks gini.

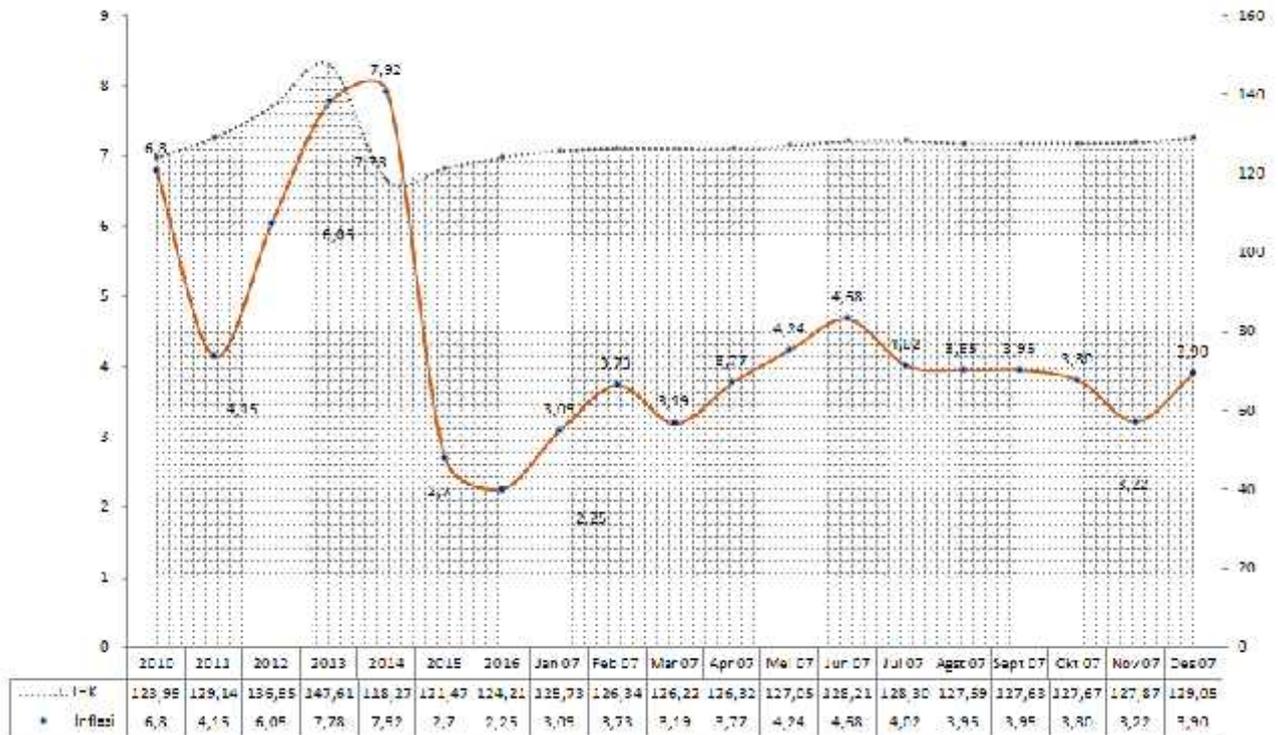
2.1.2.1.5 Inflasi

Kota Magelang memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang secara rutin menerapkan protokol pengendalian harga dengan baik, sehingga sepanjang tahun 2017 tidak ditemukan gejolak harga yang berarti pada seluruh komoditas pengeluaran. Beberapa program dan kegiatan TPID Kota Magelang di tahun 2017 antara lain adalah:

- Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan.
- Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
- Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
- Program pengembangan budidaya perikanan

- e. Program peningkatan produksi hasil peternakan
- f. Pemanfaatan Toko Tani Indonesia (TTI)
Sampai dengan saat ini di Kota Magelang terdapat delapan TTI. TTI menjual komoditas pangan hasil produksi petani sesuai harga yang wajar kepada konsumen yang dipasok oleh Gapoktan/Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dan/atau Bulog.
- g. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- h. Pengembangan sistem informasi pasar dengan melaksanakan pemantauan pasokan dan harga pangan di tiga pasar tradisional (Kebonpolo, Cacaban dan Rejowinangun), toko/warung yang menyediakan bahan pangan di 17 kelurahan dan sembilan pedagang grosir pangan di luar pasar.
- i. Publikasi perkembangan harga melalui aplikasi Sihati (Sistem Informasi Harga dan Komoditi Jawa Tengah), Magelang FM dan DataGO
- j. Melaksanakan kegiatan panel harga pangan
- k. Program peningkatan efisiensi perdagangan melalui kegiatan peningkatan sistem kerja, jaringan informasi perdagangan, pengembangan pasar dan distribusi produk sehingga tersedia informasi perusahaan yang akurat dan meningkatnya pangsa pasar produk-produk UMKM
- l. Penguatan kelembagaan TPID

Laju inflasi Kota Magelang di tahun 2017 terbilang rendah dengan fluktuasi perkembangan harga yang terkendali setiap bulannya. Sampai dengan akhir November 2017 inflasi yang terjadi sebesar 0,16% (3,22% year on year) seirama dengan laju inflasi pada skala provinsi (yoy 3,19%) dan nasional (yoy 3,30%). Akhir Desember 2017 terdapat kenaikan IHK mencapai 129,05 menyebabkan inflasi 0,93% (3,9% year on year). Laju inflasi yang terjadi pada posisi lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah (3,71%) dan Nasional (3,61%). Hal tersebut merupakan rentetan dampak dari kenaikan harga beras di akhir tahun yang mengakibatkan kenaikan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 3,96%. Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi yaitu : beras, telur ayam ras, cabe merah, daging ayam ras, papaya, cabe hijau, wortel, tomat sayur, kacang panjang, gula pasir. Sedangkan komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya deflasi adalah : bawang merah, bayam, anggur, salak, pir, minyak goreng, nangka muda, tauge/kecambah, jeruk, alpukat (BPS, 2018).

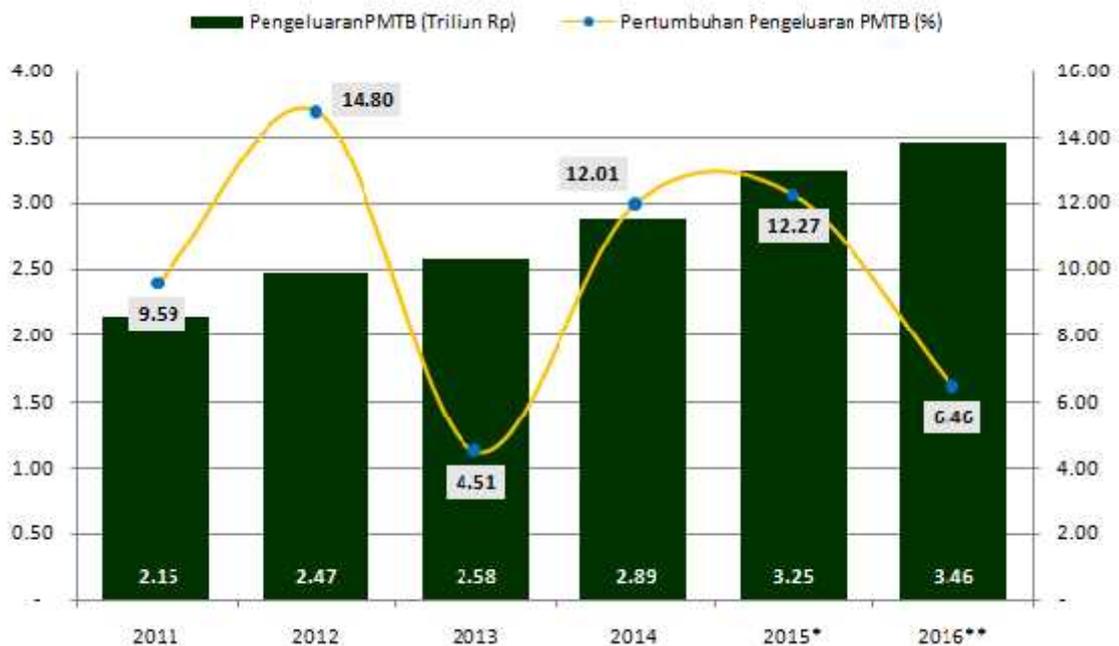


Gambar 2.9. Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Year on Year Kota Magelang, 2010-2017
 Sumber: BPS Kota Magelang, 2018

2.1.2.1.6 Investasi

Investasi dalam dokumen ini diukur dengan pendekatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan salah satu komponen PDRB dari sisi pengeluaran. Menurut BPS, PMTB adalah “pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas”. BPS menjelaskan lebih lanjut bahwa penambahan barang modal yang meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal (termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain).

Pada tahun 2016 pengeluaran PMTB di Kota Magelang mencapai 3,460 triliun (adhb). Nilai ini tumbuh sedikit melambat, yaitu hanya sebesar 6,46% setelah di tahun sebelumnya mampu tumbuh 12,27%. Dominasi PMTB di tahun 2016 berasal dari pengeluaran PMTB untuk bangunan yang memiliki distribusi sebesar 87,62%. Kecepatan pertumbuhan PMTB non bangunan sempat tercatat sangat signifikan sepanjang tahun 2011-2012 dan masih lebih cepat dibandingkan dengan PMTB bangunan sampai dengan tahun 2013. Namun kemudian pengeluaran PMTB bangunan mampu mengejar laju PMTB non bangunan dengan rata-rata growth 10,86% per tahun sepanjang tahun 2014-2016. Sementara itu PMTB non bangunan terus melambat dengan rata-rata pertumbuhan hanya 6,28% per tahun selama periode 2014-2016 dan hanya tumbuh 4,30% di tahun 2016.



Gambar 2.10. Pengeluaran PMTB dan Pertumbuhan Pengeluaran PMTB Kota Magelang, 2011-2017

* Angka sementara ** Angka sangat sementara

Sumber: BPS Kota Magelang, 2017 (diolah)

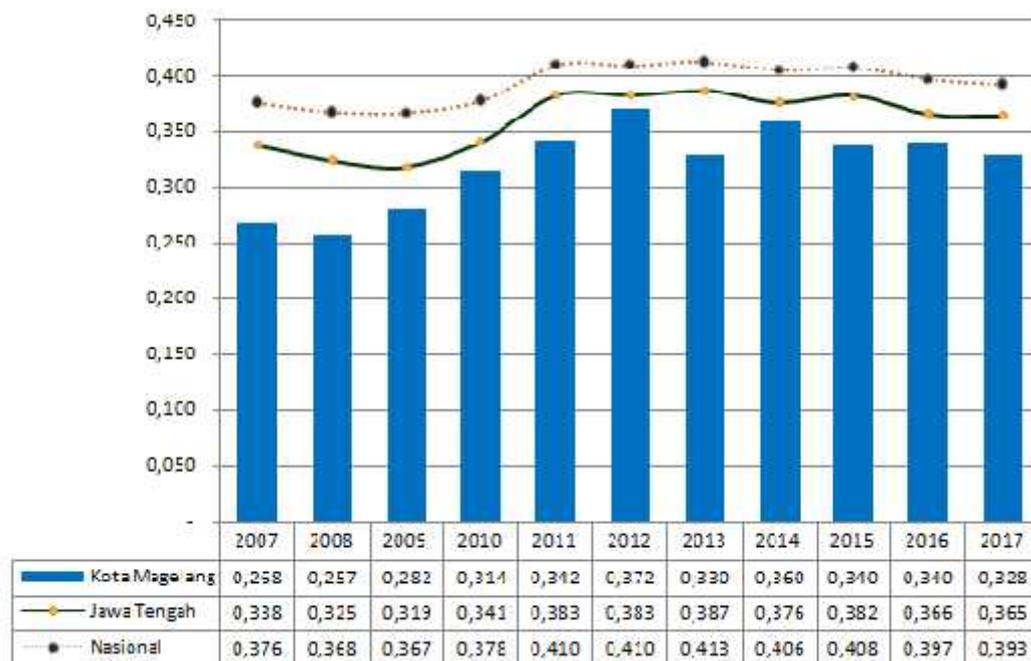
Perkembangan nilai PMTB dan total PDRB selama kurun waktu 2010-2016 menghasilkan ICOR di Kota Magelang yang relatif kecil (5,09). Hal tersebut mengindikasikan bahwa investasi di kota sejuta bunga ini cukup efektif. Untuk setiap 1% pertumbuhan ekonomi, rata-rata nominal investasi yang dibutuhkan sebesar 1,583 triliun rupiah. Sampai dengan akhir tahun 2017 diprediksi pengeluaran PMTB Kota Magelang akan tumbuh positif mencapai 3,683 triliun rupiah.

2.1.2.1.7 Ekspor Impor

Progres yang menggembirakan terjadi pada pertumbuhan ekspor di tahun 2016 yang mencapai 9,91%, jauh lebih cepat dibandingkan pengeluaran impor (5,41%). Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahan baku produksi dan produk akhir dari kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh masyarakat Kota mampu bersaing dan diterima dengan baik di pasar yang berada di luar wilayah. Penurunan tingkat ketergantungan terhadap bahan baku produksi, peningkatan kualitas produk setengah jadi dan produk akhir konsumsi dari seluruh lapangan usaha di Kota Magelang harus terus diupayakan untuk menghindari melebarinya celah dalam neraca perdagangan negatif yang selama ini dialami. Sampai dengan akhir tahun 2017 diprediksi pertumbuhan ekspor akan bertahan dan lebih cepat dibandingkan impor, dengan nominal ekspor mencapai 3,759 triliun Rupiah (deviasi 0,48%) dan impor sebesar 5,990 triliun Rupiah (deviasi 0,37%).

2.1.2.1.8 Index GINI

Keterbatasan sampel dalam Susenas yang dilaksanakan di tahun 2016-2017 menyebabkan perhitungan indeks gini tidak mampu dilakukan pada level Kabupaten/Kota. Data riil diperoleh di tahun 2015 dimana hasil pembangunan di Kota Magelang menunjukkan pola distribusi yang lebih merata, tercatat dari indeks gini yang turun 0,02 poin indeks menjadi 0,340 dari angka di tahun sebelumnya yang mencapai 0,360. Kondisi yang baik ini diprediksi bertahan dengan kecenderungan makin baik di tahun-tahun berikutnya pada interval 0,328-0,340 (deviasi $\pm 0,015$).



Gambar 2.11. Indeks Gini Nasional, Jawa Tengah dan Kota Magelang, 2007-2017
 Indeks Gini Kota Magelang Tahun 2016-2017 adalah Data Prediksi
 Sumber: BPS Kota Magelang, 2017 (diolah)
 Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada hakekatnya untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga tingkat kesejahteraan merupakan ukuran keberhasilan pembangunan. UNDP pada 1990 telah merancang bagaimana mengukur keberhasilan pembangunan Manusia dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia yang disempurnakan metodenya pada tahun 2010.

Untuk itu dalam bahasan ini akan dideskripsikan bagaimana ukuran hasil pembangunan tersebut di Kota Magelang, bagaimana posisinya di wilayah hinterland, regional maupun nasional dan ditinjau dari pembangunan serta pemberdayaan gender-nya. Selanjutnya perlu ditinjau juga kondisi riil di daerah seperti dependency ratio, kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan. Dengan demikian kita akan mampu menarik sebuah catatan penting untuk pembangunan yang lebih baik.

2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perkembangan IPM di Kota Magelang pada tahun 2016 cukup cepat sebesar 1,01% dengan capaian indeks sebesar 77,16 menempati posisi ke-4 di Provinsi Jawa Tengah setelah Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kota Surakarta. Nilai ini masuk status pembangunan manusia pada kategori tinggi. Kualitas pembangunan manusia Kota Magelang di tahun 2016 mampu mencapai angka yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perolehan IPM Jawa Tengah (69,98) dan nasional (70,18).

Pertumbuhan tertinggi komponen pembentuk IPM Kota Magelang pada tahun 2016 berasal dari indikator Harapan lama Sekolah/HLS (penduduk usia lebih dari tujuh tahun) yang tumbuh 3,45% namun masih pada kisaran 13 tahun (setara dengan jenjang pertama pada perguruan tinggi). Paritas daya beli tumbuh 2,75% di tahun 2016 mencapai

11,09 juta rupiah per tahun. Sementara itu pertumbuhan Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rata-rata Lama Sekolah (penduduk usia lebih dari 25 tahun) cukup lambat di bawah 1%. Meskipun demikian AHH di Kota Magelang terhitung tinggi mencapai rata-rata 76 tahun dengan AHH untuk kaum perempuan yang lebih tinggi (78,5 tahun) dibandingkan dengan kaum laki-laki (74,52 tahun). Hal tersebut mengindikasikan kinerja pelayanan dasar kesehatan yang baik.

Lambatnya pertumbuhan RLS yang hanya berkisar 0,7% per tahun perlu mendapat perhatian khusus terlebih dalam hal penurunan angka putus sekolah dan peningkatan kompetensi tenaga kerja di Kota Magelang. Sejak tahun 2010 RLS penduduk usia lebih dari 25 tahun di Kota Magelang stagnan pada angka 10 tahun atau setara jenjang pendidikan tingkat satu sekolah menengah atas. Dari sisi gender, pada tahun 2016 RLS di Kota Magelang masih sedikit diungguli oleh kaum laki-laki yang rata-rata mengenyam pendidikan selama 11 tahun, sementara kaum perempuan di Kota Magelang rata-rata memiliki lama studi sebesar 10 tahun. Di tahun 2017 diprediksi nilai IPM Kota Magelang mengalami laju yang cukup tinggi mencapai 77,8 melampaui target RPJMD pada tahun berkenaan yang ditetapkan sebesar 76,9.

Tabel 2.6

Komponen Pembentuk IPM Kota Magelang Tahun 2010-2016 dan Prediksi Tahun 2017

2010	76,39	12,22	10,08	9.681	73,99
2011	76,44	12,33	10,14	9.922	74,47
2012	76,49	12,49	10,20	10.169	75,00
2013	76,54	12,65	10,22	10.258	75,29
2014	76,57	12,98	10,27	10.344	75,79
2015	76,58	13,10	10,28	10.793	76,39
2016	76,62	13,55	10,29	11.090	77,16
2017*	76,67	13,88	10,30	11.384	77,80

Sumber: BPS Kota Magelang, 2017

Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

2.1.2.2.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Implikasi dari tidak dilaksanakannya kegiatan Sakernas sampel besar untuk prediksi tingkat kabupaten kota adalah tidak dapat dilakukan penghitungan angka IDG yang salah satu indikatornya adalah adanya data tentang jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk perempuan. Maka angka untuk Indeks tersebut hanya tersedia di terakhir di tahun 2015. Sedangkan untuk angka IPG tahun 2016 tidak dilakukan penghitungan karena akan ada perbaikan metodologi yang sesuai dengan kondisi saat ini. Data terakhir di tahun 2015 tercatat bahwa pembangunan berbasis gender di Kota Magelang terus mengalami perbaikan kualitas terlihat dari peningkatan IPG dari 95,45 di tahun 2015 menjadi 95,81. Secara umum peran laki-laki dalam pembangunan manusia di Kota Magelang jauh lebih baik dibandingkan kaum perempuan kecuali dari kualitas kesehatan yang tercermin melalui indikator AHH.

Tabel 2.17 Komponen Pembentuk IPM Berdasar Gender di Kota Magelang Tahun 2014-2015

	L	P	L	P	L	P	L	P
2014	74,52	78,49	13,26	12,88	10,89	9,91	11.868	10.265
2015	74,54	78,51	13,27	12,89	10,90	9,92	12.005	10.651

Sumber: BPS Kota Magelang, 2017

Pemberdayaan gender di tahun 2015 justru mengalami penurunan kualitas. Hal tersebut terlihat dari penurunan IDG ke angka 75,83 setelah di tahun 2014 mampu mencapai 78,82. Hal tersebut disebabkan karena penurunan yang cukup besar pada persentase keterlibatan perempuan di parlemen.

Tabel 2.18. Komponen Pembentuk IDG di Kota Magelang Tahun 2014-2015

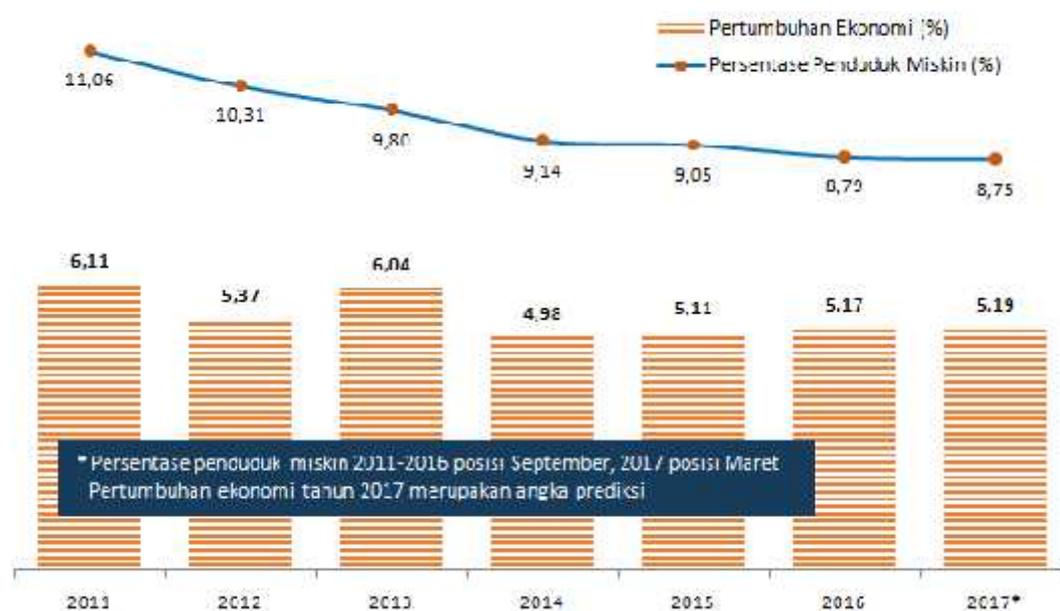
2014	24,00	45,02	41,11
2015	20,00	45,74	41,81

Sumber: BPS Kota Magelang, 2017

2.1.2.2.3 Kemiskinan

Sampai dengan Maret 2017 persentase penduduk miskin di Kota Magelang berangsur turun mencapai 8,75% dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 450.908, yang merupakan garis kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. Penurunan ini terbilang sangat kecil dibandingkan posisi September 2016. Pada periode September 2016 sampai dengan maret 2017 pengentasan penduduk miskin di Kota Magelang tercatat hanya sebesar 100 jiwa penduduk. Garis kemiskinan di Kota Magelang terus bergerak naik sedangkan persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan meskipun masih lambat. Hal ini menjelaskan meskipun biaya pemenuhan kebutuhan hidup terus meningkat namun penduduk Kota Magelang dapat mengatasinya sehingga jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan semakin menurun.

Sementara itu tingkat kedalaman kemiskinan (P1) di Kota Magelang dalam kurun waktu 5 tahun masih fluktuatif dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan dibanding 2016 yaitu dari semula 1,20 menjadi 1,30 yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, sehingga angka indeks di tahun 2017 ini adalah lebih baik dibanding 2016.

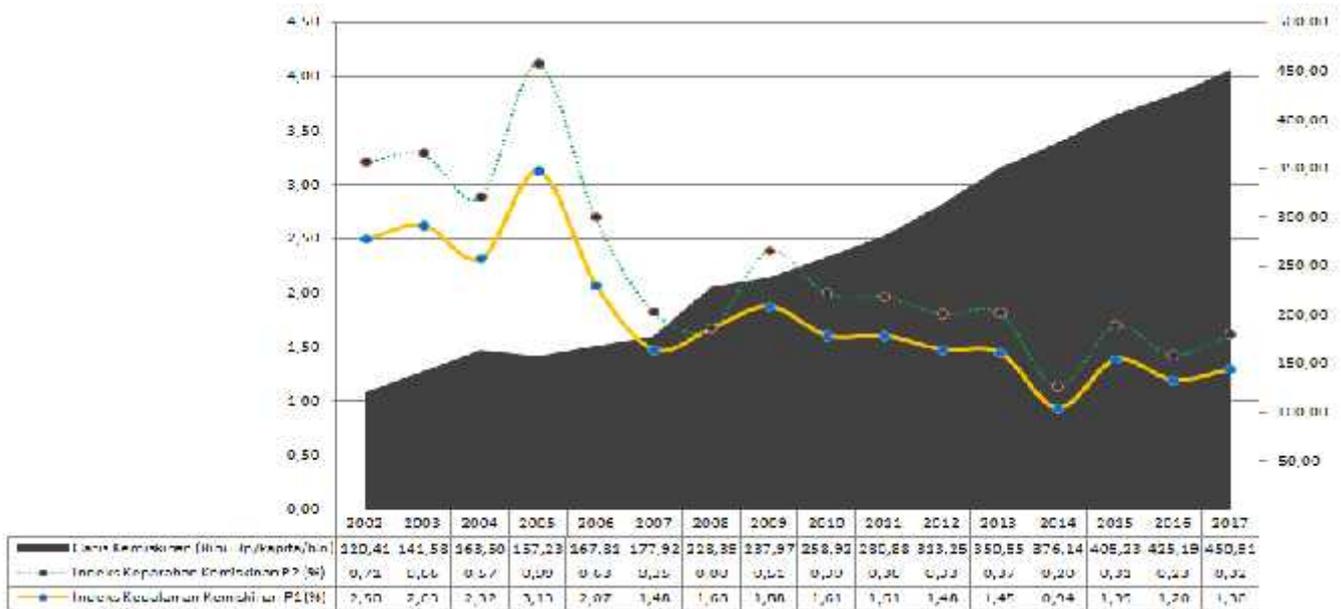


Gambar 2.12. Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang, 2011-2017

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

Tingkat keparahan kemiskinan (P2) juga masih terlihat fluktuatif dan perkembangan dari tahun 2016 ke 2017 semula 0,23 menjadi 0,32. P2 ini dapat dianalisa dengan semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, dan di tahun 2017 terlihat bahwa indeks semakin naik yang mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin bertambah. Peningkatan pendapatan dan konsumsi penduduk miskin harus diupayakan agar setidaknya sama cepat dengan pertumbuhan garis kemiskinan serta merata di seluruh kantong kemiskinan sehingga ketimpangan di antara penduduk miskin tidak semakin melebar.

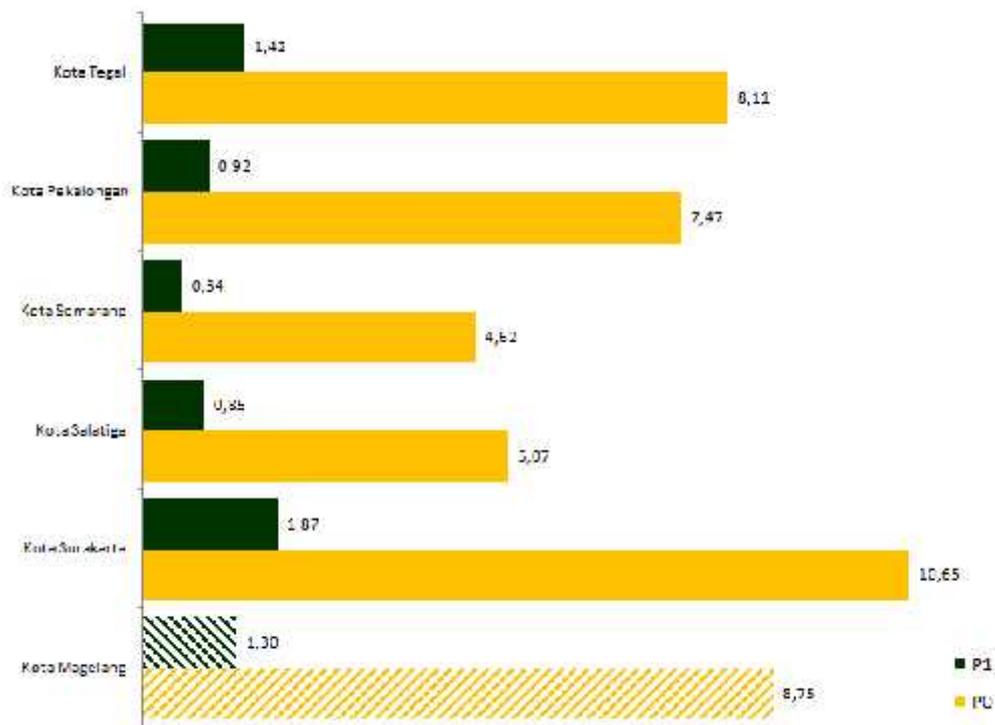


Gambar 2.13. Garis Kemiskinan, P1 dan P2 Kota Magelang, 2002-2017

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Catatan: data tahun 2017 posisi Maret

Di antara enam wilayah kota yang ada di Jawa Tengah, Kota Magelang merupakan daerah perkotaan dengan garis kemiskinan tertinggi. Bahkan dibandingkan dengan seluruh Kabupaten di Jawa Tengah. Persentase penduduk miskin Kota Magelang di tahun 2017 masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Salatiga, Pekalongan, Semarang dan Tegal. Pun demikian dengan indeks kedalaman dan keparahan. Kualitas kemiskinan di Kota Magelang masih lebih rendah dibandingkan dengan Kota Salatiga, Pekalongan dan Semarang.



Gambar 2.14. Persentase Penduduk Miskin (P0) dan Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kota-kota di Jawa Tengah, 2017
 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
 Catatan: data tahun 2017 posisi Maret

2.1.2.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Keterbatasan sampel Sakernas menjadikan indikator ketenagakerjaan tahun 2016 tidak dapat dibreakdown sampai dengan level Kabupaten/Kota. TPT Kota Magelang pada tahun 2017 naik dari tahun 2015 mencapai 6,68%. Pada periode tersebut (2015-2017) terdapat peningkatan jumlah angkatan kerja (AK) sebanyak 2,81% (1.715 jiwa) dengan total AK sebanyak 62.775 jiwa. Kenaikan TPT ini disebabkan bertambah jumlah penduduk yang mencari pekerjaan dari 4,14 % di tahun 2015 menjadi 4,36 % di tahun 2017. Meskipun secara persentase tidak terlalu banyak tetapi secara absolut jumlah tersebut perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Untuk menurunkan angka pengangguran, perlu dilakukan analisa lebih lanjut untuk mencari informasi tentang spesifikasi para pencari kerja sehingga pasar kerja bisa disesuaikan dengan spesifikasi ini. Kenaikan TPT salah satunya juga ditengarai karena pertumbuhan pengangguran terbuka (6,77%) yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja dengan status bekerja (2,54%), meski di satu sisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dalam periode tersebut mengalami kenaikan dari 64,35% di tahun 2015 menjadi 65,32% di tahun 2017. Pasar kerja di wilayah Kota Magelang sangat dibutuhkan agar angka TPT bisa terus berkurang. Untuk itu diharapkan bisa untuk mengarahkan potensi tenaga kerja ini ke dalam wilayah, atau dibuat situasi yang kondusif untuk investasi/industri, sehingga meningkatkan kebutuhan tenaga kerja.

Tabel 2.19. Indikator Ketenagakerjaan di Kota Magelang Tahun 2010-2017

Tahun	Angkatan Kerja (ribu orang)		Angkatan Kerja (ribu orang)	TPT (%)	TPAK (%)
	Bekerja	Pengangguran Terbuka			
2010	53,719	8,226	61,945	13,28	68,46
2011	58,395	7,596	65,991	11,51	71,83
2012	58,542	5,782	64,324	8,99	69,45
2013	59,567	4,313	63,880	6,75	68,37
2014	59,628	4,754	64,382	7,38	68,49

Tahun	Angkatan Kerja (ribu orang)		Angkatan Kerja (ribu orang)	TPT (%)	TPAK (%)
	Bekerja	Pengangguran Terbuka			
2015	57,133	3,927	61,060	6,43	64,35
2016*	na	na	na	na	na
2017	58,582	4,193	62,775	6,68	65,32

Sumber: BPS, 2018

* Tidak ada publikasi

2.1.2.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. TPAK pada tahun 2010 sebesar 68.46% dan pada tahun 2017 sebesar 65.32%, Dalam beberapa tahun ini kisaran angka TPAK masih sebesar 60-an%. Rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja per tahun pada tahun 2010-2014 sebesar 69%. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang usia kerja, yang termasuk Angkatan Kerja kurang lebih 69 orang dan tahun 2015 menurun di sekitar 65 orang. Kondisi ini diindikasikan banyaknya penduduk usia kerja di Kota Magelang yang mencari kerja di luar Kota Magelang untuk bekerja di daerah yang mempunyai kesempatan kerja lebih mapan. Dari data penduduk yang mencari kerja di Kota Magelang juga mengalami peningkatan dari 3.927 di tahun 2015 menjadi 4.193 di tahun 2017. Dibandingkan 2015 jumlah penduduk usia kerja mengalami kenaikan, begitu juga dengan angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Akan tetapi pencari kerja juga mengalami kenaikan sehingga berakibat pada angka TPT yang naik. Hal yang mengembirakan adalah menurunnya jumlah angkatan kerja yang merupakan salah satu indikasi bahwa sudah ada pergeseran bagi penduduk bukan angkatan kerja (yaitu penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga) untuk memberdayakan dirinya dengan bekerja atau mencari pekerjaan. Ada keinginan untuk kelompok ini dalam membantu meningkatkan perekonomian rumah tangganya.

2.1.2.2.6 Angka Beban Tanggungan Penduduk (*Dependency Ratio - DR*)

Pada tahun 2017 diproyeksi penduduk Kota Magelang mencapai 121.673 jiwa tumbuh 0,31% dengan laju pertumbuhan penduduk usia produktif mencapai 0,37%. Berdasarkan proyeksi kependudukan yang dipublikasi oleh BPS Kota Magelang, dapat diketahui bahwa bonus demografi telah dinikmati oleh Kota Magelang sejak tahun 2010, dimana rasio penduduk usia produktif rata-rata mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan penduduk kelompok usia non produktif. Pengendalian jumlah penduduk di Kota Magelang cukup baik dengan laju pertumbuhan penduduk di bawah 0,5% di setiap tahunnya. Angka ketergantungan juga menunjukkan rasio yang semakin rendah dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk usia produktif di Kota Magelang semakin turun.

Tabel 2.20
Indikator Ketenagakerjaan di Kota Magelang Tahun 2010-2017

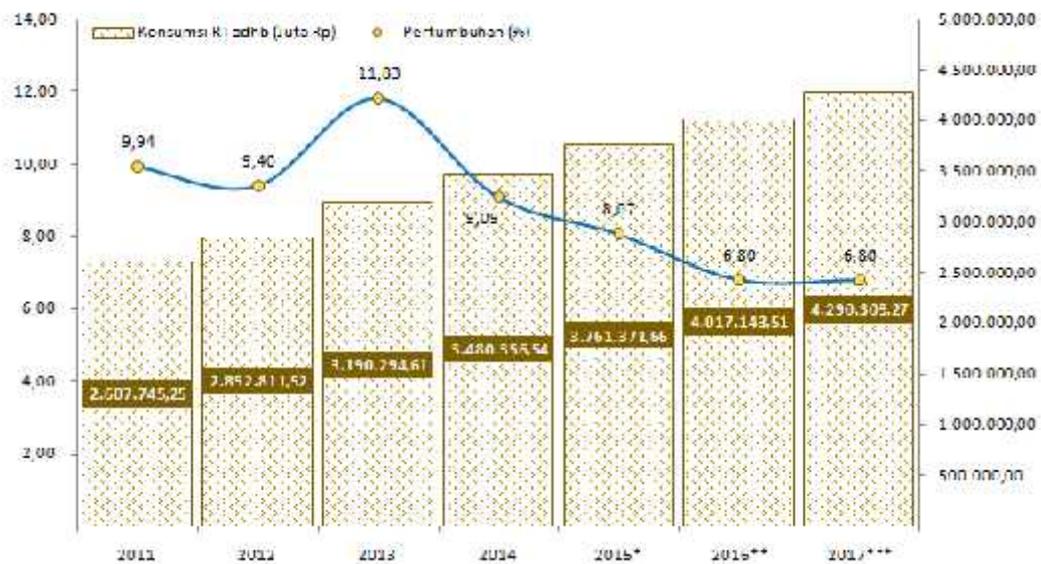
Keterangan	2015	2016	2017
Proyeksi Penduduk Usia 0-14 tahun (jiwa)	26.107	25.897	25.650
Proyeksi Penduduk Usia 15-64 tahun (jiwa)	85.260	85.534	85.851
Proyeksi Penduduk usia 65 ke atas (jiwa)	9.585	9.862	10.171

Proyeksi Penduduk Akhir Tahun (jiwa)	120.952	121.293	121.673
Proyeksi Angka Ketergantungan (%)	41,86	41,81	41,72

Sumber: BPS Kota Magelang, 2018 (diolah)

2.1.2.2.7 Konsumsi Rumah Tangga

Pola konsumsi rumah tangga di Kota Magelang memiliki pertumbuhan positif meski dengan tren menurun sejak tahun 2014. Pada tahun 2016 konsumsi rumah tangga di Kota Magelang mencapai 4,017 triliun Rupiah atau sebesar 58,04% dari total PDRB. Mayoritas konsumsi berasal dari kelompok Makanan, Minuman dan Rokok (31,9%), kelompok Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya (28,53%) dan kelompok Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga (19,53%). Di tahun 2017 diprediksi angka konsumsi ini tumbuh eksponensial sebesar 6,8% dengan nominal 4,290 triliun Rupiah.



Gambar 2-15. Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku dan Pertumbuhannya, 2011-2017
Sumber: BPS, 2017

* Angka sementara ** Angka sangat sementara *** Angka Prediksi
Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Agama

2.1.2.3.1 Seni Budaya

Dari data tentang seni budaya yang tersedia, jumlah organisasi kesenian tahun 2017 di Kota Magelang sebanyak 222 kelompok seni budaya, yang terbagi menurut seni musik, seni tari, seni suara, seni rupa, seni drama, dan seni lainnya. Kelompok-kelompok seni budaya tersebut terdiri dari antara lain: jathilan, calung, keroncong, campursari, rebana, samroh, dangdut, pop, kuda lumping, topeng ireng, kesenian reog, grasak, dayakan, barongsai, kuntulan, kubrosiswo, tarian klasik/modern, paduan suara, geguritan, seni rupa, seni lukis, kethoprak, teater, dagelan, perfilman, dan wayang kulit.

Kelompok seni budaya tersebut tersebar di kelurahan (186 kelompok), binaan sekolah (24 kelompok), dan binaan institusi / lainnya (12 kelompok). Jumlah ini masih belum akurat, karena dimungkinkan masih terdapat kelompok kesenian yang belum terdata, seperti kelompok marching band di sekolah-sekolah. Pengelompokan jumlah seniman juga masih terkendala oleh belum jelasnya definisi dan kriteria seseorang dapat disebut sebagai seniman, selain itu, seorang seniman bisa saja menekuni beberapa bidang seni.

Selain kelompok seni budaya, di Kota Magelang, juga terdapat benda dan/atau bangunan cagar budaya, yang terdiri dari bangunan-bangunan kuno, arsitektur kuno, petilasan, tempat-tempat ziarah, dan sebagainya, yang berjumlah 31 buah.

2.1.2.3.2 Olah Raga

Mulai tahun 2008, Kota Magelang membangun sebuah stadion, yaitu Stadion Madya yang berlokasi di Kelurahan Kramat Selatan. Pada tahun 2015, nama Stadion Madya berganti menjadi Stadion Moch Soebroto. Nama tersebut dipilih dengan maksud untuk mengenang dr. H. Moch Soebroto, mantan Walikota Magelang, yang menjabat tahun 1971-1981. Saat ini, stadion sudah bisa digunakan untuk berlatih dan bertanding cabang olah raga sepak bola dan atletik.

Beberapa klub olah raga yang hidup dan berkembang di Kota Magelang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2 - 21

Cabang Olahraga dan Jumlah Klub di Kota Magelang

No.	Cabang Olahraga	Jml Klub	No.	Cabang Olahraga	Jml Klub
01.	Sepak Bola	5	19.	Sepak Takraw	2
02.	Bulu Tangkis	20	20.	Tenis Lapangan	11
03.	Panahan	1	21.	Gulat	2
04.	Panjat Tebing	4	22.	Golf	3
05.	Basket	16	23.	Judo	1
06.	Angkat Besi Binaraga	2	24.	Catur	2
07.	Tarung Derajat	1	25.	Kempo	3
08.	Tenis Meja	2	26.	Karate	5
09.	Tinju	2	27.	Menembak	1
10.	Wushu	1	28.	Billyard	1
11.	Bridge	2	29.	Pencak Silat	5
12.	Dansa	5	30.	Balap Sepeda	2
13.	Tae Kwon Do	10	31.	Renang	4
14.	Atletik	2	32.	Bola Volly	3
15.	Arung Jeram	1	33.	Senam	32
16.	Judo	1	34.	Selam	1
17.	Futsal	20	35.	Paralayang	1

No.	Cabang Olahraga	Jml Klub	No.	Cabang Olahraga	Jml Klub
18.	Sepatu Roda	1	Jumlah		175

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Magelang

2.1.2.3.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjadi salah satu unggulan dari Kota Magelang, dengan keunggulan kompetitif dari sisi Sumber Daya Manusia. Beberapa warga Kota Magelang telah mengharumkan nama Kota Magelang baik di tingkat Provinsi, Nasional, bahkan Internasional melalui berbagai prestasi yang berhasil diraih, antara lain:

- Andrew S dan Liwiryon Sudarso, siswa SMP Negeri 1 Kota Magelang, memenangkan kontes Imagine Ristek 2011 kategori Rule of Robo Cup tingkat nasional yang diselenggarakan di Jakarta, dan mewakili Indonesia ke kontes robot internasional di Istanbul Turki.
- SMP Negeri 1 Kota Magelang Menduduki peringkat pertama nasional dalam perolehan nilai hasil ujian nasional (UN) 2012/2013, dengan nilai rata-rata hasil UN 9,14.
- Jingga Mutiara, siswa SMP 1 Kota Magelang meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional (OSN) mata pelajaran IPS di Padang akhir Mei 2014. Keberhasilan itu mengulangi prestasi kakak kelasnya, Gabriella Krista Anindit, yang juga meraih medali perak OSN mata pelajaran IPS di Batam tahun 2013.
- Fun Nagede Adinsyah (medali perunggu cabang ekonomi), Kurniawati Yuli Ashari (medali perak, cabang ekonomi), dan Husen Wahyu Adi (medali emas, cabang astronomi). Ketiganya berasal dari SMA Negeri 1 Kota Magelang, mengikuti Olimpiade Sains SMA 2013, yang diselenggarakan oleh ITB.
- Immanuel William Suryowidagdo, siswa SMP Negeri 1 Kota Magelang, meraih peringkat 16 dunia di World Robotic Olimpiade (WRO) Sochi, Rusia (2014).
- Achmad Haulian Yoga, siswa SMP Negeri 1 Kota Magelang, meraih juara matematika Sains dan Bahasa Inggris (MSI) tingkat nasional (2014).
- Pada tahun 2015, 2 siswa SMA Negeri 1 Kota Magelang meraih peringkat 1 pada Olimpiade Sains Nasional, yaitu Nebiba Abdul (bidang Kimia) dan Muhammad Fadlil Ismail (bidang Astronomi).
- Siti Mukaromah, siswa SMK Negeri 2 Kota Magelang, meraih juara 3 Olimpiade Sains Terapan Nasional Siswa SMK bidang lomba Matematika non Teknologi (2015).
- Jingga Mutiara Windyarahma, siswa SMA Negeri 1 Kota Magelang, meraih peringkat 1 Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMA Bidang Kebumihan (2016).
- Annida Naufal Irvania, siswa SMP Negeri 1 Kota Magelang, meraih peringkat 2 Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial (2016).
- Reynaldo Vergiawan Ridho, siswa SLB-B YPPALB, meraih peringkat 1 Lomba Keterampilan Siswa SMALB tingkat Provinsi, Mata Lomba Informasi dan Teknologi (2016).
- Shada Sukma Syahidah, siswa SMP Negeri 1 Kota Magelang, meraih peringkat 1 Lomba Karya Inovasi Pelajar (LKIP) IV SMP tingkat Provinsi dengan Judul Makalah "Sosialisasi Teknik Penjernihan Minyak Jelantah pada Penjual Gorengan di Lingkungan Sekolah".

Selain prestasi yang diraih siswa-siswinya, ada pula prestasi yang diraih warga dari aneka kegiatan terkait IPTEK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Magelang, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang melalui kegiatan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA). Sejak tahun 2005 hingga 2013 (kecuali tahun 2012), temuan KRENOVA Kota Magelang selalu mendapatkan penghargaan 20 besar di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2016 perwakilan Kota Magelang berhasil meraih peringkat 15 dan juara 3 favorit pengunjung laman web Krenova Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai upaya Pemerintah memfasilitasi dan menggali kemampuan sumber daya manusia di lembaga penelitian dan pengembangan baik pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi dan mendorong peran aktif mereka dalam rangka mendukung upaya penyelesaian masalah-masalah pembangunan dalam jangka pendek dan menengah, maka mulai tahun 2010 Pemerintah Kota Magelang melaksanakan kegiatan Riset Unggulan Daerah (RUD). Selain itu, RUD dilaksanakan dalam rangka membangun jaringan keterpaduan kerjasama antara peneliti dalam bidang yang sama dan menumbuhkan kapasitas inovasi sejalan kemajuan teknologi, dan memanfaatkan berbagai sumberdaya riset yang tersedia di daerah untuk kegiatan litbang daerah. Aplikasi RUD yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2016 sebagaimana Tabel 2-37 berikut:

Tabel 2. 22
Daftar Hasil Riset Unggulan Daerah

Tahun	Judul
2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangkit Listrik Terbaru Hybrid Convertible Tenaga Angin dan Matahari untuk Lampu Penerangan yang Tidak Terganggu Kondisi Listrik Byar Pet dari PLN; 2. Peningkatan Pendapatan Petani Bercocok Tanam Tumpang Sari; 3. Pengembangan Model Penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan Dasar di Kota Magelang.
2011	Perakitan dan pembuatan kendaraan Spyder, bekerjasama antara BPPT-Putra Agung Setia dan Pemerintah Kota Magelang.
2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi / pemanfaatan LPG kemasan tabung 12 kg untuk bahan bakar kendaraan sebagai solusi penghematan energi sektor transportasi; 2. Tabulampot pada Berbagai Ukuran Pot dan Dosis Pupuk NPK Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Strawberry guna Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kota Magelang; 3. Pembangkit Tenaga Mikrohidro Model Drum.
2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Program Magelang Kota Sejuta Bunga sebagai Dasar Perancangan Model Pemberdayaan Masyarakat "Multi Directional Cycle". 2. Pemanfaatan Tong "Takashimura" untuk Pembuatan Kompos dalam Skala Rumah Tangga bagi Warga Tidar Baru RT 01/XI Magersari, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang. 3. Menggali Potensi Aliran Sungai sebagai Sumber Energi Alternatif Terbarukan. Studi Kasus: Aliran Kali Manggis dan Kalibening Kota Magelang.

Tahun	Judul
2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi Masyarakat terhadap City Branding Magelang Kota Sejuta Bunga dan Model Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal. Studi kasus: Peserta didik dan pendidik di lingkungan Dinas Pendidikan Menengah Umum Kota Magelang. 2. Kajian Daya Guna Mesin Pencacah Sampah Organik. 3. Videotron dalam Percepatan Pembangunan. Studi kasus: Peran Videotron dalam Percepatan Pembangunan Kota Magelang.
2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektifitas Pelatihan Kerja dalam Pengurangan Pengangguran Kota Magelang. 2. Pengembangan Residu Sampah Plastik Kota Magelang menuju Ketahanan Energi Kota Magelang. 3. Pengaruh Penataan Kuliner Kota Magelang terhadap Pendapatan Masyarakat.
2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Parkir Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang. 2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Gunung Tidar sebagai Destinasi Wisata.

Sumber: Kantor Litbang dan Statistik, 2017

Prestasi lainnya yang diraih Pemerintah Kota Magelang dalam bidang IPTEK dan penerapannya adalah:

- 1) Anugerah prestasi tertinggi di tingkat nasional di bidang IPTEK, yaitu penghargaan Anugerah RISTEK dari Pemerintah Pusat selama 3 tahun berturut-turut (2009-2011). Penghargaan ini diberikan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota yang telah menunjukkan kontribusi optimal dalam membangun IPTEK, sebagai dasar penyelesaian masalah-masalah aktual yang dihadapi daerah guna mendorong daya saing daerah. Pada tahun 2012 penghargaan yang sebelumnya diberikan kepada Kabupaten/kota dialihkan pada Provinsi, sehingga pemerintah Kota Magelang tidak memiliki peluang mendapatkan Anugerah RISTEK. Pada tahun 2016, penghargaan ini kembali dilaksanakan, dan Kota Magelang berhasil menjadi nominator / finalis (3 besar) peraih penghargaan Budhipraja, serta meraih penghargaan Widigdapura.

Budhipraja adalah apresiasi pemerintah melalui Kemenristekdikti terhadap kabupaten / kota dalam mengimplementasikan teknologi untuk peningkatan daerah yang diukur dalam 6 aspek, yaitu perencanaan dan inisiasi, SDM, infrastruktur, jaringan, dan hasil inovasi.

Widigdapura adalah anugerah yang diberikan kepada pemerintah kabupaten / kota atas dasar pembinaannya terhadap pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna di kabupaten / kota dalam mengembangkan komoditas unggulan daerahnya sehingga meningkatkan daya saing daerah. Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, terpilih nominasi daerah Pemanfaat Teknologi Tepat Guna terbaik di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Magelang, Kabupaten Karang Anyar, Kabupaten Wonogiri dan Kota Magelang sebagai Daerah Pemanfaat Teknologi Tepat Guna di Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2016.

- 2) Penghargaan 102 Inovasi (tahun 2010),
- 3) Penghargaan 103 Inovasi (tahun 2011), dan
- 4) Best Practice APEKSI, 2012

Dari sisi pelayanan masyarakat, Pemerintah Kota Magelang juga telah melengkapi diri dengan beragam teknologi demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, beberapa di antaranya adalah:

- Web resmi Pemerintah Kota Magelang, untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat secara cepat.
- Web resmi SKPD, dimana di dalam website tersebut terdapat aplikasi dan informasi untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
- Penggunaan Sistem Informasi untuk meningkatkan kecepatan dan keakuratan layanan, seperti e-KTP (KTP Elektronik), SIMPUS (SIM PUSKESMAS), Perijinan, SIM Keuangan, DataGO, dan lain-lain.
- Free-access WiFi & Internet di beberapa tempat umum, seperti Alun-alun.
- Traffic Management Center, yang memantau kondisi lalu lintas di beberapa titik dengan menggunakan CCTV.
- Media sosial Facebook dan Twitter untuk berkomunikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

2.1.2.3.4 Agama

Sikap toleransi saling menghargai antar umat beragama di Kota Magelang merupakan salah satu kunci harmonisnya umat beragama di Kota Magelang. Rasa kebersamaan tanpa memandang status agama di Kota Magelang menjadi tolok ukur keberhasilan hidup bersama. Sebagian besar penduduk Kota Magelang beragama Islam sebanyak 84,53%, Kristen Protestan sebanyak 9,47%, Kristen Katolik sebanyak 5,40%, Hindu sebanyak 0,11 %, Budha sebanyak 0,47%, Kong Huchu 0,01%, dan lainnya 0,01%.

Kerukunan antar umat beragama di Kota Magelang dapat dilihat dari jarak antara tempat ibadah berbagai agama yang tidak pernah ada perselisihan ataupun perbuatan yang saling merugikan. Menurut data tahun 2016, jumlah masjid sebanyak 153 buah, musholla sebanyak 217 buah, gereja Katolik sebanyak 2 buah, gereja Protestan sebanyak 26 buah, vihara ada 2 buah dan klenteng sebanyak 2 buah, serta rumah ibadah ada 4 buah. Suasana kondusif seperti ini tentu sejalan dengan dengan Visi Kota Magelang, yaitu "Terwujudnya Kota Magelang sebagai kota jasa yang modern dan cerdas yang dilandasi masyarakat yang sejahtera dan religius"

Pada tahun 2016, jemaah yang berangkat ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan ibadah haji berjumlah 160 orang yang terdiri dari 69 pria dan 91 wanita, dengan rentang usia 29 – 82 tahun. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 147 orang.

2.1.3 ASPEK LAYANAN UMUM

2.1.3.1 Fokus Urusan Pelayanan Wajib

2.1.3.1.1 Pendidikan

Pada hakikatnya pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

Dalam upaya mewujudkan pembangunan di bidang pendidikan, Pemerintah Kota Magelang melaksanakan urusan pendidikan melalui berbagai program dan kegiatan yang termasuk dalam Misi 5 RPJM Kota Magelang Tahun 2016-2021

yaitu: Mendorong Peningkatan derajat kesehatan, pengembangan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif dan memiliki etos kerja yang tinggi. Kinerja urusan Pendidikan diukur melalui 10 program 36 indikator yang terdistribusi dalam 8 sasaran, dengan capaian sampai dengan Semester II Tahun 2017 terlihat pada tabel di sebagaiberikut :

Tabel 2 - 23
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja		Kinerja	Status Capaian
			RPJM	RKPD Tahun 2017		RKPD	
			s.d.2021	Target	Capaian	Th.2017	
			2017	2017			
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	69%	65%	89.69%	137,98%	●
		Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	56%	51%	51%	100%	●
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/SDLB/MI/Paket A	100%	98.61%	82.48%	84%	
		APK SD/SDLB/MI/Paket A	120%	112%	126.70%	113.12%	●
		APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	84%	76.00%	74.96%	99%	
		APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	100%	85.00%	94.19%	111%	●
		Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12	0,13%	1:136	1 : 151	108%	●
		Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15	0,24%	1:290	1 : 268	94%	
		Rasio guru SD terhadap murid SD	1:16	1:16	1:16	100%	●
		Rasio guru SMP terhadap murid SMP	1:14	1:14	1 : 14	100%	●
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,01	0.01	0.01%		●
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,04	0.13	0.09%		●
		Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun	0,001	0,002	0.0005		●
		Angka Melanjutkan SD ke SMP	0,001	150%	149.67%	99.78%	
		Angka Melanjutkan SMP ke SMA	150%	155%	144.31%	93%	
		Persentase sekolah yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	80%	60%	100%	167%	●
Penurunan jumlah kenakalan pelajar	24pelajar	46 pelajar	44 pelajar		●		
Adanya kebijakan muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa	1	0	0	0	●		

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja		Kinerja	Status Capaian
			RPJM	RKPD Tahun 2017		RKPD	
			s.d.2021	Target 2017	Capaian 2017	Th.2017	
		Prosentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang di implementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan	100%	80%	100%	125%	●
		Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah	95%	85%	100%	118%	●
		Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design	60%	20%	50%	250%	●
3	Program Pendidikan Non Formal	Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	97,95%	96.67%	98.57%	102%	●
		Angka lulus pendidikan kesetaraanPaket A	100%	100%	100%	100%	●
		Angka lulus pendidikan kesetaraanPaket B	100%	100%	100%	100%	●
		Angka lulus pendidikan kesetaraanPaket C	100%	100%	100%	100%	●
		Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	30%	10.00%	29.5%	295%	●
		Jumlah Juara FASI	-	-	1	100%	●
		Jumlah Juara MTQ	2	1	0	0%	
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	36,25%	35.75%	72.61%	206%	●
		Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	14,53%	14.23%	45.21%	326%	●
		Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	88%	86%	84.27%	97.98%	
		Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	55,15%	54.15%	47.52%	89%	
		Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95,40%	95.20%	94.65%	99.42%	
		Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik	68,67%	67.97%	61.62%	92%	
		Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi	80%	60%	100%	167%	●
		Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	80%	60%	100%	167%	●
5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke Desa Buku	2.000	2,000	913	46%	
		Persentase perpustakaan sekolah yang memenuhi standar	100%	80%	72%	90%	

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja		Kinerja	Status
			RPJM	RKPD Tahun 2017		RKPD	
			s.d.2021	Target	Capaian	Th.2017	
			2017	2017			
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang Propinsi dan Nasional	52	44			
		- Provinsi	34	30	14	47%	
					pelajar		
		- Nasional	18	14	6	42.85%	
					pelajar		
		Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	97%	88%	98.70%	112%	●
		Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B	100%	96%	95.45%	99%	
7	Program Pendidikan Berkelanjutan	Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/MTs	90%	30%	100%	333%	●
		Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi	85%	20%	100%	500%	●
		Persentase pembina pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar	100%	66.34%	65%	98%	
8	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching	60%	40%	75%	188%	●

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 100% target 2017 atau 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 80% target 2017 atau 80 % target RPJMD)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari total 46 indikator urusan pendidikan, 30 indikator di antaranya mampu memenuhi atau bahkan melebihi targetcapaian kinerja.

Sedangkan12 indikator capaian kinerja belum tercapai tetapi optimis akan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD tahun 2021. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal-hal sebagai berikut:

1) APM SD/SDLB/MI/Paket A

APM SD/SDLB/MI/Paket A (Target 98,61%, Realisasi 82,48%), target tidak tercapai di akhir tahun 2017 disebabkan menggunakan definisi operasional jumlah siswa usia 7-12 tahun kota magelang dibagi jumlah penduduk kota magelang usia 7-12 tahun. Sedangkan pada jenjang Sekolah Dasar banyak siswa yang berusia 6 tahun. Untuk jumlah penduduk menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

2) APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B

APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (Target 84%, Realisasi 74,96%), target tidak tercapai di akhir tahun 2017 disebabkan menggunakan definisi operasional jumlah siswa usia 12-15 tahun kota magelang dibagi jumlah penduduk kota magelang usia 12-15 tahun. Untuk jumlah penduduk menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS)

3) Rasio Sekolah SMP terhadap Penduduk usia sekolah 12 – 15

Rasio Sekolah SMP terhadap Penduduk usia sekolah 12 -15 (Target 1:290, Realisasi 1:268), target tidak tercapai disebabkan oleh tidak adanya program penambahan pembangunan Unit Sekolah Baru SMP. Dari 23 Sekolah SMP di kota magelang melayani 6.175 siswa. Sedangkan jumlah penduduk usia 12-15 tahun di Kota Magelang semakin berkurang, dan pada sebagian usia 12 tahun masih menjadi siswa pada jenjang Sekolah Dasar.

4) Angka Melanjutkan SD ke SMP

Angka Melanjutkan SD ke SMP (Target 150%, Realisasi 149,67%), target tidak tercapai hanya kurang 0,33% disebabkan oleh berkurangnya jumlah lulusan SD yang masuk ke jenjang SMP, namun demikian dapat dipastikan bahwa seluruh lulusan SD semuanya dapat tertampung di jenjang SMP.

5) Angka Melanjutkan SMP ke SMA

Angka Melanjutkan SMP ke SMA (Target 155%, Realisasi 144,31%), target tidak tercapai masih kurang 10,69% disebabkan karena lulusan SMP melanjutkan sekolah ke Sekolah Kejuruan/SMK. Namun demikian karena adanya sistem Zonasi pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru sebagian siswa lulusan SMP yang berdomisili dari luar Kota tidak dapat melanjutkan sekolah ke SMA di Kota Magelang.

6) Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (Target 86%, Realisasi 84,27%), target tidak tercapai masih kurang 1,73%. Dari data Guru SD yang berjumlah 909 sudah 766 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, dan masih 143 Guru SD yang belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Hal ini disebabkan Guru yang belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV yang usianya menjelang pensiun enggan untuk melanjutkan studi S1/D-IV.

7) Persentase Guru SD bersertifikat Pendidik

Persentase Guru SD bersertifikat Pendidik (Target 53%, Realisasi 47,52%), target tidak tercapai masih kurang 5,48%. Dari data Guru SD yang berjumlah 909 baru 432 Guru yang bersertifikat pendidik. Hal ini disebabkan karena adanya jumlah Guru SD yang bersertifikat pendidik banyak yang pensiun dan adanya perubahan mekanisme yang semakin ketat dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud bagi Guru untuk memperoleh sertifikat pendidik.

8) Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (Target 95%, Realisasi 94,65%), target tidak tercapai masih kurang 0,35%. Dari data Guru SMP yang berjumlah 766 sudah 725 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, dan masih 41 Guru SMP yang belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Hal ini disebabkan Guru yang belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV yang usianya menjelang pensiun enggan untuk melanjutkan studi S1/D-IV.

9) Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik

Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik (Target 67%, Realisasi 61,62%), target tidak tercapai masih kurang 5,38%. Dari data Guru SMP yang berjumlah 766 baru 472 Guru yang bersertifikat pendidik. Hal ini disebabkan adanya

perubahan mekanisme yang semakin ketat dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud bagi Guru untuk memperoleh sertifikat pendidik.

10) Persentase perpustakaan sekolah yang memenuhi standar

Persentase perpustakaan sekolah yang memenuhi standar (Target 80 %, Realisasi 72 %) belum dapat mencapai target capaian kinerja karena :

- a. Ukuran Ruang Perpustakaan belum memenuhi standar (1,5 Ruang Kelas)
- b. Jumlah koleksi buku masih kurang
- c. Belum tersedianya ruang baca yang memadai
- d. Belum adanya fasilitas pendukung perpustakaan yang memadai
- e. Kurangnya tenaga Pustakawan menyebabkan pengelolaan perpustakaan belum profesional
- f. Kurang optimalnya peran Asosiasi Tenaga Perpustakaan Indonesia (ATPUSI)
- g. Standar Pembangunan Ruang Perpustakaan pada saat pembangunan yang bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) berbeda dengan standar yang ditetapkan sekarang pada Standar Sarana Prasarana oleh BSNP Kemendikbud

11) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B

Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B dari target 96% Realisasi 95,45% atau Capaian kerjanya kurang 0,55% hal ini disebabkan karena adanya salah satu Sekolah SMP Swasta yang nilai akreditasinya kurang atau sekolah tersebut sudah tidak layak untuk beroperasi.

12) Persentase pembina pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar

Persentase pembina pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar (Target 66,34%, Realisasi 65%), target tidak tercapai disebabkan oleh terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan kursus mahir dasar pada tahun 2017. Adapun kursus mahir dasar pramuka bagi pembinaan pramuka diselenggarakan di beberapa sekolah melalui fasilitasi anggaran Bosda.

Disisi lain terdapat 4 indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai target realisasi. Kinerja keempat indikator ini belum memuaskan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1) Jumlah Juara MTQ

MTQ Tingkat Provinsi belum bisa memenuhi ekspektasi meraih predikat meskipun sudah dilaksanakan pembinaan baik dari Pemerintah Kota Magelang maupun Pembinaan yang telah dilaksanakan BAZNAS Kota Magelang

2) Jumlah Kunjungan ke Desa Buku

Jumlah kunjungan ke Desa Buku (Target 2.000 orang, Realisasi 913 orang), yang baru tercapai 45,65% target tidak tercapai disebabkan oleh :

- a. Pengelolaan desa buku belum optimal.
- b. Aset desa buku tercatat di Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang, sedangkan pengelolaannya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan
- c. Untuk bisa mengakses Desa Buku, Pengunjung harus melalui pintu masuk Taman Kyai Langgeng, sehingga harus membeli tiket terlebih dahulu.

- d. Masyarakat lebih memilih bacaan berbasis online
 - e. Kekurangan sumber daya manusia, terutama yang laki-laki.
- 3) Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang Provinsi dan Nasional

Jumlah Pelajar yang berpertasi pada ajang Provinsi dan Nasional dari Target 30 di jenjang Provinsi baru tercapai 14 dan di jenjang Nasional dari target 14 baru tercapai 6 hal tersebut disebabkan oleh :

- a. Target ditentukan masih mengikutkansertakan capaian prestasi pada sekolah SMA/SMK, sedangkan pada tahun 2017 Kewenangan pengelolaan SMA/SMK menjadi kewenangan Provinsi.
- b. Kurangnya pembimbingan dari tenaga Ahli/Profesional dari kalangan akademisi Perguruan Tinggi untuk Lomba Olimpiade Sains Nasional untuk Cabang Matematika, IPA dan IPS
- c. Kompetisi perseorangan yang sangat ketat untuk Lomba di Tingkat Provinsi dan Nasional. Namun demikian selain lomba perseorangan untuk Lomba-lomba yang kelembagaan untuk prestasi Ujian Sekolah Berstandar Nasional/USBN SD Tahun 2017 peringkat 1 (satu) Provinsi Jawa Tengah , SD Tarakanita menjadi Sekolah Adi Wiyata Tingkat Nasiona dan SMP Negeri 1 Kota Magelang untuk Ujian Nasional/UN meraih peringkat 1 (satu) Provinsi Jawa Tengah.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2018 adalah dengan mempertahankan capaian yang sudah sesuai track serta memastikan solusi bagi indikator yang yang belum tercapai terutama bagi indikator yang perlu upaya keras.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Indikator kinerja urusan kesehatan melibatkan 41 (empat puluh satu) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 24
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM Sd.2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.	1. Persentase kesiediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100%	100%	100%	100%	●
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase alat laboratorium terkalibrasi	100%	100%	100%	100%	●
		2. Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%	<20%	30,53%		
		3. Proporsi Kasus Diabetes Mellitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%	<45%	8,04%		●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM Sd.2021	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2017		Kinerja RKPd Th.2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
		4. Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15%	<15,4%	4,28%		●
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1. Cakupan pengawasan obat dan makanan	75%	68%	70%	102,9%	●
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	98%	97%	95,96%	98,92%	
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	●
		2. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	●
		3. Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0,31%	<0,31%	0,19%		●
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase rumah sehat	86,1%	84%	53,92%	64,19%	
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100%	100%	100%	100%	●
		Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100%	100%	100%	100%	●
		Angka Kesakitan DBD	<50	<50	54,65		
		Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<101	<105	156		
		Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90	90	47%	52,22%	
		Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0,5%	<0,5%	0,03%		●
		Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%	100%	100%	100%	●
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	100%	75%	100%	133,3%	●
		Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah terakreditasi	92.5%	40%	100%	250%	●
		Persentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin	100%	75%	100%	133%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja		Kinerja	Status Capaian
			RPJM	RKPD Tahun 2017		RKPD	
			Sd.2021	Target 2017	Capaian 2017	Th.2017	
		Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan	80%	100%	100%	100%	●
		Persentase kecamatan yg memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	100%	60%	100%	166,66%	●
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	90%	65%	100%	153,84%	●
9	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan	100%	100%	100%	100%	●
		Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	●
		Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin	15%	15%	4,80%	32%	
10	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi universal design	50%	10%	39,68%	396,8%	●
11	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif tingkat mandiri	76,47%	52,94%	52,94%	100%	●
12	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%	85%	100%	117,6%	●
		Cakupan Kunjungan Bayi	96%	96%	100%	104,16%	●
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%	90%	91%	101,11%	●
		Cakupan Puskesmas Ramah Anak	35,29%	12%	100%	833,33%	●
13	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	80%	75%	70,1%	93,46%	

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja		Kinerja	Status
			RPJM	RKPD Tahun 2017		RKPD	
			Sd.2021	Target	Capaian	Th.2017	
			2017	2017			
		Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	35,29%	12%	100%	833,3%	●
14	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase TUPM yang memenuhi syarat kesehatan	90%	86%	86%	100%	●
15	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%	95%	93,60%	98,52%	
		Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	●
		Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	95%	92%	100%	108,69%	●
		Cakupan Pelayanan Nifas	100%	100%	99,90%	99,93%	
16	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	AA	A	A	100%	●

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2017

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 100% target 2017 atau 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 80% target 2017 atau 80 % target RPJMD)

Dari ke-41 indikator kinerja urusan kesehatan, terdapat 31 indikator yang telah mencapai target yaitu indikator Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas, Persentase alat laboratorium terkalibrasi, Proporsi Kasus Diabetes Mellitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun, Cakupan pengawasan obat dan makanan, Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat, Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin, Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, Prevalensi Balita Gizi Buruk, Kelurahan UCI (Universal Child Immunization), Penemuan dan Penanganan Penderita DBD, Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun, Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS, Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar, Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah terakreditasi, Persentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin, Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan, Persentase kecamatan yg memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi, Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar, Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan, Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin, Persentase sarana kesehatan yang memenuhi universal design, Persentase kelurahan siaga aktif tingkat mandiri, Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani, Cakupan Kunjungan Bayi, Cakupan Pelayanan Anak Balita, Cakupan Puskesmas Ramah Anak, Cakupan Puskesmas Ramah

Lansia, Persentase TUPM yang memenuhi syarat kesehatan, Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani, Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN), Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan. Masing masing indikator kinerja memiliki capaian kinerja sempurna 100 % atau lebih.

Sedangkan 5 indikator akan tercapai, yaitu indikator Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat dengan kinerja capaian baru mencapai 98,92%. Hal ini disebabkan Karena masih ditemukannya anggota rumah tangga yang merokok di rumah. Cakupan Pelayanan Nifas dengan kinerja capaian baru mencapai 99,93% hal ini disebabkan adanya kasus kematian ibu sebanyak 3 orang. Indikator Angka Kesakitan DBD dengan kinerja capaian baru 91,49% (masih terdapat 66 penderita DBD). Indikator Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya dengan kinerja capaian baru 93,46% . Indikator Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4 dengan kinerja capaian baru 98,52% hal ini disebabkan adanya ibu-ibu yang hamil di pertengahan tahun sehingga belum mencapai kunjungan keempat sampai dengan akhir tahun. Namun demikian indikator kinerja ini optimis akan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD tahun 2021.

Disisi lain terdapat 5 indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai target realisasi yaitu indikator Persentase rumah sehat, Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan, Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB, Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB dan Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin. Kinerja kelima indikator ini belum memuaskan karena terdapat kendala antara lain sebagai berikut :

- 1) Indikator Persentase rumah sehat dengan kinerja capaian baru 64,19%. Capaian ini turun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 101,7% hal ini disebabkan perubahan cara penilaian rumah sehat di Tahun 2017 yaitu mensyaratkan jamban sehat. Dalam hal ini dari sejumlah rumah yang diambil sampelnya, beberapa rumah ditemukan tidak memiliki jamban sehat.
- 2) Indikator Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan dengan kinerja capaian 30,53%, masih lebih tinggi dari target Tahun 2017 yaitu <20%. Hal ini disebabkan karena perilaku hidup masyarakat yang kurang sehat, seperti kurang melakukan aktifitas fisik dan pola konsumsi makanan yang kurang seimbang.
- 3) Indikator Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB dengan kinerja capaian 156, masih lebih tinggi dari target yaitu <105. Hal ini menunjukkan masih cukup tingginya penemuan kasus TB di masyarakat. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya TB yang sangat mudah menular dan tidak segera berobat meskipun sudah ada gejala TB.
- 4) Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB dengan capaian 47% turun dari pencapaian Tahun 2016 sebesar 63,80%. Hal ini disebabkan karena penghitungan pada Tahun 2017 sudah memilah antara penderita TB dari dalam Kota dan luar Kota Magelang. Tingkat kesadaran masyarakat untuk berobat TB yang masih rendah dan adanya masyarakat yang berobat ke dokter mandiri, sehingga tidak ada laporan adanya kasus TB juga mempengaruhi indikator ini.
- 5) Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin dengan kinerja capaian 4,80%. Hal ini disebabkan Karena penanganan terhadap pasien masyarakat miskin sudah diselesaikan pada sarana kesehatan strata 1 atau puskesmas, sehingga tidak perlu dirujuk lagi ke sarana kesehatan strata 2 dan 3 atau rumah sakit.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2018 adalah dengan mempertahankan capaian yang sudah sesuai track serta memastikan solusi bagi indikator yang belum tercapai terutama bagi indikator yang perlu upaya keras antara lain dengan upaya sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi dan Pemicuan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM) yaitu upaya dalam rangka percepatan peningkatan akses terhadap sanitasi dasar di Indonesia sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2015-2019 adalah tersedianya universal access atau cakupan akses sebesar 100% untuk air minum dan juga sanitasi dengan cara melakukan pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
- 2) Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yaitu dengan melaksanakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Pelaksanaan GERMAS harus dimulai dari keluarga, karena keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk kepribadian. GERMAS dapat dilakukan dengan cara: Melakukan aktifitas fisik, Mengonsumsi sayur dan buah, Tidak merokok, Tidak mengonsumsi alkohol, Memeriksa kesehatan secara rutin, Membersihkan lingkungan, dan Menggunakan jamban. Pada tahap awal, GERMAS secara nasional dimulai dengan berfokus pada tiga kegiatan, yaitu: 1) Melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, 2) Mengonsumsi buah dan sayur; dan 3) Memeriksa kesehatan secara rutin.
- 3) Memberdayakan masyarakat melalui program "Ketuk Pintu" yaitu dengan memanfaatkan kader kesehatan masyarakat yang terdapat di tiap-tiap kelurahan untuk bisa mendeteksi apabila ada warga masyarakat yang suspect TB dan menghimbau agar berobat atau memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk kemudian melaporkannya ke Dinas Kesehatan atau Puskesmas di wilayahnya.
- 4) Sosialisasi kepada petugas rumah sakit, puskesmas dan dokter praktek swasta agar melaporkan kepada Dinas Kesehatan apabila ditemukan kasus TB.

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi penanganan sub urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Jalan dan Penataan Ruang. Kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijabarkan per sub Urusan antara lain ditunjukkan dengan program-program serta indikator program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2 - 25
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2017

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM	Capaian Kinerja RKPD		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
			s.d. 2021	Target 2017	Capaian 2017		
1.	Program Pembangunan jalan dan Jembatan	1. Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	2.242 meter	942 meter	1.192 meter	126%	●
		2. Persentase panjang trotoar dalam kondisi	71,9%	64,39%	65,12%	101%	●

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
		baik					
2.	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1. Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	89%	85%	85%	100%	●
		2. Jumlah shipon yang dibangun	10 bh	6 bh	7 bh	116%	●
3.	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	1. Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan	80%	72%	75%	104%	●
4.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	1. Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	100%	81%	81%	100%	●
5.	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1. Persentase kawasan strategis yang terbangun	4 kawasan	2 kawasan	3 kawasan	150%	●
6.	Program pengembangan wilayah perbatasan	1. Persentase sarana prasarana wilayah perbatasan dalam kondisi baik	0%	0%	0%	0%	●
7.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1. Prosentase ketersediaan sarana prasarana kebinamargaan	100%	92,85%	90%	96,93%	●
8.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	1. Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	96%	86,49%	93%	107,52%	●
		2. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	95%	86%	90%	104,65%	●
9.	Program pembinaan dan pengembangan bangunan gedung	1. Prosentase perencanaan bangunan gedung yang layak fungsi	100%	100%	75%	75%	▶
		2. Prosentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas	60%	40%	40%	100%	●
10.	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	1. Prosentase peningkatan kualitas					●

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM	Capaian Kinerja RKPD		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
			s.d. 2021	Target 2017	Capaian 2017		
		pelaksanaan jasa konstruksi meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu, efisien)	25%	25%	12,5%	85,71%	

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2016 100% target 2016 atau 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2016 >80% target 2016 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2016 80% target 2016 atau 80 % target RPJMD)

Indikator Panjang Jalan Penghubung baru yang dibangun dengan target 942 meter capaian kinerjanya melebihi target dengan total panjang jalan baru yang dibangun 1.192 meter, pada tahun ini jalan penghubung baru yang dibangun yaitu jalan penghubung Jalan Tentara Genie Pelajar dengan Perumahan Ngembik dan Jalan Penghubung Jalan Jend. Sudirman dan Jalan Sarwo Edhie Wibowo.

Indikator prosentase panjang trotoar dalam kondisi baik dengan target 64,39%, capaian kinerjanya 65,12% atau 101% melebihi target. Berarti dengan total panjang trotoar kota Magelang sepanjang 237.830 meter, yang kondisinya baik sepanjang 154.875 meter, Hal ini dapat diraih dikarenakan pada Tahun 2017 Kota Magelang mendapat dana Bantuan Keuangan Provinsi dan DAK untuk membangun jalan berikut sarpras pendukung jalan dan drainase.

Indikator prosentase panjang drainase dalam kondisi baik dengan target 85% capaian kinerjanya juga 85% atau tercapai 100% hal ini berarti dengan total panjang drainase 237.830 meter, yang kondisinya baik sepanjang 202.156 meter, untuk mencapai target 100% kegiatan yang dilaksanakan selain dari dana bantuan keuangan provinsi dan DAK, juga dianggarkan dengan dana APBD Kota Magelang diantaranya adalah pembuatan afur dan bak kontrol Jalan Ikhlas, pembangunan saluran Jl. Singosari, Jalan Tidar Salakan, sedangkan yang dibangun dengan dana bantuan keuangan provinsi adalah peningkatan saluran drainase jalan Beringin IV.

Indikator jumlah shipon yang dibangun dengan target 0 buah capaian kinerjanya 1 buah, hal ini artinya dari jumlah existing shipon 6 buah dibangun di 2017 menjadi 7 buah, shipon yang dibangun adalah shipon Kelurahan Magelang.

Indikator saluran irigasi dalam kondisi baik dengan target 81% mencapai target 81% atau 100%, hal ini berarti dari panjang saluran irigasi Kalikota yang menjadi kewenangan Kota Magelang sepanjang 5.000 meter, yang dalam kondisi kurang baik yaitu 950 meter, yang menjadi kendala dalam pemeliharaan irigasi adalah masih adanya rumah-rumah liar dan bangunan fasum diatas saluran di sepanjang kali kota serta penyempitan saluran disisi selatan.

Indikator persentase kawasan strategis yang terbangun dengan target 2 kawasan yang dibangun, capaian kinerjanya membangun 3 kawasan strategis atau 150% dari target, 3 (tiga) kawasan strategis yang dibangun adalah:

1. kawasan Gunung Tidar membangun monumen wisata Budaya Gunung Tidar berikut tamannya dan lapangan voli.

2. Kawasan Mantyasih, membangun gapura keluar mantyasih dan melebarkan jembatan menuju mantyasih.
3. Kawasan sport center sanden, yaitu merehab GOR dan menambah tiang lampu stadion Moh. Subroto.

Untuk indikator Persentase sarana prasarana wilayah perbatasan dalam kondisi baik capaian kerjanya 0% karena pada tahun anggaran 2017 target kerjanya 0% di RPJMD sehingga tidak dilaksanakan kegiatan.

Indikator prosentase ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan dari target 92,85% capaian kerjanya hanya mencapai 90% atau 96,93% hal ini dikarenakan dari kondisi 17 unit alat berat yang berfungsi sebanyak 15 unit.

Indikator prosentase jumlah jembatan dalam kondisi baik dengan target 86,49% capaian kerjanya mencapai 93% atau 107,52% dengan artian dari total jumlah 74 buah jembatan yang kondisinya baik sejumlah 69 buah. Untuk tahun 2017 jembatan yang dibangun yaitu jembatan rumkit dr. Soedjono, jembatan jalan Tentara Genie Pelajar, Jembatan Kalimas dan Jembatan Kel. Kedungsari.

Indikator persentase panjang jalan dalam kondisi baik dari target 86% capaian kerjanya sebesar 90% atau melebihi target 104,65% berarti dengan total panjang jalan sepanjang 118.915 meter, jalan dengan kondisi baik panjangnya 107.023 meter, capaian kinerja melebihi target dikarenakan pada perubahan anggaran 2017 Pemerintah Kota mengalokasikan dana 10 milyar untuk memelihara jalan-jalan kota Magelang.

Indikator prosentase perencanaan bangunan gedung yang layak fungsi dari target 100% pada 2017 hanya mencapai target 75% atau total 75% dari target, hal ini dari 4 (empat) kegiatan pembangunan gedung fasilitas kota hanya 1 bangunan yang belum laik difungsikan yaitu pembangunan kolam renang yang direncanakan secara multiyears, dan direncanakan di Tahun 2018 dapat difungsikan.

Indikator prosentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas dengan target 40% capaian kerjanya sebesar 40%, tolok ukur dari kinerja ini dari kondisi trotoar kota Magelang yang memenuhi standar aksesibilitas yaitu dari panjang 237.830 meter, hanya 95.132 meter yang memenuhi syarat standar, hal ini dikarenakan dari sempitnya beberapa trotoar, tengah trotoar ditumbuhi pepohonan dan kondisi trotoar yang rusak di beberapa ruas jalan.

Indikator prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu dan efisien dari target kinerja sebesar 25% capaian kerjanya sebesar 85,71%, hal ini diraih dengan adanya 28 proyek fisik konstruksi yang sesuai syarat sebesar 24 proyek.

Sedang Kinerja pembangunan sub urusan Penataan Ruang antara lain ditunjukkan dengan program-program serta indikator program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2 -26
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Urusan Penataan Ruang Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	Kinerja	Status
			2021	2017	2016	RKPD Th.2016	Capaian
1	Program Perencanaan Tata Ruang	Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL)	100%	50%	8%	16%	▼
		Prosentase perijinan yang sesuai Tata Ruang	100%	100%	100%	100%	●
		Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	100%	15%	15%	▼

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target	Target	Capaian	Kinerja	Status
			2021	2017	2016	RKPD Th.2016	Capaian
2	Program Pemanfaatan Ruang	Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	27 %	24%	23.33	97%	●
		Rasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri	10%	1%	0%	0%	▼
		Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber- IMB	38%	30%	31%	100%	●
		Persentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas untuk semua		20%	20%	100%	●

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 100% target 2017 atau 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 80% target 2017 atau 80 % target RPJMD)

Dari 7 (tujuh) indikator program yang dilaksanakan oleh Sub Urusan Penataan Ruang di Tahun 2017, hingga triwulan IV ada 4 (empat) indikator yang sesuai target, dan ada 3 (tiga) indikator yang perlu upaya keras. Untuk penjelasan kinerja per indikator adalah sebagai berikut:

Indikator Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL) sampai triwulan IV tahun 2017 baru memiliki 1 dokumen RTRW Kota Magelang atau sekitar 8 % dari total 13 dokumen, sedang target di tahun 2017 sebanyak 6 dokumen yaitu 1 Perda RTRW dan 5 perda RDTRK atau sebesar 50%. Tahun 2017 dokumen RTRW yang ditetapkan melalui Perda nomor 4 tahun 2012 tentang RTRW 2011-2031 diajukan untuk diajukan revisi, didasari usia Perda RTRW sudah 5 (lima) tahun dan dari hasil Peninjauan Kembali pada Tahun 2016 terdapat penyimpangan terhadap rencana sebesar 20 %, sehingga direkomendasikan dilakukan revisi. Hingga Triwulan IV Reperda Revisi RTRW sudah dilakukan pembahasan di Pansus DPRD.

Indikator Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL) masih jauh dari target yang ditetapkan, disisi lain keberadaan dokumen RDTRK dan RTBL yang merupakan dokumen operasional dalam penataan ruang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kota Magelang. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan Dokumen RDTRK dan RTBL diantaranya sebagai berikut:

1. Panjangnya proses yang harus dipenuhi dalam penetapan Peraturan Daerah tentang RDTRK, mulai dari penyusunan materi teknis, konsultasi publik, persetujuan DPRD, rekomendasi peta dari BIG, rekomendasi teknis dari BKPRD Provinsi, Persetujuan Subsansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta penetapan DPRD Kota Magelang. Dari 5 (lima) Raperda RDTR yang diajukan persetujuan subtransi ke provinsi sejak tahun 2014 hingga saat ini belum mendapatkan persetujuan subtransi.
2. Banyaknya alih fungsi lahan sehingga perlu dilakukan Revisi terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang sebagai dasar penetapan Raperda RDTRK.

3. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi yang harus diakomodir dalam dokumen Tata Ruang yang belum jelas arahnya di daerah yaitu rencana reaktivasi kembali jalur kereta api dan kewajiban pemenuhan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
4. Harmonisasi rencana pola ruang dengan Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai lampiran pengajuan Persetujuan Subtansi.

Upaya yang harus dilakukan agar target Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL) dapat terus tercapai yaitu

1. Tetap konsisten sesuai jadwal dalam memenuhi proses penetapan Dokumen RTRW, RDTRK dan RTBL. Dimana untuk Tahun 2018 ini Raperda revisi Perda nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW harus bisa ditetapkan sehingga 5 (lima) Raperda RDTRK sebagai turunan dari Perda RTRW bisa ditetapkan di Tahun 2019.
2. Selalu melakukan koordinasi dan konsultasi baik dengan BKPRD Provinsi yang memberikan rekomendasi teknis serta Kementerian ATR yang memberikan Persetujuan Subtansi.
3. Segera mengajukan pembahasan ke Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan rekomendasi.
4. KLHS yang menjadi salah satu persyaratan untuk segera dilakukan validasi di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.
5. Koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam upaya harmonisasi pola ruang dan batas wilayah administrasi.

Capaian realisasi indikator jumlah ijin Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukan sudah mencapai target yaitu 100%. Hal ini didukung oleh koordinasi yang baik antara OPD teknis yang menangani Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Perizinan. Walaupun indikator jumlah ijin Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukan ini selalu tercapai 100%, ada beberapa kendala dalam pelaksanaan perijinan, diantaranya sebagian besar masyarakat melakukan ijin setelah ada aktivitas pembangunan, sehingga berdampak kesulitan dalam memberikan arahan kesesuaian peruntukan ruangnya. Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan Perda nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW serta meningkatkan pengendalian dan pelayanan informasi penataan ruang.

Indikator tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital baru tercapai 15 % dari target yang ditetapkan di Tahun 2017 sebesar 100%. Dari 6 dokumen peta yang direncanakan yang terdiri 1 dokumen peta RTRW (1:25.000) dan 5 peta rencana rinci atau RDTRK baru (1 : 5.000) hingga triwulan IV Tahun 2017 baru 1 dokumen peta RTRW yang sudah jadi dan terinformasikan ke masyarakat.

Kendala yang dihadapi ini yaitu belum ditetapkannya Raperda tentang RDTRK yang menunggu hasil revisi Perda RTRW Kota Magelang Tahun 2018 ini.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung indikator Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital, dengan menginformasikan mengenai peta RTRW Kota Magelang ke Kelurahan dan masyarakat, selain itu informasi mengenai RTRW Kota Magelang juga dipasang di beberapa tempat publik seperti di sekitaran Alon-alon Kota Magelang, Taman badaan, dan Kawasan Pemerintah Kota. Hal ini dapat memberikan informasi atau sosialisasi secara baik kepada masyarakat umum tentang rencana tata ruang Kota Magelang dalam 20 tahun mendatang. Tentunya sosialisasi ini dimaksudkan agar masyarakat ikut mendukung rencana tersebut karena hal ini demi keberlanjutan tata ruang Kota

Magelang 20 tahun mendatang. Informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) perlu dilakukan terus menerus dan lebih luas supaya masyarakat akan lebih memahami Rencana Tata Ruang.

Indikator Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan ditargetkan 24% di triwulan IV Tahun 2017 realisasi sebesar 23,9 % atau 8.479 unit bangunan ber IMB dari 35.455 unit bangunan diseluruh Kota Magelang. Diharapkan hingga akhir Tahun Anggaran 2017 target sebesar 24 % bisa tercapai.

Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan oleh Pemerintah atau pemerintah provinsi untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada pemilik bangunan gedung untuk kegiatan meliputi:

- Pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung.
- Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.
- Pelestarian/pemugaran.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian Indikator Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan diantaranya yaitu:

1. Kesadaran masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan sesuai arahan tata ruang masih rendah.
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang tata ruang masih kurang
3. Pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan kegiatan masih kurang.

Upaya yang dilakukan untuk pemenuhan target Rasio bangunan ber IMB persatuan Bangunan diantaranya:

1. meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara kontinyu di seluruh wilayah Kota Magelang serta meningkatkan peran aktif kelurahan dan perangkat RT dan RW dalam pengawasan pendirian bangunan.
2. sosialisasi terkait Perda No. 5 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung di tiap kecamatan serta memanfaatkan papan informasi yang tersedia.
3. Pemberian keringanan berupa kegiatan Pemutihan IMB kepada masyarakat.

Rasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 1% realisasi hingga triwulan IV Tahun 2017 masih 0%, hal tersebut dikarenakan belum adanya Peraturan yang mengatur mengenai ijin mendirikan reklame serta aturan teknis yang mendasarinya. Hingga saat ini semua reklame yang ada di Kota Magelang belum ada IMB, hanya ditarik retribusinya melalui Perda retribusi pelayanan tertentu. Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target Rasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri, yaitu dengan penyusunan Raperda tentang Reklame, serta diharapkan pada bulan september sudah bisa dilakukan pembahasan di DPRD.

Indikator rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber- IMB hingga triwulan IV Tahun 2017 tercapai 28 % dari target 30 %. Kendala yang dihadapi diantaranya, surat teguran yang dilaksanakan masih terbatas pada bangunan yang sedang dalam proses pembangunan yang belum mengajukan ijin serta pada bangunan yang melanggar peruntukan pola ruangnya. Untuk bangunan yang sudah terbangun tapi belum ber IMB masih belum dijangkau.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target di Tahun 2017 sebesar 30% yaitu dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara kontinyu di seluruh wilayah Kota Magelang serta meningkatkan peran aktif kelurahan dan perangkat RT dan RW dalam pengawasan pendirian bangunan.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran serta masyarakat.

Adapun target indikator Urusan Perumahan dan Realisasi Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 - 27

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJM-D (2015)	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
					Target 2017	Capaian 2017		
1.	Program Pembangunan Infrastruktur	1. Rasio infrastruktur lingkungan permukiman dengan kondisi baik	93%	100%	96%	96.28%	100.29%	●
2.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban	2. Luas kawasan kumuh (ha)	5.62	0 Ha	2 Ha	1.04 Ha	4.58 Ha	
3.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan	3. Luas kawasan kumuh (ha)	3.41	0 Ha	1 Ha	7.13 Ha	(-3.72Ha)	●
4.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan	4. Luas kawasan kumuh (ha)	2.95	0 Ha	1 Ha	1.40 Ha	1.55 ha	▼
5.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara	5. Luas kawasan kumuh (ha)	4.24	0 Ha	1.5 Ha	n/a - Ha (T2016=3 Ha)	1.10 Ha	▼
					65%	(T2016=25,94%)	40.14%	▼

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJM-D (2015)	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
					Target 2017	Capaian 2017		
6.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari	6. Luas kawasan kumuh (ha)	6.37	0 Ha	2 Ha	7.90 Ha		
					69%	-24%	-35%	▼
7.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo	7. Luas kawasan kumuh (ha)	3.81	- Ha (T2016=7Ha)	3.5 Ha	1.85 Ha	1.96 Ha	
				(T2016)8.14%	51%	632%	632%	●
8.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan	8. Luas kawasan kumuh (ha)	9.26	0 Ha	n/a- Ha (T2016=7,26)	7.71 Ha	1.55 Ha	
					21.60%	16.74%	77.49%	▼
9.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara	9. Luas kawasan kumuh (ha)	6.59	0 Ha	2	0.19 Ha		
					69.65%	97%	139%	●
10.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang	10. Luas kawasan kumuh (ha)	3.84	0 Ha	1.5 Ha	4.09 Ha		
					60.94%	-6.56%	-10.77%	▼
11.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari	11. Luas kawasan kumuh (ha)	7.55	0 Ha	2.5	5.28 Ha		
					66.89%	30.07%	44.95%	▼
12.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang	12. Luas kawasan kumuh (ha)	3.88	0 Ha	3.88	3.77 Ha		
					-n/a	2.84%	102.84%	●
13.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsari	13. Luas kawasan kumuh (ha)	16.2	0 Ha	5	4.11 Ha		
					69.14%	74.63%	108%	●
14.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan	14. Luas kawasan kumuh (ha)	6.71	0 Ha	2 Ha	2.81 Ha		
					70.19%	58.12%	83%	▶
15.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun	15. Luas kawasan kumuh (ha)	13.62	0 Ha	5 Ha	10.90 Ha		

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJM-D (2015)	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
					Target 2017	Capaian 2017		
Utara								
16.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan	16. Luas kawasan kumuh (ha)	11.98	0 Ha	4 Ha	0.40 Ha	31.61%	▼
17.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara	17. Luas kawasan kumuh (ha)	8.46	0 Ha	3 Ha	4.46 Ha		
18.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates	18. Luas kawasan kumuh (ha)	6.6	0 Ha	2 Ha	4.37 Ha	73.22%	▼
19	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	19. Persentase penduduk berakses air minum		100%	92.30%	87.88%	95%	▶
		20. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai		90%	88%	65.19%	74%	▼
		21. Tersedianya Sistem Air Limbah Skala kawasan		12%	8%	19.13%	239%	●
20.	Program Pengembangan Perumahan	22. Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni		5 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	
				100%	40%	40 %	100%	●

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Magelang, 2017

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 100% target 2017 atau 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 80% target 2017 atau 80 % target RPJMD)

Luasan kawasan Kumuh di Kota Magelang, berdasarkan data terbaru yakni seluas 67,41 Ha (Sumber: Dokumen RP2KPKP Kotaku, 2017). Data tersebut dapat diasumsikan bahwa Pada Tahun 2017, infrastruktur permukiman Kota Magelang sebagian besar berada dalam kondisi yang baik yaitu mencakup seluas 1744.59 Ha yang sudah terlayani, atau sebesar 96.28% dari total luas wilayah yang mencapai 1812 Ha. Dapat dikatakan luas wilayah kumuh hanya sebesar 3.72% dari total wilayah, dan tersebar di 17 Kelurahan. Untuk itu, Target capaian di Tahun 2017 untuk proporsi infrastruktur sebesar 96 % sudah terlampaui (100).

Data dasar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Magelang tertanggal: 19 November 2015 , Nomor: 050/280/112-310 Tahun 2015 tentang "Penetapan Lokasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Di Kota Magelang", dikeluarkan berdasarkan kajian dari sisi top down yaitu pengidentifikasian, analisa, dan penetapan

dilaksanakan oleh OPD, dikarenakan urgensi mendesak/atas dasar ketentuan Pemerintah Pusat. Perubahan data tersebut dari seluas 121,09 Ha. menjadi hanya seluas. 67.405 Ha pada Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) yang merupakan studi lanjutan yang lebih komprehensif dari pendekatan teknokratis dan partisipatif, dimana hasil dokumen tersebut dalam kerangka mencapai target nasional 100-0-100/program kota tanpa kumuh (KOTAKU), maka mulai tahun 2018 target capain pengurangan luasan perumahan dan kawasan permukiman Kumuh Kota Magelang secara umum berkurang secara signifikan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan data dasar.

Ketidakteraturan perhitungan luasan diakibatkan oleh rumusan dan variabel yang masih berubah. Belum disusunnya rumusan yang tepat mengenai perhitungan dalam monitoring dan evaluasi dalam program pengentasan kawasan kumuh yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sedangkan kriteria tingkat kekumuhan sendiri alat ukurnya mengalami perubahan indikator yang dipakai menjadi 19 indikator, saat ini Tahun 2017 masih menggunakan 9 indikator fisik dan 6 indikator non fisik, dua indikator dan turunan variabelnya inilah yang dipakai menilai kekumuhan suatu kawasan.ketidakjelasan juknis evaluasi program/kegiatan dan ketidakmapanan variabel/kriteria kawasan kumuh yang menjadi pegangan daerah, menjadi faktor kendala tersendiri dalam penetapan target capaian ditahun mendatang, keduanya penting untuk mengukur efektifitas dan efisiensi tingkat penanganan di daerah yang kemudian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dengan dikonversi ke pencapaian penanganan luasan kawasan kumuh. Selaian itu secara sifat indikator fisik dan non fisik merupakan komposit yang saling melengkapi dan tidak dapat dicapai oleh satu atau dua OPD akan tetapi lintas OPD terkait. Adapun Kriteria /Indikator yang digunakan Daerah untuk menentukan kekumuhan suatu kawasan sebagai berikut:

ASPEK FISIK	NON FISIK
1. Keteraturan Bangunan	10. Legalitas pendirian bangunan
2. Kepadatan Bangunan	11. Kepadatan penduduk
3. Kelayakan Fisik Bangunan	12. Mata pencarian penduduk
4. Aksesibilitas Lingkungan	13. Penggunaan Daya Listrik
5. Drainase Lingkungan	14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6. Pelayanan Air Minum/Baku	15. Fasilitas Pelayanan Pendidikan
7. Pengelolaan Air Limbah	
8. Pengelolaan Persampahan	
9. Pengamanan Bahaya Kebakaran	

Permasalahan ketiga setelah data dan ketidakmenentuan rumusan perhitungan,yaitu adanya kawasan-kawasan kumuh (slum) yang berada di kawasan permukiman ilegal (squatter), penghunian ini diantaranya berada di bantaran sungai/irigasi, dan sepanjang jalur ex-rel kereta api, dimana kawasan-kawasan atau bangunan-bangunan liar tersebut bukan berada dalam aset atau tanah kewenangan pemerintah daerah, sehingga penanganannya dari segi fisik agak terhambat, penanganan dan pencegahan yang bisa dilakukan adalah dari segi pendekatan non-fisik.

Secara umum, permasalahan tidak terletak pada substansi penanganan kawasan kumuh, akan tetapi hanya dari sisi administrasi saja, sehingga ada beberapa yang tidak tercapai, adapun masalah substansi penanganan

kawasan kumuh terbentur pada kewenangan yang dimiliki daerah pada kawasan-kawasan ilegal yang ada pada aset yang merupakan kewenangan instansi/lembaga lain.

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah pencapaian target indikator Persentase penduduk berakses air minum mencapai kinerja 95% atau akan tercapai, dimana 38.930 Kepala Keluarga (KK) sudah terlayani air minum, pelayanan ketersediaan air minum ini merupakan pelayanan melalui perpipaan yang disediakan oleh PDAM Kota Magelang, sedangkan capaian sebenarnya lebih tinggi lagi, karena tidak mencakup data masyarakat yang menggunakan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) dan menggunakan air permukaan (Mata Air), alasan kenapa tidak dimasukkan dalam data karena air minum mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi termasuk syarat kesehatan.

Indikator kedua yaitu capaian ketersediaan sistem air limbah setempat yang memadai sebesar 74% (target 88%, tercapai 65,19%, atau capaian total penduduk terakses ke jamban dan septictank pribadi sampai dengan Tahun 2017 sebesar 28.880 KK. Hal ini perlu capaian yang lebih keras dari OPD untuk pemenuhan akses ketersediaan jamban dan tanki septic, upaya yang telah dilakukan adalah melalui cara sosialisasi agar tidak Buang Air Besar Sembarangan (BABS) melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang dalam data Environmental Health Risk Assessment (EHRA) Kota Magelang Tahun 2017. Masih terdapat sekitar 1.653 KK yang belum mempunyai tangki septic, walaupun terkadang sudah mempunyai jamban, akan tetapi air limbah domestik masih dibuang ke air permukaan seperti sungai dan saluran irigasi.

Capaian ketersediaan Sistem Air Limbah Skala Kawasan, digunakan pendekatan KK yang terlayani oleh IPAL Komunal, MCK plus-plus, dan Sanitasi Langsung Berbasis Masyarakat (SLBM), adapun capaian sampai dengan Tahun 2017 ini sudah melebihi target sebesar 19.13% (dari target 8%), dengan tingkat pelayanan akses sebesar 8.474 KK di Kota Magelang, dengan demikian capaian kinerja pada Tahun 2017 untuk indikator tersebut sebesar 239%. Pada kenyataannya seharusnya indikator ini mempunyai definisi operasional yaitu berupa SPALD-T (Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat) yang melayani 1400 KK, di Kota Magelang belum mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dimaksud, sehingga indikator ini digunakan untuk menghitung capaian pelayanan IPAL Komunal Setempat yang sebenarnya masuk dalam kategori SPALD-S (setempat).

Permasalahan yang dihadapi pada penyediaan air minum dan air limbah menurut fakta lapangan bukan kekurangpedulian masyarakat, akan tetapi lebih kepada willingness to pay terhadap prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Program Hibah Air Minum misalnya, Pada Tahun 2017 ada sejumlah 1003 KK yang mendapat Sambungan Rumah, dengan dipasangkan saluran pipa air minum dan meteran gratis ternyata ada sebagian masyarakat yang enggan untuk menggunakan, masyarakat berpenghasilan rendah yang sudah mendapatkan hibah ternyata tetap memilih menggunakan sumber mata air yang ada di sekitarnya, karena ketidakmampuan untuk membayar rekening. Pada Bantuan SLBM dan IPAL Komunal pada tahap prakonstruksi terbentur pada ketersediaan lahan yang akan dibangun fasilitas/sarana penempatan tangki septic, sedangkan kondisi pasca penyambungan, jumlah penerima manfaat tidak berkembang/bertambah, karena terkendala biaya beban penyambungan dari jamban ke IPAL Komunal yang harus ditanggung pribadi.

Program Pengembangan Perumahan Daerah ditempuh dengan dua cara yaitu pembangunan Rumah Susun Sewa dan Rumah Susun Milik. Pada Tahun 2017 dengan target sejumlah 2 (dua) buah sudah terpenuhi 100% dengan

adanya pembangunan rumah susun sewa (vertikal) 1 twin blok dan rumah khusus (horisontal) rumah tipe 28 dengan jumlah 30-50 unit di Kelurahan Wates. Pembangunan akan dilaksanakan pada Tahun 2018 dengan didahului dengan kegiatan pematangan lahan. Sampai denan Tahun 2017 Pemda sudah memiliki UPTD Rusunawa yang mengelola 2 (dua) unit Rusunawa, yaitu Rusunawa Potrobangsari dan Rusunawa Tidar.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perumahan ini adalah mencari luasan lahan sesuai dengan syarat minimal yaitu hamparan seluas 3500 m² dan menjadi aset pemerintah daerah, lahan tersebut sebagai readiness criteria yang wajib disiapkan oleh Pemda untuk mendapatkan bantuan Pemerintah Pusat.

2.1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 28
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017

N o	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM D 2021	Targ et 2017	Capaia n 2017	Kinerj a RKPD Th.201 7	Status Capaia n
1	Program kemitraan pengembang an wawasan kebangsaan	Terfasilitasin ya Dialog FKUB, FPBI Dengan Elemen Masyarakat	10	8	8	100%	●
		Terpublikasikannya dialog antar agama	12	5	6	120%	●
		Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan	4	1	1	100%	●
		Tingkat kerukunan antar umat beragama	100%	100%	100%	100%	●
		Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3	3	3	100%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
2	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	100%	18,75%	18,75%	100%	●
		Persentase ormas yang difasilitasi	9,84%	7,87%	7,82%	99,36%	
3	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase kriminalitas yang tertangani	80%	80%	72,84%	91,05%	
		Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai-nilai luhur Pancasila	0%	0%	0%	100%	●
		Perda pelarangan peredaran narkoba	0	0	0		
		Jumlah Kampung Bebas Narkoba	6	2	2	100%	●
		Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	2,57%	1,13%	1,40%	123,89%	●
		Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	15%	3%	2,44%	81,33%	
		Rasio jumlah siskamling aktif	100%	0,78%	0,69%	88,46%	
4	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	47,5%	37,5%	37,09%	98,90%	
		Cakupan tim relawan siaga bencana	14,71%	2,94%	30 org		

N o	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM D 2021	Targ et 2017	Capaia n 2017	Kinerj a RKPD Th.201 7	Status Capaia n
		Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana	100%	25%	0%	0%	
		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	100%	25%	16%	64%	
		Cakupan penanganan korban bencana	100%	100%	100%	100%	●
		Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana:	35,29%	6%	6%	100%	●
		- Pratama	0	1	1	100%	●
		- Madya	0	0			
		- Utama	0	0			
		Kebijakan terkait penanggulangan bencana	ada	ada	1 Perwal	100%	●
5	Program pendidikan politik masyarakat	Terfasilitasinya dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah	1	1	1	100%	●
		Tingkat partisipasi politik	-	-	-		
6	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	80%	69,60%	72.73%	104,49	●
		Database ormas yang akurat	77%	69,00%	69,55%	100,80%	●
		Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	57,39%	27,79%	7.41%	26.66%	

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM D 2021	Targ et 2017	Capaia n 2017	Kinerj a RKPD Th.201 7	Status Capaia n
7	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/ hari	3 kali/ hari	3 kali/ hari	100%	●
		Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	100%	90%	100%	111,11%	●
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	7,89	6,52	4,91	75,3%	
		Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	16,67	10%	18%	180%	●
		Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (K3)	98%	94,5%	100%	105,8%	●
		Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	77,27	70,47	55%	78,04%	
		Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	23,97%	11,27%	17%	107%	●
		Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	21	9	9	100%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
8	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penanganan penyakit masyarakat	95%	90%	100%	111,11%	●
		Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	0	0	1		
		Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	0	-	-		
9	Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Beragama Umat	Rasio SKPD yang menerapkan bina suasana dan kegiatan - kegiatan kerohanian sesuai dengan agama masing - masing di tiap SKPD	75%	25%	34.48%	137,92%	●
		Persentase peningkatan jumlah ZIS dari aparatur	5%	5%	684.48%	13689,6%	●
		Cakupan kegiatan perayaan hari besar keagamaan tingkat kota	66,67%	53,33%	53,33%	100%	●
		Frekuensi terselenggaranya kajian rutin keagamaan di masyarakat	5	5	5	100%	●
		Persentase tempat ibadah yang memenuhi standar Kemenag	20%	5%	-		

N o	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM D 2021	Targ et 2017	Capaia n 2017	Kinerj a RKPD Th.201 7	Status Capaia n
		Ketersediaan kebijakan daerah tentang standar tempat ibadah sesuai peraturan Kemenag	-	-	-		
		Cakupan ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap PD		10%	34,78%	347,8%	●
		Prosentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah		83%			
		Cakupan ketersediaan pusat-pusat keagamaan	30%	-	-		
		Jumlah Ketersediaan regulasi daerah terkait pembiasaan pelaksanaan ibadah secara rutin di lingkungan masyarakat masyarakat	-	-	-		
10	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Persentase kelancaran penyelenggaraan pemilu	-	-	-		

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 100% target 2017 atau 100% target RPJMD)
- : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 80% target 2017 atau 80 % target RPJMD)

Dari 51 indikator kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 41 indikator ditargetkan pencapaiannya di tahun 2017. Dari 41 indikator tersebut terdapat 28

indikator yang telah mencapai target, 5 indikator beradadiantara 80% s.d. 100%, dan 8 indikator masih dibawah 80%.Beberapa kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

1. Pencegahan dan Penanggulangan bencana.

Tim relawan siaga bencana disiapkan melalui kegiatan pembentukan Kelurahan Rintisan Tangguh Bencana, dimana pada tahun 2017 baru dibentuk 1 kelurahan dengan jumlah personel 30 orang. Definisi Operasional dari indikator adalah membandingkan antara jumlah relawan tangguh bencana dengan jumlah relawan. Oleh karena belum adanya data relawan, maka indikator ini belum dapat dihitung.

Dokumen rencana kontijensi penanggulangan bencana identik dengan SPP dan SOP. Dokumen ini belum disusun untuk semua jenis bencana yang akan ditangani.

Sarana prasarana yang ada untuk penanggulangan bencana dirasakan masih kurang, Perlu dilakukan nventarisasi sarana-prasarana apa saja yang harus tersedia (jenis, volume berikut spesifikasinya) dihadapkan pada kondisi riil yang ada.

2. SKT ormas

Masih banyak ormas yang enggan melakukan pendaftaran maupun memperbaharui datanya (registrasi ulang). Keengganan tersebut muncul karena beberapa faktor antara lain :

- a. Kurangnya kesadaran akan kewajiban melakukan pendaftaran;
- b. Eksistensi dari ormas juga bermacam, ada yang terorganisir dengan baik, ada yang bersifat temporer dan insidental berdasarkan minat-minat tertentu, sehingga kadang aktif kadang pasif;
- c. Merasa tidak memperoleh manfaat dari keberadaan SKT.

3. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja

Memperhatikan Permendagri Nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP, jumlah personel Satpol PP Kota Magelang standarnya 150 orang PNS, sedangkan saat ini hanya memiliki 80 orang. Jumlah itupun termasuk pegawai honorer (non PNS).

4. Cakupan Linmas

Idealnya jumlah linmas setidaknya sama dengan jumlah RT. Untuk mengatasi kekurangan personel, maka perekrutan anggota linmas akan dilaksanakan secara bertahap.

5. Tempat ibadah

Belum ada pengkajian terhadap standar tempat ibadah sebagaimana ditetapkan oleh Kemenag, dihadapkan dengan kebutuhan umat. Sehingga pengukuran/penilaian pun belum dapat dilakukan.

Belum semua sekolah memiliki fasilitas ibadah yang memadai.

Kebijakan/regulasi dan kajian/perencanaan operasional terkait tempat ibadah, pembiasaan ibadah dan lain-lain yang berhubungan dengan upaya pencapaian visi Religius belum ada.

Upaya yang perlu dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2019 adalah :

1. Meningkatkan jumlah tim relawan siaga bencana, membentuk Kelurahan Rintisan Tangguh Bencana, inventarisasi data relawan, menyusun rencana kontijensi (SPP-SOP) untuk semua jenis bencana, inventarisasi dan pengadaan sarana-prasarana penanggulangan bencana.
2. Monitoring, evaluasi dan sosialisasi SKT bagi ormas.
3. Rekrutmen PNS untuk Satpol PP.
4. Perekrutan anggota linmas.
5. Pengkajian, perencanaan dan pengembangan Kota Religius.

2.1.3.1.6 Sosial

Target dan realisasi indikator urusan sosial tahun 2017 sesuai dengan indikator RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 adalah tampak pada tabel berikut :

Tabel 2 - 29
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian Kinerja RKPd Tahun 2017		Kinerja RKPd Th.2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos	100%	100%	98,30%	98,30%	
		Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40,00%	20%	11,40%	57%	
2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian	100%	100%	100%	100%	●
		Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	16,74%	10%	15,31%	153,1%	●
3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	100%	100%	100%	100%	●
		Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial	7	3	8	266,66%	●
		Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	20%	0%	0%	

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian Kinerja		Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
				RKPD Tahun 2017			
				Target 2017	Capaian 2017		
4	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA	90%	70%	94,25%	134,64%	●
5	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia	83%	50%	61,53%	123,06%	●
6	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial	40%	15%	19,53%	130,2%	●

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang, 2017

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 100% target 2017 atau 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 80% target 2017 atau 80 % target RPJMD)

Dari ke-10(sepuluh) indikator kinerja urusan sosial, terdapat 7 (tujuh) indikator sudah memenuhi target yaitu indikator Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian, Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif, Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan social, Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA, Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia, Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial. Masing masing indikator kinerja memiliki capaian kinerja sempurna 100 % atau lebih.

Sedangkan 1 (satu) indikator akan tercapai yaitu Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos dengan kinerja capaian baru mencapai 98,90%.

Sementara itu 2 (dua) indikator lainnya masih perlu usaha keras untuk dapat mencapai target yaitu indikator Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social dan Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi sasaran utama kegiatan urusan sosial. Data PMKS Tahun 2016 digunakan sebagai database kegiatan Tahun 2017. Validasi data dilaksanakan pada akhir tahun 2016.

Adapun secara detail capaian masing masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos

Pada Tahun 2017 total proposal yang masuk sejumlah: 2.953. Sampai dengan akhir Bulan Desember yang telah diverifikasi dan atau terdistribusi sekitar 2.903 proposal. Ada proposal yang kembali atau terselip sehingga tidak tercapai 100 %

Bagian Kesra bertugas untuk memverifikasi kelengkapan proposal dan mendistribusiakannya ke OPD pemberi rekomendasi. Diharapkan ada sistem aplikasi Hibah Bansos, serta ada link ke OPD dan kelurahan.

2) Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian

Total jumlah permohonan 483 orang. Disetujui 473 namun yang mengajukan pencairan 470. Adapun 3 di antaranya; 2 pemohon bekerja di luar kota dan 1 sakit sehingga opname. Ditolak 4 pemohon karena tidak sesuai kriteria. Ada 6 permohonan tidak ditindaklanjuti, di antaranya; 3 pemohon meninggal, 1 istri PNS, 1 pindah domisili, dan 1 pengajuan duplikasi.

3) Persentase lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Di Tahun 2017 sebanyak 70 orang lanjut usia terlantar telah menerima jaminan sosial berupa uang sebesar Rp. 200.000 setiap bulannya yang berasal dari dana Provinsi dan diberikan selama 10 bulan setiap tahunnya. Sementara itu ada 614 lanjut usia terlantar di Kota Magelang sehingga baru sebesar 11,40 persen lanjut usia terlantar yang mendapatkan jaminan sosial. Indikator ini masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 20 persen di tahun 2017 dan meningkat menjadi 30 persen di tahun 2018. Perlu menjadi perhatian bahwa program ini telah berakhir pada Tahun 2017 dan akan diintegrasikan ke Program Keluarga Harapan (PKH). Diharapkan indikator ini bisa dipenuhi melalui PKH untuk lanjut usia. Oleh karena itu sangat perlu dan mendesak bagi pemerintah Kota Magelang untuk mengintervensi pencapaian target indikator ini melalui penganggaran APBD Kota.

4) Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

Di Tahun 2017 PMKS, 750 orang dari 4.898 orang fakir miskin telah menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE yang terfasilitasi dalam 75 KUBE. Dana ini berasal dari pusat sebagai salah satu fungsi pemerintah pusat dalam redistribusi pendapatan. Indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan bahkan melebihi target Akan tetapi perlu diantisipasi dimulai tahun ini agar pencapaian target tidak menurun di tahun tahun mendatang. Pencanaan e-warung oleh pemerintah pusat diharapkan bisa membantu pencapaian target indikator di masa mendatang disamping antisipasi anggaran dari pemerintah kota sangat diharapkan untuk menstimulasi pencapaian target ini.

5) Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif

Indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan. Di Kota Magelang terdapat 12 lembaga kesejahteraan sosial yang aktif diantaranya Panti Sosial Asuhan Anak sebanyak 8 buah, Panti Sosial Tresna Wirda 1 buah, Panti Sosial Bina Grahita 2 buah, dan Panti Sosial Bina Laras 1 buah. Keseluruhan lembaga kesejahteraan ini secara aktif membantu instansi sosial dalam penyelenggaraan sarana prasarana kesejahteraan sosial.

- 6) Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial
Pada tahun 2017 Kesra memfasilitasi dan mengkoordinasikan dana CSR dari berbagai badan usaha. Selama kurun waktu 2017 ada 6 lembaga yang telah bekeja sama dengan Pemkot dalam penggunaan dana CSR, yaitu:
- Bank Jateng, - Bank Jateng Syariah, - Bank Magelang, - BPR BKK Kota Magelang, - PDAM Kota Magelang, - PDOW Taman Kyai Langgeng. Selain itu ada CSR yang masuk melalui Dinas Sosial yaitu dari Bank Magelang, BMPD (Badan Musyawarah Perbankan Daerah), OHANA pemberian bantuan berupa 1 alat bantu dengar dan 4 kursi roda anak.
- 7) Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
Realisasi indikator Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Pembentukan WKBSM di Kota Magelang sudah dilaksanakan di Kelurahan Rejowinangun Selatan dan di Kelurahan Tidar Selatan, tetapi dari keduanya masih belum dapat menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi agar WKBSM yang telah terbentuk dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Direncanakan pada Tahun 2018 ini Dinas Sosial Kota Magelang akan mulai mengaktifkan kembali WKBSM.
- 8) Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan napza
Di tahun 2017, target indikator kinerja ini sudah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, Namun demikian perlu antisipasi di tahun-tahun mendatang agar target yang ditetapkan tetap mampu untuk dicapai. Dari 261 gelandangan, pengemis, pemulung, WTS dan korban penyalahgunaan napza di Kota Magelang baru 246 orang yang ditangani.
- 9) Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia
Bagian Kesra memfasilitasi dan mengkoordinasikan dengan lembaga / yayasan panti asuhan/panti jompo pada tahun 2017 target sebanyak 8 panti asuhan/panti jompo. Panti Asuhan yaitu : - Panti Asuhan/Anak Yatim Muhammadiyah, - Ihsanul Fikri, - Ar Rahman, - Jami'atul Quro'
Ponpes: - Tahfidzul Qur'an, - Tahfidz Al Falah, - Sirojul Huda, - Al Ihsan Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Ramadhan 1438 H.
- 10) Persentase penyandang cacat mental dan fisik tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial
Dari 343 orang penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial, baru 67 orang yang mendapatkan bantuan sosial sosial. Meskipun indikator ini telah memenuhi target Tahun 2017, kondisi ini harus menjadi agenda utama urusan sosial dalam pemberian bantuan sosial kepada penyandang cacat tidak potensial yang ada di Kota Magelang. Validasi kebutuhan mereka harus segera dilaksanakan untuk menunjang keberlangsungan hidup pada penyandang cacat tidak potensial. Disinilah peran pemerintah sangat penting dan mendesak.

2.1.3.1.7 Ketenagakerjaan

Upaya pelaksanaan urusan ketenagakerjaan dengan dana tersebut diatas menghasilkan capaian kinerja pada Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2 - 30

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2017

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d.	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
			2021	Target 2017	Capaian 2017		
1.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Persentase Wirausaha Baru	10%	5 %	15%	300%	●
		2. Persentase pencari kerja yang ditempatkan	80%	70 %	86.8%	124 %	●
		3. Persentase pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan	80%	70 %	70.18%	100.3%	●
2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	4. Persentase peserta pelatihan tersertifikasi	7.5%	2 %	2.4%	120%	●
		5. Persentase pencari kerja terlatih berbasis kompetensi	80%	65%	69.2%	106.5%	●
		6. Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP	7.5%	0%	25%	900%	●
3	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	7. Coverage asuransi tenaga kerja	75%	69%	71.86%	104%	●
		8. Persentase Perselisihan HI terselesaikan melalui PB	50%	50%	83.33%	166.7%	●

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, 2017

Keterangan:

● : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 100% target 2017 atau 100% target RPJMD)

▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)

▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 80% target 2017 atau 80 % target RPJMD)

Dari kedelapan indikator kinerja urusan tenaga kerja, semuanya telah mencapai target tahun 2017 dengan hasil melebihi target yang ditetapkan. Upaya penanganan urusan ketenagakerjaan dilakukan dalam 3 (tiga) fungsi yaitu (1) pelatihan kepada pencari kerja dan pekerja untuk meningkatkan ketrampilan dan produktivitas (2) fasilitasi penempatan tenaga kerja dan (3) fasilitasi dan pembinaan terhadap tenaga kerja.

Adapun penjelasan masing-masing indikator diatas adalah sebagai berikut :

1. Persentase Wirausaha Baru

Dari hasil pelatihan kerja berbasis kewirausahaan telah muncul 10 (sepuluh) orang wirausahawan baru yang sampai sekarang masih difasilitasi untuk promosinya. Untuk kelanjutannya, para wirausahawan baru ini akan diserahkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk diberi pelatihan tingkat lanjut baik teknis maupun manajemen. Adapun para wirausahaan baru tersebut adalah :

Tabel 2-31
Wirausahawan Baru sampai dengan akhir Desember 2017

No	Nama	Alamat	Jenis wirausaha
1.	Budi Bintoro	Jl. Sunan Ampel II RT. 02/02 Kel. Jurangombo Selatan	Sablon
2.	Budi Cahyadi	Jl. Sunan Ampel II RT. 02/02 Kel. Jurangombo Selatan	Sablon
3.	Ahmad Padli	Karanggading Rt. 01/03 Kel. Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan	Sablon
4.	Salmah	Meteseh Rt. 01/013 Kel. Magelang	Sablon
5.	Dedy Haryanto	Gg. Kantil II No. 8 Rt. 03/08 Kel, Kemirirejo Magelang Tengah	Sablon
6.	Atik Astutik	Jl. Anggrek I/240 Rt. 02/04, Kel. Kemirirejo	Jumputan
7.	F. Sigid Sunarko	Menowo Rt. 001/003 Kel. Kedungssari	Jumputan
8.	Dasinah	Jaranan Rt. 01/06 Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah	Jumputan
9.	Dessy Rizawati	Jl. Sunan Ampel II No. 21 Rt. 002/002 Kel. Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan	Jumputan
10.	Wibiyanti	Tidar Sari Rt. 01/011 Kel. Tidar Selatan Kec. Magelang Selatan	Jumputan

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Tahun 2017

2. Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

Capaian persentase pencari kerja ditempatkan dalam Tahun 2017 ini telah melampaui target yang ditetapkan dimana dari 100 orang ada 86 orang berhasil mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Jumlah pencari kerja di Tahun 2017 sebanyak 576 orang sementara jumlah lowongan yang tersedia sebanyak 3.422 jabatan dan yang telah bekerja sebanyak 500 orang pencari kerja terdiri dari 473 orang bekerja di wilayah Propinsi Jawa Tengah sementara 9 orang bekerja di luar wilayah Propinsi Jawa Tengah dan 18 orang bekerja di Luar Negeri (Pekerja Migran Indonesia). Adapun secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2-32.

Pencari kerja terdaftar, ditempatkan dan lowongan kerja Tahun 2017			
Uraian	L	P	Total
Pencari kerja terdaftar	292	284	576

Pencari kerja ditempatkan	251	249	500
Lowongan terdaftar	1.611	1.811	3.422

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Tahun 2017

Pada Tahun 2017 ini telah dilaksanakan JOB FAIR yang merupakan kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja, jumlah yang berhasil ditempatkan sebanyak 451 orang pencari kerja, dari Kota Magelang sebanyak 99 orang atau 21,95 persen.

3. Persentase pencari kerja terlatih berbasis kompetensi dan kewirausahaan

Secara rinci pelatihan ketenagakerjaan dibagi menjadi 2 (dua) sesuai dengan PERMENAKERTRANS NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN yaitu pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan kewirausahaan. Capaian untuk pelatihan berbasis kompetensi sudah mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian 69.2 persen dari target yang telah ditetapkan (65%) sementara capaian indikator pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebesar 70.18 persen, telah mencapai target yang telah ditetapkan (70%).

Adapun jenis pelatihan yang telah diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja, Kota Magelang di Tahun 2017 beserta jumlah pesertanya adalah sebagai berikut :

Tabel 2-33

Jenis Pelatihan dan Jumlah peserta Pelatihan Tahun 2017

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta		Jumlah Peminat	
A	Diklat Berbasis Kompetensi	207	orang	299	orang
1.	Diklat menjahit bagi pencari kerja	20	orang	24	orang
2.	Diklat bordir bagi pencari kerja	20	orang	28	orang
3.	Diklat bahasa asing bagi pencari kerja	45	orang	57	orang
4.	Diklat komputer	11	orang	15	Orang
5.	Diklat tata boga bagi pencari kerja	20	orang	43	orang
6.	Diklat tata rias bagi pencari kerja	20	orang	35	orang
7.	Diklat Teknisi HP bagi pencari kerja	11	orang	22	orang
8.	Diklat Montir Sepeda Motor bagi pencari kerja	20	orang	25	orang
9.	Diklat Las bagi pencari kerja	20	orang	30	orang
10.	Diklat Perkayuan bagi pencari kerja	20	orang	20	orang
B	Pelatihan Kewirausahaan	40	orang	57	orang

1.	Pelatihan batik jumputan bagi pencari kerja	20	orang	23	orang
2.	Pelatihan sablon	20	orang	34	orang
JUMLAH		247	orang	356	orang

4. Persentase peserta pelatihan tersertifikasi
Sampai akhir Tahun 2017 jumlah peserta pelatihan yang tersertifikasi BNSP sebanyak 5 orang dari 207 orang peserta pelatihan berbasis kompetensi. Dari 10 (sepuluh) jenis pelatihan kerja yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Kota Magelang, baru 1 (satu) jenis pelatihan yang telah diikuti sertifikasi kompetensi yaitu Pendidikan dan Pelatihan Perkayuan. Adapun jenis kompetensinya adalah finishing kayu dengan tingkatan kompetensi (1) menyiapkan pekerjaan finishing, (2) Menyiapkan permukaan benda kerja untuk finishing, (3) menyesuaikan warna finishing dan (4) mengerjakan finishing dengan teknik semprot. Dari 20 orang peserta pelatihan perkayuan hanya 5 orang peserta yang memenuhi 4 kriteria kompetensi dimaksud.
5. Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP
Meskipun indikator tenaga kerja tersertifikasi BNSP di Tahun 2017 belum ditargetkan akan tetapi pada akhir tahun 2017 telah tercapai sebesar 25 persen yaitu 5 orang dari 20 orang yang mengikuti sertifikasi BNSP.
6. Coverage asuransi tenaga kerja
Hal lain yang perlu diapresiasi adalah capaian pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek yang mencapai 71.86 persen, melebihi dari target yang ditetapkan (69 persen). Capaian kedua indikator ini menunjukkan bahwa sebagian pengusaha telah mulai menerapkan peraturan ketenagakerjaan khususnya norma perlindungan tenaga kerja, namun sebagian yang lain belum sehingga perlu fasilitasi pemerintah dalam pencapaian kinerja ini. Norma perlindungan tenaga kerja meliputi hak-hak pekerja diantaranya mengenai upah, jaminan sosial tenaga kerja, lembur, waktu kerja dsb.
7. Persentase Perselisihan HI terselesaikan melalui PB
Pada Tahun 2017 ini, kondisi ketenagakerjaan di Kota Magelang cukup kondusif dimana diindikasikan oleh rendahnya jumlah perselisihan pengusaha dengan pekerja. Sampai dengan akhir tahun ada sebanyak 6 (enam) kasus, yang bisa diselesaikan dengan perjanjian bersama antara pengusaha dan pekerja sebanyak 5 (lima) kasus sementara 1 (satu) kasus perselisihan melalui anjuran.

2.1.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 - 34
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Tahun 2017

No	Program Prioritas / Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Realisasi 2017	Kinerja	Status
1	Program keserasian					

kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan						
1	Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada	Ada	Ada	100%	●
2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak						
1	Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	55,79%	44.74%	67.34%	150.51%	●
3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan						
1	Rasio KDRT	0,04%	0.055%	0.035%	136.36%	●
2	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	15	23	12	147.83%	●
3	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	100%	100%	100%	●
4	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanga	100%	100%	100%	100%	●

	nan Pengadu an oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu					
5	Cakupan Perempu an dan Anak Korban Kekerasa n yang Mendapat kan Layanan Kesehata n oleh Tenaga Kesehata n Terlatih di Puskesm as Mampu Tatalaksa na KIP/A dan PPT / PKT di RS	100%	100%	100%	100%	●
6	Cakupan Layanan Rehabilita si Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabi- litasi social Terlatih Bagi Perempu an dan Anak Korban Kekerasa n di dalam Unit Pelayana n Terpadu	100%	100%	100%	100%	●
7	Cakupan Layanan Bimbinga n Rohani yang	100%	100%	100%	100%	●

	Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu					
8	Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Pendidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%	100%	100%	100%	●
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	●
10	Persentase perempuan rentan yang mendapatkan penguatan kapasitas	8%	3%	2.14%	71.33%	▼
4	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender					

dalam pembangunan						
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30%	17%	6.37%	37.47%	▼
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	35%	20%	14.05%	70.25%	▼
3	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	80,00%	78.00%	59.18%	75.87%	▼

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 = 100% target 2017 atau = 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 < 80% target 2017 atau < 80 % target RPJMD)

Dari 15 indikator kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017, terdapat 11 indikator yang telah mencapai target, sedangkan 4 indikator lainnya masih dibawah 80%. Kinerja indikator ini belum memuaskan karena terdapat kendala antara lain sebagai berikut :

- a. Penguatan kapasitas bagi perempuan rentan terkendala keterbatasan anggaran;
- b. Partisipasi perempuan sebagai angkatan kerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta tidak dapat diintervensi langsung melalui program/kegiatan.

Dari sisi partisipasi perempuan dalam bekerja maka hal ini dapat tergantung dari ketersediaan lapangan kerja. Ditambah lagi dengan faktor kultur budaya yang berbunyi “laki-laki sebagai pencari nafkah” dan “perempuan sebagai pengelola rumah tangga” menjadi penyebab kurangnya perempuan dalam dunia kerja utama. Perempuan (istri) bekerja cenderung sebagai pekerjaan sampingan untuk menunjang penghasilan laki-laki (suami).

Dari sisi kesetaraan, maka indikator kinerja yang ditetapkan seharusnya dapat membandingkan antara proporsi laki-laki dan perempuan dalam bekerja. Hal ini akan tergantung pada kebijakan lembaga/lapangan kerja yang ada. Pada umumnya kebijakan lembaga/lapangan kerja akan mengutamakan kompetensi/kesesuaian pekerjaan yang tersedia daripada masalah gender. Artinya berbagai kemungkinan yang terjadi adalah sebagai berikut :

- Kompetensi perempuan pada lapangan pekerjaan yang ada masih kalah dibandingkan laki-laki;
- Sebagian besar lapangan pekerjaan yang ada cenderung lebih tepat untuk laki-laki.

Indikator kesetaraan gender secara makro adalah IPG dan IDG. Angka IPG dan IDG diukur oleh BPS yang sampai saat ini baru dipublikasi angka tahun 2015, yakni IPG 95,81 dan IDG 75,83.

Upaya yang perlu dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2019 adalah :

- a. Mempertahankan capaian kinerja yang sudah baik, utamanya dalam hal :
 - Sosialisasi, pembinaan/penyuluhan, koordinasi dan kerjasama dalam perlindungan perempuan dan anak guna mewujudkan ketahanan keluarga;
 - Menjaga, mencegah, mengantisipasi hingga menangani terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak perdagangan orang dan eksploitasi anak;
 - Secara intensif melakukan pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut kebijakan guna mewujudkan pemberdayaan perempuan yang lebih baik;
 - Mempertahankan Anugerah Parahita, Kota Layak Anak dan penghargaan/status lainnya sebagai bagian dari citra (visi) Kota Magelang sebagai Kota Jasa yang Modern dan Cerdas dilandasi masyarakat yang Sejahtera dan Religius.
- b. Mengintensifkan koordinasi/kerjasama/kemitraan antar lembaga, dunia usaha dan masyarakat dalam penanganan masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Meningkatkan/memutakhirkan sarana prasarana, fasilitas, sistem/prosedur dan database pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d. Meningkatkan pemberian pelatihan ketrampilan baik teknis maupun manajerial kepada perempuan dalam rangka meningkatkan kapasitas/kompetensinya.

2.1.3.1.9 Ketahanan Pangan

Indikator kinerja urusan Ketahanan Pangan melibatkan 4 (empat) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 35

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Jumlah regulasi ketahanan pangan	2	1	1	100%	●
		Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%)	95%	92%	83%	90%	●
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,20%	85%	50%	83%	●
		Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	80%	80%	50%	80%	●

Sumber: Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Magelang, 2017

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 = 100% target 2017 atau = 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 < 80% target 2017 atau < 80 % target RPJMD)

Dari ke 4 (empat) indikator kinerja urusan Ketahanan Pangan kesemuanya indikator tercapai yaitu Jumlah regulasi ketahanan pangan, Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%), Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%).

Meskipun indikator kinerja urusan ketahanan pangan telah tercapai 100%, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi beberapa permasalahan, sebagai berikut:

- Pola hidup masyarakat dalam mengkonsumsi makanan belum perhatikan
- Kualitas kandungan makanan terutama pada kualitas gizi
- Kadang masyarakat menyajikan tidak melihat kandungan gizinya.

2.1.3.1.10 Pertanian

Indikator kinerja urusan Pertanian melibatkan 2 (dua) program prioritas dan 2 (dua) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 36
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
1	Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersedianya informasi pertanahan yang akurat	100%	30%	30%	100%	●
2	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanian	Tersedianya sistem informasi geografis pertanahan	100%	30%	30%	100%	●

Sumber: BPKAD Kota Magelang, 2017

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 = 100% target 2017 atau = 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 < 80% target 2017 atau < 80 % target RPJMD)

Indikator kinerja urusan Pertanian yang terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu tersedianya informasi pertanahan yang akurat dan tersedianya sistem informasi geografis pertanahan, dapat tercapai 100%. Dari 2 (dua) indikator kinerja urusan Pertanian terdapat 2 (dua) indikator yang tercapai yaitu tersedianya informasi pertanahan yang akurat dan tersedianya sistem informasi geografis pertanahan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Satu Peta maka Sistem Informasi Geografis (SIG) pertanahan harus memakai peta yang sudah terkoreksi dan terverifikasi terhadap Informasi Geospasial Dasar (IGT). Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2017, maka terjadi perubahan luas wilayah di Kota Magelang menjadi 18,54 km² sehingga SIG pertanahan perlu menyesuaikan. Hal ini bisa diatasi dengan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan BPN terkait kewilayahan.

2.1.3.1.11 Lingkungan Hidup

Indikator kinerja urusan Lingkungan Hidup melibatkan 6 (enam) indikator kinerja daerah dan tujuh (tujuh) indikator program dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 37

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target	Capaian Kinerja RKPD		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
			RPJM s.d. 2021	Tahun 2016	Tahun 2017		
1.		IKLH (Indeks Kualitas)Lingkungan Hidup)	68,5	62	62,54	100%	●
2	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;	IPA (Indeks Pencemaran Air)	76,84	75,65	46,47	61,4%	▼
		Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	100%	20 %	20 %	100%	●
3	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	IPU (Indeks Pencemaran Uda	79,1	61,8	85,67	138,6%	●
		Prosentase Pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin	100 %	100 %	100 %	100%	●
4	Program Konservasi Sumber Daya Alam	ITH (Indek Tutupan Vegetasi)	49,56	48,55	57,24	118%	●
		Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonservasi	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	●
		Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	●
5	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Volume sampah yang dibuang ke TPSA	136,7	158,7	249,66	63,6%	▼
		Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya	14%	3 %	3,2%	100.06%	●
		Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	100 %	87 %	86,2%	99,08%	▶
6	Program pengelolaan ruang terbuka hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau a. Privat	10	10	19,1	191 %	●
		b. Publik	18,50	18,37	19,6	107 %	●

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2017

Keterangan

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi tahun 2017 100% target 2017 atau 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 80% target 2017 atau 80 % target RPJMD)

Dari ke 12 (dua belas) indikator kinerja urusan Lingkungan Hidup terdapat 9 (sembilan) indikator yang tercapai yaitu IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup), IPU (Indeks Pencemaran Udara), ITH (Indek Tutupan Vegetasi), Luas RTH Kota, Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati, Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonservasi, Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya, Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia, Prosentase Pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin

Disisi lain terdapat dua indikator yang perlu upaya keras adalah indikator IPA (Indeks Pencemaran Air) dengan capaian baru 61.4% dan indikator volume sampah yang dibuang ke TPSA tercapai sekitar 63,6 % atau justru sangat jauh dari target yang telah ditentukan.

Kinerja indikator indikator IPA (Indeks Pencemaran Air) belum memuaskan karena terdapat kendala antara lain sebagai berikut :

1. Kualitas air sungai sangat fluktuatif tergantung dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari adanya aktifitas manusia di bidang industri, pertanian, peternakan dan sebagainya yang membuang limbah langsung ke perairan umum tanpa mengalami pengolahan terlebih dahulu sehingga mempengaruhi kualitas air sungai,
 - a. Limbah domestik, terutama dihasilkan oleh masyarakat yaitu dari tempat tinggal mereka, terdiri dari :
 - Buangan manusia (tinja dan urin), limbah cair ini disebut sebagai "black water"
 - Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga seperti mencuci, mandi, memasak, membersihkan dan sejenisnya dimasukkan ke dalam kelompok "gray water"
 - Limbah cair yang dihasilkan dari perkantoran, hotel, kawasan komersial dan sumber pencemar lainnya yang bukan kelompok industri.
 - b. Limbah cair industri – efluen yang dikeluarkan dari berbagai industri dan industri pengolahan yang berada di sepanjang Sungai Progo. Sungai sebagai pemasok air juga berfungsi sebagai penampung limbah cair. Peningkatan rencana tata guna lahan dan peningkatan peruntukan kawasan dimaksudkan untuk mendorong industri-industri besar untuk ditempatkan sejauh mungkin dari sumber air. Limbah cair dari industri memberikan kontribusi terhadap pencemaran sungai di bagian hilir.
 - c. Pencemaran dari limbah pertanian sangat signifikan pada musim hujan dimana larian membawa sejumlah besar lapisan permukaan tanah, unsur hara dan bahan organik dari lahan padi dan lahan lainnya di sekitar sungai. Bersamaan dengan itu aliran sungai sangat cepat, sebagai konsekuensinya oksigen terlarut DO (Dissolved Oxygen) rendah dan pemulihan kondisi air tinggi sehingga menurunkan kualitas air. Pada musim kemarau pencemaran air dari lahan pertanian masih terjadi di sungai melalui aliran balik dari saluran dan drainase irigasi, tetapi pada saat puncak musim kemarau hal ini hampir tidak terjadi. Tidak seluruh saluran irigasi menggunakan saluran yang diperkeras (pasangan) menyebabkan erosi tanah turut memperburuk buangan ke badan sungai. Penggunaan pupuk yang tidak terkontrol juga akan menyebabkan terjadinya beban berlebihan nutrien di badan sungai.

Aktivitas pertanian memberikan kontribusi ke polusi air melalui :

 - Adanya limpasan tanah dan sedimen
 - Nutrien-nutrien
 - Material tanaman dan organik

- Limbah dari peternakan
- d. Buangan limbah dari rumah pemotongan hewan, yang pembuangannya disalurkan langsung ke badan air menyebabkan tingginya beban BOD. Di wilayah Kota Magelang terdapat rumah pemotongan hewan yang belum memiliki pengolahan limbah yang berfungsi dengan maksimal, menyumbang minyak, lemak serta bakteri-bakteri patogen di badan air sehingga beban BOD sungai di penggalan sungai ini cukup tinggi.
 - e. Limbah cair lainnya meliputi limbah yang berasal dari rumah sakit, hotel, sekolah, supermarket dan fasilitas umum lainnya. Kegiatan masyarakat dan sektor industri serta perkembangan fasilitas Kota secara cepat telah mencemari Sungai Progo di bagian hilir.
Kegiatan masyarakat yang menghasilkan limbah cair telah menjadi penyebab utama pencemaran air Sungai Progo, hal ini terjadi karena tidak adanya sistem pengolahan air limbah secara terpadu di Wilayah Sungai Progo dan juga kurangnya kesadaran masyarakat tentang pelestarian lingkungan. Pembuangan dari limbah padat juga menyumbang material-material yang menambah cemaran air di bagian hilir. Tempat pembuangan akhir yang dekat dengan badan sungai juga diprediksi akan mencemari badan air dari air lindi / leachate-nya. Pembuangan-pembuangan ilegal lain juga turut menyumbang pencemaran air, walaupun memang sulit dikuantifikasi.
2. Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah adanya perubahan iklim, curah hujan, bencana alam dsb yang juga berpengaruh terhadap kualitas air sungai.
 3. Tahun 2017 adalah tahun dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Tingginya curah hujan sangat mempengaruhi laju infiltrasi air tsb kedalam tanah. Hal ini dapat menimbulkan pencemaran air sungai dengan semakin cepat dan semakin banyaknya bakteri coli mengikuti limpasan air hujan menuju sungai. Disamping itu perilaku masyarakat yang masih membuang tinja baik manusia ataupun hewan ke sungai mengakibatkan timbul dan terindikasinya bakteri coli di sungai.
 4. Obyek data yang dijadikan sebagai sumber IPA (Indeks Pencemaran Air) adalah 4 sungai yang melewati Kota Magelang yaitu Sungai Progo, sungai Elo, Kali Bening dan Kali Manggis. Pengelolaan Sungai Progo dan Sungai Elo yang berhulu di kabupaten Temanggung berada pada kewenangan pemerintah pusat sedangkan pengelolaan kali Bening dan Kali Manggis yang berhulu di Kabupaten Magelang kewenangannya berada pada Provinsi Jawa Tengah. Dengan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melewati batas administratif wilayah yang berbeda maka kualitas air sungai akan terpengaruh oleh daerah lain di sekitarnya meskipun obyek pemantauan dalam hal ini sungai yang melewati wilayah kota Magelang telah melakukan upaya pengendalian lingkungan. Dengan adanya pengaruh kewilayahan terhadap permasalahan pencemaran lingkungan maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan lingkungan tidak bisa diselesaikan dengan batasan administratif wilayah tapi harus dengan batasan ekologis. Artinya apabila pencemaran di daerah hulu tidak tertangani dengan baik pasti akan mengakibatkan pengelolaan dan pengendalian pencemaran akan menjadi tidak optimal.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2018 adalah dengan mempertahankan capaian yang sudah sesuai track serta memastikan solusi bagi indikator yang yang belum tercapai terutama bagi indikator yang perlu upaya keras yang akan dilakukan pada tahun 2018) antara lain dengan upaya :

1. Industri yang membuang limbahnya ke sungai perlu memperbaiki kualitas limbah cairnya dengan mengupayakan semaksimal mungkin dalam pengolahan limbah cairnya (IPAL) sebelum dibuang ke badan air (sungai) sekitar.

2. IPAL dari industri-industri sekitar kawasan sungai baik Sungai Progo dan Sungai Elo maupun anak-anak sungainya yang sudah ada harus dioperasikan secara periodik dengan menjamin kualitas limbahnya sudah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan sehingga tidak merusak ekosistem sungai, dan kualitas air sungai itu sendiri.
3. Program analisa air sungai tersebut sebagai salah satu instrument dari Program Kali Bersih (PROKASIH) perlu dilakukan setiap tahun sehingga bisa mengetahui kondisi pencemaran air sungai di Kota Magelang.
4. Pembuatan kebijakan dan program prioritas pengelolaan lingkungan hidup harus selalu berprinsip pembangunan berwawasan lingkungan dan harus selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Semakin kritisnya ketersediaan air untuk keperluan manusia memerlukan pengembangan sistem pengelolaan sumber daya air terpadu (one management for one watershed) dengan Pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan dan konservasi sumber daya air, disamping upaya penghematan air secara sungguh-sungguh, serta memulihkan kondisi dan kualitas Air Sungai Progo dan Sungai Elo yang dirasa sudah semakin menurun kualitasnya maka dapat dilakukan upaya pemulihan, antara lain (1) melalui pembuatan IPAL domestik bagi permukiman-permukiman (IPAL Komunal), (2) Konservasi air sungai (3) pencegahan pencemaran lingkungan dengan pemantauan kualitas industri-industri di sekitar wilayah Kota Magelang , (4) penegakan hukum lingkungan melalui kerja sama antar pemangku kepentingan di semua tingkatan.
6. Mengendalikan pencemaran air yang efektif sesuai dengan baku mutu air dan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pencemaran air serta mengendalikan secara terpadu daya rusak air.
7. Menerapkan prinsip-prinsip pencemar dan atau perusak lingkungan hidup yang bertanggung jawab, serta mekanisme insentif dan disentif dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya pengembangan sistem hukum, instrumen hukum, pentaatan dan penegakan hukum termasuk instrument alternatif serta upaya rehabilitasi lingkungan hidup.
9. Meningkatkan peran antar individu, kelompok-kelompok masyarakat, dan jejaring dalam pengendalian dampak lingkungan.
10. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam melakukan inisiatif dan inovasi di bidang pelestarian lingkungan, antara lain melalui penyelenggaraan pendidikan lingkungan sejak dini serta peningkatan kegiatan riset dan pengembangan.
11. Mengembangkan dan menguatkan kelembagaan lingkungan hidup, baik pemerintahan maupun non pemerintahan, di semua tingkatan untuk pelestarian fungsi lingkungan.
12. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, antara lain melalui penerapan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial korporasi (Corporate Social Responsibility) dan tanggung gugat korporasi (Corporate Accountability).
13. Meningkatkan keikutsertaan dan peran aktif semua pemangku kepentingan dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup global tanpa mengabaikan kepentingan pengelolaan lingkungan hidup lokal dan nasional.
14. Meningkatkan pengetahuan masyarakat sekitar DAS Progo tentang sungai dan air tanah, baik dari segi kualitas dan kuantitas sungai dan air tanah dan Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan etika berbudaya ramah lingkungan termasuk didalamnya budaya tidak membuang sampah di sungai.

15. Daerah hulu Sungai Progo dan Sungai Elo diusahakan dipertahankan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Daerah tengah direkomendasikan dengan mempertahankan tanaman bambu dan penanaman tanaman keras, menambah daerah resapan serta vegetasi untuk menahan erosi dan tebing sungai serta meningkatkan suplai air tanah dan mengurangi tingkat pencemaran.
16. Meningkatkan kearifan terhadap lingkungan (khususnya sungai) kepada masyarakat sejak dini dan mengembangkan budaya bersih sungai sehingga kualitas, kebersihan dan keindahan sungai selalu terjaga selama lamanya.
17. Mengembangkan perencanaan perlindungan badan air (khususnya sungai) secara komprehensif dan terarah dari hulu sampai hilir sebagai satu kesatuan ekologis.
18. Dibentuk sekretariat bersama untuk menangani masalah lingkungan di DAS Progo dan DAS Elo.
19. Identifikasi PointSos dalam penentuan daerah area beresiko pencemar aliran sungai Progo maupun Sungai Elo dipertajam .

Sedangkan indikator volume sampah yang dibuang ke TPSA tidak tercapai dikarenakan :

1. Besarnya beban volume sampah tidak terlepas dari minimnya pengelolaan sampah dari sumber penghasil dan di tempat pembuangan sementara (TPS) sampah. Baru sekitar 2,4 % atau sekitar 8,57 m³/hari sampah yang berkurang dari sumbernya yang didaur ulang atau dibuat kompos. Sementara itu, sisanya sekitar 86% dibuang begitu saja tanpa pengolahan ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Dan, 12% ada pengurangan di TPS. Tak heran bila sampah akan menumpuk di TPA. Akibatnya, daya tampung TPA akan menjadi cepat terpenuhi. Besarnya volume sampah di TPA juga mempengaruhi biaya pengelolaan sampah menjadi semakin tinggi.
2. Pemilahan sampah mestinya sudah harus dilakukan sejak berada di sumber sampah. Sampah yang sudah terpilah mestinya dapat dimanfaatkan sesuai dengan jenisnya. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi tentunya dapat dimanfaatkan kembali menjadi sumber pendapatan, sedangkan material organik dapat dilakukan fermentasi menjadi kompos bahkan biogas, sedangkan yang dipandang sebagai residu dapat diangkut oleh petugas kebersihan. Sehingga jumlah sampah yang dibawa ke TPA menjadi semakin sedikit. Namun demikian karena masih kurang sadarnya masyarakat, pemilahan sampah belum banyak dilakukan. Ada pula sebagian kecil masyarakat yang sudah memilah sampahnya, namun oleh petugas kebersihan, sampah tersebut dijadikan satu kembali, sehingga apa yang sudah dilakukan sebagian masyarakat tadi menjadi sia-sia.
3. Upaya Pemerintah Daerah dalam mengedukasi masyarakat sudah banyak dilakukan. Sudah banyak trigger untuk masyarakat seperti program Bank Sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup, program TPS 3-R dari Kementerian Pekerjaan Umum, serta Pengembangan Kampung Organik oleh Pemerintah Kota Magelang, namun hingga saat ini program pengurangan dan penananan sampah baik berbasis masyarakat maupun komunitas belum membawa hasil yang signifikan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan volume sampah dari sumbernya masih sangat minim. Masyarakat belum begitu paham akan kondisi "darurat sampah" yang tengah menyelimuti permasalahan sampah di Kota Magelang.
4. Di samping itu untuk pengelolaan sampah TPST 3R yang berada di Kota Magelang juga belum dilaksanakan secara optimal, seharusnya dengan adanya keberadaan 3 TPST 3R bisa dimaksimalkan untuk mengurangi volume sampah sebelum dibuang ke TPSA.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Magelang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup harus benar-benar bekerja keras dalam melakukan berbagai macam terobosan untuk menangani permasalahan sampah ini.

Masyarakat harus diajak secara paksa untuk mengetahui kondisi riil permasalahan sampah di Kota Magelang yang sudah memasuki masa “darurat sampah”. Masyarakat harus diajak secara nyata untuk ikut berkontribusi dalam penanganan sampah. Harus sudah saatnya masyarakat berawal dari masing-masing sumbernya melakukan penanganan dan pengelolaan sampah. Sosialisasi dan pelatihan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup harus dilaksanakan secara nyata di masing-masing masyarakat, baik perorangan, kelompok, swasta ataupun pemerintah. Sehingga diharapkan nantinya permasalahan sampah di Kota Magelang bisa tertangani.

Sedangkan indikator Prosentase sampah perkotaan yang ditangani baru tercapai sekitar 99,08 %, dan akan tercapai pada tahun 2018. Hal ini disebabkan pada tahun 2017 ini banyak armada pengangkut sampah yang rusak dan masuk bengkel. Namun pada tahun 2018 yakin akan tercapai sesuai dengan target yang ditentukan setelah servis armada pengangkut sampah selesai dan adanya tambahan armada pengangkut sampah pada tahun 2018.

2.1.3.1.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sebagai suatu rangkaian kegiatan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan yang dilakukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan yang hasilnya digunakan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, informasi administrasi kependudukan memiliki nilai yang sangat strategis bagi penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan yang baik, perlu adanya peningkatan faktor – faktor yang mempengaruhinya. Intervensi program maupun kegiatan yang harus dilakukan sangat diperlukan guna mendorong capaian kinerja yang belum memenuhi target. Dan sebaliknya, capaian kinerja yang telah memenuhi target perlu untuk dipertahankan. Capaian target kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan di tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2 - 7

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPd Th.2017	Status Capaian
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan.	Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%	100%	93.51%	100%	●
		Cakupan penduduk memiliki KIA	100%	-	57.84%	100%	●
		Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%	85%	85.0%	85.0%	●
		Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	925	935	937.1	937.1	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
		Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%	100%	100%	100%	●
		Persentase kepemilikan Akte kematian	75%	60%	79.82%	79.82%	●
		Terbangunnya system pelayanan administrasi terintegrasi	100%	40%	50%	50%	●

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2017

Keterangan:

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi tahun 2017 > 100% target 2017 atau > 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 > 80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 < 80% target 2017 atau < 80% target RPJMD)

Dari 7 (tujuh) indikator yang ditetapkan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2016 – 2021 dapat dikatakan bahwa semua indikator kinerja telah mencapai target. Namun masih perlu adanya langkah-langkah yang harus dilakukan guna lebih mengoptimalkan capaian kinerja di tahun mendatang. Sebagai contoh, pada saat dilakukan evaluasi internal dari 3500 sampel penduduk yang belum memiliki KTP-el dan berstatus sebagai penduduk kota Magelang ternyata ditemukan sejumlah 849 penduduk yang telah terbukti memiliki KTP-el luar kota Magelang (memiliki KTP-el ganda). Mensikapi hal tersebut, perlu intervensi kegiatan terkait penyusunan daftar Penduduk Wajib KTP yang belum memiliki KTP, verifikasi ulang terkait status domisili penduduk Kota Magelang, penduduk yang sudah meninggal tetapi belum dilaporkan oleh pihak keluarga, Sudah Pindah tapi belum lapor, atau kondisi jompo/difabel sehingga belum memiliki KTP.

Optimalisasi manfaat KIA juga masih perlu ditingkatkan karena sampai saat ini, fungsi dan manfaatnya belum begitu dirasakan oleh warga Kota Magelang terkait dengan kebutuhan Rekreasi, kebutuhan peralatan sekolah, kebutuhan buku maupun layanan kesehatan.

2.1.3.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencakup dengan 6 (enam) program prioritas dengan 12 indikator kinerja, dengan target dan capaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2 - 39

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017

No	Program Prioritas / Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian	Keterangan
1	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan					
1	Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	53%	29%	35%	121%	●

2	Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	4	4	4	100%	●
2	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa					
1	Persentase PL KB yang mendapat pembinaan				100%	
3	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	15	10	10	100%	●
2	LPM berprestasi					
	Tingkat kota	65%	41%	93%	226%	●
	Tingkat provinsi	peringkat 1	peringkat 1	Peringkat 2		▶
	Tingkat nasional	peringkat 1	peringkat 1	-		▼
3	Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	71%	24%	24%	102%	●
4	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143	143	143	100%	●
4	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa					
1	Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100,00%	87.50%	22.82%	26%	▼
5	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					
1	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	82%	54%	100%	185%	●
6	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan					
1	Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	●

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 100% target 2017 atau 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 80% target 2017 atau 80 % target RPJMD)

Dari 12 indikator kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdapat 9 indikator yang telah mencapai target, sedangkan yang belum tercapai ada 3 indikator. Ketiga indikator tersebut adalah :

a. Prestasi LPM di tingkat provinsi

Pada tahun 2017 Kelurahan Jurangombo Selatan mewakili Kota Magelang meraih Juara II dalam lomba BBGRM tingkat Provinsi. Pada tahun sebelumnya (2016) Kota Magelang meraih Juara I pada lomba yang sama. Sebagai sebuah ajang lomba, maka persaingan ketat atas perebutan kejuaraan merupakan hal yang wajar.

b. Prestasi LPM di tingkat nasional

Pada tahun 2017 tidak ada lomba yang diselenggarakan di tingkat nasional.

c. Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan partisipasi pembangunan desa

Jumlah kader LPM sampai dengan tahun 2017 sebanyak 425 orang, yang sudah mengikuti pelatihan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat kelurahan (P3MK) baru 97 orang (23%). Target kinerja dalam dokumen RPJMD

adalah 87,50%, Dihadapkan dengan keterbatasan anggaran maka angka target tersebut terlalu tinggi, sehingga sesuai dengan DPA yang ada, target pelatihan kader ditargetkan sebesar 18% (realisasi tercapai).

Teknologi tepat guna (TTG) adalah teknologi yang ditemukan atau diciptakan dengan tujuan untuk semakin meningkatkan atau membuat pekerjaan manusia semakin lancar, termasuk pula bisa meningkatkan nilai ekonomi. Teknologi tersebut tidak hanya asal dibuat namun dibuat dengan tepat sesuai dengan kebutuhan manusia. Masyarakat pada dasarnya sebagian sudah memanfaatkan TTG secara mandiri, namun program pengembangan TTG oleh pemerintah masih terkendala dengan proses yang belum sinergis. Koordinasi antar instansi seperti Litbang, Perindustrian, akademisi dan Lembaga yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat perlu lebih intensif. Hasil-hasil Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) yang dikembangkan oleh Balitbang, perlu diterapkan di masyarakat.

LPM sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dituntut untuk dapat berpartisipasi baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pelatihan LPM dalam perencanaan partisipasi pembangunan desa dimaksudkan agar LPM dapat memiliki kapasitas sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan.

Program UP2K-PKK dilaksanakan dalam bentuk pelatihan-pelatihan bagi anggota masyarakat (ibu-ibu PKK). Harapannya ibu-ibu tersebut dapat mengembangkannya menjadi tambahan penghasilan. Pada kenyataannya pelatihan-pelatihan tersebut hanya menjadi ketrampilan yang dipakai sendiri dan jarang sekali menjadi usaha.

17 LKK yang tersebar di setiap kelurahan dan berdiri sejak tahun 2007 seharusnya dapat berkembang dan membantu mengatasi masalah permodalan bagi masyarakat usaha mikro/kecil di masyarakat. Pada kenyataannya LKK yang sehat diukur pada triwulan III ini hanya 35% (meskipun melampaui target). Dengan banyaknya LKK yang "Tidak Sehat", maka diperlukan langkah-langkah penanganan khusus agar dana yang ada dalam LKK dapat diberdayagunakan sebaik-baiknya.

Upaya yang perlu dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2019 adalah dengan :

- a. Pelatihan P3MK bagi LPM
- b. Pembentukan lembaga yang mengelola sosial budaya di tingkat kelurahan
- c. Pembinaan/pelatihan bagi LKK dan fasilitasi untuk berbadan hukum
- d. Menjalin kemitraan LPM dengan berbagai pihak dalam pengenalan dan penerapan TTG
- e. Penguatan ekonomi rumah tangga melalui UP2K-PKK

2.1.3.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mencakup 7 (tujuh) program dengan 28 indikator sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 - 40

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017

No	Program Prioritas / Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Realisasi 2017	Kinerja	Status
1	Program Keluarga Berencana					
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	100%	●
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja					

1	Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun	1%	2%	2.03%	98,50%	▶
3	Program pelayanan kontrasepsi					
1	Cakupan peserta KB aktif	81,00%	77.50%	78.63%	101%	●
4	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri					
1	Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	81%	64%	64.38%	101%	●
5	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR					
1	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	2%	3%	2.98%	112,35%	●
6	Program Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS					
1	Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	15%	3%	15%	494%	●
7	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga					
1	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpe-nuhi	3%	5%	5.00%	100%	●
2	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	81%	77%	77.43%	101%	●
3	Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)	88%	88%	88.28%	100%	●
4	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) kelurahan	100%	100%	167.00%	167%	●
5	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan	100%	100%	100%	100%	●
6	Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	30%	100%	333%	●
7	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan	30%	100%	100%	100%	●
8	Partisipasi laki-laki dalam ber-KB	13%	10%	10.03%	100%	●
9	Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri	67%	57%	57.09%	100%	●
10	Persentase peserta KB yang putus pakai (drop out)	8%	13%	9.08%	130,15%	●
11	Persentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun	2%	3%	2.03%	132,33%	●
12	Persentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	95%	88%	89.22%	101%	●
13	Persentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR)	100%	95%	96.83%	102%	●
14	Persentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif	100%	100%	100%	100%	●
15	Persentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif	100%	100%	100%	100%	●

16	Persentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun	2%	3%	2.97%	101%	●
17	Persentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun	1%	2%	2%	100%	●
18	Persentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro	100%	100%	100%	100%	●
19	Persentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga	100%	100%	100%	100%	●
20	Persentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan	100%	100%	100%	100%	●
21	Persentase jumlah keluarga sejahtera	93%	87%	87.50%	101%	●
22	Rasio kesesuaian kegiatan Bina Keluarga dengan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah	75%	20%	33%	165%	●

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 >= 100% target 2017 atau >= 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 < 80% target 2017 atau < 80 % target RPJMD)

Dari 29 indikator kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara keseluruhan telah mencapai target. Sehingga upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2019 adalah dengan menjaga dan mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya agar target akhir tahun tetap dapat tercapai. Hal yang harus selalu mendapat perhatian adalah :

- a. Adanya pernikahan dini (dibawah usia 20 tahun) dan jarak kehamilan yang kurang dari 3 tahun ;
Sebagian besar terjadi karena married by accident (hamil sebelum menikah), biasanya disebabkan oleh pergaulan yang terlalu bebas, konten pornografi dan kurangnya perhatian dari orang tua.
Diperlukan adanya kerjasama terkait pendidikan sex, pengoptimalan fungsi Pusat Informasi dan Konseling Remaja / Mahasiswa,
- b. Kepesertaan dalam KB, UPPKS, BKB dan BKR ;
Ketika kesejahteraan suatu keluarga meningkat, apalagi jika 2 anak yang dimiliki memiliki jenis kelamin yang sama, maka terkadang muncul keinginan untuk menambah anak dengan harapan mendapatkan anak dengan jenis kelamin yang berbeda dari anak sebelumnya.
- c. Fenomena Bonus Demografi harus disikapi dengan upaya penciptaan keluarga sejahtera dengan kecukupan lapangan kerja bagi penduduk.

2.1.3.1.15 Perhubungan

Indikator kinerja urusan Perhubungan melibatkan 6 (enam) program prioritas dan 13 (tiga belas) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 8

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2017

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
1.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah pelayanan umum	1	1	5	500%	●
2	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik	100%	40%	20%	50%	▼
		Jumlah Sub terminal (Terminal Tipe C) yang tertata	3	1	1	100%	●
		Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik	100%	55%	55,70%	101,2%	●
		Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum	100%	86%	87%	101,1%	●
		Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte)	22	17	17	106%	●
3	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum	9,25%	7,78%	8,40%	107,9%	●
		Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	100%	45%	38,88%	86,4%	▶
4	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan	8.136	7.936	8.216	103,5%	●
		Rasio Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang tidak melakukan pengujian	4%	4%	4%	100%	●
5	Program peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.900.000	2.900.000	3.039.336	104,8%	●
		Rasio ketersediaan angkutana umum terhadap jumlah penduduk	5%	5%	4,76%	95,2%	▶

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
6	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	7	7	7	100%	●

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Magelang, 2017

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 100% target 2017 atau 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 80% target 2017 atau 80 % target RPJMD)

Dari 13 (tiga belas) indikator kinerja urusan Perhubungan terdapat 10 (sepuluh) indikator yang tercapai yaitu jumlah pelayanan umum, jumlah sub terminal (Terminal Tipe C) yang tertata, rasio prasarana parkir dengan kondisi baik, tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum, jumlah tempat-tempat pemberhentian angkutan umum (halte), tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum, jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan, rasio kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) yang tidak melakukan pengujian, jumlah arus penumpang angkutan umum dan jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara.

Sedangkan indikator yang akan tercapai ada 2 (dua) yaitu persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi dan rasio ketersediaan angkutan umum terhadap jumlah penduduk. Kedua indikator kinerja ini optimis akan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD tahun 2021.

Disisi lain terdapat 1 (satu) indikator yang perlu upaya keras yaitu prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik. Kinerja indikator ini belum memuaskan karena terdapat kendala antara lain sebagai berikut :

Terminal angkutan barang bertujuan untuk mengelola arus distribusi keluar masuk barang baik dalam kota, antar kota/kabupaten, maupun yang berskala regional dan nasional. Selain itu, pengoperasian terminal angkutan barang diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan angkutan barang yang efektif dan efisien sehingga mengurangi beban lalu lintas di Kota Magelang. Terminal angkutan barang merupakan kontrol penyelenggaraan angkutan barang yang melintas kota dan dan juga digunakan sebagai tempat bongkar muat kendaraan barang yang tidak memiliki gudang. Kondisi terminal angkutan barang di Kota Magelang dapat dilihat dengan terpenuhinya 7 (tujuh) komponen yang harus ada, yaitu lahan, aktifitas, gudang, rambu-rambu, fasilitas umum, pos pengawasan dan manajemen pengelolaan. Kendala pencapaian kinerja RKPD tahun 2017 untuk indikator kinerja prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik yaitu :

a. Kendala tata guna lahan.

Lahan terminal angkutan barang Kota Magelang yang ada di Cangkuk, Kota Magelang saat ini peruntukannya tidak hanya difungsikan untuk terminal angkutan barang, namun juga dimanfaatkan untuk Samsat Cepat Kota Magelang dan Kantor Unit Patwal Polres Magelang Kota.

b. Kendala aktifitas.

Aktifitas di terminal angkutan barang di Canguk, Kota Magelang masih belum maksimal. Terminal angkutan barang di Canguk Kota Magelang tidak digunakan sebagaimana fungsinya, namun digunakan sebagai tempat parkir dan tempat istirahat pengemudi angkutan barang serta masih ditemukan di lapangan, kendaraan besar pengangkut barang yang memasuki kawasan Kota Magelang pada pukul 06.00 -18.00 WIB

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan perhubungan terutama pada tahun 2019 adalah dengan mempertahankan capaian yang sudah sesuai track serta memastikan solusi bagi indikator yang belum tercapai terutama bagi indikator yang perlu upaya keras yang akan dilakukan pada tahun 2019, antara lain dengan upaya optimalisasi fungsi terminal angkutan barang di Canguk, Kota Magelang sesuai peruntukannya. Sistem transportasi perkotaan yang dapat berfungsi dengan baik merupakan salah satu faktor dalam mewujudkan wilayah perkotaan yang efisien. Perkembangan perkotaan yang sangat pesat diiringi pertumbuhan penduduk yang sangat pesat pula tentu akan menyebabkan berbagai masalah dalam bidang transportasi yang harus segera diatasi dan juga dapat menimbulkan tuntutan untuk menambah kualitas dan kuantitas sistem transportasi. Terminal barang bukan saja merupakan komponen fungsional utama dari sistem transportasi, tetapi juga sering merupakan prasarana dimana titik kemacetan mungkin terjadi.

2.1.3.1.16 Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika di Kota Magelang pada tahun 2017, dilaksanakan melalui 5 program prioritas yang diukur dengan 13 indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut terbagi dalam indikator kinerja sasaran, kinerja program unggulan dan kinerja daerah. Indikator kinerja sasaran terdiri atas 2 indikator, indikator program unggulan sebanyak 7 indikator, indikator kinerja daerah berjumlah 2 buah, sedangkan indikator urusan komunikasi dan informatika sebanyak 12.

Satu indikator bisa menjadi tolok ukur bagi satu kinerja tetapi juga dapat menjadi tolok ukur dalam beberapa kinerja, baik sasaran, program unggulan maupun kinerja daerah. Persentase PD yang menerapkan e-Government merupakan indikator kinerja dalam urusan komunikasi dan informatika yang sekaligus menjadi indikator bagi sasaran, program unggulan dan kinerja daerah. Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi merupakan indikator bagi sasaran dan kinerja daerah. Program unggulan dalam urusan komunikasi dan informatika adalah program sarana dan prasarana bidang teknologi dan informatika serta program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi yang seluruh indikatornya sudah tertuang dalam indikator urusan komunikasi dan informatika

Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 42

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2017

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
1	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	90%	70%	0%	0%	

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
2	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media:					
		- Radio	60 kali siar / 5 agama & kepercayaan (100%)	60 kali siar / 5 agama & kepercayaan (100%)	365 kali siar/ 3 agama		
		- Media Cetak	12 kali / 5 agama & kepercayaan (100%)	12 kali / 5 agama & kepercayaan (100%)	4 cetak majalah / 2 agama		
		Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3	3	6	200%	●
		Cakupan KIM (Jumlah KIM)	100% (17)	100% (17)	100% (21)	100%	●
		Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan	7	6	6	100%	●
		Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-	-	6		
3	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Jumlah dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	1	1	1	100%	●
4	Program sarana dan prasarana bidang teknologi informatika	Interoperabilitas antar system informasi	4	0	2		
		Cakupan WAN (Wide Area Network) kota	100%	30%	41,25%	137,5%	●
		Cakupan data yang terpusat dan terkendali	100%	60%	50%	83,33%	▶
		Persentase PD yang menerapkan e-government	100%	100%	100%	100%	●
5	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Sumber daya manusia pada PD yang memiliki kecakapan di bidang teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	●

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 100% target 2017 atau 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 80% target 2017 atau 80 % target RPJMD)

Dalam urusan komunikasi dan informatika, terdapat dua indikator yang belum memenuhi target, yaitu:

- 1) Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan yang belum terealisasi. Saat ini sudah dimulai peninjauan dengan Ketua DPRD Kota Magelang terkait rencana publikasi hasil kegiatan dewan agar terjadi kesepahaman terkait pokok materi yang akan dipublikasikan. Publikasi kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebagai media untuk menunjukkan kinerja dewan selama masa pengabdian.
- 2) Publikasi materi keagamaan melalui media cetak yang ditargetkan terbit setiap bulan untuk 5 agama, hanya terealisasi pencetakan majalah Dinamika yang terbit setiap triwulan untuk agama Islam, Katolik, Nasrani dan Hindhu . Sedangkan publikasi yang melalui radio, meskipun sudah dilakukan setiap hari namun baru untuk 2 agama (Islam dan katolik). Kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini terkait materi yang akan disampaikan. Narasumber yang diharapkan dapat memberi materi belum memberikan respon yang positif.

Indikator cakupan data yang terpusat dan terkendali, pada tahun 2017 juga belum mencapai target (akan tercapai). Wujud kongkret dari indikator kinerja cakupan data yang terpusat dan terkendali adalah terbangun dan beroperasinya command center dengan baik. Upaya untuk mengejar kinerja indikator direncanakan melalui penyusunan DED Command Center dan pengadaan modul dashboard di tahun 2018 serta pembangunan fisik dan launching pada tahun 2019.

Sembilan indikator lainnya dalam urusan komunikasi dan informatika sudah mencapai target. Realisasi indikator jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin tercapai 6 dari target 3 yang ditetapkan. Kerjasama yang sudah terjalin adalah dengan beberapa badan dan lembaga pada beberapa urusan yaitu pendidikan dengan TK Pertiwi, keagamaan dengan Kemenag, pariwisata dengan PD. Kyai Langgeng, perbankan dengan PD. Bank Magelang, Pengadilan Negeri, dan kesehatan dengan RST.

Realisasi cakupan KIM di tahun 2017 juga sudah mencapai 100% sesuai target yang ditetapkan. Pada tujuh belas kelurahan di Kota Magelang sudah terbentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), bahkan apabila dilihat dari kuantitas, Kota Magelang sudah memiliki 21 KIM yang artinya terdapat lebih dari satu KIM pada beberapa kelurahan.

Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Magelang sudah memenuhi target di tahun 2017. Ruang media informasi yang ada adalah Kelompok Informasi Masyarakat, FK Metra, Website, Radio (Magelang FM), Majalah (Dinamika) dan PPID. Sedangkan indikator jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa pada tahun 2017 tidak memiliki target, tetapi pada tahun 2018 memiliki target 1 kebijakan. Pada tahun 2017 sudah ada kebijakan terkait LPPL, Website, Medsos, PPID, Data Go, dan Majalah sebagai bentuk kontrol terhadap arus informasi media massa di kota Magelang. Interoperabilitas antar system informasi juga merupakan indikator yang belum ditarget di tahun 2017 tetapi sudah mulai dilaksanakan. Realisasinya pada tahun 2017 mencapai 2 sistem yang sudah di interoperabilitas, yaitu sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) dan sistem perijinan.

Penelitian yang dilakukan di tahun 2017 yang memenuhi target indikator jumlah dan penelitian bidang komunikasi dan informasi adalah kajian microcell sebagai rekomendasi penempatan menara telekomunikasi. Kuantitas kajian yang dikeluarkan dalam hal penyelenggaraan menara telekomunikasi pada tahun 2017 mencapai 4 buah kajian.

Cakupan WAN (Wide Area Network) Kota Magelang pada tahun 2017 mencapai 41,25% dari target 30%. Jumlah titik yang sudah masuk cakupan WAN meliputi 66 titik dari 160 titik yang direncanakan. Meskipun sudah mencapai target, perlu dirumuskan strategi agar upaya pencapaian target tidak menelan dana yang besar. Hal ini karena sisa titik

yang ditargetkan berada di lokasi yang sulit dibandingkan titik yang lain, sehingga akan menelan biaya yang lebih besar dalam pembangunannya.

2.1.3.1.17 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Target dan capaian indikator kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah hingga akhir Tahun 2017 yang secara rinci tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 43

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2017

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
1	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase peningkatan kualitas pelaku UKM	7%	3%	23.51%	783.76%	●
		1. Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi Halal dan Merk	10%	10%	10.43%	104.30%	●
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru (UMKM)	100	75	79	105.33%	●
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan	7%	3%	3%	100%	●
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase koperasi aktif	94%	93,25%	93,15%	99,89%	▶
		Prosentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP	40%	25%	26.45%	105.80%	●
		Jumlah koperasi	235	225	219	97,33%	▶
		Jumlah koperasi syariah	24	16	14	87,50%	▶

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2017

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 100% target 2017 atau 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 80% target 2017 atau 80 % target RPJMD)

Dari delapan indikator kinerja urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah , terdapat 5 indikator yang telah mencapai target yaitu indikator Persentase peningkatan kualitas pelaku UKM, Persentase peningkatan jumlah KUM yang

terfasilitasi Halal dan Merk, Jumlah wirausaha baru (UMKM), Persentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan, Prosentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP Masing masing indikator kinerja memiliki capaian kinerja sempurna 100% bahkan lebih dari target capaian diatas 100%.

Dari kelima indikator tersebut diatas dapat tercapai tidak lepas dari peran aktif para pelaku KUM sendiri dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka, dan juga semakin mudahnya para pelaku KUM mengakses permodalan dari perbankan disamping juga adanya kerjasama antar OPD dalam melakukan upaya – upaya yang bertujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. OPD yang ikut aktif mendukung peningkatan kesejahteraan KUM yaitu Bagian Perekonomian Setda Kota Magelang melalui fasilitasi pengelolaan data SIKP, Fedep yang ikut berperan aktif mendukung Disperindag melalui kegiatan fasilitasi penguatan kelembagaan KUM, memfasilitasi pameran produk unggulan daerah, sosialisasi akses permodalan dengan perbankan serta fasilitasi pelatihan – pelatihan management pemasaran, Disnaker melalui BLK dalam upaya mencetak wirausaha baru dan peningkatan skil para pelaku KUM. Dan OPD lain yang secara tidak langsung membantu capaian indikator yang dibebankan pada Disperindag Kota Magelang.

Sedangkan yang akan tercapai adalah indikator indikator persentase Koperasi aktif dengan kinerja capaian mencapai 99.89%, jumlah koperasi dengan kinerja capaian mencapai 97.33% dan jumlah koperasi syariah dengan kinerja capaian baru mencapai 87,50%. Namun demikian indikator kinerja ini optimis akan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD tahun 2021.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu:

- SDM pengelola koperasi yang kurang memahami management berkoperasi secara baik dan benar
- Penelolaan Koperasi sebagian besar dilakukan oleh anggota koperasi itu sendiri dengan kata lain pengadministrasian koperasi menjadi kegiatan tampahan para pelaku usaha yg menjadi anggota koperasi tersebut sehingga pengelolaan koperasi belum dapat secara professional dijalankan.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terutama pada tahun 2019 adalah dengan mempertahankan capaian yang sudah sesuai track serta memastikan solusi bagi indikator yang yang belum tercapai terutama untuk indikator Prosentase koperasi aktif, Jumlah koperasi, Jumlah koperasi syariah perlu upaya keras pada tahun 2019 antara lain :

1. Pembinaan secara berkesinambungan kepada Koperasi – koperasi yang aktif untuk lebih ditingkatkan dalam pengelolaan management administrasi maupun management usaha kopersasi
2. Menggiatkan sosialisasi kepada kelompok – kelompok usaha bersama (KUB) untuk dapat membentuk koperasi
3. Menyelenggarakan pelatihan / bimbingan teknis perkoperasian guna meningkatkan pemahaman prinsip – prinsip berkoperasi baik koperasi konvensional maupun koperasi syariah sehingga diharapkan pada akhir periode RPJM target tersebut dapat terpenuhi 100%.

2.1.3.1.18 Penanaman Modal

Indikator kinerja urusan Penanaman Modal melibatkan 2 (dua) program prioritas dan 4 (empat) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 9

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2017

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
1.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.	Jumlah kerjasama pemerintah dan investor	4	2	2	100%	●
2.	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Pertumbuhan nilai investasi PMA	15%	5%	0.19%	3.80%	
		Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	15%	16.85%	112.3%	●
		Jumlah investor baru	200	164	1.510	920.7%	●

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2017

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 \geq 100% target 2017 atau \geq 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 $>$ 80% target 2017 atau $>$ 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 $<$ 80% target 2017 atau $<$ 80% target RPJMD)

Dari 2 (dua) program utama dengan 4 (empat) indikator, diketahui bahwa 3 (tiga) indikator kinerja dapat tercapai sedangkan 1 (satu) indikator perlu upaya yang keras untuk dapat mencapai karena capaian masih jauh di bawah target. Indikator kinerja Pertumbuhan nilai investasi PMA dan Indikator kinerja Pertumbuhan nilai investasi PMDN merupakan indikator prioritas daerah dengan sasaran meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Indikator ini sewajarnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah manakala indikator tersebut tidak dapat tercapai.

Dari table diatas jelas terlihat ada masalah serius pada indikator Pertumbuhan nilai investasi PMA yang ditargetkan pada tahun 2017 yaitu sebesar 5% hanya tercapai 0.19% atau dapat dikatakan kinerja capaian hanya 3.80%. hal tersebut disebabkan karena perusahaan yang ada di Kota Magelang belum / tidak melaporkan kegiatan penanaman modal asing DPMPPTSP. Terkait dengan kewajiban perusahaan untuk melaporkan kegiatan tersebut langsung ke BKPM Pusat, dan DPMPPTSP hanya sebagai tembusan, maka berdampak pada pertumbuhan Penanaman modal asing yang sebenarnya optimis sesuai target yang diharapkan tidak dapat kita ketahui. Permasalahannya yaitu ketersediaan laporan dari masing-masing perusahaan PMA yang ada di Kota Magelang yang langsung disampaikan ke BKPM Pusat. Untuk melengkapi data realisasi, PPMPPTSP perlu melakukan tindakan proaktif yaitu menghubungi BKPM pusat untuk mendapatkan data yang akurat sehingga gambaran riil investasi PMA dapat dilihat pencapaiannya.

Permasalahan lainnya yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal yaitu:

- kurang optimalnya dukungan terhadap potensi investasi karena kekurangsiapan sumberdaya dan sarana prasarana dalam menarik investor.

- Ketika investor tertarik melakukan investasi di kota magelang justru yang terjadi adalah Ketidaksiapan daerah dalam menyajikan data akurat lokasi investasi dan juga regulasi yang mendasari investor untuk dapat melakukan investasi pada lokasi – lokasi yang ditawarkan oleh DPMPTSP.
- Kewenangan dalam memperoleh informasi secara langsung dari perusahaan – perusahaan asing/investor asing yang melakukan kegiatan investasi di daerah masih terpusat pada provinsi atau bahkan kementerian yang menangani masalah investasi.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan Penanaman Modal i terutama pada tahun 2019 adalah dengan mempertahankan capaian yang sudah sesuai track serta memastikan solusi bagi indikator yang belum tercapai terutama untuk indikator Pertumbuhan nilai investasi PMA perlu upaya keras pada tahun 2019 antara lain :

1. Membangun koordinasi yang lebih intensif ke BKPM Provinsi maupun pusat untuk memperoleh data dan informasi
2. Menyusun dokumen studi kelayakan investasi pada 8 wilayah strategis yang telah rencanakan dalam perda RTRW Kota guna mendukung terealisasinya investasi oleh investor di kota magelang.

2.1.3.1.19 Kepemudaan dan Olah Raga

Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 10

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2017

No	Program Prioritas / Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Realisasi 2017	Kinerja	Status
1	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga					
1	Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan regional, nasional, dan internasional	7	6	6	100.00%	●
2	Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional					
	- Peringkat di POPDA SD	3	7	5	128.57%	●
	- Peringkat di POPDA SMP	9	17	19	88.24%	▶
	- Peringkat di POPDA SMA	16	22	19	113.64%	●
	- Peringkat di Dulongmas	NA	NA	0		
	- Peringkat di PORPROV	NA	NA	0		
3	Jumlah klub olah raga	183	183	183	100.00%	●
4	Jumlah organisasi olah raga	36	35	35	100.00%	●
2	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda					
1	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	91%	79.41%	85,71%	107,93%	●
2	Prestasi pemuda di tingkat Propinsi dan Nasional					
	a. Propinsi	8	6	1	16.67%	▼
	b. Nasional	1	0	0		
3	Program peningkatan peran serta kepemudaan					
1	Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	98,00%	94.00%	68,57%	72,95%	▼

2	Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1	1	0	0.00%	▼
3	Persentase pengangguran pemuda	5,37%	6.65%	6,27%	105,71%	●
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga					
1	Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi	5	4	3	75.00%	▼
2	Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	89%	65%	1	100.00%	●
5	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda					
1	Persentase kelompok wirausaha pemuda	75	50	70,58	141,16%	●
6	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba					
1	Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	2,57%	1.13%	1,19%	104,93%	●

Sumber : Disporapar Kota Magelang, 2017

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 100% target 2017 atau 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 80% target 2017 atau 80 % target RPJMD)

Dari 16 indikator kinerja urusan Kepemudaan dan Olah Raga, terdapat 10 indikator yang telah mencapai target, sedangkan yang akan tercapai ada 1 indikator dan yang capaian masih dibawah 80% ada 4 indikator.

Keempat indikator tersebut terjadi karena adanya kendala sebagai berikut :

a. Prestasi pemuda di tingkat Propinsi dan Nasional

Prestasi pemuda diraih oleh 5 orang dalam ajang lomba TUB-BB se eks Kedu, sedangkan pada tingkat provinsi hanya diperoleh 1 orang yang berprestasi. Pada tingkat nasional masih nihil.

b. Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi

Jumlah OKP yang terdaftar sebanyak 45 OKP, yang nampak masih aktif sebanyak 30 OKP, pasif 5 OKP dan sudah tidak operasional lagi sebanyak 10 OKP. Dari jumlah tersebut yang mengikuti pembinaan hanya sebanyak 24 OKP. Hal ini dikarenakan adanya agenda kegiatan yang waktunya bersamaan, sehingga OKP yang bersangkutan tidak ikut dalam kegiatan pembinaan.

c. Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi

Pemuda pelopor yang berhasil dijangkau untuk mengikuti lomba di tingkat provinsi sebanyak 7 orang, namun kesemuanya masih kalah dalam persaingan ketat/berat dengan daerah lain.

d. Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi

Revitalisasi lapangan olahraga untuk masyarakat terkendala simpang siur kewenangan OPD yang ditunjuk untuk melaksanakan revitalisasi. Semula telah dianggarkan di OPD Disporapar, namun karena lapangan olahraga yang akan direvitalisasi tersebut merupakan aset dari OPD lainnya (Kecamatan/Kelurahan), maka terjadi pembatalan pelaksanaan.

Upaya yang perlu dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2019 adalah :

1. Pembinaan, pelatihan, pengembangan, fasilitasi dan pendampingan dalam rangka menciptakan generasi muda yang berkualitas, berkarakter dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi dirinya.
Menghadapi ekses dari fenomena bonus demografi, maka dituntut secara bersama-sama menciptakan lapangan kerja secara kreatif dan inovatif.
2. Revitalisasi peran KNPI.
Organisasi kepemudaan (OKP) memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi Pemuda. Organisasi Kepemudaan baik yang resmi tercatat maupun tidak tercatat seperti komunitas, geng, paguyuban dll, yang tumbuh secara inisiatif dari sekelompok anak muda dalam kepentingan maupun hobby tertentu, perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan berbagai pihak. Peran KNPI sebagai induk organisasi pemuda perlu dioptimalkan sebagaimana mestinya untuk dapat menjadi mitra bagi pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan, mewadahi aspirasi pemuda dan sebagai komunikator berbagai program dan permasalahan kepemudaan.
3. Memusatkan perhatian untuk penyiapan pemuda pelopor, membangun sistem dan jaringan pengembangan, melakukan pembinaan dan pendampingan pra kompetisi.
4. Menjalinkan kerjasama dengan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk ikut berperan dalam pembinaan Kelompok Wirausaha Pemuda (KWP) ataupun kegiatan kepemudaan lainnya.
5. Inventarisasi, identifikasi dan revitalisasi lapangan olahraga yang tersebar diberbagai kelompok masyarakat. Dalam hal memutuskan OPD yang akan ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan revitalisasi, perlu adanya kebijakan tertulis semacam Surat Keputusan ataupun Surat Perintah dari Walikota utamanya dengan mempertimbangkan kualitas hasil akhir yang diinginkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.3.1.20 Statistik

Kinerja Urusan Statistik terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 -46
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
1	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase pemenuhan data statistik	95%	90%	90,99%	101,10%	●

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 100% target 2017 atau 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 80% target 2017 atau 80 % target RPJMD)

Penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan yang baik harus didasarkan data yang akurat. Kesalahan data yang digunakan mengakibatkan perencanaan yang dibuat tidak akan berguna. Dalam istilah sistem informasi dikenal istilah GIGO (garbage in garbage out) yang bermakna apabila input datanya sampah maka yang dihasilkan adalah sampah pula. Demikianlah data memegang peran yang sangat penting dalam sebuah formulasi perencanaan.

Kinerja urusan statistik tahun 2017 di Kota Magelang sudah memenuhi target yang ditetapkan. Saat ini telah tersedia 441 variabel data dari 484 variabel yang diperlukan. Dalam penyediaan data statistik, pemerintah Kota Magelang bekerjasama dengan BPS yang secara tupoksi berwenang dalam penyediaan data statistik melalui dokumen - dokumen seperti Daerah Dalam Angka, Analisis PDRB dan lain sebagainya.

2.1.3.1.21 Persandian

Kinerja Urusan Persandian terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 -47
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Ketersediaan SOP persandian	100%	50%	100%	200%	●
		Tingkat kapasitas SDM persandian	100%	100%	75%	75%	
		Persentase SKPD yang menerapkan SOP persandian	100%	60%	0%	0%	

Sumber : Diskominsta Kota Magelang, 2017

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 100% target 2017 atau 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 80% target 2017 atau 80 % target RPJMD)

Indikator kinerja urusan persandian melalui program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa baru tercapai satu indikator. Ketersediaan SOP persandian sudah disusun pada tahun 2017, akan tetapi baru direncanakan disosialisasikan pada tahun 2019 sehingga untuk indikator persentase SKPD yang menerapkan SOP persandian belum dapat dicapai. Tingkat kapasitas SDM persandian juga masih belum memenuhi target di tahun 2017. Tenaga khusus / ahli di bidang persandian saat ini berjumlah 2 orang dengan kapasitas SDM satu orang 100% dan satu orang 50% sehingga tingkat kapasitasnya baru mencapai 75%. Tenaga ahli di bidang persandian tersebut pada tahun 2018 pensiun 1 orang sehingga perlu strategi pemenuhan baik kuantitas maupun kapasitas SDM sandi agar memenuhi target di akhir RPJMD.

2.1.3.1.22 Kebudayaan

Kinerja Urusan Kebudayaan terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 48
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2017

No	Program Prioritas / Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian	Keterangan
1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya					
1	Prosentase Benda, Situs dan Kawasan	100	100%	100%	100%	●

	Cagar Budaya yang dilestarikan					
2	Jumlah pengunjung museum	5.600	5,150	6503	126%	●
3	Jumlah koleksi museum	15	11	60	545%	●
2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					
	Persentase Kelompok Kesenian dan					
1	Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	16,67	14.86%	18.47%	124%	●
2	Jumlah festival seni dan budaya.	14	11	10	91%	▶
3	Cakupan gelar seni 75%	100%	100%	100%	100%	●
3	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya					
1	Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang	230	223	222	100%	●
2	Misi kesenian 100%	50%	38%	100%	263%	●
4	Program Pengembangan Nilai Budaya					
1	Jumlah gedung kesenian	2	1	0	0%	●
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	15	11	11	100%	●
3	Cakupan kajian seni 50%	80	75%	73.33%	98%	▶
4	Cakupan fasilitas seni 30%	45	35%	71.43%	204%	●
5	Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	80	77%	75.00%	97%	▶
6	Cakupan tempat 100%	100	100%	100%	100%	●
7	Cakupan organisasi 34%	100	100%	100%	100%	●

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 = 100% target 2017 atau = 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 < 80% target 2017 atau < 80 % target RPJMD)

Dari 15 indikator kinerja urusan Kebudayaan, terdapat 12 indikator yang telah mencapai target, sedangkan yang akan tercapai ada 3 indikator.

2.1.3.1.23 Perpustakaan

Indikator kinerja urusan melibatkan 6 (enam indikator) dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 -49
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan	Persentase peningkatan judul buku	15,99%	2,57%	11,15%	>100%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
	Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah buku	9,89	2,64%	14,43%	>100%	●
		Prosentase SDM pengelola perpustakaan yang berkompeten	66,35	47,39	47,73%	>100%	●
		Presentase perpustakaan aktif	28,44	18,96%	18,96%	100%	●
		Cakupan pelayanan melalui e-Library	5%	0	0,00%	100%	●
		Peningkatan Layanan Perpustakaan Promosi	25,00%	8,33%	71,62%	>100%	●

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 100% target 7 atau 100% target RPJMD)
- : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 80% target 2017 atau 80 % target RPJMD)

Dari 6 (enam) indikator pada urusan perpustakaan, seluruhnya telah mencapai target, bahkan beberapa diantaranya melampaui target tahun 2017 seperti persentase peningkatan jumlah buku, persentase peningkatan judul buku, persentase SDM pengelolaan perpustakaan yang kompeten serta peningkatan layanan promosi perpustakaan.

Tahun 2017 perpustakaan Pemerintah Kota Magelang telah menambah media baca melalui ebook. Melalui eksistensi ebook ini menyasar para pembaca yang memiliki literasi bacaan secara soft. Hal ini mempengaruhi realisasi dan tingkat capaian dua indikator pertama dari tabel di atas.

Sementara fokus pada kemampuan SDM pengelola juga menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat, disamping melalui prop=mosi yang gencar untuk gemar membaca dan meningkatkan literasi masyarakat.

Meski telah tercapai target 2017, namun demikian bukan berarti tantangan pencapaian target ke depan semakin ringan. Hal ini mengharuskan fokus ekstra bagi eksekusi program kegiatan di urusan ini, terutama paling berat adalah untuk mencapai indikator e-library.

2.1.3.1.24 Kearsipan

Indikator kinerja urusan melibatkan 9 (sembilan) indikator dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 -50
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 7

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD 2017	Status Capaian
1	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase sarpras arsip yang terpelihara	89%	40%	40,00%	100%	●
2	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Cakupan pelayanan acces arsip	82%	67%	104,29%	155,65%	●
		Tingkat Komptensi SDM Pengelola Kearsipan	67%	39%	39%	100%	●
3	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase OPD yang telah melaksanakan arsip baku	100%	34%	34,48%	101,4%	●
		Persentase arsip dan risalah	85%	82%	82%	100%	●
		Persentase Penyelamatan Arsip	73%	47%	47,00%	100%	
4	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Presentase implementasi e-arsip	100%	17%	8,93%	52,53%	
		Persentase ketersediaan sarpras arsip	60%	10%	16,67%	166,67%	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang, 2017

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 = 100% target 2017 atau = 100% target RPJMD)
- : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 < 80% target 2017 atau < 80 % target RPJMD)

Belum seluruh indikator dalam urusan kearsipan telah mencapai target, meski beberapa diantaranya melampaui target tahun 2017. Terdapat satu kegiatan yang tidak mampu mencapai target yaitu terkait implementasi e-arsip. Sama halnya dengan urusan perpustakaan tantangan pencapaian target ke depan tidak semakin ringan, terlebih implementasi arsip yang masih belum optimal pelayanannya. Hal ini mengharuskan fokus ekstra bagi eksekusi program kegiatan di urusan ini, terutama paling berat adalah untuk mencapai implementasi e-arsip.

2.1.3.1.25 Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan serapan sebesar Rp Indikator kinerja urusan melibatkan 6 (enam indikator) dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 -51

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

N O	URUSAN/PROGRAM KERJA/KEGIATAN	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status capaian
				Target 2017	Capaian 2017 sd TW IV		
1	2	6	7	8	9		
1	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	1. Prosentase unit pengolahan ikan yang telah tersertifikasi SKP	0	0	6%	>100%	●
		2. Jumlah pengolah ikan yang telah melaksanakan prinsip dasar pengolahan yang benar	6	2	2	100%	●
2	Program pengembangan budidaya perikanan	3. Produksi hasil perikanan :Produksi ikan	167.01	160.65	153.,01	95,24%	
		4. Persentase unit pembenihan ikan bersertifikasi CBIB	70%	30%	30%	100%	●
3	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	5. Luas lahan perikanan organic	0.6	0.2	0,1	50%	▼

Sumber: Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 > 100% target 2017 atau > 100% target RPJMD)
- : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 < 80% target 2017 atau < 80 % target RPJMD)

Tabel di atas menunjukkan capaian indikator kinerja urusan Kelautan dan Perikanan dan diketahui bahwa dari 5 (lima) indikator, baru terdapat 3 (tiga) indikator yang tercapai, yaitu Prosentase unit pengolahan ikan yang telah tersertifikasi SKP, Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar, Persentase unit Pembudidayaan ikan yang telah bersertifikasi CBIB.

Adapun indikator yang belum tercapai adalah indikator Produksi hasil perikanan :Produksi ikan, dan luas lahan perikanan organik. Tidak ada target kinerja sampai dengan akhir RPJM tahun 2021, sehingga tahun 2017 juga tidak terdapat target capaian untuk unit pengolahan ikan yang telah bersertifikasi SKP. Kinerja untuk indikator luas lahan perikanan organik perlu kerja keras untuk dapat mencapai target kinerja di tahun 2021 sebesar 100%, sedangkan indikator produksi hasil perikanan : produksi ikan optimis tercapai pada akhir RPJMD 2016-2021.

Permasalahan / Kendala yang muncul, untuk menuju sertifikasi, tempat pengolahan ikan harus terpisah antara tempat pengolahan dengan rumah tinggal. Tetapi kebanyakan tempat pengolahan ikan masih menjadi satu dengan rumah tinggal, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi.

2.1.3.1.26 Pariwisata

Kinerja Urusan Pariwisata terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 -52
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2017

No	Program Prioritas / Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Realisasi 2017	Kinerja	Status
1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata					
1	Destinasi Wisata Unggulan	7	3	3	100.00%	0
2	Persentase destinasi wisata yang memenuhi sapta pesona	88,89%	44.44%	44.44%	100.00%	0
2	Program Pengembangan Kemitraan					
1	Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata	13	9	9	100.00%	0
3	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata					
1	Lama Kunjungan Wisatawan	2-4 HARI	2-3	2-3	100.00%	0
2	Persentase TIC yang representatif	100%	0	0		
3	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	1.143.954	1,136,435	1,269,949	111.75%	1
4	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	5.219	5,185	6,341	122.30%	2

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 > 100% target 2017 atau > 100% target RPJMD)
- : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 < 80% target 2017 atau < 80 % target RPJMD)

Dari 7 indikator kinerja urusan Pariwisata secara keseluruhan telah mencapai target. Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain :

- a. Destinasi wisata yang diunggulkan saat ini adalah Gunung Tidar, Mantyasih dan Desa Wisata Tidar Campur. Ketiganya masih terdapat banyak hal yang perlu dibenahi untuk semakin layak sebagai unggulan. Perlu nya keterlibatan CSR dalam mewujudkan Desa Wisata, Kampung Pelangi, dll.
- b. Tourist Information Center (TIC) secara fisik maupun non fisik jauh dari ideal. Website informasi pariwisata saat ini juga pasif (tidak up to date), kurang menarik dan kurang informative/promotif. TIC belum menyediakan tour guide untuk wisatawan, sehingga wisatawan berkunjung tanpa pengarahan resmi dan hanya mengandalkan biro jasa yang bisa jadi informasi yang diberikan tidak lengkap, tidak akurat bahkan bisa keliru.

2.1.3.1.27 Pertanian

Indikator kinerja urusan Pertanian melibatkan 13 (tiga belas indikator) kinerja daerah dan 13 (tiga belas) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 53

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2017

NO	URUSAN/PROGRAM KERJA/KEGIATAN	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status capaian
				Target 2017	Capaian 2017 sd TW 2		
	Urusan Pilihan Pilihan	Urusan					
1	Program Kesehatan Veteriner	Pelayanan Masyarakat					
		1. Persentase Unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi NKV	4,24%	1.82%	36,5	100%	●
2	Program penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	pemberdayaan					
		2. Prosentase Petani yang melaksanakan GAP	52,94	5,88%	5,88%	100%	●
		3. Rasio petani terlatih	90%	85%	85,88%	100%	●
3	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak						
		4. Persentase hewan sehat	87	83%	86%	100%	●
4	Program Kesejahteraan Petani	Peningkatan					

		5. Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang	8	4	4	100%	●
5	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan						
		6. Prosentase Petani yang melaksanakan GHP	10%	1%	1%	100%	●
		7. Pertumbuhan jumlah komoditas agribisnis pertanian	10	7	7	100%	●
6	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan						
		8. Persentase unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi halal	4,24	1,82%	1,82%	100%	●
7	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan						
		9. Luas lahan pertanian organik	1,14	0,94	1	100%	●
		10. Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian	72%	45%	45,18%	100%	●
8	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan						
		Jumlah pelaku usaha peternakan organik:					
		11. Peternak ayam buras/ ayam broiler	5	1	1	100%	●
		12. Peternak kelinci	5	1	1	100%	●
		13. Peternak kambing/domba	5	1	1	100%	●
		14. Rasio peternak Terlatih	90	85%	85%	100%	●
9	Program peningkatan produksi hasil peternakan						
		15. Daging Ruminansia	1.401.690	1.177.418	1.209.046	100%	●
		16. Daging Unggas	5.660.315	5.122.583	7.00.713	100%	●
		17. Telur	500.000	420.000	71.918		

10	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	18. Susu	209000	193.000	214.105	100%	●
		19. Padi	3.380.000	3.201.000	3.069.44	89.5%	
		20. Jagung		11	12,6	100%	●
		21. Ubi kayu	15	13,5	13,5	100%	●

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 > 100% target 2017 atau > 100% target RPJMD)
- ◐ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 > 80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 < 80% target 2017 atau < 80 % target RPJMD)

Berdasarkan Capaian kinerja Dari matrik diatas Bidang pertanian dan pangan dapat diketahui bahwa ada 10 program kerja/kegiatan dan 21 indikator target sampai dengan triwulan IV Tahun 2017 yang sudah tercapai antara lain :

Persentase Unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi NKV, Pertumbuhan jumlah komoditas agribisnis pertanian, Persentase unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi halal, Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian, daging ruminansia, daging unggas, susu dan jagung. Ada 2 (dua)

Indikator yang belum memenuhi / tercapai target triwulan IV (empat) adapun yang belum tercapai adalah :

1. Program peningkatan produksi hasil peternakan /telur antara target dengan realisasi capaian masih terlalu jauh dikarenakan adanya kesalahan ketik dalam pencapaian indikator telur terlalu tinggi jadi antara target dan realisasi hasilnya terlalu jauh.
 2. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan / padi target dengan realisasi dalam pencapaian belum maksimal dikarenakan adanya cuaca ekstrim yang mengakibatkan padi roboh.dalam hal ini pencapaian indicator sudah hampir tercapai dan pada saat realisasi kinerja akhir akan tercapai.
- Rasio petani dalam pencapaian target sudah tercapai akan tetapi belum maksimal dikarenakan petani hanya sebagai penggarap sawah dan dalam mengerjakan masih dengan cara tradisional yang mana masih banyaknya petani yang belum mengenal peralatan moderen seperti traktor dan penggiling padi yang sudah dengan teknologi cukup canggih , yang mana masih kebanyakan petani masih mengerjakan dengan pola lama sehingga dalam pengerjaan kurang efektif dan hasil yang diperoleh lebih sedikit.
 - Petani yang melaksanakan Good Agricultural practices (GAP) adalah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang, Prosentase Petani yang melaksanakan GHP, masih belum maksimal

Good Agricultural practices (GAP) pada teknologi yang direkomendasikan menurut SK Menteri No.48 Tahun 2010 yang mencakup beberapa hal seperti : Lahan bebas dari cemaran limbah bahan berbahaya dan beracun, adalah termasuk salah satu syarat untuk melaksanakan Good Agricultural practices (GAP)

Dengan menerapkan (GAP) ,Good Handling Practice (GHP) yang memiliki standard operational procedure (SOP) tertentu diharapkan agar sistem budidaya yang dilakukan memberikan banyak manfaat baik terhadap produk yang dihasilkan, pekerja dan mampu meminimalisir cemaran terhadap lingkungan disekitar. Apabila produk pertanian yang dihasilkan hendak bersaing di era perdagangan bebas, maka memiliki sertifikat GAP adalah sebuah kewajiban.

Dengan meningkatnya harga jual tanah, dan tingginya desakan untuk perumahan, maka lahan pertanian produktif tersebut rawan dialih fungsikan menjadi perumahan. Tingginya angka konversi lahan pertanian menjadi non pertanian setiap tahun tentunya memberi tantangan bagi jaminan ketahanan pangan masyarakat Kota Magelang.

Berkurangnya lahan pertanian di Kota Magelang berimbas pada fluktuasi luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas beberapa komoditas tanaman pangan (tabel 2.7). Sebagai contoh, luas tanam padi pada tahun 2012 menurun sebesar 1,64% menjadi 541 ha, namun pada tahun 2013 meningkat 0,55% (544 ha), kemudian pada tahun 2014 terus meningkat hingga 1,47% menjadi 552 ha, pada tahun 2015 kembali menurun sebesar 0,18% (551 ha) Begitu pula produktivitas padi, pada tahun 2012 meningkat sebesar 4,79% (59,71 kw/ha), namun pada tahun 2013 menurun 2,03% (58,50 kw/ha), dan pada tahun 2014 menurun lagi sebesar 0,55% (58,18 kw/ha), tetapi pada tahun 2015 meningkat 1,58% menjadi 59,1 kw/ha, dan pada tahun 2016 meningkat.

Selain itu, kondisi petani Kota Magelang yang sebagian besar merupakan petani penggarap, menyebabkan rendahnya produksi komoditas tanaman pangan. Karena, keputusan penggunaan lahan ditentukan oleh pemilik lahan, sementara petani hanya mengerjakan apa yang telah ditetapkan oleh pemilik lahan.

Maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap produksi komoditas pertanian dan peternakan asal Kota Magelang, tetapi juga menyebabkan menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Secara berturut-turut kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Namun demikian, sektor pertanian merupakan penyangga ketahanan pangan, oleh karena itu kegiatan budidayanya tetap harus dipertahankan di Kota Magelang. Pengembangan Urban farming dan adanya pengembangan Pertanian Organik di Kota Magelang dan juga adanya budidaya pertanian, peternakan, maupun perikanan.

Beberapa tehnik budidaya di lahan sempit yang menunjang di Kota Magelang, misalnya: vertikultur, hidroponik, dan aquaponik. Serta Penerapan vertikultur dapat dilakukan pada budidaya sayur-mayur dan buah-buahan yang tumbuh secara merambat, maupun tanaman hias dan bunga. Tentunya dengan mengacu pada sistem budidaya yang ramah lingkungan.

Dalam rangka mempercepat akselerasi terwujudnya MKSB, maka sejak tahun 2014 telah dilakukan pengembangan kultur jaringan, serta pelatihan budidaya tanaman hias dan bunga bagi masyarakat Kota Magelang. Harapannya melalui kegiatan tersebut mampu mendorong terwujudnya agribisnis tanaman hias dan bunga sebagai salah satu penggerak ekonomi Kota Magelang.

Berdasarkan data dari Dinas, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota Magelang, saat ini sudah terbentuk 7 (tujuh) kelompok pembudidaya hias dan bunga, yang berada di Kelurahan Kedungsari, Kelurahan Kemirirejo, dan Kelurahan Potrobangsari., wates, sanggrahan, Bogeman , , Berikut ini adalah data kelompok tani tanaman hias dan

bunga yang terdapat di Kota Magelang; jumlah seluruh kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga yang terdapat di Kota Magelang.

Produksi komoditas daging ruminansia mencakup: sapi, kerbau, kambing, dan domba. Daging sapi banyak dikonsumsi oleh masyarakat, terutama pada saat perayaan hari raya Idul Adha. Namun pada saat perayaan hari raya tersebut, ketersediaan daging sapi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk, sehingga memacu terjadinya impor daging sapi. Oleh sebab itu, untuk memenuhi ketersediaan daging sapi lokal, maka populasi dan produktivitas sapi potong perlu terus ditingkatkan.

Kondisi peternakan saat ini menunjukkan bahwa, peternak Kota Magelang lebih menyukai budidaya ternak sapi potong ketimbang ternak sapi perah. Hal ini disebabkan karena kurangnya ketersediaan air bersih dalam budidaya ternak sapi perah. Disamping itu menurut sebagian besar peternak, beternak sapi perah perawatannya lebih sulit dibanding dengan sapi potong.

2.1.3.1.28 Energi dan Sumber Daya Mineral

Indikator kinerja urusan Energi dan Sumberdaya Mineral melibatkan 1 (satu) indikator kinerja daerah dan 1 (satu) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 54

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
1	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rasio ketercukupan Penerangan Jalan Umum (PJU)	71,89%	62%	62,11%	100,1%	●

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2018

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 100% target 2017 atau 100% target RPJMD)
- : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 80% target 2017 atau 80 % target RPJMD)

Satu satunya indikator kinerja dari urusan Energi dan Sumberdaya Mineral, yaitu rasio ketercukupan penerangan jalan umum yang dilaksanakan pada tahun 2017 tercapai 62,11% dari target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 71,89%. Secara detail pelaksanaan program tahun 2017 yang direncanakan sebesar 62% dari target akhir RPJMD 2021 sebesar 71,89% dapat tercapai 100% sesuai yang ditargetkan.

Memperhatikan target kinerja RPJMD, maka untuk mencapai target akhir ketercukupan penerangan jalan umum sebesar 71,89%, urusan Energi dan Sumberdaya Mineral masih menghadapi tantangan capaian sebesar 9,89 % yang secara bertahap akan dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan pada program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.

2.1.3.1.29 Perdagangan

Indikator kinerja urusan Perdagangan melibatkan 6 (enam) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 55

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2017

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
1	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Cakupan PKL yang dibina	16 %	8 %	37.04 %	463 %	●
		Jumlah shelter PKL yang dikelola	17	13	19	146 %	●
2	Program Pengelolaan Pasar	Persentase penurunan kejadian kriminal di lingkungan pasar	54 %	7 %	83.33%	1190 %	●
		Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisional	10 %	10 %	50.79 %	507 %	●
		Cakupan pedagang pasar yang dibina	16 %	8 %	10.14 %	126 %	●
		Persentase pasar tradisional yang dikelola	80 %	75 %	75 %	100 %	●
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah ekspor produk ke LN	US\$1.250.000	US\$ 950.000	US\$ 1.950.541	2053 %	●
4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah	7 %	3 %	11.22 %	374 %	●
6	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah alat UTTP yang ditera	3.100	2.700	3.712	137 %	●
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana perdagangan yang memenuhi universal design	60 %	20 %	20 %	100%	●

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2017

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 100% target 2017 atau 100% target RPJMD)
- : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 80% target 2017 atau 80 % target RPJMD)

Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja urusan Pilihan perdagangan Masing masing indikator kinerja memiliki capaian kinerja sempurna 100% bahkan 9 (Sembilan) indikator melebihi dari target capaian diatas 100%.

Indikator Cakupan PKL yang dibina yang ditargetkan 8% dari total PKL yang ada berjumlah 1350 orang hasil pendataan tahun 2016 pada akhir tahun ini mampu dibina sebanyak 500 orang yang berarti 37,04% dari jumlah PKL

sudah mendapatkan pembinaan dari Dinas Perdagangan, hal ini juga terkait langsung dengan indikator Jumlah shelter PKL yang dikelola yg itargetkan 13 tempat sudah tercapai 19 tempat selter, sehingga PKL memang telah secara intensif mendapatkan pembinaan, dilain sisi dengan pertumbuhan selter yang sudah melampaui target bahkan target akhir RPJMD Kota magelang pun sudah terlampaui, ini kemudian seharusnya menjadikan perhatian pemerintah bahwa dengan terus tumbuhnya selter PKL dapat menimbulkan masalah yang lain yaitu berkurangnya fungsi fasilitas public khususnya trotoar jalan yang dijadikan selter PKL, kedepan perlu dirancang secara serius bahwa pertumbuhan shelter dan pembinaan PKL dapat berjalan harmonis dengan kepentingan – kepentingan umum lainnya.

Indikator Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi oleh pasar – pasar tradisional mengalami capaian target yang sangat menggembirakan, hal ini didukung dengan adanya inovasi pengelolaan sampah yang terdapat di pasar – pasar tradisional, hal ini perlu dipertahankan dan apabila perlu tidak hanya sekedar mengejar target kinerja yang telah ditetapkan melainkan semakin meningkatkan upaya – upaya pemanfaatan sampah sehingga disamping dapat mengurangi volume sampah yg harus dibuang di TPA, dapat memanfaatkan hasil olahan sampah agar bermanfaat secara berkelanjutan.

Indikator – indikator capaian kinerja urusan pilihan perdagangan ini sangat memuaskan, namun demikian perlu menjadi perhatian bahwa kinerja pelayanan umum ini perlu dijaga dan dipertahankan sekuat tenaga jangan sampai mengalami penurunan pelayanan yang sudah sangat baik ini.

Upaya lainnya yaitu Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri. Dalam rangka ketahanan ekonomi di daerah, pemerintah harus menjaga dan memberikan ruang yang leluasa untuk pertumbuhan perekonomiannya, baik secara kelembagaan maupun legalitasnya. Perekonomian rakyat yang sudah terbukti tangguh, berdaya, produktif dan mandiri, merupakan salah satu pilar utama ketahanan nasional, termasuk dalam memantapkan demokrasi. Upaya ini dilakukan dengan berbasiskan semangat kerakyatan dan kekeluargaan (Peningkatan koperasi, usaha mikro, perdagangan dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat). Untuk itu secara terkendali pemerintah perlu membuka akses bagi tumbuh kembangnya ekonomi modern dengan tidak menutup kesempatan atau “mematikan” sektor ekonomi tradisional. Pemerintah juga perlu membuka akses sinergi antara sektor ekonomi modern dengan sektor ekonomi tradisional, akses ini sebagai jembatan bisnis yang mampu memajukan dan menumbuhkan sektor tradisional sebagai roh dari ekonomi kerakyatan itu sendiri. Selain itu juga harus dipertahankan adanya keterpenuhan dan kesediaan bahan pangan melalui upaya peningkatan ketahanan pangan. Ketahanan pangan dapat ditingkatkan dengan berbagai upaya kebijakan diantaranya penjaminan rantai distribusi pangan Kota Magelang yang disuplai oleh daerah daerah sekitar dan juga upaya optimalisasi lahan yang ada di Kota magelang berbasiskan pertanian modern.

2.1.3.1.30 Perindustrian

Realisasi yang telah dicapai pada penyelenggaraan urusan perindustrian secara rinci tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 56

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2017

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Peningkatan daya saing IKM Formal	3,3 %	3,1 %	5.78 %	186 %	●
2	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sentra industri	15	11	11	100 %	●
3	Program peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP, HACCP, Produksi Bersih, ISO, GKM, SNI, dll)	4,30%	4,10%	4,52%	110 %	●
4	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase IKM formal yang memanfaatkan peralatan produksi teknologi tepat guna	5,29%	5.04%	5.16%	102 %	●

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2017

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 100% target 2017 atau 100% target RPJMD)
- : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 80% target 2017 atau 80 % target RPJMD)

Capaian dari indikator-indikator di urusan perdagangan pada tahun 2017 kesemuanya sudah bisa memenuhi yang di targetkan. Keempat indikator tersebut antara lain indikator peningkatan daya saing IKM Formal, indikator jumlah sentra industri, indikator persentase IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP, HACCP, Produksi Bersih, ISO, GKM, SNI, dll). indikator persentase IKM formal yang memanfaatkan peralatan produksi teknologi tepat guna sudah secara sempurna memenuhi dari target yang ditetapkan pada tahun 2017.

Dunia perindustrian dan perdagangan merupakan salah satu primadona penggerak pertumbuhan ekonomi suatu daerah, terutama di Kota Magelang yang mulai mengandalkan sektor jasa. Dua hal yang sangat strategis dibahas dalam setiap perencanaan baik perencanaan jangka pendek, menengah, maupun panjang. Beberapa aspek yang terkait yang mempengaruhi dunia perindustrian dan perdagangan Kota Magelang terutama di era MEA antara lain: infrastruktur, investasi, sumber daya baik alam maupun SDM, daya saing produk, daya saing tenaga kerja, penggunaan teknologi, keterbukaan informasi, peran pemerintah dan perlindungan konsumen.

Luas Kota Magelang yang hanya sekitar 18,12 km² memudahkan pemerintah daerah untuk menata dan mengelola penyediaan infrastruktur, termasuk kemudahan aksesibilitas bagi pertumbuhan industri dan perdagangan. Oleh karenanya infrastruktur yang sudah baik dan tertata perlu dipelihara dan ditingkatkan pemanfaatannya dari waktu ke

waktu. Di era MEA, infrastruktur yang layak dan memadai serta kemudahan aksesabilitas usaha sangat mendukung dan merupakan salah satu daya tarik bagi investasi. Investasi sangat diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah, terutama investasi yang produktif, yaitu investasi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Agar investasi yang masuk ke Kota Magelang mampu menyerap tenaga kerja lokal maka harus ada link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Keterbatasan luasan juga berarti sangat terbatasnya sumber daya alam yang dimiliki Kota Magelang. Sumber daya alam yang terbatas ini perlu dikelola dengan benar sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat yang maksimal. Keadaan ini membuat masyarakat Kota Magelang menjadi kreatif dan tidak pantang menyerah. Sektor jasa merupakan salah satu sektor yang dikembangkan secara maksimal dan semakin memberikan nilai tambah bagi setiap produk yang dihasilkan Koperasi dan UMKM Kota Magelang. Koperasi dan UMKM Kota Magelang didampingi instansi terkait dan para stake holder, berupaya semakin meningkatkan kualitas dan jenis produk untuk meningkatkan daya saing. Hingga saat ini masih banyak produk Koperasi dan UMKM yang belum memenuhi persyaratan agar mampu menembus pasaran dunia. Era MEA menuntut produk daerah yang memenuhi standar mutu produk, sehingga upaya sertifikasi dan HKI bagi produk Koperasi dan UMKM menjadi sangat penting. Daya saing yang dimaksud selain memenuhi standar mutu produk, juga harus mampu menjaga kualitas produk dan menjaga konsistensi pasokan produk. Dalam hal itu maka tak lepas dari kemampuan Koperasi dan UMKM dalam memanfaatkan teknologi dan informatika. Koperasi dan UMKM yang 'melek' teknologi dan 'informatika' akan mampu bersaing di era globalisasi. Teknologi sangat membantu dalam proses produksi karena dengan teknologi maka pekerjaan menjadi lebih mudah dan jumlah produksi meningkat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Selain melek teknologi, Koperasi dan UMKM juga perlu berpikir kreatif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mengembangkan dan memajukan usahanya. Teknologi informasi mengandung dua fungsi: informasi dan komunikasi, yang bila mampu mengolah dapat digunakan sebagai sarana promosi dan sebagai sarana Koperasi dan UMKM berhubungan dengan dunia luar. Hal demikian akan semakin memperluas jangkauan perdagangan.

Perkembangan Industri dan perdagangan dewasa ini berdampak luar biasa pada beredarnya berbagai macam produk di pasaran. Hal tersebut berdampak pada perlunya perlindungan terhadap konsumen sebagai pengguna produk. Pengusaha semestinya menghargai konsumen dengan memberikan produk yang sesuai standar mutu, di sisi lain pemerintah pun wajib melindungi konsumen melalui peraturan perundang-undangan.

Secara umum peran pemerintah untuk mendorong industri dan perdagangan di Kota Magelang terlebih dalam era MEA sangatlah penting. Bagaimana peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang memadai, membuat regulasi yang mampu membuka kran investasi lebar-lebar sehingga Kota Magelang mampu menarik investasi besar yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, mengelola sumber daya yang sangat terbatas yang mampu dimanfaatkan untuk menumbuhkan laju perekonomian semaksimal mungkin, meningkatkan daya saing produk melalui berbagai upaya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, hingga yang terakhir pemerintah juga harus melindungi konsumen dari produk-produk yang merugikan dan dari perlakuan tidak adil produsen. Pemerintah pun harus mampu menciptakan strategi yang melindungi produk lokal dari perdagangan bebas dan melindungi tenaga kerja dari persaingan internasional, sehingga mampu bersaing dan dapat menembus pasaran internasional.

Pada tahun 2017 dalam mendorong industri dan perdagangan pemerintah perlu meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Magelang yang memiliki program

CSR dapat pula sebagai salah daya dorong yang baik dan cepat. Pemanfaatan teknologi informasi juga perlu di tingkatkan dalam mendorong industry dan perdagangan salah satunya mendorong KUM untuk melakukan strategi pemasaran dengan memanfaatkan internet dan menawarkan produk yang dihasilkannya didalam marketplace yang dibentuk baik secara perorangan lembaga maupun dikelola oleh pemerintah Kota Magelang.

2.1.3.1.31 Transmigrasi

Penyelenggaraan transmigrasi menurut Undang-Undang Nomor. 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, serta meningkatkan dan melakukan pemerataan pembangunan di daerah dan juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, tujuan lain dari transmigrasi sesuai dengan konteks kehidupan bangsa Indonesia saat ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru di sektor informal, dan mengembangkan potensi sumber daya alam di daerah. Upaya penanganan urusan ketransmigrasian di daerah asal dilakukan dalam 3 (tiga) cara yaitu (1) pengarahan calon transmigran (2) sosialisasi potensi lokal daerah transmigran (3) fasilitasi penempatan transmigrans. Dana yang digunakan sebagai upaya untuk melaksanakan urusan ketransmigrasian di Tahun 2017 adalah Dana APBD Kota Magelang. Total dana yang sebesar Rp 239.477.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp 203.491.648,- atau 84,97 persen.

Dengan melaksanakan ketiga fungsi tersebut capaian realisasi indikator urusan Ketenagakerjaan Tahun 2017 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2-57

Target Indikator Realisasi Pencapaian Urusan Ketransmigrasian Tahun 2017

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
				Target 2017	Capaian 2017		
1.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	1. Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan	100%	100 %	75%	75%	▼
2	Program Transmigrasi Regional	2. Persentase masyarakat tersosialisasi program transmigrasi	100%	100 %	100%	100%	●

Keterangan

- : Tercapai/ melampaui (Realisasi tahun 2017 100% target 2017 atau 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 80% target 2017 atau 80 % target RPJMD)

Dari hasil capaian indikator diatas terlihat bahwa sampai dengan akhir Tahun 2017 dari 2 (dua) target indikator kinerja, 1 (satu) indikator kinerja belum tercapai, hal ini disebabkan dari 4 (empat) KK yang sudah siap untuk

berangkat, 1 (satu) KK mengundurkan diri di saat pemberangkatan. Sementara untuk kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan pada Bulan Agustus 2017 dengan jumlah peserta 300 orang dari 17 kelurahan di Kota Magelang.

2.1.3.2 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.2.1 Fungsi Lain-lain

Fungsi penunjang lain lain melibatkan 27 indikator dan 9 program. Capaian indikator Fungsi ini sebagaimana tampak pada tabel berikut ini :

Tabel 2 - 58
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penunjang Fungsi lain Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
1	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%	100%	100%	100%	●
		Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	78%	56%	64%	>100%	●
2	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Implementasi SIPID (Sistim Informasi Potensi Investasi Daerah)	100%	0	20%	>100%	●
		Implementasi pemanfaatan SPIPISE	100%	70%	100%	>100%	●
3	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100%	100	100	100%	●
4	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah review PERDA/PERWAL	0	0	1	>100%	●
		Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	3	0	0	100%	●
		Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	0	0	0	100%	●
5	Program pengelolaan barang milik daerah	Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah kota Magelang	80%	60%	72,44%	>100%	●
		Barang milik daerah yang didayagunakan	100%	100%	100%	100%	●
		Pelaporan semesteran BMD yang tepat waktu	100%	50%	50%	100%	●
		Pelaporan tahunan BMD yang	100%	100%	50%	<100%	▶

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
6	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	tepat waktu Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%	100%	100%	100%	●
7	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	cakupan kebijakan penataan daerah	100%	20%	20%	100%	●
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tingkat Ketersediaan pokok pikiran dewan tepat waktu	100%	50%	50%	100%	●
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Cakupan pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri	100%	88,71%	88,33, %	<100%	▶
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	55%	30%	30%	100%	●
		Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review	100%	80%	80%	100%	●
		Persentase zona integritas yang terbentuk	50%	10%	5%	<100%	▶
		Nilai hasil LKJip SKPD	B	CC	CC	100%	●
		Persentase SKPD yang direview LKJIP	75%	35%	58,62%	>100%	●
		Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	95%	90%	88,73%	<100%	▶
		Temuan ketidak patuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	5%	60%	114,29%	>100%	▶
		Penyelesaian TLHP BPK meningkat	100%	90%	83,45%	<100%	▶
		Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal	100%	90%	100%	>100%	●
		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	85%	65%	84%	>100%	●
		persentase SPM yang mencapai target nasional	85%	65%	65%	100%	●
		Tingkat pemahaman tentang SAKIP	100%	100%	100%	100%	●

2.1.3.2.2 Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI.

Pemerintah Kota Magelang telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah berbasis AkruaI dimulai tahun 2015. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip berbasis akuntansi, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar. Pada tahun 2011 - 2014 Pemerintah Kota Magelang masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, oleh karena itu perbaikan laporan terutama masalah aset terus diprioritaskan.

Perjuangan dan upaya perbaikan tersebut akhirnya membuahkan hasil yang sangat membanggakan bagi Pemerintah Kota Magelang ketika berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016. Ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Magelang sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, utamanya kepatuhan kepada peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung peningkatan PAD dilakukan optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui peningkatan pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah, up dating data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, peningkatan manajemen aset daerah dengan penerapan Sistem Informasi Barang Milik Daerah. Selain itu perlu dilakukan optimalisasi pendapatan terkait Pajak Bumi dan Bangunan.

Target dan realisasi indikator urusan Keuangan hingga triwulan IV Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 -59

Target dan Realisasi Indikator Urusan Keuangan Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017		Kinerja RKPD Th. 2017	Status Capaian
			s.d. 2021	Target 2017	Capaian 2017		
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang	80%	60%	72,44,%		▶
		2 Barang milik daerah yang didayagunakan	100%	100%	100%		●
		3 Pelaporan semesteran BMD yang tepat waktu	100%	50%	100%		●
		4 Pelaporan tahunan BMD yang tepat waktu	100%	100%	100%		●

2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Persentase pertumbuhan PAD	10,21%	18,44%	5,6%	▼
		2	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	90%	81%	100%	●
3	Program Peningkatan PAD dari Pajak dan Retribusi Daerah	1	Rasio pajak daerah terhadap PAD	12%	13,48%	13,37%	●
		2	Rasio retribusi daerah terhadap PAD	2,91%	4,20%	2,63%	●
4	Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusda	1	Rasio bagi hasil laba BUMD terhadap PAD	2,59%	3%	3,3%	●

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, 2017

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 > 100% target 2017 atau > 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 > 80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 < 80% target 2017 atau < 80% target RPJMD)

Dari sembilan indikator kinerja urusan keuangan, terdapat 7 indikator yang telah mencapai target yaitu indikator barang milik daerah yang didayagunakan, pelaporan semesteran BMD yang tepat waktu, pelaporan tahunan BMD yang tepat waktu, persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP, rasio pajak daerah terhadap PAD, rasio retribusi daerah terhadap PAD, rasio bagi hasil laba BUMD terhadap PAD.

Pada akhir tahun 2017, indikator aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang belum melampaui target dengan kinerja capaian 72,44%. Namun demikian indikator kinerja ini optimis akan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD tahun 2021. Sampai dengan akhir tahun 2017 ini sudah 105 bidang tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang.

Barang milik daerah yang didayagunakan merupakan aset-aset yang disewakan dan tidak mendukung tupoksi. Indikator barang milik daerah yang didayagunakan ini telah mencapai target tahun 2017 dan target RPJMD.

Realisasi persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP tahun 2017 telah melampaui target tahun 2017 dan target RPJMD, hal ini dikarenakan dari 7 (tujuh) laporan keuangan semua sudah sesuai dengan SAP. Realisasi rasio pajak daerah terhadap PAD tahun 2017 juga telah melampaui target tahun 2017 dan target RPJMD.

Realisasi indikator pelaporan semesteran BMD yang tepat waktu dan realisasi indikator pelaporan tahunan BMD yang tepat waktu bisa terlaksana secara tepat waktu dari 29 OPD karena pada tahun 2017 ini terdapat terobosan regulasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yaitu dalam pengajuan GU dari tiap OPD wajib melampirkan laporan mutasi barang bulanan. Dengan demikian laporan barang dari OPD yang tadinya dikumpulkan tiap semester kini menjadi setiap bulan.

2.1.3.2.3 Perencanaan Pembangunan

Indikator kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah melibatkan 12 (dua belas) indikator kinerja dan 7 (tujuh) program dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 50
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100	100%	●
		Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	90	70	70	100%	●
		Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	85	72	74	100%	●
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	55	35	36	116%	●
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	85%	76%	76%	101%	●
2	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100	100	100	100%	●
3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang esosial budayai	100	100	100	100%	●
4	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana	100	100	100	100%	●
5	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama (MoU) yang ditindaklanjuti	4	1	2	>100%	●
6	Program Pengembangan	Persentase terpenuhinya jenis	95	70	75	>100%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
	Data/Informasi	data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan					
7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan	100	100	100	100%	●

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang, 2017

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 100% target 2017 atau 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 80% target 2017 atau 80 % target RPJMD)

Dari ke 12 target yang diemban oleh penunjang perencanaan keseluruhan target mampu dilalui dengan baik bahkan terdapat beberapa indikator yang melampaui target. Hal yang harus terus dilakukan adalah kreatifitas dan inovasi terhadap perencanaan pembangunan daerah sambil mengeliminir berbagai permasalahan yang dihadapi.

2.1.3.2.4 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Indikator kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan melibatkan 16 (enam belas) indikator kinerja dan 6 (enam) program utama dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 - 51
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ASN yang memiliki kualifikasi:					
		Pendidikan S1	49%	46%	45,11%	<100%	▶
		Pendidikan S2	10%	9%	8,70%	<100%	▶

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
		Persentase ASN yang mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh BKD	100	100	100,00%	100%	●
		Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK	0,46	41%	45,45%	110,86%	●
		Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural	100%	0%	71,43%	100%	●
		Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	5%	5%	100%	>100%	●
		Persentase ASN yang dijatuhi hukuman	0,01%	0,10%	0,20%	>100%	●
2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran ASN	100	97%	97,78%	>100%	●
		Persentase pelanggaran disiplin ASN	0,18%	0,21%	0,26%	85%	▶
3	Program Pendidikan kedinasan	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	98%	94%	142,66%	>100%	●
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	100%	80%	100%	>100%	●
4	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemda	Persentase ASN yang mengikuti diklat pra jabatan	100%	100%	0%	0%	▼
		Persentase ASN yang mengikuti diklat fungsional	90%	80%	78,95%	<100%	▶
		Persentase ASN yang mengikuti diklat pengembangan karakter	97%	80%	175%	>100%	●
5	Program Kerjasama	Persentase SKPD yang	100%	60%	100%	>100%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
	Pembangunan	menerapkan finger print					
6	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	92%	85%	78,14%	<100%	▶

Sumber: Badan kepegawaian, Pendiidkan dan Pelatihan Kota Magelang, 2017

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 100% target 2017 atau 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 80% target 2017 atau 80 % target RPJMD)

Dari 16 indikator urusan ini masih terdapat beberap indikator yang belum mencapai target, sementara sebagian besar indikator tercapai bahkan sebagian banyak telah melampaui target. Pengampu urusan ini harus terus meningkatkan kinerja pada target target yang belum tercapai.

2.1.3.2.5 Penelitian dan Pengembangan

Fungsi Penelitian dan Pengembangan menjadi salah satu posisi kunci dalam siklus perencanaan. Hal ini dikarenakan, sebuah program kegiatan sebaiknya diawali dari sebuah perencanaan yang berbasis penelitian, sehingga kegiatan tersebut memiliki dasar ilmiah yang kuat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, OPD pengampu fungsi ini mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Sesuai peraturan tersebut, hasil kelitbangan menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, serta menjadi bahan rekomendasi bagi para OPD.

Target dan realisasi indikator urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 - 52

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
1	Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	Persentase Krenova masyarakat yang berkualitas	23%	11%	3846%	>100%	●
		Presentase Krenova OPD yang berkualitas	12%	4%	25,58%	>100%	●
2	Program Penelitian dan Pengkajian	Persentase hasil riset/kajian yang ditidaklanjuti	50%	30%	33,33%	>100%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
3	Program Pengembangan dan Penerapan IPTEK	Cakupan Pengembangan dan Penerapan IPTEK	20%	10%	80%	>100%	●
4	Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan	Cakupan Monev dan / atau Pengendalian Riset dan / atau Kebijakan	20%	10%	37,6%	>100%	●
5	Program Pendokumentasian dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	Cakupan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	80%	50%	50%	100%	●
6	Program Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi	Cakupan Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi	15%	0%	0%	100%	●
7	Program Perlindungan Produk Teknologi dan Inovasi	Persentase Produk Teknologi dan Inovasi yang dilindungi HKI	15%	7%	13,04%	>100%	●
8	Program Penguatan Inovasi Daerah	Cakupan Penguatan SIDA	75%	40%	45%	>100%	●
9	Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	75%	40%	46,93%	>100%	●

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 100% target 2017 atau 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)
- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 80% target 2017 atau 80 % target RPJMD)

Dari 9 program dan 10 kegiatan yang menjadi indikator kinerja urusan kelitbangan, semuanya telah mencapai target, bahkan beberapa indikator telah melampaui target 2017. Melihat kondisi ini, maka besar harapan bahwa di akhir masa periode RPJMD, indikator-indikatornya dapat tercapai.

Krenova di tingkat masyarakat setiap tahun selalu dilakukan, terutama hasil-hasil temuan yang memiliki nilai dan dampak ekonomi bagi penemu dan masyarakat sekitar. Hasil dari penjangkaran ini kemudian diikutsertakan dalam ajang serupa di tingkat Provinsi Jawa Tengah, dan apabila lolos, juga diikutsertakan dalam ajang serupa ke tingkat Pusat. Pada beberapa kesempatan pameran yang diikuti Pemerintah Kota Magelang, beberapa produk temuannya juga diikutsertakan untuk meningkatkan peluang bertemu dengan calon investor, atau calon pembeli. Bagi temuan-temuan yang berpotensi untuk mendapatkan perlindungan Kekayaan Intelektual, juga difasilitasi untuk registrasinya.

Selain hasil-hasil kreasi dan inovasi dari masyarakat, pemerintah juga menerima hasil-hasil riset yang dilakukan masyarakat, dengan tema-tema strategis yang telah ditentukan, dan seleksi pada proposal riset yang masuk. Pemerintah menyediakan subsidi biaya riset bagi proposal terpilih. Hasil riset ini kemudian dijadikan bahan penyusunan kebijakan / perencanaan lebih lanjut. Untuk lebih mengaplikatifkan hasil-hasil riset yang sudah dilaksanakan, juga dilakukan beberapa kegiatan yang mengevaluasi hasil-hasil penelitian, supaya bisa lebih terasa manfaatnya baik pemerintah maupun masyarakat Kota Magelang.

Untuk lebih memperkenalkan budaya IPTEK di masyarakat, juga rutin dilaksanakan aneka kegiatan lomba terkait IPTEK, seperti lomba Robot dan Roket Air, untuk tingkat SLTP / SLTA. Diharap dengan aneka kegiatan ini, masyarakat sudah mengenal IPTEK sejak dini dan dapat tumbuh menjadi orang-orang yang sadar IPTEK.

Dalam hal kerjasama, telah dijalin kerjasama kelitbangan dengan beberapa perguruan tinggi di Kota Magelang, dunia usaha, BPPT, dan unsur-unsur masyarakat. Mereka diikutsertakan dalam beberapa kegiatan seperti riset, lomba, seminar, diseminasi, dan FGD.

2.1.3.2.6 Pengawasan

Target dan realisasi indikator urusan Pengawasan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 - 53
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2017

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
1	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Cakupan pemeriksaan (diperinci dari Orbik SKPD, Satker dan BUMD plus targetnya)	87%	55%	50,00%	90,90%	▼
		Persentase Aparat SPIP aktif	80%	55%	32,60%	59,27%	▼
		Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	90%	70%	66,67%	95,24%	►
	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Level APIP Kota Magelang menjadi level 3	Level 3	Level 2	Level 2 dengan catatan perbaikan	100%	●
		Persentase APIP yang bersertifikat Kompetensi meningkat	80%	55%	46,15%	83,90%	►
		Persentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat	85%	60%	100,00%	166%	●
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Persentase LKJIP SKPD dengan nilai baik	B	CC	CC	100%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2017	Capaian 2017	Kinerja RKPD Th.2017	Status Capaian
	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh SKPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	80%	55%	55%	100%	●
		Perjanjian Kinerja yang memenuhi kriteria standar	100%	55%	55%	100%	●
		Persentase LKJIP SKPD dengan nilai baik	90%	30%	30%	100%	●
		Penurunan kasus temuan LKPD	0	3	4	75%	▼
		Rasio laporan APBD, DAK dan Bantuan Keuangan tepat waktu	100%	80%	80%	100%	●
		Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh SKPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	80%	55%	55%	100%	●
		Nilai survey kepuasan penggunaan layanan PD	95	85	85%	100%	●
	Program Sinergisitas Penerapan SPI pada SKPD (Program Baru)	Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil Pemeriksaan APIP	55%	85%	73,46%	86,42	▼
		Penurunan temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan APIP	5%	70%	62,35%	89%	▼
		Persentase implementasi SPIP	100%	66%	50,00%	75,75%	▼

Keterangan:

- : Tercapai / melampaui (Realisasi tahun 2017 >= 100% target 2017 atau >= 100% target RPJMD)
- ▶ : Akan tercapai (Realisasi tahun 2017 >80% target 2017 atau > 80% Target RPJMD)

- ▼ : Perlu Upaya keras (Realisasi tahun 2017 80% target 2017 atau 80 % target RPJMD)

Dari 17 indikator yang ada, terdapat 6 indikator yang perlu upaya keras dan sisanya dapat tercapai bahkan melampaui target tahun 2017. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan pencapaian target yang harus difokuskan adalah kesiapan sumber daya manusia serta manajemen internal serta koordinasi yang baik dengan seluruh pihak yang terkait.

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu hal yang mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah yang nantinya berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Suatu daerah yang memiliki daya saing yang tinggi, akan menarik banyak investor untuk masuk ke dalam daerah. Bergairahnya kondisi perekonomian daerah diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan daerah. Kondisi daya saing daerah akan berpengaruh terhadap daya tarik investasi daerah. Daya saing yang relatif rendah tentunya akan menyebabkan daya tarik investor yang akan melakukan investasi di daerah menjadi relatif kecil begitu pula sebaliknya. Kinerja pemerintahan memegang peranan penting dalam penentuan daya saing daerah.

Kemampuan suatu daerah dalam mengenali dan menggali potensi daerah, mengidentifikasi dan menganalisis faktor – faktor pembentuk dan penentu daya saing kemudian menuangkannya ke dalam strategi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sangat berpengaruh dalam meningkatkan daya saing suatu daerah. Selain hal yang mampu meningkatkan daya saing, Pemerintah juga harus jeli dalam memperhatikan hal – hal yang dapat menghambat peningkatan daya saing diantaranya korupsi, birokrasi pemerintahan yang tidak efisien, infrastruktur yang tidak memadai bagi pengembangan investasi di daerah, ketidakstabilan politik, keamanan dan ketertiban di daerah, tenaga kerja yang tidak terdidik, etika kerja yang buruk, inflasi, peraturan pajak, buruknya pelayanan birokrasi di daerah dan lain sebagainya. “Reformasi struktural harus dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah mengingat kinerja pemerintahan memegang peranan penting dalam penentuan daya saing daerah seperti mempermudah proses perizinan dan kejelasan RTRW agar investor dengan mudah menanamkan investasi ke suatu daerah.

Survey Daya saing yang dilakukan pada tahun 2016 mengukuhkan Kota Magelang sebagai Kota dengan peringkat tertinggi dalam daya saing daerah di antara Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dengan indeks 64.75. Survey Daya saing daerah ini menilai daya saing Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah dengan tujuh katagori yang mempengaruhi daya saing dan daya tarik investasi daerah sebagai berikut : Kinerja pemerintahan; Lingkungan usaha; Infrastruktur; Sumber Daya Manusia ; Kesehatan; Pendidikan; Pasar Keuangan. Keberhasilan Kota Magelang meraih peringkat pertama tersebut karena didongkrak oleh tiga kategori dari tujuh kategori di atas yakni persepsi iklim usaha, kinerja pemerintah dan infrastruktur. Hal yang menjadi faktor utama Kota Magelang menempati peringkat pertama adalah aspek kelembagaan, lingkungan usaha, basis di pasar tenaga kerja, kesehatan, pendidikan, pasar keuangan, dan teknologi. Penghargaan ini juga sekaligus mengukuhkan Magelang sebagai salah satu kota yang dinyatakan siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Terkait daya saing Kota Magelang ada hal yang perlu mendapat perhatian ke depan yaitu aspek makro ekonomi dan infrastruktur karena berdasarkan indikator pengukuran indeks tersebut, Kota Magelang masih belum unggul dalam pilar makro ekonomi. Upaya peningkatan realisasi investasi di Magelang harus dipertahankan karena investasi

dapat berkembang lebih besar dengan adanya daya saing. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan signifikan positif antara pertumbuhan ekonomi dan skor daya saing untuk indikator perekonomian daerah

Gap negatif mengindikasikan masih terdapat sektor ekonomi yang belum tereksplor secara optimal. Beberapa strategi pemantapan perekonomian dalam mendukung daya saing dapat ditempuh melalui inovasi, penetrasi teknologi, eksplorasi ekonomi kreatif, mendongkrak investasi, optimasi sektor andalan dan kompetensi SDM. Tidak kalah penting adalah komitmen untuk menghindari eksternalitas negatif menuju penciptaan kelembagaan yang berkualitas dan akuntabel dalam mewujudkan Kota Magelang yang berdaya saing dan sejahtera secara berkesinambungan meski Magelang tidak memiliki sumber daya alam, Magelang dapat menawarkan jasa terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan suasana kota yang kondusif.

Aspek Daya Saing Daerah merupakan salah satu Indikator Kinerja Daerah, dimana aspek ini mempunyai empat fokus yaitu:

- a) Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah;
- b) Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur;
- c) Iklim Berinvestasi
- d) Sumber Daya Manusia

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator yang dipergunakan untuk mengukur aspek kemampuan ekonomi daerah sekaligus sebagai indikator pengukur kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan per kapita dan tingkat pemerataan pendapatan karena dua hal ini mencerminkan kemampuan daerah untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di Kota Magelang. Peningkatan pendapatan perkapita penduduk akan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat apabila diimbangi dengan adanya pemerataan pendapatan. Tabel di bawah ini merupakan tabel PDRB per kapita penduduk Kota Magelang dengan jumlah penduduk tengah tahun berdasarkan perhitungan BPS dengan menggunakan tahun dasar 2010 sebagai berikut :

Tabel 2 - 54

PDRB Per Kapita Kota Magelang Tahun 2010-2016, prediksi 2017 (menggunakan tahun dasar 2010)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017* *
Jumlah Penduduk pada tengah tahun (jiwa)	118.424	119.003	119.416	120.879	120.438	120.792	121.112	121.474
PDRB Per Kapita atas dasar Harga Berlaku (Rp/kapita/tahun)	33.926.4 59,42	37.641.9 32,95	41.086.8 15,37	44.732.0 69,37	49.023.2 43,20	53.538.0 74,04	58.353.89 7,63	63.408.67 8,87
Pertumbuhan adhb (%)		10.95	9.15	8.87	9.59	8.55	8.99	8.66

Sumber : Dinas KOMinfo dan statistik Kota Magelang Tahun 2017

* Angka sementara

** Angka prediksi

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat perkembangan PDBR per kapita penduduk . PDRB per kapita di Kota Magelang mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 dengan proyeksi penduduk tengah tahun sebesar 121.112 jiwa, besarnya PDRB per kapita tercatat sebesar 58.353.897,63 / tahun (atas dasar harga berlaku). Upaya untuk meningkatkan ukuran dari indikator ini di antaranya melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk aerta peningkatan produktivitas ekonomi di sektor-sektor potensial

Tingkat pemerataan pendapatan di Kota Magelang dalam beberapa tahun ini yang direpresentasikan melalui indeks gini. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 0 maka tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati 1 di katakana bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi. Indeks gini di Kota Magelang mengalami fluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2012 meningkat kemudian sebaliknya pada tahun 2013 mengalami penurunan. Kondisi ini berulang hingga tahun 2016, dengan kisaran perubahan yang tidak terlalu ketimpangan antar kelompok pendapatan yang cenderung tidak melebar atau dengan kata lain gap antar kelompok pendapatan semakin kecil atau semakin merata. Data Indeks gini dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang semakin meningkat. Indeks Gini dalam rentang tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 berada di kisaran 0.3. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan masyarakat di Kota Magelang mendekati merata namun masih menyisakan permasalahan yang berupa distribusi pendapatan yang belum merata.

Tabel 2 - 55
Perbandingan Indeks Gini, Kota Magelang Tahun 2010- 2015

Uraian	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gini Rasio Kota Magelang	0.3138	0.3418	0.3715	0.330	0.360	0.34

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Magelang 2016, BPS Kota Magelang 2017

Selain indeks Gini, indikator lain yang dipergunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan mayarakat adalah tingkat kesejahteraan masyarakat menggunakan kriteria Bank Dunia, di mana 40% penduduk berpendapatan rendah. Tingkat ketimpangan masyarakat ini di gambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan terhadap seluruh panduduk yang di golongan menjadi : a). <12%, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap tinggi; b). 12%-17%, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap sedang; dan c). > 17%, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap rendah.

Tabel 2 - 56
Distribusi Pembagian Pengeluaran Per Kapita 2011-2015

Tahun	40% rendah	40% Menengah	20% Tinggi
2011	19.40	38.24	42.36
2012	16.10	35.74	48.17

Tahun	40% rendah	40% Menengah	20% Tinggi
2013	19.24	39.24	41.52
2014	17.15	38.75	44.10
2015	17.20	37.09	45.71

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Magelang 2016, BPS Kota Magelang 2017

Berdasarkan tabel di atas distribusi pengeluaran pada kelas 40% penduduk berpengeluaran rendah selama rentang tahun 2011 sampai dengan 2015 relatif berfluktuatif. Pada tahun 2011 ketimpangan relatif rendah pada kisaran 19.40% kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi 16.10%. Kondisi di tahun 2013 membaik dengan ketimpangan yang rendah, namun pada tahun 2014 – 2015, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan berkisar pada angka 17%. Angka ini masuk di dalam kriteria ketimpangan tingkat rendah. Kondisi ini masih lebih baik apabila di dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2012. dimana tingkat ketimpangan distribusi pendapatan Kota Magelang masuk di dalam kriteria sedang. Meskipun berapada pada kategori ketimpangan rendah, kelompok penduduk berpengeluaran tinggi mengalami fluktuasi persentase pendapatan, dari 42.36% pada tahun 2011 naik menjadi 48.17% di tahun 2012, menurun di tahun 2013 kemudian naik di tahun 2014 dan tahun 2015.

Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari prosentase pengeluaran non makanan. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat maka pola konsumsi masyarakat akan bergeser ke konsumsi non makanan dengan artian bahwa semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran konsumsi non makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipergunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, di mana perubahan komposisinya di gunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan

Tabel 2 - 57
Tabel Perbandingan % Konsumsi Makanan, % Konsumsi Non Makanan dan Rata- rata Pengeluaran Per Kapita Kota Magelang Tahun 2011 – 2016

Tahun	% Konsumsi Non Makanan	% Konsumsi Makanan	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita sebulan (Rp)
2011	53.83	46.17	653.780
2012	57.53	42.47	822.561
2013	54.87	45.13	757.919
2014	55.64	44.36	787.022
2015	54.38	45.62	880.508
2016	58.22	41.78	1.125.811

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Magelang 2016, BPS Kota Magelang 2017

Dari tabel di atas, maka apabila didasarkan dengan teori kesejahteraan dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat konsumsi non pangannya 50%, menunjukkan kondisi rumah tangga yang baik sedangkan apabila tingkat konsumsi non pangannya menunjukkan nilai 20-49% menunjukkan kondisi sedang dan menunjukkan kondisi yang buruk. Tingkat konsumsi non pangan masyarakat Kota Magelang sejak tahun 2011 menunjukkan trend yang meningkat di atas 50% sehingga apabila di dasarkan dari teori di atas , dapat di golongan ke dalam kondisi rumahtangga yang baik. Proporsi pengeluaran non makanan lebih dari 50% dengan fluktuatif yang mendekati 60%. Tahun 2016 merupakan nilai terkecil untuk persentase pengeluaran makanan atau nilai tertinggi untuk persentase pengeluaran non makanan dalam rentang enam periode. Sementara untuk rata – rata pengeluaran per kapita per bulan selama rentang enam tahun dapat di lihat bahwa rata – rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk meningkat dari Rp. 653.780,- pada tahun 2011 menjadi Rp. 1.125.811,- di tahun 2016

Kemampuan Ekonomi Daerah juga dapat direpresentasikan melalui produktivitas total daerah yang tercermin pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sembilan sektor atau lapangan usaha:

Tabel 2 - 58
PDRB Menurut Lapangan Usaha adhk dan adhb Tahun 2010-2012
dan Prediksi Tahun 2013-2016 (2010=100 dalam Juta Rupiah)

Tahun	PDRB adhb	PDRB adhk
2011	4.464.559,10	4.255.662.20
2012	4.887.646,47	4.484.268,07
2013	5.356.307,45	4.755.269,18
2014	5.915.830,84	4.987.376,46
2015	6.466.971,04	5.241.660,00
2016*	7.015.380, 09	5.518.684,55
2017**	7.544.799, 70	5.804.917,24

Sumber : Dinas KMinfo dan statistik Kota Magelang Tahun 2017

* Angka sementara

** Angka sangat sederhana

Indikator selanjutnya dari aspek Kemampuan Keuangan Daerah adalah Jumlah bank dan lembaga keuangan non bank yang ada di Kota Magelang. Keberadaan lembaga perbankan dan lembaga keuangan non bank tersebut diharapkan akan mampu mencukupi kebutuhan pembiayaan masyarakat dan mendukung perekonomian daerah khususnya dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Magelang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan luas wilayah 18.12 km², pada tahun 2017 Kota Magelang mempunyai 49 lembaga keuangan perbankan (cabang dan unit lembaga perbankan) yang terdiri dari 4 lembaga bank milik pemerintah, 2 lembaga perbankan milik daerah, serta 22 bank swasta yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Magelang. Berdasarkan jenis, bank yang ada di Magelang meliputi : a). 36 Bank Umum (commercial Bank), terdiri 34 bank konvensional dan 2 bank syariah, b). 13 Bank Perkreditan Rakyat (Rural Bank), yang merupakan jenis konvensional; dan 3). 3 Bank Syariah (Islamic Bank). Selain Lembaga Keuangan perbankan, jasa keuangan Non Bank yang terdapat di Kota Magelang pada tahun 2017, terdiri dari 17 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang tersebar di 17 Kelurahan dan 15 Perusahaan Asuransi yang terdiri dari 14 perusahaan asuransi jiwa dan 1 perusahaan asuransi kerugian. (sumber, Bagian Perekonomian, SIPD Kota Magelang 2017)

Terkait dengan lembaga keuangan Koperasi yang ada di Kota Magelang pada tahun semester 1 2017 terdapat 217 koperasi yang terdiri dari :a). 160 koperasi konsumen dengan jumlah anggota 22.803 orang; b). 9 koperasi produsen, dengan jumlah anggota sebanyak 824 orang; c). 39 koperasi simpan pinjam dengan jumlah anggota sebanyak 31.128 orang; d). 3 koperasi sekunder dan, e). 6 koperasi jasa dengan jumlah 530 orang. Total masyarakat yang menjadi anggota koperasi sebanyak 55.285 orang. Total modal usaha Koperasi – koperasi yang ada di Kota Magelang pada semester 1 tahun 2017 sebesar Rp.443.726.617.000,-, sementara volume usahanya sebesar Rp. 299.689.708.000,-. Sisa Hasil usaha dari kegiatan koperasi tersebut sebesar Rp. 79.668.663.000,-. Apabila di dibandingkan dengan tahun 2016, capaian pada semester 1 tahun 2017 relatif lebih kecil. Modal usaha koperasi pada tahun 2016 sebesar Rp.445.341.150.000,- dengan volume usahanya sebesar Rp.302.729.304.000,-

Fasilitas perdagangan di Kota Magelang cukup mendukung dan berkontribusi di dalam menambah sektor jasa perdagangan. Pada tahun 2017 di Kota Magelang terdapat 5 pasar tradisional, 20 minimarket, 7 supermarket dan 17 grosir. Keberadaan fasilitas – fasilitas perdagangan di Kota Magelang cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Kota Magelang bahkan beberapa fasilitas jasa perdagangan menjadi sarana pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat di sekitar Kota Magelang dan mampu menjadi daya tarik di sektor jasa perdagangan.

Capaian membanggakan di raih Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2017, dengan di raihnya penghargaan Anugerah Pancawara 2017 dari Kementerian Perdagangan. Penghargaan ini di raih oleh Pasar Rejowinangun Magelang. Hasil penilaian tim juri menyatakan, Pasar Rejowinangun layak menjadi pemenang untuk Kategori Pasar Rakyat Pemerintah Daerah Tipe I dan II diraih Pasar Rejowinangun (Magelang) dengan inovasi 'Pengembangan Pasar Rakyat sebagai Ruang Sosial Budaya'. Anugerah Pancawara 2017 merupakan penghargaan yang pertama kalinya diselenggarakan Yayasan Danamon Peduli bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan RI untuk mengapresiasi pasar tradisional di Indonesia yang dinilai sukses membuat inovasi bagi kemajuan pasar yang dikelolanya. Pemerintah Kota Magelang senantiasa berusaha untuk terus melakukan revitalisasi beberapa sarana jasa perdagangan di Kota Magelang khususnya Pasar – pasar tradisional yang ada di Kota Magelang dengan harapan pasar tradisional ini mempunyai daya saing tersendiri dengan memperhatikan kearifan lokal apabila di dibandingkan dengan pasar modern mengingat pasar tradisional mampu menyerap ribuan masyarakat yang bergerak di sektor tersebut. Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang pada semester 1 tahun 2017 terdapat 2.953 pedagang yang berjualan di pasar – pasar tradisional yang ada di Kota Magelang. Jumlah ini belum termasuk para penyedia jasa yang bergerak pada sektor perdagangan yang ada di pasar – pasar tradisional.

Indikator lain yang merepresentasikan Aspek Kemampuan Keuangan daerah adalah jumlah penginapan/hotel yang ada di Kota Magelang beserta sarana pendukung pariwisata di Kota Magelang. Pengembangan wisata di Kota Magelang dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek produk wisata yang meliputi obyek wisata, daya tarik wisata, serta aksesibilitas. Sementara aspek yang kedua adalah pasar wisatawan baik lokal, regional maupun mancanegara. Objek dan daya tarik wisata di Kota Magelang terdiri dari wisata budaya, wisata pendidikan, wisata religius/ziarah, wisata alam dan wisata buatan. Adapun fasilitas wisata terutama di dukung dengan keberadaan jasa akomodasi pariwisata berupa hotel, rumah makan dan fasilitas lainnya.

Tabel 2 - 59

Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Magelang Tahun 2010- Semester 1 2017

Jml Kunjungan Wisata	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Semester 1 Tahun 2017
Jumlah wisatawan	796.246	716.850	971.163	918.232	994.187	1.139.454	1.020.040	540.764
Wisatawan Dalam Negeri	795.729	716.206	970.554	913.768	988.622	1.133.373	1.013.138	539.590
Wisatawan Luar Negeri	517	644	609	4.464	5.565	6.081	6.902	1.174

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Magelang , SIPPD 2016, Bappeda Kota Magelang Data Go, Data Strategis Pemerintah Kota Magelang, 2017

Secara umum potensi dan peluang pengembangan wisata di Kota Magelang sangat besar guna mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di bawah ini disajikan tabel kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Magelang, dari sumber pendapatan pajak hotel, restoran dan hiburan.

Tabel 2 - 60

Kontribusi Pendapatan Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap PAD Kota Magelang Tahun 2012-2016

Sumber Pendapatan Daerah	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
Pajak Hotel	730.319.921,-	1.372.069.102,-	2.027.782.556,-	2.441.943.652,-	2.879.263.958,-
Pajak Restoran	872.997.547,-	1.364.657.315,-	1.797.050.823,-	2.104.103.322,-	2.431.241.151,-
Pajak Hiburan	1.019.667.207,-	1.399.359.651,-	1.329.451.348,-	1.459.002.821,-	1.634.690.181,-
Total pajak hotel, restoran, hiburan	2.622.984.675,-	4.136.086.068,-	5.154.284.727,-	6.005.049.795,-	6.945.195.290,-
Total PAD	90.986.601.697,-	107.739.838.961,-	164.927.631.230,-	186.677.410.081,-	220.193.738.774,-
Kontribusi terhadap PAD	2.88%	3.84%	3.13%	3.22%	3.15%

Sumber : Laporan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Magelang Tahun 2011- 2016, BPKAD Kota Magelang

Potensi pariwisata di Kota Magelang saat ini belum di imbangi dengan pengembangan dan pemanfaatan yang optimal potensi – potensi pariwisata di Kota Magelang. Hal tersebut dapat dilihat dari masih kecilnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB Kota Magelang dan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Magelang. Inventarisasi dan penggalan berbagai potensi, keunikan dan destinasi pariwisata, meningkatkan promosi, informasi dan pemasaran

pariwisata, menyelenggarakan berbagai event yang dapat menarik wisatawan hadir ke Kota Magelang serta mengembangkan berbagai fasilitas pendukung kepariwisataan diharapkan akan menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Magelang dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata

Data realisasi kontribusi Pendapatan Pajak Hotel, Restoran dan hiburan terhadap PAD pada triwulan 1 tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2 - 61
Kontribusi Pendapatan Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap PAD
Kota Magelang tahun 2017

Sumber Pendapatan Daerah	Tahun 2017 (Rp)
Pajak Hotel	3.304.979.480,-
Pajak Restoran	3.388.469.448,-
Pajak Hiburan	1.884.212.564,-
Pendapatan dari pajak hotel, restoran, hiburan	8.577.661.492,-
Total PAD	232.925.982.708,-
Kontribusi terhadap PAD	3.68%

Sumber : Laporan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Magelang semester 1 Tahun 2017, BPKAD Kota Magelang

Pada Tahun 2015 fasilitas hotel di Kota Magelang bertambah 2 yaitu Cityhub Hotel dan Hotel Safira. Dengan bertambahnya 2 hotel tersebut, maka pada Tahun 2017 Kota Magelang memiliki fasilitas Hotel sebanyak 17 hotel, terdiri dari 10 hotel kelas melati, 3 hotel bintang 2 yaitu Hotel Trio, Hotel Borobudur Indah dan Hotel Cityhub, 3 hotel kelas Bintang 3 yaitu Hotel Sriti, Hotel Oxalis dan Hotel Safira, 1 buah hotel bintang 4 yaitu Hotel Atria yang terletak di Jalan Jendera Sudirman, serta 1 buah hotel bintang 5 yaitu Hotel Puri Asri yang terletak di tepi sungai Progo dan bersebelahan dengan Taman Kyai Langgeng. Layanan Hotel yang ada di Kota Magelang di rasa cukup untuk menampung wisatawan dan tamu yang berkunjung di Kota Magelang bahkan pada saat event- event tertentu baik yang berskala regional maupun nasional yang di selenggarakan di Kota Magelang. Jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri yang menginap di Kota Magelang pada semester 1 Tahun 2017 sebanyak 102.248 pengunjung, sedangkan jumlah pengunjung luar negeri yang menginap di Kota Magelang sebanyak 965 pengunjung.

Fasilitas lain selain hotel yang mendukung jasa pariwisata di Kota Magelang yaitu keberadaan Rumah makan yang tersebar cukup banyak di Kota Magelang yaitu sebanyak 84 buah. Beberapa tahun ini Pemerintah Kota Magelang juga mengembangkan Pusat-pusat Kuliner yang memfasilitasi banyak PKL yang ada di sana. Selain bertujuan pada penataan PKL di Kota Magelang juga bermaksud untuk menciptakan suasana Kota yang tertib, bersih dan rapi dalam mendukung peningkatan pendapatan dari sektor Pariwisata. Data Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2016 terdapat 19 Pusat Kuliner yang tersebar di seluruh penjuru Kota Magelang. Pusat – pusat Kuliner tersebut mampu menampung 898 PKL Kuliner di Kota Magelang (sumber Data Strategis Kota Magelang 2017. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang)

Fasilitas wisata terutama didukung dengan keberadaan jasa akomodasi pariwisata baik berupa hotel maupun rumah makan serta fasilitas pelayanan pariwisata lainnya. Sedangkan aksesibilitas terutama terkait dengan

ketersediaan sarana prasarana transportasi yang dapat menjangkau obyek-obyek dan fasilitas pariwisata di Kota Magelang. Hotel merupakan fasilitas penunjang pariwisata atau Amenitas yang utama selain rumah makan serta fasilitas pelayanan pariwisata lainnya. Semakin meningkatnya potensi dan daya tarik Kota diindikasikan dengan semakin bertambahnya jumlah hotel di Kota Magelang.

Tabel 2 -62
Hotel Bintang di Kota Magelang

Nama & Alamat	Klasifikasi	Jumlah Kamar
PURI ASRI Jl. Cempaka 9	B - 5	178
ATRIA HOTEL & CONFERENCE Jl. Jend. Sudirman	B - 4	144
SRITI Jl. Daha 23 Telp. (0293) 363347, 363348	B - 3	31
TRIO Jl. Jend. Sudirman 68 Telp. (0293) 365095, 365096	B - 2	73
BOROBUDUR INDAH Jl. A. Yani 246 Telp. (0293) 364502, 312500	B - 2	39
OXALIS Jl. Cempaka 17 Telp. (0293) 5503151, 310371	B - 3	53
CITY HUB Jl. Gatot Subroto No. 260, Telp. (0293) 311758	B - 2	34
SAFIRA Jl. Gatot SoebrotoNo. 56A, Telp. (0293) 360033	B - 3	54

Sumber: Profil Pariwisata Kota Magelang, 2016

Selain itu jumlah agen perjalanan wisata, dimana sampai dengan tahun ini tercatat jumlahnya sebanyak 19 agen perjalanan wisata. Upaya Pemerintah untuk meningkatkan potensi daerah dan memajukan sektor jasa Pariwisata dapat dilihat dengan beberapa kebijakan yang dilaksanakan di antara penataan dan pengembangan kawasan lembah tidar untuk mendukung wisata religi Gunung Tidar, pengembangan kawasan budaya Mantyasih, pengembangan kawasan kuliner di beberapa titik di Kota Magelang.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

Fokus Kedua dari Aspek daya Saing Daerah adalah Fokus Fasilitas Wilayah atau ketersediaan Insfrastruktur yang memadai di daerah. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah dalam rangka untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atau investor dengan penyediaan sarana dan prasarana. Fasilitas Wilayah yang meliputi ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan

merupakan aspek yang sangat penting dalam mengelola kawasan perkotaan. Ketersediaan sarana prasarana wilayah dan infrastruktur yang terus dibenahi oleh Pemerintah Kota Magelang meliputi sarana perkotaan yaitu sarana pendidikan, kesehatan, permukiman, perdagangan, sarana perhubungan darat, serta sarana rekreasi dan olah raga. Prasarana perkotaan meliputi prasarana permukiman; prasarana perhubungan; prasarana jaringan, yang terdiri dari jaringan drainase perkotaan, jaringan irigasi, serta jaringan utilitas lainnya; serta prasarana persampahan.

Salah satu sarana prasana wilayah yang di sediakan pemerintah dan swadaya masyarakat dalam rangka mendukung perwujudan Kota Religius adalah ketersediaan tempat - tempat ibadah. Kecukupan sarana prasarana peribadatan di dibandingkan dengan jumlah penduduk ini menjadi modal bagi Pemerintah daerah dalam menjamin dan memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat dalam melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang di akui oleh Pemerintah.. Data dari Departemen Agama Kota Magelang yang tersaji di dalam Data Go Kota Magelang menyajikan data ketersediaan tempat ibadah di Kota Magelang pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 - 63
Sarana Peribadatan di Kota Magelang Tahun 2013 – 2017

Tempat Ibadah	2013	2014	2015	2016	2017
Masjid	153	153	153	153	153
Langgar / Mushola	224	210	217	217	217
Gereja Kristen	16	23	26	26	26
Gereja Katholik/Kapel	2	2	2	2	2
Wihara	2	2	2	2	2
Klenteng	2	2	2	2	2
Lainnya	-	-	4	4	4

Sumber : Kemenag Kota Magelang, Data Go, Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang

Ada beberapa indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur diantaranya adalah Ketaatan terhadap RTRW, Prasarana Jalan, Kondisi Permukiman dan Infrastruktur, Sumber daya Air, Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, Persentase Rumah tangga yang menggunakan air bersih.

2.1.4.2.1 Ketaatan Terhadap Perda RTRW

Perda RTRW Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011–2031 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. RTRW memuat rumusan kebijakan dan strategi pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang, selain itu juga berisi rencana struktur dan pola ruang, serta penetapan kawasan strategis kota yang perwujudannya dilakukan melalui pelaksanaan indikasi program. RTRW berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun rencana struktur dan pola ruang wilayah Daerah serta dalam menetapkan kawasan strategis, memantapkan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang yang meliputi :

- a) penyesuaian dan sinkronisasi program-program pembangunan Daerah dengan rencana tata ruang;
- b) peningkatan kejelasan dan perincian dari program-program utama yang telah ditetapkan kedalam implementasi rencana tindak yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Daerah;
- c) penyempurnaan pedoman pemanfaatan ruang agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Daerah;
- d) penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan kegiatan dan program pembangunan Daerah secara menerus dan berlanjut berkaitan dengan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang yang terdapat dalam rencana tata ruang;
- e) penyempurnaan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang;
- f) pengoptimalan sistem koordinasi antar instansi terkait dalam penataan ruang.

Rencana Tata Ruang Kota Magelang secara Umum membagi Kota Magelang menjadi 5 (lima) Bagian Wilayah Kota (BWK) selain itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang juga memuat adanya kebijakan dan strategi dalam penataan ruang yaitu adanya Kawasan strategis kota artinya wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota Magelang terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Rencana pengembangan kawasan strategis Kota meliputi:

- a) Kawasan strategis untuk pertahanan dan keamanan;
- b) Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
- c) Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- d) Kawasan strategis sosial budaya.

Salah satu wujud ketaatan terhadap pelaksanaan RTRW maka Pemerintah Kota Magelang senantiasa berupaya untuk memenuhi target pencapaian ruang terbuka hijau sebesar 30% sebagaimana yang diamanatkan oleh - oleh Undang – undang. Ruang terbuka hijau merupakan salah satu kebutuhan utama perkotaan yang berkaitan langsung dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup, yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Dengan adanya Ruang Terbuka Hijau maka mutu lingkungan hidup di perkotaan dapat meningkat, sehingga lingkungan terasa nyaman, segar, indah, bersih dan juga dapat berfungsi sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota Magelang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Target indikator ini adalah 20 % dari luas wilayah Kota Magelang. Penyediaan RTH publik bukan merupakan hal yang mudah untuk suatu kabupaten/kota.

Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan pada tahun 2015 baru terealisasi sebesar 18,57%. Kekurangan luasan RTH sebesar 1,43% atau seluas 25,9 hektar sangat sulit dipenuhi, mengingat keterbatasan lahan di Kota Magelang. Program dan kegiatan pada bidang RTH harus difokuskan pada upaya peningkatan jumlah (kuantitas) luasan, tidak hanya pada peningkatan kualitas aspek visual (estetika) dari RTH khususnya taman kota. Peningkatan kuantitas lahan RTH dilakukan dengan pembebasan lahan pada sepadan Jalan dan Sungai, pemenuhan Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebesar 10% bagi pengembang serta pembebasan melalui pembelian tanah masyarakat untuk RTH.

Tabel 2 - 64

Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang, Tahun 2017 Semester 1

Rinican	Jumlah	Satuan	Luas (Ha)
Taman Kota	60	Buah	8.94
Jalur Hijau	20	titik	263.39
Hutan Kota	1	titik	67.12
TPU	1	Buah	16
Jumlah	84		355.45

Secara perhitungan ideal luasan RTH di Kota Magelang memiliki kekurangan sebanyak 22,41 Ha. Luas ruang terbuka hijau pada tahun 2017 sebesar 355.45 HA Pengembangan RTH terus diupayakan sebagai salah satu prioritas pembangunan di Kota Magelang, dengan melibatkan masyarakat dan instansi-instansi seperti sekolah, perusahaan, pihak swasta dan lain sebagainya.

Belum tercapainya Ruang Terbuka Hijau khususnya publik perlu adanya upaya tersendiri untuk mengotimalkan lahan terbuka yang sudah ada seperti makam dan sempadan sungai seperti memanfaatkan lahan – lahan sempit, lahan marginal dan lahan – lahan yang terabaikan untuk dijadikan RTH publik, melakukan penertiban terhadap bangunan – bangunan liar yang tidak berizin di sempadan sungai, serta mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya keberadaan RTH untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencapaian amanat Undang – Undang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang

Sarana informasi tata ruang wilayah Kota Magelang kurang memenuhi target pada tahun perencanaan. Informasi tata ruang kepada masyarakat masih perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan tata ruang. Sarana informasi bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata ruang, Hal ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga tata ruang dan ikut menegakkan tata ruang di Kota Magelang.

Salah satu indikator yang merepresentasikan terhadap keataan terhadap Peraturan Tata Ruang di Kota Magelang di antaranya indikator jumlah ijin Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukan sudah mencapai target yaitu 100%. Hal ini didukung oleh koordinasi yang baik antara Bappeda (selaku sekretaris BKPRD), KPPT (instansi pemberi ijin tertentu), dan kantor pertanahan (terkait izin IPPT) yang mensyaratkan setiap proses sertifikasi dan alih fungsi lahan.

Beberapa permasalahan terkait dengan penataan ruang daerah selain hal tersebut di atas di antaranya adalah masih lemahnya pengendalian dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang karena belum ada rencana rinci Tata Ruang Kota Magelang yang disebabkan karena proses legalisasi Raperda RDTR masih sangat panjang. Selain itu juga masih banyak ditemui bangunan – bangunan yang belum mempunyai ijin serta bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Masalah yang lain yang juga masih menjadi PR bagi Pemerintah adalah masih

rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan ruang sesuai dengan aturan yang ada ditambah dengan belum optimalnya pengembangan sistem informasi kepada masyarakat di bidang tata ruang.

Ketaatan terhadap peraturan perundangan terkait penataan ruang sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan mengingat saat ini degradasi daya lingkungan semakin besar mengingat kebutuhan masyarakat terhadap lahan semakin besar. Kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi terganggu akibat kurang terkendalinya para pelaku pembangunan dalam pemanfaatannya serta kurangnya kepedulian terhadap kaidah – kaidah kelestarian lingkungan alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

2.1.4.2.2 Prasarana Jalan

Di Kota Magelang terdapat beberapa jaringan jalan primer yaitu Jalan Ahmad Yani, Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Urip Sumoharjo yang menjadi jalan penghubung utama antara 2 (dua) Kota yang berperan sebagai PKN, yaitu Semarang dan Yogyakarta. Jalur ini memiliki tingkat intensitas pergerakan yang cukup tinggi, khususnya untuk angkutan bus dan angkutan barang. Sementara itu, untuk jaringan jalan di dalam kota yang memiliki intensitas tinggi antara lain adalah Jalan Pahlawan, Jalan Pemuda, Jalan Sudirman, dan Jalan Ikhlas. Penyebab adanya intensitas tinggi di kawasan ini karena adanya pusat pelayanan kegiatan masyarakat yang memiliki daya tarik tinggi seperti sarana perdagangan dan pendidikan serta adanya parkir on street..

Struktur dan kondisi fisik jaringan jalan Kota Magelang secara umum hampir 100% dalam kondisi baik dan terawat baik jalan kota maupun jalan lingkungan. Struktur jalan di Kota Magelang sebagian besar berupa jalan aspal dengan perkerasan hotmix terutama untuk jalan utama kota dan lingkungan serta sebagian dengan perkerasan rigid pavement atau betonisasi untuk jalan-jalan lingkungan. Secara fisik ruas jalan dan jembatan di Kota Magelang sudah dalam keadaan yang baik oleh karena itu untuk menjaga kondisi tersebut perlu adanya pemeliharaan dan peningkatan baik secara rutin dan berkala

Capaian kinerja terkait dengan Kondisi jalan terkait panjang trotoar dalam kondisi baik dengan dari panjang trotoar yang jumlah total panjangnya 81.653 meter terdapat 56.391 meter trotoar yang kondisinya baik. Pada tahun 2016 trotoar yang dibangun adalah trotoar Jl. A. Yani, Trotoar Jl. Abimanyu, Trotoar Jl. Perintis Kemerdekaan, dan Trotoar Jl. Sudirman. Indikator Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik capaian kinerjanya 88,5% dari target 88,5%, artinya dari total panjang jalan kota 122,94 Km terdapat 108,8 Km dalam kondisi baik. Pada tahun 2016 Kota Magelang memiliki tambahan ruas jalan perkotaan akibat penurunan status jalan provinsi, yaitu Jl. Tidar, Jl. Kyai Mojo, Jl. Mayjend. Sutoyo, Jl. Aloon – aloon Selatan dan Jl. Gatot Subroto, kelima ruas jalan tersebut kondisinya rusak sedang.

Tabel 2 - 65

Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi, fungsi dan Status Jalan Di Kota Magelang Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Semester 1 Tahun 2017
--------	------------	------------	------------	------------	-----------------------

a.

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Semester 1 Tahun 2017
Jenis Permukaan Jalan					
a. Aspal	84.306	84.306	116.352	118.92	118.92
b. Kerikil			-	-	-
c. tanah			-	-	-
d. Tidak di rinci	8.763	9.633	-	-	-
Panjang jalan berdasarkan kondisi					
a. Jalan baik					
b. Jalan sedang	33.81	38.35	59.64	70.08	70.08
c. Jalan rusak	29.71	29.17	33.37	38.98	38.98
d. Jalan rusak berat	26.54	23.45	21.56	9.15	9.15
	3.00	2.97	1.78	0.7	0.7
Panjang jalan berdasarkan fungsi					
a. Jalan arteri					
b. Jalan kolektor	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574
	10.938	10.938	10.938	10.938	10.938
Status Jalan					
a. Kabupaten/Kota	77,964	77,964	77,964	77,964	77,964
b. Nasional	13,512	13,512	13,512	13,512	13,512
c. Provinsi	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920
Kelas Jalan					
a. Kelas I	-	-	-	-	-
b. Kelas II	-	-	-	-	-
c. Kelas III	-	-	-	-	-
d. Kelas IIIA	-	-	-	-	-
e. Kelas IIIB	-	-	-	-	-
f. Kelas IIIC	84.306	84.306	116.35	118.92	118.92
g. Tidak Dirinci	8.763	9.633	-	-	-

Sumber : Kantor DPU Kota Magelang, Profil Daerah Kota Magelang dan DDA Kota Mgl Tahun 2013-2017

Dasar : Keputusan Walikota Magelang nomor 621/120/112/2015 tentang Penetapan Status Ruas – ruas jalan Kota dan Jembatan Kota Magelang

Transportasi merupakan salah satu elemen perkotaan yang tidak dapat dipisahkan, dan menjadi struktur utama pembentuk kawasan perkotaan. Transportasi menjadi tumpuan aktivitas masyarakat dalam beraktivitas serta pengembangan ekonomi dan sosial wilayah perkotaan sehingga pengembangan transportasi menjadi prioritas penanganannya. Pemerintah Kota Magelang mempunyai komitmen dalam peningkatan kualitas jalan.

Di Kota Magelang terdapat beberapa jaringan jalan primer yaitu Jalan Ahmad Yani, Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Urip Sumoharjo yang menjadi jalan penghubung utama antara 2 (dua) Kota yang berperan sebagai PKN, yaitu Semarang dan Yogyakarta. Jalur ini memiliki tingkat intensitas pergerakan yang cukup tinggi, khususnya untuk angkutan bus dan angkutan barang. Sementara itu, untuk jaringan jalan di dalam kota yang memiliki intensitas tinggi antara lain adalah Jalan Pahlawan, Jalan Pemuda, Jalan Sudirman, dan Jalan Ikhlas. Penyebab adanya intensitas tinggi di kawasan ini karena adanya pusat pelayanan kegiatan masyarakat yang memiliki daya tarik tinggi seperti sarana perdagangan dan pendidikan serta adanya parkir on street.

Keberadaan angkutan umum juga sangat mendukung system pergerakan wilayah, Salah satu jenis angkutan umum yang beroperasi di Kota Magelang adalah angkutan perkotaan yang melayani 12 rute yang berkapasitas 12 penumpang, saat ini jumlah angkutan umum yang tercatat masih beroperasi adalah sebanyak 335.

Selain angkutan kota, dikota Magelang juga dilalui angkutan perbatasan sejumlah 173 angkutan perbatasan dengan rincian jumlah armada pada masing-masing trayeknya adalah sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2 - 66
Trayek dan Jumlah Armada Angkutan Perbatasan di Kota Magelang

No	Trayek	Jumlah Armada
1	Magelang-Payaman-Secang	21
2	Magelang-Tanjung-Kalinegoro	12
3	Magelang-Blondo-Borobudur	6
4	Magelang-Blabak-Muntilan	29
5	Magelang-Sorobayan-Tegalrejo	23
6	Magelang-Secang-Grabag	15
7	Magelang-Secang-Pirikan-Grabag	23
8	Magelang-Panca Arga-Salaman	12
9	Magelang-Canguk-Candimulyo-Petung-Krakal-Pogalan	7
10	Magelang-Muntilan-Salam	22
11	Magelang-Tegalrejo-Ngablak	3

Sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Terminal Tipe A yaitu Terminal Tidar mulai Tahun 2016 pengelolaannya diserahkan Provinsi. Sedang untuk Kota Magelang hanya mengelola Terminal Tipe C. Keberadaan Terminal Type C sekarang ini belum memenuhi syarat sesuai dengan aturan, kedepan perlu ada pembangunan terminal Type C sesuai standar. Pengembangan Terminal Tipe C yaitu Terminal Kawasan Kebonpolo, Terminal Kawasan Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo, Terminal Kawasan Canguk, Terminal Kawasan Sambung, Terminal Kawasan Iklas, dan Terminal Kawasan Jalan Kalimas. Sedangkan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi, yaitu Terminal Angkutan Barang berada di Jalan Sukarno-Hatta Kelurahan Tidar Utara, belum berfungsi sebagai terminal barang. Kedepan perlu ada pengembangan Terminal Barang yang melayani bongkar muat dan pergudangan.

2.1.4.2.3 Drainase

Jaringan drainase seringkali disebut jaringan air hujan, jaringan pematusan, jaringan pelimpasan, jaringan riol, dan sebagainya. Saluran drainase berfungsi mengalirkan luapan/ limpasan air hujan (run off), yang umumnya berupa saluran terbuka (selokan/got/kanal/sungai) dengan "rute" dari area tangkapan hujan (catcment area) berupa lahan tertutup/ terbangun seperti jalan, halaman, dan lain lain ke muara (out-fall) yang juga bisa berupa sungai, waduk, polder, dan lain lain.

Kondisi jaringan drainase di Kota Magelang mencakup seluruh system jaringan tersebut, diatas dengan pengecualian tidak terdapat waduk penampungan. Dalam hal ini, fungsi waduk penampungan sebagai muara (out fall) seluruh saluran tersebut, digantikan oleh S. Progo dan S. Elo yang sekaligus merupakan saluran primer. Bahkan karakteristik khusus wilayah Kota Magelang yang masih mempertahankan sekitar 12 % luas wilayahnya sebagai area persawahan, dalam kondisi tertentu lahan persawahan tersebut juga dapat berfungsi sebagai penampungan limpasan air hujan.

Di dalam lingkungan permukiman, jaringan drainase dikembangkan di kanan kiri jalan dimanfaatkan sebagian besar untuk pembuangan limbah rumah tangga dan pembuangan air hujan. Sistem jaringan drainase umumnya mencakup seluruh saluran yang ada, mulai dari selokan di halaman bangunan, saluran tersier yang umumnya berupa selokan di tepi jalan, saluran sekunder yang umumnya berupa kanal yang lebih lebar dan menuju saluran primer, hingga saluran primer yang umumnya berupa aliran sungai besar, serta waduk penampungan.

Sistem jaringan drainase di Kota Magelang terdiri dari sistem jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier. Sistem jaringan drainase tersier merupakan jaringan drainase yang rumah per rumah, jaringan sekunder yang menghubungkan antara jaringan tersier dan primer.

Drainase di Kota Magelang banyak menggunakan drainase tertutup utamanya pada kawasan pusat perdagangan dan jasa. Sistem pengelolaan drainase lingkungan di Kota Magelang pada dasarnya telah diatur sebagaimana pola permukiman yang ada, namun seiring dengan berjalannya waktu, jumlah penduduk meningkat dan secara fisik mengalami perkembangan terutama adalah target pemenuhan kualitas lingkungan hidup, penurunan permukaan tanah, peningkatan debit air, kerusakan – kerusakan ekologi lingkungan. Secara umum, setiap kawasan permukiman telah memiliki saluran drainase sekunder dan tersier sampai ke tiap – tiap rumah dan terintegrasi ke dalam saluran drainase primer namun genangan pada musim penghujan akibat dari naiknya debit air pada saluran drainase primer dan adanya penurunan sudut elevasi pada saluran drainase sekunder sehingga air yang seharusnya mengalir dari saluran drainase tersier menuju saluran drainase sekunder kemudian berakhir di saluran drainase berbalik arah. Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah untuk memperbaiki sarana drainase di Kota Magelang.

Permasalahan yang muncul dalam sistem drainase di Kota Magelang adalah sudut elevasi saluran yang tidak seimbang sehingga permukaan dasar saluran sekunder lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan dasar saluran tersier hal ini dipengaruhi oleh kontur lahan yang cukup bervariasi. Permasalahan lainnya adalah bahwa jaringan drainase perkotaan juga menjadi saluran pembuangan limbah rumah tangga. Jaringan drainase primer di Kota Magelang terdiri dari sungai Manggis dan Sungai Bening yang menampung limpahan air hujan dari seluruh jaringan drainase kota.

Permasalahan lain terkait dengan system drainase di Kota Magelang diantaranya: a).belum optimalnya fungsi dan peran sarana dan prasarana drainase untuk pengendalian banjir dan genangan pada musim hujan, b). jaringan teknis irigasi masih menjadi tumpuan pembuangan air hujan dan air limbah dari permukiman dan perumahan, c). adanya konversi lahan persawahan ke permukiman/ perumahan baru pada setiap tahunnya, akan mempengaruhi penyediaan saluran irigasi serta d).belum terpenuhinya semua kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku.

Implementasi pengembangan jaringan drainase di Kota Magelang dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi jaringan sungai dan jaringan drainase utama yang ada, berperan sebagai main drain (drainase induk). Pola

jaringan drainase yang dikembangkan mengikuti pola jaringan jalan yang dikembangkan. Untuk beberapa kawasan yang cepat mengalami sedimentasi maka perlu adanya normalisasi irigasi (tanggul, saluran) secara bertahap. Upaya untuk perbaikan jaringan drainase perkotaan diupayakan untuk meminimalisir merusak atau mengganggu keberadaan jalur hijau jalan mengingat kita masih mempunyai kewajiban untuk mencapai batas minimal 30% ruang hijau di Kota Magelang.

2.1.4.2.4 **Kondisi Permukiman dan Infrastruktur**

Pemerintah Kota Magelang mempunyai tantangan di dalam aspek penyediaan sarana permukiman bagi penduduk di atas lahan yang terbatas sehingga dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang permukiman. Pemerintah Kota Magelang berusaha mengoptimalkan pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama di kawasan - kawasan yang padat penduduk. Selain itu Pemerintah Kota Magelang juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas prasarana pelayanan dasar permukiman perkotaan prasarana permukiman yang meliputi prasarana jalan lingkungan, prasarana drainase lingkungan, prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan.

Amanat Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia dan meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar pada tahun 2019.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dari Pemerintah daerah terkait dengan Key Performance Indicators – akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh 0% dan akses sanitasi layak 100%. Kondisi yang ada di Kota Magelang pada saat ini adalah masih adanya lingkungan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni di Kota Magelang, belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, belum optimalnya upaya pemeliharaan sarana permukiman yang ada guna mendukung perpanjangan usia pakai sarana tersebut serta masih perlunya peningkatan kualitas prasarana dasar permukiman perkotaan yang meliputi prasarana lingkungan, prasarana drainase lingkungan, prasarana air bersih lingkungan serta prasarana sanitasi lingkungan.

Rumah layak huni secara nasional SPMnya dari Kementerian Perumahan Rakyat 100% dengan kurun waktu tahun 2009-2025, untuk mempercepat terwujudnya indikator kinerja tersebut perlu dukungan kesepakatan kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) antara PD terkait, dengan maksud agar dilakukan survey data RTLH akan memudahkan untuk melaksanakan program rumah layak huni. Permasalahannya yaitu sebagian besar penanganan RTLH terkendala dengan masalah kepemilikan aset yang belum jelas. Indikator ini memerlukan data jumlah rumah layak huni dan jumlah rumah keseluruhan rumah di suatu wilayah. Untuk mengetahui jumlah rumah layak huni terlebih dahulu ditetapkan kriteria rumah layak huni, setelah itu baru dilakukan survey yang melibatkan PD terkait, seperti DKPTK, DPU, Bappeda, Kantor Statistik, Kantor Litbang dan Statistik, BPMPKB.

Data Statistis Kota Magelang semester 1 tahun 2017 menyebutkan bahwa jumlah rumah tidak layak huni di Kota Magelang pada tahun 2016 sebanyak 2.157 unit rumah sedangkan rumah layak huni di lokasi perkotaan sebanyak 29.240 unit rumah. Sementara luas kawasan kumuh di Kota Magelang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor 050/280/112-310 Tahun 2015 tentang Luasan Kumuh yang diterbitkan pada tahun 2015 seluas 121.17 Ha. Hasil verifikasi disesuaikan dengan Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang Permukiman dan Perumahan Kumuh, terdapat luasan kumuh seluas 125.34 Ha di Kota Magelang. Satu hal yang juga masih menjadi pemikiran bagi

Pemerintah yaitu terkait dengan keberadaan penduduk di permukiman kumuh. Data 2017 menyebutkan bahwa upaya Pemerintah Kota Magelang dalam menyurangi kawasan kumuh telah berhasil mengurangi luasan kumuh 57.935 Ha sehingga saat ini terdapat 2.188 jiwa atau 547 KK yang tinggal di perumahan kumuh seluas 67.405 Ha.

Pertambahan jumlah penduduk di kawasan perkotaan meningkatkan hunian padat yang jika tidak terkendali akan menyebabkan kekumuhan, kegiatan untuk mengurangi kawasan kumuh permukiman baru menyentuh infrastruktur jalan lingkungan, saluran permukiman dan air bersih, sedangkan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan sanitasi tidak dapat dilaksanakan karena terkendala aturan dan juknis, sehingga penanganannya belum maksimal. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah sehingga berkurangnya luasan kumuh di Kota Magelang dapat terpacai sesuai dengan target perencanaan yang telah ditetapkan

Beberapa program pengurangan rumah tidak layak huni yang sudah terlaksana di Kota Magelang melalui pembiayaan APBD Kota, APBD Provinsi, PNPM, dan BPS. Dalam mensikapi Keterbatasan lahan dan semakin tingginya harga tanah di wilayah perkotaan menjadi kendala dalam penyediaan rumah layak huni, pembangunan perumahan di arahkan pada pembangunan rumah susun. Hingga tahun 2015 Pemerintah Kota Magelang sudah memiliki 2 (dua) unit Twin Block Rusunawa yang berada di Kelurahan Porobangsari dan Kelurahan Tidar Utara

Terkait dengan sanitasi rumah tinggal, pada tahun 2016 rumah dengan fasilitas air bersih sebanyak 29.055 unit, rumah yang memiliki pembuangan tinja 28.320 unit sedangkan rumah dengan memiliki tempat pembuangan sampah sebanyak 21.237 unit Tersedianya system air limbah yang memadai, dimana rumah tinggal yang bersanitasi berarti harus memiliki system pengelolaan limbah yang memadai. Khusus untuk kawasan padat hunian dan bangunan, penyediaan rumah tinggal bersanitasi akan menghadapi masalah ketersediaan tanah. Peran pemerintah sangat strategis untuk penyelesaian masalah ini melalui penyediaan septic tank komunal dalam dokumen SSK yang telah disusun.

Partisipasi masyarakat sangat menentukan untuk menyelesaikan program-program untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi, karena masih terdapat kawasan rawan sanitasi di Kota Magelang, yang diakibatkan oleh kesadaran masyarakat masih rendah mengenai BAB. Perlu upaya untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengikuti pola hidup sehat serta untuk bersama – sama Pemerintah menyelesaikan program – program sanitasi di Kota Magelang.

2.1.4.2.5 Sumber Daya Air

Sumber daya air di Kota Magelang terdiri dari dua yaitu Sungai dan Sumber Mata Air. Kota Magelang dibatasi juga oleh dua sungai yang cukup besar yaitu Sungai Elo di sebelah Timur dan Sungai Progo di sebelah barat dan Sungai Elo di sebelah timur yang masuk dalam Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak. WS Progo-Opak-Serang memiliki luas total 4.993,85 km² yang terdiri dari DAS Progo, Opak, Serang, Tangsi, Elo, Oyo. Sungai Progo menurut hasil penelitian geologi yang dilakukan PDAM Kota Magelang didapat bahwa aquifer terdapat di kedalaman 10 – 30 m dan 90 – 120 m, dengan total panjang 138 Km dan luas DAS seluas 2.380 Km². Sementara itu didalam kota sendiri dilalui oleh 2 saluran Kali Manggis dan Kali Bening yang membelah Kota Magelang dari utara ke selatan yang merupakan kesatuan wilayah irigasi Saluran Progomanggis-Kali Bening dengan luas 3.663 Ha.

Sumber air bersih yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Magelang berasal dari 7 sumber dan hanya satu yang berlokasi di wilayah Kota Magelang, yaitu sumber air Tuk Pecah. Sumber air lainnya

berlokasi di wilayah Kabupaten Magelang, yaitu mata air Kalimas I, mata air Kalimas II, mata air Wulung, mata air Kalegen, mata air Kanoman I, dan mata air Kanoman II. Sumber air di Kota Magelang juga dimanfaatkan untuk sistem irigasi yang berasal dari aliran Kalli Bening dan Kali Manggis yang membelah Kota Magelang dari utara ke selatan. Prasarana irigasi di Kota Magelang terdiri dari 5.000 m saluran irigasi Kali Kota, 9.700 m saluran irigasi Kali Manggis, dan 7.850 m saluran irigasi Kali Bening.

Prasarana air bersih di Kota Magelang telah manjangkau ke 17 Kelurahan. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, sebagian besar penduduk mendapatkan layanan air bersih dari Perusahaan Air minum Kota Magelang. Sampai dengan saat ini kondisi mata air di Kota Magelang cukup banyak, namun yang harus mulai dipikirkan oleh Pemerintah adalah tidak seluruhnya mata air dimanfaatkan dengan baik ketika kebutuhan permukiman meningkat, bahkan terdapat mata air yang ditutup untuk bangunan. Kondisi ini cukup memprihatinkan di mana tingkat kebutuhan air bersih cukup tinggi seiring dengan pertumbuhan penduduk. Selain itu perlunya peningkatan kualitas dari saluran – saluran air agar tidak terjadi kebocoran sehingga kebutuhan air bersih masyarakat tidak terganggu.

2.1.4.2.6 Persentase Rumah tangga yang menggunakan air bersih

Sumber air bersih bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Magelang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu sumber air bersih dari air tanah (sumur) dan air bersih perpipaan yang dikelola oleh PDAM Kota Magelang. Sebagian besar kebutuhan air bersih penduduk sudah dapat dilayani melalui jaringan perpipaan yang telah manjangkau hampir di seluruh wilayah Kota Magelang.

Sistem jaringan air bersih di Kota Magelang terbagi menjadi sistem perpipaan dan sumur air dalam. Sistem perpipaan dikelola oleh PDAM dengan jumlah pelanggan pada tahun semester 1 2017 sebanyak 25.162. Jumlah ini meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan tingkat penggunaan air bersih pada tahun 2017 sebesar 7.434.942 liter/ tahun. Data Strategis Kota Magelang 2017 menyebutkan bahwa pada tahun 2016, jumlah rumah tangga yang menggunakan leding /perpipaan sebanyak 25.103 rumah tangga dengan tingkat penggunaan air bersih 7.606.319 liter/ tahun, sedangkan rumah tangga yang masih menggunakan sumur lindung sebanyak 310 rumah tangga. Total jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum sebanyak 102.228 penduduk. Berdasarkan data strategis Kota Magelang pada semester 1 Tahun 2017 Pemakaian terbanyak oleh golongan II yaitu sebanyak 22.966 pelanggan dengan total pemakaian 3.741.482 m³. Jumlah ini sedikit meningkat apabila di bandingkan dengan tahun 2016 di mana jumlah pelanggan kelas 2 sebanyak 22.899 pelanggan, total pemakaian sebanyak 7.606.319 m³.

Tabel 2 - 67

Jumlah Pelanggan Air Minum, Total Pemakaian Air Minum, Jumlah Rumah Tangga dan Prosentase RT yang Menggunakan Air Bersih di Kota Magelang Tahun 2011 - 2017

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pelanggan Air Minum	23.280	23.396	23.785	24.289	24.652	25.103	25.162
Total Pemakaian Air (m ³)	7.652.245	7.202.615	7.507.332	7.405.096	7.434.942	7.606.319	7.434.942
Jumlah Rumah tangga	39.672	40.623	41.246	41.853	42.433	43.026	43.328
Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih (Pelanggan PDAM Kota Magelang)	58.61%	57.59%	57.67%	58.03%	58.10%	58.34%	58.07%

Selain penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan, di Kota Magelang juga masih terdapat masyarakat yang menggunakan sistem penyediaan air bersih melalui sumur air tanah sementara prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih/Pelanggan PDAM sebesar 58.34%, sedangkan sisanya mendapatkan air bersih dari beberapa hidran umum air bersih yang disediakan Pemerintah Kota Magelang. Sebagian lainnya dengan memanfaatkan mata air baik yang diambil dari sumur maupun dari sumber-sumber mata air lainnya. Beberapa upaya pengembangan sistem jaringan air bersih antara lain adalah sebagai berikut: Pengoptimalan sumber mata air yang sudah ada, Revitalisasi jaringan air bersih perpipaan dan Penyediaan sumber pengaliran air bersih komunal seperti hydrant pada pusat-pusat kegiatan dan permukiman.

Dengan semakin banyaknya kebutuhan akan air bersih, maka diperlukan perhatian serius untuk menambah volume atau debit air gunaantisipasi tahun-tahun mendatang. Sistem penyediaan/ pelayanan air bersih pada umumnya terdiri dari bangunan pengambil air baku, jaringan transmisi air baku, instalasi produksi, jaringan transmisi, bak penampung (reservoir) dan jaringan distribusi. Demikian halnya sistem penyediaan air bersih di Kota Magelang, prasarana pendukung yang ada meliputi :

1. Bangunan pengambil air baku, berada di lokasi sumber air, yaitu masing-masing adalah Mata Air (MA) Kalimas I & II, MA Kanoman I & II, MA Wulung, MA Kalegen, dan MA Citrosono dengan kapasitas total sumber air sebesar \pm 705,5 liter/detik.
2. Instalasi produksi merupakan bangunan penampungan, khusus untuk air bersih dari MA Kalegen dan MA Wulung, yaitu BPT Kaputran, BPT Keringan, BPT Tonoboyo dan BPT Bandongan, sementara air bersih dari mata air lainnya langsung didistribusikan. Total kapasitas produksi terpasang air bersih maksimal sebesar \pm 425 liter / detik.
3. Reservoir merupakan bangunan penampungan terakhir sebelum air bersih didistribusikan yaitu Reservoir Bandongan (1.400 m³), Reservoir (menara) Alun-alun (1.750 m³), Reservoir Tidar (1.000 m³) dan Reservoir Akmil (500 m³). Total kapasitas seluruh reservoir tersebut adalah \pm 4.650 m³.
4. Jaringan perpipaan, meliputi jaringan transmisi air baku atau jaringan transmisi primer (\varnothing 9". 12") jaringan transmisi sekunder (\varnothing 4". 8"), jaringan distribusi primer (\varnothing 1". 3"), jaringan distribusi sekunder hingga sambungan rumah (< \varnothing 1").

2.1.4.2.7 Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik

Pemenuhan kebutuhan listrik penduduk Kota Magelang dipenuhi melalui layanan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Jumlah pelanggan yang menggunakan jasa layanan listrik negara di Kota Magelang terus mengalami peningkatan. Untuk meningkatkan pelayanan terkait dengan adanya peningkatan jumlah pelanggan listrik dari tahun per tahun maka PLN terus berupaya untuk memperluas jaringan listrik di wilayah Kota Magelang.

Pada tahun 2017 jumlah pelanggan listrik di Kota Magelang sebanyak 32.346 dengan jumlah daya listrik yang terpasang 29.495.814 GWh dan jumlah pemakaian listrik pada tahun 2017 sebesar 27.499.522 Gwh. Pemakaian listrik oleh rumah tangga terbanyak menggunakan 900 watt sebanyak 13.914 KK, Rumah tangga yang menggunakan daya 450 watt sebanyak 12.236 KK, yang menggunakan daya 1300 watt sebanyak 3.944 KK, sementara sisanya 2.252 KK

menggunakan daya listrik 2200 watt dan > 2200 watt. Hampir 90% pelanggan listrik di Kota Magelang merupakan rumah tangga sementara sisanya merupakan pelanggan dari kelompok usaha, kelompok industri dan umum.

Pada tahun 2015 jumlah pelanggan listrik di Kota Magelang sebanyak 36.180 dengan jumlah penggunaan Kwh listrik yang meningkat seiring bertambahnya jumlah pelanggan 10.296.592 Kwh. Sementara pada tahun 2014 jumlah pelanggan sebanyak 34.773, dengan jumlah pemakaian Kwh listrik sebanyak 9.089.329 Kwh Hampir 90% pelanggan listrik di Kota Magelang merupakan rumah tangga sementara sisanya merupakan pelanggan dari kelompok usaha, kelompok industri dan umum.

2.1.4.2.8 Kondisi Pengelolaan Sampah

Sistem jaringan persampahan di Kota Magelang dikelola oleh Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup (DPLH). Sistem pengangkutan sampah dilakukan melalui 2 tahap yaitu dari rumah tangga dan kegiatan lain ke transfer Depo/TPS dan dari TPS ke TPA. Pengangkutan sendiri dibagi menjadi dalam beberapa jenis angkutan antara lain adalah Becak Sampah, Dump Truck dan Mini Truck. Tempat Pembuangan Sampah Akhir. Selain dilihat dari aktivitas yang menghasilkan sampah, bentuk produksi sampah di Kota Magelang dapat diidentifikasi berdasarkan persentase jenisnya. Jumlah persentase sampah terbesar berupa sampah organik 72.6%. Hal ini menunjukkan kondisi yang cukup baik, karena sampah organik merupakan sampah yang mudah untuk terurai. Sementara untuk bahan non organik yang paling banyak menjadi sampah adalah sampah plastik dengan persentase 9,65%.

Sistem pengangkutan yang dilakukan dikelola oleh beberapa pihak antar lain adalah Dinas Pertamanan dan Tata Kota Magelang, Kelurahan, dan Dinas Pasar. Sistem pengangkutan yang dilakukan diawali dengan pengelolaan sampah oleh rumah tangga atau kegiatan lain secara swadaya untuk selanjutnya dilakukan pengangkutan sampah dengan gerobak/ truk sampah. Kawasan merupakan kawasan yang seluruhnya dilalui oleh sistem pengangkutan gerobak sampah, sehingga sistem pembuangan sampah di wilayah ini dapat dikatakan cukup baik. Sampah yang diangkut dengan gerobak sampah kemudian diangkut ke TPS atau Transfer Depo, dan dilanjutkan dibawa ke TPA.

Tabel 2 - 68

Prosentase Sampah Terangkut Tahun 2010 - 2017

Tahun	Volume	Terangkut	Prosentase
2010	207.18	170.06	82.08
2011	193.94	164.78	84.96
2012	208.85	172.45	82.57
2013	217.92	186.72	85.68
2014	139.39	118.54	85.04
2015	160.58	136.75	85.16
2016	280.19	240.4	85.80
Semester 1 2017	279.04	240.16	86.07

Sumber: Data Strategis Kota Magelang 2010-2017. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang

Meningkatnya volume sampah dan keterbatasan lahan untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah industri menyebabkan masalah pengelolaan sampah di Kota Magelang menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Magelang. Hal ini ditambah dengan telah habisnya umur pakai TPSA Banyu urip sehingga saat ini Kota Magelang dalam keadaan darurat sampah dan harus mencari alternatif lain yang akan di jadikan sebagai lokasi TPSA. Terkait permasalahan di bidang pengelolaan persampahan, Pemerintah Kota

Magelang sudah melakukan beberapa terobosan dan inovasi seperti pembentukan Kampung Organik serta membudayakan 3R untuk memaksimalkan usia TPA. Jumlah bank sampah dan kampung organik yang terbentuk saat ini ada 124 unit dengan rincian 58 kampung organik dan 66 bank sampah yang tersebar di beberapa RT, RW, sekolah dan instansi di Kota Magelang

Upaya dari Pemerintah ini perlu mendapat dukungan dari masyarakat utamanya dalam meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah domestik. Perlunya mengoptimalkan kembali kegiatan kegiatan yang sudah ada seperti kampung organik, 3R, pengomposan skala rumah tangga dan bank sampah serta sosialisasi dan penyuluhan mengenai reduksi volume sampah rumah tangga.

Jumlah TPS di Kota Magelang ada 13 buah, sementara jumlah transfer depo ada 12 buah. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Sementara transfer depo adalah tempat yang digunakan untuk mentransfer sampah dari gerobak sampah ke truk sampah, sehingga seharusnya di transfer depo tidak terdapat sampah. Jumlah prasarana TPS dan Transfer depo Kota Magelang sebagaimana table berikut:

Tabel 2 - 69
Lokasi TPS dan Transfer Depo

No.	TPS	Transfer depo
1	Maluku (Kebonpolo)	Pasar Cacaban
2	Depok	Kyai Langgeng
3	Getuk Marem	Jl. Tarumanegara
4	Jurangombo	Telagawarna
5	Perum Korpri	Pasar Gotong Royong
6	Dalangan	Jl. Sunan Giri
7	Karet	Tidar Baru
8	Cacaban	Lapangan Rindam
9	Sanden	Sekretariat Pemkot
10	Kuncen	Lapangan Parkir MT
11	Magersari	Meteseh
12	Sidotopo	Pajang
13		Shopping/BCA
	12 Lokasi	13 Lokasi

Sumber: DLH Kota Magelang, 2017

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Kajian daya tarik tersebut didasarkan pada persepsi para pengusaha yang mempunyai usaha di daerah baik pengusaha lokal, nasional maupun multinasional dan menyimpulkan bahwa daya tarik investasi daerah (KPPOD, 2006) dipengaruhi oleh:

- a) Kelembagaan yang meliputi kepastian hukum, aparatur dan pelayanan, kebijakan daerah dan kepemimpinan lokal;
- b) Keamanan, politik dan sosial budaya;
- c) Ekonomi daerah yang meliputi potensi ekonomi dan struktur ekonomi;
- d) Tenaga kerja yaitu ketersediaan tenaga kerja, kualitas tenaga kerja dan biaya tenaga kerja.
- e) Infrastruktur fisik baik ketersediaan/ kualitas infrastruktur

Indikator yang dapat dipergunakan untuk merepresentasikan Fokus Iklim Berinvestasi di antaranya adalah Angka Kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, Perda yang mendukung iklim usaha.

Tabel 2 - 11
Kondisi Keamanan Ketertiban Masyarakat Kota Magelang Tahun 2012 – 2017

No	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Jumlah Demo/Unjuk Rasa	7	6	5	14	16	10
	a. Unjuk rasa bidang politik	0	0	0	0	0	3
	b. Unjuk rasa bidang ekonomi	7	1	3	2	4	2
	c. Unjuk rasa bidang lainnya	-	5	2	12	12	5
2	Kasus pertikaian antar warga	2	0	0	4	7	3
	a. Antar etnis	-	-	-	-	-	-
	b. Antar wilayah desa	1	-	-	1	1	1
	c. Antar agama	-	-	-	-	-	-
	d. Antar simpatisan partai	-	-	-	-	-	-
	e. Antar pelajar	1	-	-	-	2	2
	f. Rusuh masal/pengeroyokan	-	-	-	3	4	-
3	Kasus pemogokan kerja	-	-	-	-	-	-
4	Kasus sengketa pengusaha dan pekerja	-	1	-	-	-	5
5	Sarana prasarana keamanan						
	a. Jumlah aparat keamanan (polisi)	550	546	583	597	588	578
	b. Jumlah pos keamanan (polisi)	10	10	13	13	13	10
	c. Jumlah mobil kebakaran	5	5	5	5	5	5
	d. Aparat Pamong Praja	65	56	59	60	60	58

No	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
e.	Jumlh patroli petugas satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 dalam 24 jam	154	262	262	262	262	360
f.	Jumlh petugas perlindungan masy	740	782	782	832	832	832
g.	Jumlah pos Siskamling	262	262	262	262	262	262
6	Angka Kriminalitas	15.38	10.99	12.35	14.14	14.02	13.31
7	Jumlah Tindak Kriminal						
a.	Jumlah Kasus Narkoba	6	14	25	26	20	26
b.	Jumlah kasus Pembunuhan	0	0	0	1	0	0
c.	Jumlah kasus Seksual	3	3	0	1	0	1
d.	Jumlah Kasus Penganiayaan	13	5	3	15	18	11
e.	Jumlah Kasus Pencurian	80	19	20	23	56	62
f.	Jumlah Kasus Penipuan	7	9	1	15	20	11
g.	Jmlh Kasus Pemalsuan uang	0	1	0	0	0	0
h.	Jumlah Kasus lain – lain (pembakaran, senpi, perjudian)	na	na	na	na	na	2
i.	penggelapan	na	na	na	na	na	13
j.	perjudian	na	na	na	na	na	9

Sumber : Bappeda, SIPD Kota Magelang 2016 (Badan Kesbangpolinmas dan Polres Magelang Kota)

Terkait dengan Angka kriminalitas di Kota Magelang pada dalam beberapa terakhir ini relatif berfluktuatif. Data kriminalitas berdasarkan laporan dari Badan KesbangPolinmas Kota Magelang sampai dengan tahun 2017 sebanyak 162 kasus. Gambaran angka kriminalitas di Kota Magelang disajikan tabel berikut.

Tabel 2 - 71
Angka Kriminalitas di Kota Magelang Tahun 2011 – 2017

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
JUMLAH KEJAHATAN YANG TERJADI DI KOTA MAGELANG	242	184	132	149	171	170	162
JUMLAH PENDUDUK (data Dispendukcapil)	129.556	130.955	130.836	131.703	132.261	132.662	132.911
JUMLAH PENDUDUK (dataBPS)	119.210	119.647	120.158	120.615	120.952	121.293	121.673
ANGKA KRIMINALITAS	18.68 /20.30	14.05/ 15.38	10.09 / 10.99	11.31 / 12.35	12.93 / 14.14	12.81 / 14.02	12.19/ 13.31

- Sumber : 1. Bappeda Kota Magelang, Sistem Informasi Profil Daerah Kota Magelang 2015, data diolah
 2. Data Strategis Kota Magelang 2011-2017. Dinas Kominfo, data diolah
 3. Proyeksi Penduduk Kota Magelang 2010 – 2020, BPS Kota magelang

Data di bawah ini menunjukkan Statistik jumlah kriminalitas selama 2011-2017 sebagaimana nampak pada tabel berikut :

Tabel 2 -72
 Data Kriminalitas yang Tertangani di Kota Magelang Tahun 2011-2017

Tahun	Jumlah Kriminalitas		Rasio (%)	Angka Kriminalitas yang Tertangani
	Lapor	Selesai		
2011	242	164	67,77	13.75
2012	184	134	72,83	11.20
2013	132	90	68.18	7.49
2014	149	108	72.48	8.95
2015	171	134	78,36	11.08
2016	170	120	70.59	9.89
2017	162	118	72.84	8.88

Sumber : Polres Magelang Kota, 2011-2016

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa berdasarkan kejadian tindak kriminalitas yang dari tahun ke tahun makin menurun, menunjukkan tingkat kondusivitas yang makin baik. Kondisi ini sangat penting bagi iklim usaha yang kondusif dan prasyarat utama menuju daya saing daerah.

Terkait dengan jumlah kriminalitas di Kota Magelang pada dalam beberapa terakhir ini relatif berfluktuatif. Data kriminalitas berdasarkan laporan dari Badan KesbangPolinmas Kota Magelang dan Polres Magelang Kota sampai dengan tahun 2017 sebanyak 162 kasus dan yang terselesaikan sebanyak 118 kasus sehingga rasio jumlah kriminalitas yang terselesaikan sebesar 72.84%

Tabel 2 - 73
 Jumlah Demo/Unjuk Rasa di Kota Magelang 2010 – 2017

No	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Jumlah Demo/ Unjuk Rasa	25	9	7	6	5	14	16	11
a	Unjuk rasa bidang politik		2	0	0	0	0	0	3
b	Unjuk rasa bidang ekonomi		7	7	1	3	2	4	2

No	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
c	Unjuk rasa bidang lainnya		-	-	5	2	12	12	5

Sumber : Bappeda Kota Magelang, SIPD 2017, data KesbangLinmas dan Polres Magelang Kota data tahun 2010-2017

Demo atau unjuk rasa yang terjadi di Kota Magelang masih dalam batas wajar sebagai penyampaian aspirasi beberapa elemen masyarakat namun demo atau unjuk rasa dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan prosedur hingga tidak mengganggu ketertiban dan tidak menimbulkan keresahan massa/merusak fasilitas umum.

Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Untuk itu, dalam rangka pemantapan kekuatan fiskal daerah, optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah mempunyai peranan yang sangat strategis, dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan trend yang cukup positif.

Tabel 2 - 74
Realisasi PAD terhadap Potensi PAD pada Tahun Anggaran 2010 – 2017

TAHUN	POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)	TARGET PAD (Rp)	REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)	Prosentase (%) Potensi terhadap realisasi	Prosentase (%) Target terhadap realisasi
2010	62.751.575.900,00	45.804.070.000,-	59.546.717.600,00	94.89 %	130%
2011	69.552.144.480,00	62.100.129.000,-	63.557.701.976,00	91.38 %	102.35%
2012	91.619.320.000,00	82.457.388.000,-	90.986.601.697,00	99.31 %	111.56%
2013	120.378.596.250,00	96.302.877.000,-	107.739.838.961,00	89.50 %	111.88%
2014	172.114.484.610,00	124.432.498.000,-	164.906.266.142,00	95.81%	132.53%
2015	207.682.651.625,00	152.806.995.000,-	186.677.410.081,00	89.89%	122.17%
2016	269.616.256.588,00	197.465.478.000,-	220.217.864.000,00	81.68%	111.52%
2017	297.261.794.010,00	218.085.185.000,-	232.925.982.708,00	78.36%	106.86%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang TA. 2010-2017

Berdasarkan tabel di atas, potensi pendapatan daerah menunjukkan trend yang positif dengan kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun sementara prosentase realisasi PAD terhadap Potensi PAD cukup berfluktuatif. Realisasi pada tahun 2011 sempat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010, dimana serapannya sebesar 91.38%. Prosentase ini meningkat pada tahun 2012 mendekati 100% yaitu sebesar 99.31% kemudian sempat menurun pada tahun 2013 dan meningkat kembali pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 sedikit mengalami

penurunan. Meski demikian secara efektifitas pencapaian target persentase realisasi selalu di atas 100 % dari tahun 2010-2016. Peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kota Magelang untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah dengan terus menggali potensi-potensi pendapatan yang ada di daerah sebagai sumber pembiayaan bagi pembangunan di daerah. Kenaikan potensi PAD Kota Magelang pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2 - 75
Tabel Kenaikan/ Penurunan PAD Tahun 2010-2017

No	URAIAN	REALISASI PAD (Rp)	% Kenaikan / Penurunan PAD
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2010	59.546.717.600,-	24.8%
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2011	63.557.701.976,-	6.74 %
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2012	90.986.601.697,-	43.16 %
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2013	107.739.838.961,-	17.99 %
5	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2014	164.906.266.142,-	53.06 %
6	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2015	186.667.410.081, -	13.20 %
7	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2016	204.220.414.045, -	9.40 %
8	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2017	232.925.982.708, -	14.06 %

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang TA. 2010- 2017 (data diolah)

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)

Indikator lain yang dapat dipergunakan untuk merepresentasikan Fokus Sumber Daya manusia adalah Indikator rasio ketergantungan penduduk. Indikator tersebut merupakan indikator yang dipergunakan untuk melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif. Angka beban tanggungan penduduk atau yang sering disebut dengan Dependency Ratio (DR) adalah perbandingan antara penduduk usia kerja dengan penduduk di luar usia kerja. Apabila Dependency Ratio menunjukkan angka yang semakin tinggi maka beban tanggungan penduduk semakin besar karena ini berarti bahwa tingkat beban yang harus ditanggung setiap penduduk yang produktif semakin besar. Kondisi Rasio Ketergantungan di Kota Magelang bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 - 76

Angka Beban Tanggungan Penduduk Kota Magelang Tahun 2010 - 2017

Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Angka Beban Tanggungan	Naik/Turun
	0-14 th	15-64 th	65 th		
2010	27.283	82.926	8.504	43.16	
2011	27.072	83.435	8.702	42.88	0.28
2012	26.855	83.897	8.896	42.61	0.26
2013	26.604	84.448	9.105	42.29	0.33
2014	26.376	84.903	9.334	42.06	0.23
2015	26.107	85.260	9.585	41.86	0.20
2016	25.897	85.534	9.862	41.81	0.06
2017	25.650	85.852	10.171	41.72	0.09

Sumber : Proyeksi Penduduk Kota Magelang, BPS Kota Magelang, 2016, data diolah

Pada tabel di atas diperlihatkan bahwa Angka Beban Tanggungan penduduk di Kota Magelang relatif stabil walaupun berfluktuatif rendah dan masih pada kisaran angka 41-43. Hal ini juga perlu menjadi perhatian dari pemerintah daerah untuk berupaya menyediakan lapangan kerja dan menyiapkan tenaga kerja yang produktif dan profesional sehingga mempunyai daya saing serta berupaya untuk menekan angka pengangguran. Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat di lihat dari perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka bebant ketergantungan karena dengan semakin kecilnya angka ketergantungan maka akan memberikan kesempatan yang semaki besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas diri. Angka Beban Kerja di Kota Magelang dari tahun ke tahun menunjukkan kondisi yang membaik dan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2010 besar angka Beban Tanggungan sebesar 43.16 kemudian pada tahun 2017 turun menjadi 41.72. Angka ini mempunyai arti bahwa untuk setiap 100 penduduk produktif menanggung beban 42 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan usia 65 tahun ke atas).

Menurut data BPS pada Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Magelang, rasio ketergantungan yang cenderung menurun diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Namun di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja namun di satu sisi mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika di antara mereka banyak yang tidak bekerja. Mereka ini yang di katakana usia produktif namu tidak dapat termanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja. Data di atas juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbesar adalah penduduk usia produktif, skitar 70an persen. Hal ini menunjukkan potensial sebagai modal dasar untuk pembangunan. Potensi yang besar harus di imbangi dengan ekonomi yang cukup dan akhlaq yang baik serta fasilitas yang mendukung seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan sehingga nantinya akan menghasilkan penduduk yang berkualitas dan membawa manfaat bagi pembangunan.

2.1.4.4.2 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat di lihat dari keahlian dan ketrampilan yang di miliki serta ilmu pengetahuan yang di miliki. Adapun hal ini bisa di asumsikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka di harapkan dia akan mempunyai kemampuan/ketrampilan dan keahlian yang tinggi serta memiliki ilmu pengetahuan yang luas sehingga harapannya dia akan lebih mudah untuk mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang di tamatkan juga dapat dipergunakan untuk menilai tingkat keberhasilan Pemerintah dalam melaksanakan program wajib belajar 9 tahun (wajar 9 tahun)

Tabel 2 - 77

Rasio Lulusan S1/S2/S3 Penduduk Kota Magelang Tahun 2011-2017

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Lulusan S1/S2/S3	Rasio
1.	2011	129.556	12.315	930
2.	2012	130.955	12.257	936
3.	2013	130.836	12.045	921
4.	2014	131.703	12.053	915
5.	2015	132.261	12.105	915
6.	2016	132.662	12.162	917
7.	2017	132.911	12.288	925

Data Strategis Kota Magelang 2010-2017. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang, data diolah

Penduduk di Kota Magelang berdasarkan data DispendukCapil pada tahun 2016 pada Data Strategis Kota Magelang menyebutkan bahwa pada umumnya minimal sudah mengenyam pendidikan setingkat SMA yaitu sebanyak 35.526 jiwa (41.88%) dan sudah banyak pula penduduk di Kota Magelang yang menempuh pendidikan di universitas/akademi atau sederajat sebanyak 16.604 jiwa (19.57%). Data pada semester 1 tahun 2017, menunjukkan hal yang sama kondisinya pada tahun 2017, dimana penduduk yang mengenyam pendidikan SMA sebanyak 35.889 jiwa (42.15%). Sementara untuk penduduk yang menempuh pendidikan universitas/akademi sebanyak 16.773 jiwa (19.70%). data dari 2011 menunjukkan bahwa jumlah penduduk dengan pendidikan yang di tamatkan di atas pendidikan SMA cenderung meningkat setiap tahunnya, meskipun cukup berfluktuatif namun menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Kondisi demikian harus di pertahankan dan terus ditingkatkan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang di miliki Kota Magelang. Tingginya penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA menjadi tugas bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kerja di Kota Magelang sebagai salah satu langkah untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) sehingga tenaga kerja yang ada di Kota Magelang memiliki daya saing dan daya tawar yang tinggi

Tabel 2 - 78
 Jumlah Penduduk 5 tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
 di Kota Magelang Tahun 2015-2017

Tahun	Tidak/belum Lulus SD	SD	SLTP	SLTA	D1/D2	D3	S1/S2/S3
2015	1.937	17.212	13.950	34.733	424	10.334	11.967
2016	1.870	16.886	13.937	35.526	429	4.013	12.162
Semester 1 2017	1.848	16.715	13.926	35.889	426	4.059	12.288

Data Strategis Kota Magelang 2010-2017. Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang, data diolah

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPd sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD pada periode tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 - 79

Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 pada Akhir Tahun 2017

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target kinerja Th 2017	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab		
			I		II		III		IV				
			K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian			
MISI SATU													
1	Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	1	Persentase pegawai berkinerja baik	97%	78,17%	80,59%	78,17%	80,59%	82,63%	85,19%	82,63%	85,19%	BPKPP
		2	Capaian SPM Kota Magelang	60%	65,00%	108,33%	65,00%	108,33%	65,00%	108,33%	86,09%	143,48%	Tapem
		3	Persentase pengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar	48%	13,06%	27,21%	41,59%	86,65%	45,97%	95,78%	47,00%	97,92%	Disperpusip
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi	1	Nilai Opini BPK atas LKPD	WDP	WDP	50,00%	WTP	100,00%	WTP	100,00%	WTP	100,00%	BPKAD
		2	Indeks EKPPD	3	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%	3,215	107,17%	Tapem
		3	Hasil implementasi SAKIP	CC (54,00)	55,78	103,30%	55,78	103,30%	55,78	103,30%	55,78	103,30%	Organisasi
		4	Persentase pelaksanaan PATEN di kecamatan	45%	34,00%	75,56%	34,83%	77,41%	38,33%	85,19%	65,08%	144,61%	Kecamatan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target kinerja Th 2017	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab			
			I		II		III		IV					
			K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian				
	5	Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi	100%	35,00%	35,00%	50,00%	50,00%	75%	75,00%	100%	100,00%	Hukum		
1	Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsive	1	Persentase dengan pelayanan baik	PD nilai	48,48%	48,28%	99,58%	48,28%	99,58%	48,28%	99,58%	48,28%	99,58%	Setda
2	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik	1	Persentase menerapkan e-Gov	PD	80%	100,00%	125,00%	100,00%	125,00%	100,00%	125,00%	100,00%	125,00%	Diskominfo
		2	Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi		60%	100,00%	166,67%	100,00%	166,67%	100,00%	166,67%	100,00%	166,67%	Diskominfo
3	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	1	Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja		90%	45,00%	50,00%	90,00%	100,00%	90,00%	100,00%		0,00%	Bappeda
		2	Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan		60%	87,89%	146,48%	89,09%	148,48%	90,55%	150,92%	90,99%	151,65%	Diskominfo

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target kinerja Th 2017	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab
			I		II		III		IV		
			K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	
4 Terwujudnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang cepat, tepat dan akurat berbasis teknologi informasi	1 Cakupan penduduk memiliki KTP el	100%	98,50%	98,50%	98,10%	98,10%	98,84%	98,84%	101,64%	101,64%	Capil
	2 cakupan penduduk memiliki KIA	100%	42,80%	42,80%	48,20%	48,20%	53,21%	53,21%	104,67%	104,67%	Capil
	3 Presentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	80%		0,00%	79,14%	98,93%	80,00%	100,00%	85%	106,25%	Capil
	4 Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk	930	911,4	98,00%	918,6	98,77%	925,7	99,54%	937,1	100,76%	Capil
	5 Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	Capil
	6 Persentase kepemilikan akta kematian	45%	50,58%	112,40%	54,62%	121,38%	54,62%	121,38%	79,82%	177,38%	Capil
	7 Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	15%		0,00%	50,00%	333,33%	50,00%	333,33%	50,00%	333,33%	Capil
1 Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan asset daerah	1 Derajat Otonomi Fiskal	22,52%	7,56%	33,57%	28,77%	127,75%	25,68%	114,03%	34,80%	154,53%	BKPAD
	2 Rasio ketergantungan	73,66%	22,27%	30,23%	30,12%	40,89%	60,42%	82,03%	61,18%	83,06%	BKPAD

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target kinerja Th 2017	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab		
			I		II		III		IV				
			K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian			
1	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	1	keuangan daerah terhadap dana pusat	60%	58,00%	96,67%	60,00%	100,00%	60,00%	100,00%	0,00%	Bappeda	
			Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD										
			2										Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga
3	Persentase perkembangan kerjasama daerah	3,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,02%	33,33%	8,82%	288,24%	Tapem		
1	Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1	Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	46%	6,00%	13,04%	6,00%	13,04%	6,00%	13,04%	87,24%	189,65%	BP4KB
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional	1	Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional:										

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target kinerja Th 2017	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab		
			I		II		III		IV				
			K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian			
	a. Regional	4	6	150,00%	6	150,00%	6	150,00%	6	150,00%	Disporapar		
	b. Nasional	2	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Disporapar		
	c. International	0	0		0		0				Disporapar		
	2 Jumlah prestasi Olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional												
	a. Regional	10	43	430,00%	79	790,00%	120	1200,00%	125	1250,00%	Disporapar		
	b. Nasional	5	3	60,00%	10	200,00%	15	300,00%	19	380,00%	Disporapar		
	c. International	2	1	50,00%	1	50,00%	1	50,00%	19	950,00%	Disporapar		
MISI 2													
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	1	Rata-rata lama sekolah	10,41	9,14	87,80%	9,14	87,80%	9,14	87,80%	9,14	87,80%	Dikbud
		2	Persentase sekolah berstandar nasional										
			a. SD	40,66%	41,33%	101,66%	41,33%	101,66%	41,33%	101,65%	41,33%	101,65%	Dikbud
			b. SMP	70%	72,73%	103,90%	72,73%	103,90%	72,73%	103,90%	72,73%	103,90%	Dikbud
		3	Angka Melek Huruf	97,67%	96,67%	98,98%	96,67%	98,98%	96,67%	98,98%	98,57%	100,92%	Dikbud

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target kinerja Th 2017	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab		
			I		II		III		IV				
			K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian			
	4	Persentase kunjungan perpustakaan	72,52%	20,18%	27,83%	35,86%	49,45%	51,77%	71,39%	81,10%	111,83%	Disperpusip	
	5	Jumlah kunjungan perpustakaan	96.200	26.689	27,74%	47.434	49,31%	68.474	71,18%	107.260	111,50%	Disperpusip	
2	Meningkatnya kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat	1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 RS, 5 Puskesmas, 1 Lab Kesda)	53,85%	46,15%	85,46%	46,15%	85,46%	53,85%	100,00%	97,00%	180,14%	DKK
	2	Angka Harapan Hidup	76,71	76	99,07%	76	99,07%	76,00	99,07%	76	99,07%	DKK	
	3	AKI/ 1.000 KH	126	63	200,00%	63	200,00%	96,90	130,03%	192,43	152,72%	DKK	
	4	AKB/ 1.000 KH	14,5	14,29	101,47%	9,19	157,78%	7,75	187,05%	12,18	119,05%	DKK	
	5	AKABA	15,5	17,14	90,43%	10,49	147,76%	9,69	159,96%	1,92	805,48%	DKK	
	6	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,31	0,21	147,62%	0,21	147,62%	0,22	138,70%	0,21	147,62%	DKK	
	7	Angka Kesakitan DBD	50	23,14	216,08%	37,75	132,45%	46,05	108,58%	54,65	91,49%	DKK	
	8	Angka Prevalensi Kasus TB	105	83,54	125,69%	83,54	125,69%	83,54	125,69%	83,54	125,69%	DKK	
	9	Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	0,05%	0,0085%	588,24%	0,0130%	384,62%	0,0130%	384,62%	0,03%	166,67%	DKK	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target kinerja Th 2017	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab		
			I		II		III		IV				
			K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian			
	10	Persentase Rumah Tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat	97%	0%	0,00%	0%	0,00%	0%	0,00%		0,00%	DKK	
3	Meningkatnya kontribusi sektor industri usaha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah	1	Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	16,15%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	Perindag
4	Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju mendukung Kota Magelang modern	1	Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan menuju standar inklusivitas (universal design)	20%	20,00%	100,00%	50,00%	250,00%	50%	250,00%	50%	250,00%	Dikbud
		2	Persentase sarana prasarana penyedia layanan kesehatan menuju standar inklusivitas (universal design)	10%	42,86%	428,60%	42,86%	428,60%	42,86%	428,60%		0,00%	DKK
		3	Persentase sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang menuju standar inklusivitas (universal design)	20%	20,00%	100,00%	20,00%	100,00%	20%	100,00%		0,00%	Perindag
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Pencemaran Air	75,65	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	46,47	61,43%	DLH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target kinerja Th 2017	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab		
			I		II		III		IV				
			K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian			
	2	Indeks Pencemaran Udara	61,8	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	85,67	138,62%	DLH	
	3	Indeks Tutupan Vegetasi	48,55	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	57,24	117,90%	DLH	
	4	Volume sampah yang dibuang ke TPSA (m3)	158,7	240,15	66,08%	240,89	65,88%	246,35	64,42%	249,66	157,32%	DLH	
2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	1	Persentase Ruang Terbuka Hijau										
			a. Privat	10%	0,00%	19,11%	191,10%	19,11%	191,10%	19,11%	191,10%	DLH	
			b. Publik	18,37%	0,00%	19,25%	104,79%	19,25%	104,79%	19,60%	106,70%	DLH	
3	Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana	1	Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	6,68%	2,83%	42,40%	4,72%	70,67%	4,85%	72,61%	4,92%	73,70%	Satpol
		2	Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	5,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,88%	101,42%	Satpol
4	Pemanfaatan lahan berkelanjutan sesuai regulasi tata ruang	1	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	24%	23,03%	95,96%	23,10%	96,25%	23,20%	96,67%	23,33%	97,20%	DPUPR

MISI TIGA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target kinerja Th 2017	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab	
			I		II		III		IV			
			K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian		
1	Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	1 Rasio Infrastruktur Perkotaan dalam kondisi baik	82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,62%	100,76%	DPUPR
2	Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat	1 Presentasi penyediaan perumahan bagi Masyarakat	12%	12,80%	106,67%	12,80%	106,67%	12,80%	106,67%		0,00%	Perkim
		2 Tercapainya 100 - 0 - 100										
		a. Persentase jumlah Kepala Keluarga yang terlayani air minum	92,30%	85,24%	92,35%	87,00%	94,26%	87,88%	95,21%	87,88%	95,21%	Perkim
		b. Luas kawasan kumuh (Ha)	39,65	96,87	40,93%	96,87	40,93%	96,87	40,93%	67,4	58,83%	Perkim
		c. Rasio Rumah Tangga yang masih BABS	3%	7%	42,86%	7,00%	42,86%	7,00%	42,86%	3,73%	80,40%	Perkim
		3 Prosentase RTLH	2,90%	4,20%	144,83%	4,20%	144,83%	4,20%	144,83%	65,76%	2267,60%	Perkim

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target kinerja Th 2017	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab		
			I		II		III		IV				
			K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian			
3	Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan	1	Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	8,25%	8,22%	99,64%	8,22%	99,64%	8,33%	100,97%	8,40%	101,82%	Dishub
1	Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	1	Pertumbuhan investasi										
			a. Pertumbuhan nilai investasi PMA	5%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	3,80%	DPMPTS P
			b. Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	8,50%	56,67%	10,40%	69,33%	13,60%	90,67%	16,85%	112,33%	DPMPTS P
2	Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif	1	Prosentase sarana prasarana perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang dalam kondisi baik	75%	70%	93,33%	70%	93,33%	80%	106,67%	75%	100,00%	Perindag

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target kinerja Th 2017	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab		
			I		II		III		IV				
			K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian			
	2	Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti	28%	18%	64,29%	16%	56,61%	49,18%	175,66%	30,84%	110,14%	Litbang	
3	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	12.831	13.501	105,22%	13.501	105,22%	13.501	105,22%	13.637	106,28%	Pertanian
1	Meningkatnya lapangan kerja	1	Persentase penyerapan tenaga kerja	65%		0,00%	0%	0,00%	0%	0,00%	65%	100,00%	Disnaker
2	Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS	1	Persentase Penurunan PMKS	15%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,61%	64,04%	Dinsos
1	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan	1	Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2	2	100,00%	2	100,00%	2	100,00%	2	100,00%	DP4KB
1	Menurunnya kesenjangan gender	1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	17%	0,05%	0,29%	0,05%	0,29%	0,05%	0,29%	6,37%	37,48%	DP4KB
		2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	20%	0,06%	0,30%	0,06%	0,30%	0,06%	0,30%	14,06%	70,30%	DP4KB
		3	Rasio KDRT	0,060%	0,011%	545,45%	0,017%	352,94%	0,017%	352,94%	0,035%	169,04%	DP4KB
MISI EMPAT													

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target kinerja Th 2017	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab		
			I		II		III		IV				
			K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian			
1	Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan	1	Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	14%	13,51%	96,53%	13,51%	96,53%	14,86%	106,14%	15,00%	107,14%	Dikbud
		2	Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	5	35	700,00%	35	700,00%	35	700,00%	35	700,00%	Dikbud
1	Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial	1	Jumlah Wisatawan										
			a. Nusantara (orang)	1.136.435	1.043.435	91,82%	1.524.769	134,17%	2.279.199	200,56%	3.447.841	303,39%	Disporapar
			b. Mancanegara (orang)	5.185	6.625	127,77%	8.525	164,42%	10.963	211,44%	17.162	330,99%	Disporapar
MISI LIMA													
1	Terbentuknya karakter religius dalam kehidupan bermasyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan	1	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	3%	75,27%	2508,83%	62,19%	2073,03%	42,40%	1413,43%	27,21%	906,95%	Satpol
2	Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat	1	Angka kriminalitas	13%	3,78%	28,77%	7,31%	55,67%	10,85%	82,56%	13,31%	101,33%	Kesbang
		2	Prosentase	3%	0,00%	0,00%	1,50%	50,00%	6,00%	200,00%	6,00%	200,00%	Kesbang

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target kinerja Th 2017	Realisasi kinerja pada triwulan								OPD Penanggung jawab	
			I		II		III		IV			
			K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian	K	Capaian		
	penurunan kasus narkoba											
	3 Angka kriminalitas yang tertangani	11,50%	2,88%	25,01%	5,42%	47,17%	7,97%	69,32%	9,70%	84,33%	Kesbang	
	4 Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100,00%	Kesbang	
1	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat peribadatan dalam											
	1 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,56%	3,22%	125,78%	3,22%	125,78%	3,22%	125,78%	3,22%	125,78%	Kesra	
	2 Ketersediaan kelembagaan pusat – pusat keagamaan (religious centre)	0									Kesbang	

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas permasalahan yang akan disolusikan ditentukan oleh aspek urgensi dan konektivitas dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari mandat kebijakan nasional/provinsi yang bersifat harus dilakukan sebagai bagian tak terpisahkan.

Mekanisme identifikasi permasalahan pembangunan daerah tersebut dilakukan agar permasalahan paling prioritas atau isu strategis daerah, sudah mengakomodasi informasi dari permasalahan yang (mungkin) muncul dari hasil identifikasi kebijakan nasional/provinsi, dinamika lingkungan eksternal dan isu-isu regional, nasional maupun global.

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan berbagai urusan pemerintahan hingga tahun 2017 masih menyisakan permasalahan yang harus segera mendapatkan solusi antara lain sebagai berikut:

2.3.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

2.3.1.1 Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan, yaitu:

1. Rendahnya insentif bagi pendidik PAUD.
2. Belum meratanya kualifikasi, kompetensi dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan, sebagian pendidik belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan S1/D4, dan sebagian pendidik belum bersertifikat pendidik
3. Kurangnya tenaga guru kelas di jenjang sekolah dasar karena memasuki masa pensiun
4. Kurangnya sumber daya, kompetensi dan kualifikasi pustakawan dan laboran.
5. Kurang memadainya sarana prasarana dan tenaga pendidikan pada pendidikan non formal.
6. Belum efektifnya pendidikan karakter di sekolah diindikasikan dengan masih adanya vandalisme, kurangnya ketertiban dan kedisiplinan siswa.

2.3.1.2 Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kesehatan yaitu:

1. Angka kematian Ibu (AKI) di Kota Magelang masih tinggi bila dihitung per 100.000 kelahiran Hidup, pada Tahun 2017 ada 3 kasus kematian ibu sedangkan jumlah kelahiran hidup ada 1.559, sehingga apabila dihitung AKI nya diperoleh angka 192,43. Angka ini lebih dari target tahun 2017 sebesar 126.
2. Angka Kematian bayi (AKB) juga masih tinggi apabila dihitung per 1.000 Kelahiran Hidup. Pada Tahun 2017 terdapat 19 kasus kematian bayi, maka apabila dihitung AKB nya diperoleh angka 12,18. Meskipun angka ini masih dibawah target tahun 2017 sebesar 14,5 akan tetapi dengan adanya 19 kasus kematian bayi tersebut tetap menjadi perhatian.

3. Angka balita pendek dan sangat pendek di Kota Magelang masih cukup tinggi berdasarkan hasil survei Pemantauan Status Gizi (PSG) di Kota Magelang yang mencakup 326 responden yang diambil secara acak, didapatkan balita sangat pendek (TB/U < -3SD) = 3,99% dan balita pendek (TB/U = -2SD) = 13,8%
4. Banyak TUPM yang tidak memiliki sertifikat Laik Sehat
5. Masih banyak warga yang belum akses ke jamban Sehat (berseptic tank)
6. Dari hasil survei PHBS, hasil penilaian indikator ke-2 yaitu tidak merokok dalam rumah masih rendah (49%)
7. Desa/Kelurahan Siaga Aktif dengan Strategis mandiri, baru di 7 kelurahan
8. Masih rendahnya penemuan penderita TB, dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berobat atau memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan
9. Data penyakit jiwa dan penyakit tidak menular belum tertangani khususnya penyakit tidak menular di rumah sakit, puskesmas dan dokter praktek swasta.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang:

1. Perlu percepatan penyusunan Perda RDTRK dengan melakukan peninjauan kembali Perda nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang.
2. Masih lemahnya pengendalian dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang karena belum ada rencana rinci Tata Ruang Kota Magelang sampai saat ini belum ditetapkan menjadi produk hukum. Proses menuju legalisasi raperda RDTR sangat panjang.
3. Kesadaran masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan ruang sesuai arahan tata ruang masih rendah.
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang tata ruang masih kurang
5. Pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan kegiatan masih kurang.
6. Sarana dan prasarana untuk pengawasan dan pengendalian tata ruang masih kurang.
7. Konflik pemanfaatan ruang daerah perbatasan
8. Masih perlunya pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan, irigasi, dan saluran drainase yang sudah ada.
9. Secara fisik ruas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap, oleh karena itu untuk menjaga kondisi tersebut perlu pemeliharaan dan peningkatan baik secara rutin dan berkala, khususnya yang di bawah pengelolaan pemerintah Kota Magelang.
10. Masih perlunya penambahan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan baru, terutama pada wilayah perbatasan di sisi Barat dan Timur wilayah Kota Magelang.
11. Kondisi drainase kota yang sudah cukup baik tetapi masih tercampur dengan air limbah rumah tangga.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan permukiman yaitu:

1. Masih adanya rumah tinggal yang belum terlayani air minum dan belum bersanitasi layak serta kawasan kumuh, yang menjadi tuntutan untuk mencapai akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, akses sanitasi layak 100%, di akhir RPJMN 2015-2019.
2. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya.
3. Masih adanya lingkungan pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni di Kota Magelang.
4. Belum optimalnya upaya pemeliharaan terhadap sarana permukiman yang ada guna memperpanjang usia pakai sarana tersebut.
5. Masih perlunya peningkatan kualitas prasarana dasar permukiman perkotaan, yang meliputi prasarana jalan lingkungan, prasarana drainase lingkungan, prasarana air bersih lingkungan, serta prasarana sanitasi lingkungan.

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu:

1. Masih adanya potensi ancaman terorisme, konflik SARA dan gerakan laten/ radikalisme
2. Masih adanya kasus penyakit masyarakat seperti tawuran pelajar, vandalisme, prostitusi dan kriminalitas lainnya.
3. Masih adanya peredaran/ penyalahgunaan miras dan narkoba.
4. Belum terbentuknya beberapa regulasi penting terkait penanggulangan bencana, kontrol tempat hiburan, pelaksanaan ibadah dan sebagainya.
5. Berkurangnya jiwa kebangsaan, kepedulian sosial, solidaritas dan gotong royong di masyarakat.
6. Masih perlu peningkatan pendidikan politik untuk meningkatkan kedewasaan politik masyarakat.

Selain permasalahan umum tersebut, terdapat beberapa permasalahan teknis dalam upaya pencapaian indikator kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, antara lain :

1. Keterbatasan personil Satpol PP dan Linmas
2. Masih perlunya peningkatan kapasitas bagi personil SATPOL PP dan LINMAS.
3. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap sistem penanggulangan bencana, mengingat kondisi geologis Kota Magelang banyak terdapat tanah lereng yang memungkinkan terjadinya bencana longsor.

2.3.1.6 Sosial

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan urusan sosial yaitu:

1. Belum optimalnya dukungan anggaran untuk penambahan jumlah lanjut usia terlantar tidak potensial yang mendapatkan jaminan sosial.
2. Belum adanya anggaran pemberdayaan sosial bagi PMKS

3. Belum adanya anggaran yang mendukung pelaksanaan WKBSM sehingga tersedia sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
4. Kurangnya anggaran yang mendukung bantuan sosial dan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial

2.3.2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan adalah:

1. Masih rendahnya minat pencari kerja untuk berwirausaha/menjadi wirausahawan
2. Belum adanya jenis pelatihan unggulan berbasis kompetensi yang menjadi rujukan daerah sekitar.
3. Belum optimalnya utilisasi Balai Latihan Kerja
4. Belum tersertifikasinya para lulusan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja sesuai standar BNSP
5. Belum tersertifikasinya para pekerja sesuai dengan standar BNSP
6. Belum optimalnya pembinaan kepada perusahaan tentang kewajiban mengikutsertakan tenaga kerjanya di BPJS ketenagakerjaan.

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

1. Masih adanya perbedaan persepsi atas peran/kedudukan, partisipasi, pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
2. Masih adanya perbedaan persepsi atas Definisi/kriteria kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Masih rendahnya porsi/peran/partisipasi perempuan dalam kebijakan pembangunan.
4. Kurangnya fasilitasi pemerintah dalam hal pembiayaan dan proses penyelesaian visum maupun pengecekan DNA bagi korban pemerkosaan dan visum atas korban KDRT.

2.3.2.3 Pangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pangan yaitu:

1. Rendahnya produksi komoditas pangan (tanaman, ternak, dan ikan) asal Kota Magelang, sebagai akibat dari konversi lahan pertanian menjadi non pertanian.

2. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan maupun lahan yang tidak terpakai di rumah tangga untuk budidaya pertanian, peternakan, dan perikanan;
3. Adanya potensi kerawanan pangan dan gizi, akibat masih tingginya jumlah penduduk miskin;
4. Tingginya fluktuasi harga beberapa komoditas pangan, seperti: daging sapi, daging unggas, telur, cabe, dan bawang merah;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat Kota Magelang mengenai konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.
6. Belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal sebagai pangan utama, sehingga skor PPH Kota Magelang masih berada di angka 95%. Sementara, target PPH Nasional pada tahun 2020 adalah sebesar 100%.
7. Masih beredarnya pangan yang mengandung zat aditif (penyedap, pewarna, pemanis, pengawet, pengental, pemucat, dan anti gumpal) dan berbahaya di pasaran, termasuk lingkungan sekolah .
8. Adanya pencemaran bahan kimia (pestisida) pada beberapa komoditas pangan segar seperti: sayur, dan buah-buahan.

2.3.2.4 Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan yaitu:

1. Masih dijumpainya tumpang tindih
2. masih adanya lahan terlantar atau lahan yang tidak digunakan sebagaimana mestinya sehingga sumber daya tersebut tidak dapat dipetik manfaatnya bagi kehidupan bersama .
3. Peruntukan tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan legalisasi atas tanah
4. Pemerintah atau pemerintah daerah belum menyediakan data base tentang pemanfaatan lahan dan penggunaan ruang secara memadai. Ketidakakuratan data pertanahan dalam hal substansi/kelas/status maupun koordinatnya menyebabkan benturan antar sektor/benturan kepentingan dan di kawasan budi daya menyebabkan benturan antar pemangku kepentingan atas tanah.
5. Sertifikat tanah merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan tanah, namun proses mendapatkan sertifikat tanah cukup rumit.
6. Ketidakterdediaan sumberdaya dan minimnya sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan penataan ruang/tanah
7. Permasalahan ganti rugi tanah

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup yaitu:

1. Semakin meningkatnya pencemaran lingkungan yang banyak dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, industry, rumah sakit, perhotelan, transportasi, dan pertokoan sehingga perlu adanya upaya pengendalian pencemaran baik air, tanah, maupun udara yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dengan pelaku usaha.
2. Belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan
3. Banyak industri kecil (seperti industri tahu, batik, dan makanan) yang sangat berpotensi mencemari lingkungan tapi tidak bisa memenuhi persyaratan teknis dan pembiayaan pembuatan IPAL.
4. Keterbatasan lahan untuk membangun IPAL terpadu industri kecil.
5. Belum adanya pejabat fungsional PPLHD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Adanya regulasi bantuan hibah yang sulit untuk diterapkan di masyarakat.
7. Kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah
8. Belum adanya komisi amdal daerah karena kurangnya persyaratan personil yang memiliki kompetensi penilai amdal
9. Minimnya persentase pengurangan sampah dari sumbernya disebabkan peran serta masyarakat masih kurang karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan sampah domestik
10. Belum optimalnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, diindikasikan dengan belum terpenuhinya RTH publik sehingga perlu optimalisasi lahan terbuka yang sudah ada seperti makam dan sempadan sungai,
11. Ketersediaan RTH publik di Kota Magelang belum memenuhi amanah Undang-undang RI No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.
12. Secara teknis TPA Banyuurip sudah tidak bisa menampung sampah lagi.

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu:

1. Perlunya peningkatan peran aktif publik untuk memberikan saran, masukan, bahkan komplain atas pelayanan administrasi kependudukan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada.
2. Perlunya peningkatan Sumber daya manusia baik dari unsur teknis maupun manajerial.
3. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) guna mendukung tercapainya Reformasi Birokrasi.
4. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan Teknologi Informasi maupun Manajemen Informatika.

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Belum optimalnya peran lembaga dan organisasi kemasyarakatan untuk turut serta dalam meningkatkan kemandirian masyarakat (swadaya, swakarsa dan swakelola) yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan teknis, kesadaran hingga permasalahan-permasalahan personal (psikologis).
2. Belum sinerginya kinerja antar lembaga masyarakat (LPM, LKM, LKK, PNPM dan lain sebagainya).
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah setempat.
4. Belum akuratnya Data Profil Kelurahan dalam mencerminkan potensi yang ada berikut langkah pengembangannya.
5. Kurangnya perhatian (fasilitasi/insentif) terhadap Kader Pemberdayaan Masyarakat.

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yaitu:

1. Rendahnya kepesertaan KB pria karena kurangnya kesadaran laki-laki untuk ber-KB dan adanya kekhawatiran pada sebagian perempuan/isteri karena dapat mendorong pria untuk bebas berselingkuh.
2. Kurangnya tenaga penyuluh KB, idealnya 1 orang per kelurahan sedangkan saat ini baru terdapat 15 orang PLKB dari 17 yang dibutuhkan.
3. Kurangnya Balai PLKB.
4. Masih adanya remaja perempuan (ibu Muda) berusia 15-19 tahun yang hamil.
5. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan KB-KS.

2.3.2.9 Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perhubungan yaitu:

1. Terminal angkutan barang yang ada belum memadai (kurangnya lahan, kurang fasilitas dan bercampur dengan fungsi lain
2. Belum tersedianya terminal type C di wilayah perbatasan.
3. Sarana tempat pemberhentian angkutan umum di Kota Magelang masih belum memadai
4. Tingginya volume pergerakan/mobilitas terutama pada jam-jam sibuk yang tidak didukung oleh sarana prasarana jaringan jalan sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk terjadinya kemacetan dan potensi peningkatan kecelakaan lalu lintas.
5. Load faktor angkutan penumpang umum semakin menurun
6. Usia kendaraan angkutan umum yang lebih dari umur ekonomis
7. Belum tersedianya terminal barang di Kota Magelang.
8. Kurangnya disiplin pengguna jalan terhadap rambu-rambu dan aturan-aturan yang berlaku.
9. Fasilitas pengatur dan pengamanan lalu lintas masih belum optimal.

10. Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal terutama pada badan jalan yang mengakibatkan kemacetan dan tundaan perjalanan karena parkir.

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika yaitu:

1. Masih terdapat perbedaan persepsi dengan DPRD terkait indikator publikasi hasil kegiatan dewan. Fokus materi publikasi diharapkan hanya pada hasil kegiatan tidak pada proses pelaksanaan kegiatan. Upaya komunikasi sudah dilakukan dengan Ketua DPRD Kota Magelang agar kegiatan sebagai upaya pencapaian target indikator ini dapat diwujudkan pada tahun mendatang.
2. Diskominsta selaku OPD pelaksana pencapaian indikator persentase publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah baik melalui radio maupun media cetak kesulitan dalam pengadaan materi publikasi. Upaya kerjasama dengan narasumber tokoh agama sudah dilaksanakan melalui Kantor Kemenag dan Forum Komunikasi Umat Beragama akan tetapi masih belum membuahkan hasil positif untuk materi agama Budha, Hindhu, Konghuchu dan kepercayaan. Pelaksanaan publikasi melalui media cetak sebanyak 12 kali untuk 5 agama juga terkendala oleh jangka waktu terbit Majalah Dinamika setiap triwulan (4 kali dalam setahun) sebagai media cetak milik Pemerintah Kota Magelang.
3. Titik yang belum terealisasi cakupan WAN sebagian besar berlokasi di pinggir yang secara lokasi maupun spesifikasi membutuhkan teknik khusus sehingga dikhawatirkan akan meningkatkan kebutuhan dana dalam upaya pencapaian target cakupan WAN kota.
4. Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan komunikasi dan informatika tidak mencakup pengaturan penyelenggaraan menara telekomunikasi, padahal secara aturan (PERDA) kajian izin penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kota Magelang masih melekat di Diskominsta. Secara kewenangan Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Rekomendasi Izin Menara lebih dekat dengan penyelenggaraan penataan ruang prasarana, sarana, dan utilitas. Hal ini memerlukan kajian agar pelaksanaan penyenggaraan menara telekomunikasi ke depan dapat dilakukan dengan tepat.
5. Operasional LPPL saat ini masih melekat dalam APBD dan belum ada pemasukan iklan, sehingga sepenuhnya masih bergantung pada anggaran daerah. Hingga saat ini belum ada kajian mengenai kelembagaan yang tepat terkait operasional LPPL.
6. Hingga saat ini belum ada dasar hukum integrasi aplikasi dan sistem informasi yang menjadi tupoksi Diskominsta sehingga hingga saat ini pengembangan aplikasi dan sistem informasi masih dilakukan secara mandiri oleh OPD.

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu :

1. Modal yang terbatas yang menyebabkan volume usaha terbatas dan kurang bisa memelihara asetnya,

2. SDM pengelola yang kurang terampil sehingga banyak kepentingan administrasi yang terabaikan dan solidaritas antar anggota yang kurang terjalin,

Sedangkan permasalahan yang dihadapi UKM antara lain:

1. Rendahnya daya saing,
2. terbatasnya modal dan masih terbatasnya akses perbankan bagi UKM,
3. kurangnya wilayah pemasaran, sarana promosi produk, kemampuan akses usaha, kemampuan manajerial sumberdaya manusia pengelolanya,
4. kemampuan inovasi dan kreativitas, dan kemampuan penguasaan teknologi yang masih terbatas

2.3.2.12 Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal yaitu:

1. Kurangnya informasi dan promosi terhadap potensi investasi yang ada di Kota Magelang;
2. kurang optimalnya dukungan terhadap potensi investasi karena kekurangsiapan sumberdaya dan sarana prasarana dalam menarik investor,
3. ketentuan hukum yang kurang konsisten (masih terdapat overlap antara peraturan perundangan yang satu dengan yang lain),
4. pelayanan pengurusan perijinan yang masih membutuhkan waktu lebih dari satu hari, serta terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang menangani pelayanan pengurusan perijinan dan investasi di Kota Magelang.
5. masih rendahnya rasio penyerapan tenaga kerja

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga yaitu:

1. Ketatnya persaingan dengan daerah lain.
2. Kurangnya kompetisi olahraga yang berjenjang dan agenda kompetisi tidak menentu.
3. Lemahnya pembibitan, pembinaan, pemanduan dan pemasyarakatan olahraga.
4. Kurangnya penghargaan dan perlindungan terhadap atlet berprestasi berakibat terjadinya mutasi olahragawan berprestasi dari Kota Magelang ke daerah lain.
5. Fasilitas olahraga belum memadai dan memenuhi standar.
6. Rendahnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan olahraga.
7. Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah disebabkan rendahnya pengetahuan, ketrampilan, daya tangkal, kepedulian, keterbatasan akses dan kemitraan, serta lemahnya lembaga kepemudaan.
8. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan pemuda.

9. Lemahnya sistem informasi dan database pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.
10. Kurangnya sarana prasarana bagi pemuda seperti gedung pemuda, pusat eksplorasi potensi, sekretariat pemuda, jejaring informasi dan komunikasi.

2.3.2.14 Statistik

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan statistik yaitu:

1. Masih perlunya peningkatan ketersediaan data dasar dan data makro yang akurat dan up to date.
2. Masih adanya inkonsistensi dan validitas data dari Perangkat Daerah
3. Belum optimalnya kerjasama antar Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan penyediaan data;
4. Kurangnya tenaga profesional yang khusus menangani masalah pendataan di tiap unit kerja.
5. Masih terdapat data-data penting yang sulit didapatkan/dihitung secara akurat dan tepat waktu.
6. Belum efektifnya manajemen pengumpulan data dan sistem informasi data.
7. Masih terjadinya perbedaan data antar sumber-sumber data.

2.3.2.15 Persandian

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan persandian yaitu:

1. Keterbatasan SDM persandian dalam hal kualitas maupun kuantitas
2. Infrastruktur jaringan belum cukup memadai
3. Fungsi persandian belum dipahami secara menyeluruh oleh birokrasi sebagai suatu fungsi teknis pemerintahan yang memberikan proteksi terhadap nilai kerahasiaan informasi pemerintahan
4. Masih ada beberapa tenaga persandian yang belum didiklat, kaderisasi SDM persandian perlu dilakukan.
5. Kurangnya pemahaman SDM di OPD tentang persandian.

2.3.2.16 Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan yaitu:

1. Cagar budaya belum terdokumentasikan dengan baik karena belum ada Tim Ahli Cagar Budaya yang bersertifikasi dan mengakibatkan belum berjalannya Sistem Register Cagar Budaya
2. Belum adanya kesepahaman antara pemilik bangunan, pemerintah baik pusat maupun daerah, dan komunitas pemerhati dalam pengelolaan dan pengembangan cagar budaya.
3. Masih kurangnya perhatian terhadap kondisi dan pengembangan museum dan pusat informasi sejarah.

4. Masih kurangnya pengembangan dan promosi karya kreatif seniman lokal agar memiliki manfaat dan nilai ekonomi tinggi.
5. Belum adanya gedung kesenian yang dilengkapi sarana prasarana yang memadai untuk pentas seni.
6. Sangat terbatasnya dokumentasi sejarah dan legenda lokal, seiring makin berkurangnya narasumber sejarah.
7. Kurangnya pemahaman masyarakat Kota Magelang tentang sejarah dan legenda kota Magelang.
8. Masih kurangnya jalinan komunikasi interaktif antara Kelompok Penghayat Kepercayaan dengan pemerintah. Kota Magelang.

2.3.2.17 Perpustakaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan yaitu:

1. Perlunya optimalisasi untuk lebih meningkatkan minat baca di dalam masyarakat
2. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan (perpustakaan daerah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus/instansi, perpustakaan kelurahan, perpustakaan rumah ibadah, dan perpustakaan sekolah).
3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam.
4. Perpustakaan digital belum menjadi fokus program

2.3.2.18 Kearsipan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kearsipan yaitu:

1. Belum optimalnya sistem kearsipan yang disebabkan oleh kurangnya SDM dan sarana dan prasarana kearsipan serta rendahnya perhatian dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem kearsipan;
2. Belum optimalnya pelayanan informasi kearsipan daerah yang disebabkan oleh belum tersedianya sistem informasi kearsipan yang memadai.
3. Digitalisasi arsip belum menjadi fokus kebijakan

2.3.3 URUSAN PILIHAN

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan yaitu:

1. Rendahnya produksi perikanan Kota Magelang, sebagai akibat dari alih fungsi lahan perikanan menjadi perumahan, industri, dan fasilitas umum lainnya.
2. Belum adanya kelompok masyarakat perikanan yang bersertifikasi CBIB, CPIB dan Kelayakan Pengolahan.

3. Belum berkembangnya perikanan yang ramah lingkungan di Kota Magelang, sehingga merusak kelestarian dan mengganggu keamanan ekosistem air tawar.
4. Belum berkembangnya budidaya perikanan di lahan sempit (tidak terpakai) di Kota Magelang.
5. Belum optimalnya peningkatan fungsi dan peran kelembagaan pelaku utama perikanan (pembudidaya, pemasar dan pengolah)

2.3.3.2 Pariwisata

Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pariwisata yaitu:

1. Sumbangan sektor pariwisata terhadap PAD belum optimal, disebabkan belum optimalnya promosi, informasi dan pemasaran pariwisata promosi yang dilakukan, baik di dalam maupun luar negeri, sehingga jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran belanja wisatawan masih relatif kecil.
2. Daya saing dan daya jual destinasi pariwisata masih lemah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kualitas produk dan jasa pariwisata, kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan obyek dan daya tarik wisata, masih rendahnya kualitas SDM pengelola obyek dan daya tarik wisata, pramuwisata maupun para pelaku pariwisata lainnya.
3. Kurang memadainya sarana dan prasarana kepariwisataan dan sumber daya manusia pengelola pariwisata.
4. Kurangnya kreativitas, kreasi, atraksi dan berbagai fasilitas pendukung destinasi pariwisata
5. Belum optimalnya penyelenggaraan even pariwisata yang dilaksanakan secara periodik yang dikemas dalam atraksi yang menarik dan atraktif serta berskala luas yang mampu menarik wisatawan berkunjung.
6. Masih lemahnya kemitraan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha pariwisata dan masyarakat masih belum terjalin dengan baik. Hal ini disebabkan oleh lemahnya jejaring, kerjasama, koordinasi dan keterpaduan dalam pengembangan pariwisata serta rendahnya partisipasi masyarakat.
7. TIC belum representatif.
8. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Magelang sebagai Kota Jasa termasuk kecil.
9. Promosi dan informasi pariwisata belum cukup efektif.
10. Lemahnya daya dukung terwujudnya Desa Wisata dan obyek wisata yang memiliki daya tarik.
11. Kurangnya informasi terkait obyek wisata (sejarah/rincian obyek, rute/peta, fasilitas, keterkaitan antar obyek, dsb).
12. Kurangnya produk spesifik cenderamata.

2.3.3.3 Pertanian

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pertanian adalah:

1. Pelaksanaan Agricultural Practices (GAP) yang masih sulit untuk diterapkan pada petani Kota Magelang karena petani kota Magelang sebagai penjual jasa atau penggarap sawah.
2. Kurang adanya pembinaan di UKM dibidang kuliner maupun dikelompok tani sehingga petani yang sudah mengikuti pelatihan tidak berlangsung sesuai dengan pelatihan yang diikuti dan cenderung hanya ikut pelatihan saja;
3. Banyaknya alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian yang menyebabkan berkurangnya lahan pertanian diperkotaan
4. Dalam penerapan teknologi belum dilaksanakan secara maksimal, petani penggarap sawah sebagian masih menggunakan alat manual / tradisional dan masih terbatasnya alat sehingga tidak maksimal dalam pengerjaannya.
5. Dengan tidak tercapainya produksi padi disini dikarenakan faktor iklim/cuaca yang tidak mendukung seperti adanya cuaca ekstrim, angin kencang yang menjadikan padi pada roboh sebelum dipanen walau tidak menutup kemungkinan produksi padi akan naik dan tetap akan tercapai pada pencapaian target yang akan datang.
6. Belum adanya sarana pemasaran pasar bunga di Kota Magelang sehingga belum optimal dalam pengembangan agribisnis tanaman hias di masyarakat Kota Magelang.
7. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep Urban Farming, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengembangkan urban farming dan belum berkembangnya pertanian perkotaan (Urban farming) dalam mengatasi permasalahan keterbatasan lahan untuk usaha pertanian , peternakan dan perikanan.
8. Pola pikir petani yang praktis dalam budidaya tanaman dan menggunakan bahan kimia tanpa memikirkan efek terhadap lingkungan. Dalam hal ini pertanian, peternakan dan perikanan di Kota Magelang masih bersifat konvensional, sehingga berdampak negative bagi lingkungan yang berupa kerusakan lingkungan air ,udara maupun mahluk hidup
9. dan yang jelas dirasakan petani tidak sesuai antara perawatan dengan nilai jual dipasaran

2.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral yaitu:

1. Belum optimalnya upaya penghematan energi
2. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam terbarukan

2.3.3.5 Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perdagangan yaitu:

1. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta belum berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;
2. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
3. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah

2.3.3.6 Perindustrian

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perindustrian yaitu:

1. Rendahnya daya saing produk IKM dalam menghadapi dampak globalisasi;
2. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk;
3. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM;
4. Terbatasnya produk berorientasi ekspor.
5. Semakin menurunnya daya serap tenaga kerja pada sektor industri menengah.

2.3.3.7 Transmigrasi

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan transmigrasi adalah:

1. Penentuan jumlah transmigran yang dikirim dan lokasi penempatan masih menjadi kewenangan pusat yang tidak dapat ditawarkan oleh pemerintah daerah baik propinsi maupun kab/kota
2. Rendahnya minat penduduk Kota Magelang untuk bertransmigrasi
3. Belum adanya terobosan dari Kota Magelang untuk mengikuti program transmigrasi swakarsa, dimana pemerintah daerah pengirim bertanggung jawab dalam pemberian bantuan kebutuhan dasar hidup kepada calon transmigrans.
4. Pelatihan bagi calon transmigrans masih dilakukan secara klasikal belum mengarah pada minat dan bakat serta skill/kemampuan. Perlu adanya koordinasi dengan bidang pelatihan dan produktivitas untuk pelatihan teknis dan dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan dalam pemberian wawasan berwirausaha

2.3.4 FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN

2.3.4.1 Perencanaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan adalah:

1. Masih diperlukannya sinergisitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik. Sebagai contoh untuk Pokok pokok pikiran DPRD sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, diamanatkan untuk disampaikan kepada Eksekutif dalam hal ini Bappeda sejak Rancangan Awal RKPD Tahun rencana (Januari), namun demikian selama ini hal tersebut belum bisa terwujud. Sehingga capaian indikator Tingkat Ketersediaan Pokok Pikiran Dewan tepat waktu baru dapat tercapai 50%
2. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang belum konsisten yang perlu terus dilakukan minimalisasi deviasi

3. Masih memerlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD. Menjadi tidak ideal ketika yang memahami indikator dan ukurannya hanya pada tingkat kasubbag program.
4. Meskipun dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan, proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.
5. Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tidak ringan, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global .

2.3.4.2 Fungsi Penunjang Keuangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan fungsi penunjang keuangan adalah:

1. Belum optimalnya sistem pajak online
2. Law enforcement belum sepenuhnya dijalankan, yaitu denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya
3. Belum optimalnya penilaian kembali atas tanah dan bangunan
4. Belum adanya peta zona nilai tanah tahun terbaru sebagai perhitungan nilai pasar
5. Belum optimalnya penggunaan instrumen Analisis Standar Biaya (ASB) perencanaan penganggaran dalam penyusunan penganggaran
6. Belum optimalnya pemahaman pengelola keuangan Perangkat Daerah atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis accrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
7. Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah terkait Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Perangkat Daerah yang menangani pendapatan.

2.3.4.3 Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Diklat

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan diklat sebagai berikut:

1. Kinerja pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah belum semuanya memuaskan
2. Pengisian jabatan ASN belum seluruhnya berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja
3. Layanan kepegawaian belum sepenuhnya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi
4. Belum optimalnya evaluasi layanan kepegawaian

5. Belum terpenuhinya sarana prasarana penunjang layanan kepegawaian
6. Penegakan disiplin pegawai belum didukung dengan penerapan sistem reward dan punishment yang terintegrasi

2.3.4.4 Fungsi Penunjang Pengawasan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan fungsi penunjang pengawasan yaitu:

1. Manajemen pengawasan lemah disebabkan pemeriksaan belum berbasis resiko, pengendalian internal dan quality assurance
2. Kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan
3. SPIP tidak efektif disebabkan belum optimalnya pembinaan dan peran Satgas SPIP
4. Pencegahan KKN lemah disebabkan rendahnya komitmen aparatur pemerintah daerah

2.3.4.5 Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yaitu:

1. Masih minimnya jumlah MoU antara Pemerintah Kota Magelang dengan Kementerian/LNDP/pembina terkait penelitian & pengembangan
2. Belum optimalnya pembinaan dan hilirisasi produk hasil kreativitas dan inovasi masyarakat
3. Rendahnya proporsi SDM pengelola Kelitbangan
4. Kurang kuatnya dalam menjalani fungsi koordinasi
5. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi di Kota Magelang
6. Belum terimplementasikannya online jurnal system di Kota Magelang
7. Belum adanya payung hukum yang mengatur Penguatan Sistem Inovasi Daerah
8. Belum optimalnya fungsi Forum Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK (Jarlitbangrap IPTEK)

2.4 ISU STRATEGIS

Dari hasil kajian terhadap kondisi Kota Magelang dari berbagai aspek pembangunan dan berdasarkan berbagai isu dan kebijakan di tingkat global, nasional, provinsi maupun global, maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kota Magelang. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang 2016-2021 karena dari tahap

ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan isu strategis yang tepat akan menghindarkan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang salah didefinisikan..

Dari proses analisis lingkungan strategis dengan menyangdingkan:

- 1) Sasaran pokok pembangunan daerah dalam UU no 23 tahun 2014 pasal 258, yaitu: peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; kesempatan kerja; lapangan berusaha; meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; daya saing Daerah;
- 2) RPJPD Kota Magelang 2005-2025, yaitu terwujudnya Kota Magelang: (i) sebagai pusat pelayanan jasa yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan fasilitas yang memadai; (ii) masyarakat Kota Magelang yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; (iii) daya saing daerah melalui pengelolaan pembangunan Kota Magelang yang efisien, efektif, profesional, berwawasan lingkungan, mengembangkan potensi daerah secara kreatif, inovatif didukung oleh penguasaan iptek dan sumber daya manusia yang berkualitas; (iv) perekonomian Kota Magelang yang bertumpu pada penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; (v) good governance dan clean government dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat madani (civil society), dan media massa sehingga kehidupan masyarakat Kota Magelang agamis, damai, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran;
- 3) RTRW Kota Magelang 2011-2031: arah kebijakan pengembangan struktur dan pola ruang kota;
- 4) Dimensi pokok pembangunan nasional RPJMN 2015-2019 yaitu (i) Kemananan dan Ketertiban; (ii) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi; (iii) Pemerataan pembangunan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah; (iv) Kepastian dan penegakan hukum, (v) Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Perumahan; (vi) Pembangunan sektor unggulan: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan kelistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri; (vii) Revolusi Mental; (viii) Politik dan Demokrasi;
- 5) RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, dengan isu: Pengurangan Kemiskinan, Pengurangan Pengangguran, Pembangunan Infrastruktur, Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi, Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah;
- 6) Hasil evaluasi RPJMD Kota Magelang 2010-2015, ditemukan hal-hal yang masih harus dikejar dari penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- 7) Visi misi Kepala Daerah Terpilih Kota Magelang Tahun 2016-2021, yang mengusung isu: peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah, peningkatan akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan kesejahteraan sosial, pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah, pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan peningkatan penciptaan lapangan kerja, dan perlunya peningkatan kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama.

Kriteria yang digunakan untuk penentuan isu strategis yaitu: (i) memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan tugas dan tanggungjawan Pemerintah Daerah;

(iii) dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat; (iv) memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; (v) Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani; dan (vi) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Setelah melakukan analisis isu, dilakukan proses pembobotan isu, dan konsultasi publik, maka ditarik kesimpulan bahwa terdapat isu strategis sebagai berikut:

1. Penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan peningkatan penciptaan lapangan kerja
2. Peningkatan akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan kesejahteraan sosial
3. Penguatan reformasi birokrasi
4. Peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat serta kondusivitas daerah
5. Pengelolaan persampahan
6. Peningkatan koperasi, usaha mikro dan perdagangan
7. Penguatan daya saing dan kemandirian daerah
8. Peningkatan kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama
9. Penerapan prinsip-prinsip kota cerdas
10. Penguatan kemitraan dalam pembangunan daerah
11. Peningkatan daya saing dan daya jual pariwisata
12. Penguatan implementasi Branding Magelang Kota Sejuta Bunga
13. Pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah
14. Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
15. Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan
16. Peningkatan ketahanan pangan
17. Keadilan gender dan perlindungan anak
18. Peningkatan kreativitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
19. Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga

Dari isu-isu strategis tersebut, dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) kelompok payung besar isu strategis Kota Magelang yaitu:

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi);
- c. Penguatan reformasi birokrasi;
- d. Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri;
- e. Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- f. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal;
- g. Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan;
- h. Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2019

Perencanaan pembangunan daerah Tahun 2019 tidak dapat terlepas dari rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2019 sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator makro daerah dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2019. Kerangka ekonomi makro ini sekaligus memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Magelang baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Di sisi lain kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2019. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Dengan demikian rancangan kerangka ekonomi tahun 2019 akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Magelang.

3.1 Kondisi Ekonomi Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018

3.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional

Kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2017 sangat baik dengan progress capaian indikator makro yang terbilang signifikan. Hampir seluruh indikator makro menunjukkan posisi yang baik. Inflasi mengalami sedikit peningkatan di akhir tahun namun masih dalam batas wajar dan masuk dalam target yang ditetapkan.

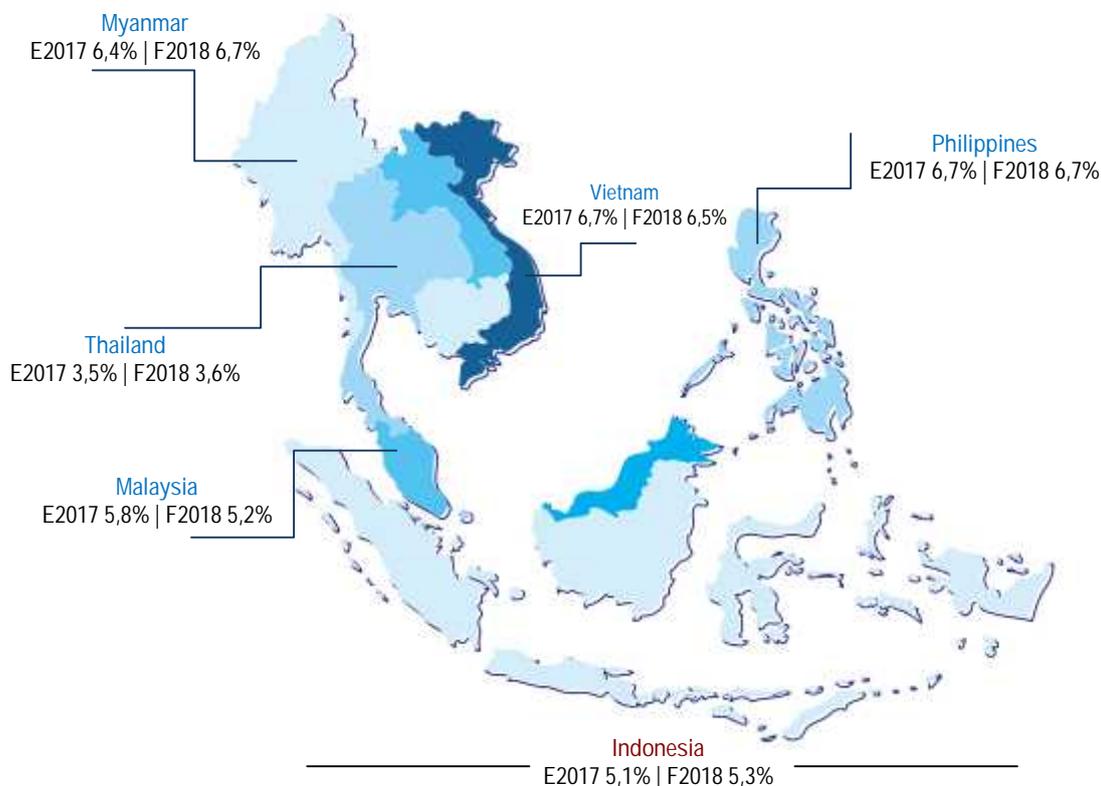
Tabel 3-1
Realisasi Ekonomi Makro Nasional 2016 & Asumsi RAPBN 2017-2018

Indikator	2015	2016	2017*	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,88	5,02	5,06	2017 data Triwulan III (y-o-y)
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,18	5,61	5,50	
IPM (%)	69,55	70,18	na	Data belum dipublikasi
Inflasi (%)	3,35	3,02	3,61	
Indeks Gini (Maret)	0,408	0,397	0,393	
Persentase Penduduk Miskin (%)	11,13	10,70	10,12	Data September

Sumber: BPS, 2018

Fokus pembangunan infrastruktur di berbagai pelosok tanah air terbukti mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memicu kenaikan investasi skala nasional. World Bank mengemukakan bahwa pertumbuhan investasi di Indonesia di tahun 2017 mencapai nilai tertinggi dalam empat tahun terakhir. Demikian pula dengan jumlah arus masuk investasi asing langsung yang mencapai nilai terbesar dalam tujuh tahun terakhir. Gebrakan yang baik dalam reformasi birokrasi juga menuai hasil yang signifikan dengan meningkatnya peringkat ease of doing business dari posisi 120 ke posisi 72 di tahun 2017. Kabar gembira juga muncul dari naiknya peringkat utang jangka panjang dalam mata uang asing

dan lokal menjadi BBB dengan outlook stabil. Stabilitas makro ekonomi dari sisi moneter juga terjaga dengan baik sepanjang tahun 2017. Nilai tukar terjaga dengan volatilitas kurs pada kisaran 3%.



Gambar 3-1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%), Tahun 2010- 2016

Kemiskinan tercatat memiliki tren menurun. Sampai dengan September 2017 persentase penduduk miskin Indonesia mencapai 10,12% atau 26,58 juta jiwa. Angka ini menurun dari posisi Maret 2017 dengan pengentasan kemiskinan sebesar hamper 1,19 jiwa penduduk. Pendapatan juga mengalami distribusi yang lebih merata dengan tren menurun sejak tahun 2014. Capaian indeks gini Indonesia pada September 2017 sebesar 0,391, turun 0,002 poin dari Maret 2017. Kondisi ekonomi yang terkendali juga berimbas pada menguatnya Rupiah di awal tahun 2018. Kondisi ekonomi nasional yang terkendali melahirkan rumusan asumsi dasar makro 2018 yang cukup optimis sebagai berikut:

Tabel 3-2
Outlook 2017 dan Asumsi Dasar makro Ekonomi Indonesia Tahun 2018

Indikator Makro	Outlook 2017	APBN 2018	Asumsi Makro 2019
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1	5,4	5,4-5,8
Inflasi (%)	3,6	3,5	2,5-4,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	13.384	13.400	13.500-13.900
Harga Minyak (US\$/barrel)	48	48	45-60
Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	815	800	722-850
Lifting gas (ribu barrel/hari)	1.150	1.200	1.210-1.300

Sumber: Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, 2018

3.1.2 Kondisi Perekonomian Jawa Tengah

Sampai dengan Triwulan III 2017 BPS merilis angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,13% dengan tingkat inflasi sampai dengan akhir tahun cukup rendah di angka 3,71%. Pemerataan pendapatan membaik meski dengan penurunan indeks gini yang cukup lambat. Scenario sasaran ekonomi makro di tahun 2019 diprediksi mencapai pertumbuhan ekonomi 5,4% dengan rentang nilai 5,2%-5,6%.

Jumlah penduduk miskin pada September 2017 mencapai 4,197 juta jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 337.657. Secara porsi, besarnya persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada September 2017 (12,23%) masih lebih tinggi dari persentase pada skala nasional dan menduduki peringkat ke-13 tertinggi se-Indonesia setelah DI Yogyakarta (12,36%). Pada skala Kabupaten/Kota posisi Maret 2017 persentase penduduk miskin terbesar berada di Kabupaten Wonosobo, Kebumen dan Brebes. Mayoritas penduduk miskin di kantong kemiskinan terbesar di Jawa Tengah adalah berasal dari pedesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian. Arah dan prioritas pembangunan Jawa Tengah di tahun 2019 untuk penanggulangan kemiskinan memfokuskan pada penyediaan basic life access, penguatan sustainable livelihood, penguatan basis data, spasial, komunitas, pendampingan dan keterlibatan swasta serta pihak lain dalam pengentasan kemiskinan.

Tabel 3-3
Capaian Indikator Makro Jawa Tengah, 2015-2017

Indikator	2015	2016	2017*	Keterangan	Target 2019**
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,47	5,28	5,13	2017 data Triwulan III (y-o-y)	5,2-5,6
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,99	4,63	4,57		4,52
IPM (%)	69,49	69,98	na		-
Inflasi (%)	2,73	2,36	3,71		-
Indeks Gini (Maret)	0,382	0,366	0,365		-
Persentase Penduduk Miskin (%)	13,58	13,27	12,23	Data September	12,01

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

** SE Gubernur Jawa Tengah No. 050/019604 Tanggal 27 Desember 2017

TPT di Jawa Tengah mampu turun di tahun 2017. Dengan total angkatan kerja sebanyak 18,016 juta jiwa, jumlah pengangguran terbuka di Jawa Tengah masih ditemui sebesar 823.938 jiwa atau mencapai 4,57% dari total angkatan kerja. TPT tertinggi terjadi di Kota Tegal sebesar 8,19% sedangkan wilayah dengan TPT terkecil adalah Kabupaten Semarang yang hanya mencapai 1,78%.

3.1.3 Deskripsi Umum Prediksi Perekonomian Kota Magelang

Berdasarkan uraian kinerja makro ekonomi dan sosial dari hasil pembangunan yang telah dicapai Pemerintah Kota Magelang di tahun 2017 sebagaimana diuraikan dalam Bab II pada dokumen ini, maka sub bab ini akan membahas outlook kondisi ekonomi Kota Magelang sampai dengan akhir tahun 2018 dari beberapa indikator makro pada tabel berikut :

Tabel 3-4
Realisasi dan Prediksi Capaian Indikator Makro Kota Magelang, 2015-2018

Indikator	2015	2016	2017	2018	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi (%)*	5,11	5,17	5,19	5,39	2017-2018 prediksi (deviasi $\pm 0,40\%$)
TPT (%)	6,43	na	6,68	5,77	2018 prediksi
IPM (%)*	76,39	77,16	77,80	78,56	2017-2018 prediksi
Inflasi (%)*	2,70	2,25	3,90	3,26-4,23	2018 prediksi
Indeks Gini*	0,340	0,325-0,340	0,314-0,340	0,312-0,340	2016-2018 prediksi
Persentase Penduduk Miskin (%)*	9,05	8,79	8,75	8,32	2011-2016 data September, 2017 data Maret 2018 prediksi (deviasi $\pm 0,71$)

Sumber: Sumber: BPS Kota Magelang, 2018
Prediksi Indikator Bertanda Bintang oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018
Prediksi TPT oleh Pusdatin Naker, 2017

3.1.3.1 Produk Domestik Regional Bruto

3.1.3.1.1 PDRB atas Dasar Harga Berlaku

Besarnya PDRB Kota Magelang atas dasar harga berlaku di tahun 2018 diprediksi tumbuh positif 7,49%. Dengan komposisi peran lapangan usaha yang cenderung sama dari tahun ke tahun diprediksi beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan PDRB secara umum antara lain adalah: Industri Pengolahan; Konstruksi; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya. Perekonomian masih ditopang kokoh oleh sektor-sektor andalan yaitu Industri Pengolahan (16,65%), Konstruksi (16,75%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,81%) dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (11,41%).

Tabel 3-5
Prediksi PDRB Kota Magelang Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp), 2018

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	146.733,01
Industri Pengolahan	1.350.081,12
Pengadaan Listrik dan Gas	22.293,84
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.307,93
Konstruksi	1.358.571,71
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.120.227,80
Transportasi dan Pergudangan	539.086,31
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	473.799,62
Informasi dan Komunikasi	401.070,57
Jasa Keuangan dan Asuransi	407.474,95
Real Estate	251.447,95
Jasa Perusahaan	31.390,13
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	924.920,40

Jasa Pendidikan	664.042,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	235.068,85
Jasa lainnya	173.084,68
PDRB	8.109.601,36

Sumber: Prediksi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

3.1.3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2018 dengan asumsi perolehan PDRB adhb sebesar 8,110 triliun Rupiah, perekonomian riil Kota Magelang diprediksi mencapai 5,39% (deviasi 0,40%). Prediksi ini cukup optimis sejalan dengan target RPJMD pada tahun berkenaan yang ditetapkan pada range 4,79%-5,29%. Secara riil PDRB diprediksi mencapai 6,118 triliun Rupiah. Dari sisi lapangan usaha beberapa sektor diprediksi mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi seperti Jasa Pendidikan (11,33%), Informasi dan Komunikasi (9,28%), Jasa Perusahaan (8,11%) dan Transportasi dan Pergudangan (7,16%). Dengan asumsi prediksi tersebut tercapai, maka jika disandingkan dengan data proyeksi penduduk tengah tahun Kota Magelang di tahun 2018 sebesar 121.872, besarnya PDRB per kapita Kota Magelang diprediksi tumbuh 1,7% (adhb) mencapai 59,92 juta/tahun.

3.1.3.2 Pemerataan Pendapatan

Keterbatasan data resmi yang dipublikasi BPS menjadikan indikator pemerataan pendapatan yang diproksi melalui indeks gini tidak tersedia dengan historis yang mencukupi. Data terakhir di tahun 2015 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kota Magelang masuk dalam klasifikasi ketimpangan sedang dengan indeks sebesar 0,340. Pada tahun-tahun ke depan pemerataan tersebut diprediksi makin baik dengan indeks di tahun 2018 pada interval 0,312-0,340 dengan kecenderungan menurun.

3.1.3.3 Perkembangan Harga

Seiring dengan outlook yang cukup optimis pada indikator makro ekonomi, laju perkembangan inflasi di Kota Magelang pada tahun 2018 juga diprediksi stabil pada kisaran angka 3,26-4,23. Prediksi ini masuk dalam rentang target RPJMD di tahun tersebut yang ditetapkan sebesar 3,15% - 4,73%.

3.1.3.4 Ekspor dan Investasi

Neraca perdagangan negatif memang tidak dapat dihindari di Kota Magelang mengingat keterbatasan sumber daya dan luas wilayah. Namun demikian diprediksi ekspor (perdagangan ke luar wilayah) Kota Magelang di tahun 2018 mampu tumbuh mengimbangi bahkan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan impor. Celah yang tercipta dalam pos ekspor netto terhadap PDRB diprediksi makin mengecil dengan perolehan nilai ekspor diprediksi 3,968 triliun rupiah (deviasi 0,48%) di tahun 2018 dengan outlook meningkat stabil. Sementara itu Investasi dari pendekatan PMTB di tahun 2018 diprediksi tumbuh 6,46% dengan nominal mencapai 3,921 triliun rupiah.

3.2 Tantangan Dan Prospek Perekonomian Kota Magelang Tahun 2019

3.2.1 Tantangan Perekonomian Kota Magelang 2018

Perekonomian Kota Magelang pada tahun 2019 masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong potensi lapangan usaha unggulan dan andalan serta meningkatkan daya saing lokal dalam rangka mendukung pembangunan kawasan strategis agropolitan Semarang Boyong (Semarang-Boyolali-Magelang) yang merupakan salah satu prioritas pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah Kota Magelang dengan perbaikan peraturan perundang-undangan daerah, perbaikan kualitas pelayanan, efektifitas pajak dan penyederhanaan birokrasi.
- c. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas dengan konsep universal design. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan.
- d. Meningkatkan daya saing dan produksi ekspor daerah. Pertumbuhan ekspor akan mempengaruhi keberlangsungan usaha dan perekonomian daerah sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja serta mempersempit celah neraca perdagangan yang selama ini bernilai negatif.
- e. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan variasi infrastruktur yang berkualitas.
- f. Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (seed capital) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (a group lending approach) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kota Magelang.
- g. Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kota Magelang sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama.
- h. Membangun promosi bersama (joint marketing) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.
- i. Mengelola inflasi pada tingkat yang rendah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro sehingga mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan.
- j. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengintegrasikan informasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan penjangkauan riset inovatif sehingga dapat meningkatkan daya saing Kota Magelang dalam menarik atensi investor untuk memperbesar peluang percepatan pertumbuhan ekonomi.

3.2.2 Prospek Perekonomian Kota Magelang Tahun 2019

Berdasar kondisi eksisting perekonomian Kota Magelang tahun 2016 dan prediksi tahun 2017-2018, maka pada tahun 2019 perekonomian Kota Magelang memiliki prospek antara lain:

- a. Dengan menyesuaikan data historis PDRB penyesuaian tahun dasar 2010, pertumbuhan ekonomi Kota Magelang diprediksi tumbuh 5,42% pada rentang 5,02%-5,82% dengan kecenderungan naik. Rentang prediksi ini masih sinergi dengan skenario sasaran makro perekonomian Provinsi Jawa Tengah yang menetapkan pertumbuhan ekonomi untuk Kota Magelang sebesar 5,71% di tahun 2019.
- b. Inflasi diprediksi pada kisaran angka 2,93%-4,51% dengan kecenderungan menurun.
- c. Laju pertumbuhan penduduk diproyeksi mencapai 0,21% (berdasarkan proyeksi kependudukan Kota Magelang tahun 2010-2020 oleh BPS).
- d. PDRB atas dasar harga berlaku diprediksi mencapai 8,688 triliun rupiah (deviasi 0,69%), tumbuh 7,13%.
- e. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku diprediksi sebesar 60,92 juta rupiah per tahun.
- f. Tingkat Pengangguran Terbuka diprediksi mencapai 5,54% (berdasarkan prediksi pada dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kota Magelang 2017-2021).

Beberapa asumsi tersebut diharapkan dapat tercapai selama proses pembangunan. Target dan asumsi akan disesuaikan kembali jika asumsi *ceteris paribus* tidak terpenuhi, terjadi dinamika dan atau perubahan ekstrim pada faktor/variabel eksternal dan atau internal baik di skala global maupun lokal serta terdapat perubahan metode atau formulasi perhitungan indikator baku pada periode yang bersangkutan.

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menitikberatkan pada efektivitas pemerintahan melalui klasifikasi urusan pemerintahan. Sebagaimana tercantum pada pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, Klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari: 1) Urusan pemerintahan absolute yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, 2) Urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, 3) Urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Terkait dengan otonomi daerah, menyebabkan daerah memiliki kesempatan yang besar untuk melaksanakan tujuan pembangunannya berdasarkan lokalitas yang lebih tinggi dan harapan baru mengenai otonomi yang lebih luas, khususnya daerah tingkat kabupaten/kota. Disisi lain, otonomi menimbulkan suatu kebutuhan dana yang besar dan daerah tidak bisa lagi menggantungkan diri sepenuhnya kepada pemerintah pusat, oleh karena itu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai pelimpahan keuangan. Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ekonomi masyarakat setempat.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan sosial budaya masyarakat.
- d. Untuk demokratisasi.

Seiring dengan otonomi daerah, maka semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sistem pengelolaan keuangan, sebagai realisasi dari kebijakan anggaran yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektifitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Dimana Kebijakan Fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah. Kebijaksanaan fiskal pada umumnya bertujuan untuk mencapai kestabilan dalam perekonomian. Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari besaran-besaran belanja dalam APBD.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan fiskal dari pusat ke daerah, maka pemerintah pusat melakukan Kebijakan Desentralisasi Fiskal ke Daerah dengan maksud untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakatserta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan. Pelaksanaan Kebijakan Fiskal juga merupakan salah satu upaya Pemerintah daerah dalam rangka mendapatkan dana-dana untuk

membayai pelaksanaan pembangunan di daerah untuk kemudian dibelanjakan/diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan. Kebijakan desentralisasi fiskal daerah mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas
- b. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja
- c. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decision maker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (OPD)
- d. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ada dua hal penting yang perlu terus dikembangkan secara profesional. Pertama, sistem informasi manajemen keuangan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah. Kedua, pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal seyogyanya menjadikan salah satu pemacu pemerintah Kota Magelang dalam mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan anggaran dalam tahun 2019 di Kota Magelang diarahkan untuk:

1. Melanjutkan konsolidasi fiskal untuk mewujudkan sustainable fiskal daerah.
2. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pusat dan Kebijakan Provinsi.
3. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah, berdasarkan urusan pemerintahan konkuren (urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yg tidak terkait dg pelayanan dasar) yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan per-UU.
4. Pendanaan program dan kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat utk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah inklusif, dan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengoptimalkan pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah.

Strategi-strategi diatas perlu ditindaklanjuti dalam politik anggaran, mulai dari perencanaan, implementasi dan pertanggungjawaban kebijakan fiskal. Hal ini kemudian diikat dalam tanggung jawab sosial antara pemerintah dan DPRD yang perlu dibahas dalam pembahasan dokumen yang lebih detail, termasuk hal yang sangat penting adalah soal realisasi penyerapan anggaran serta akuntabilitas anggaran melalui laporan-laporan pelaksanaan APBD.

3.3.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan kedalam sebagai berikut:

Tabel 3-6
Realisasi dan Prediksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kota Magelang Tahun 2016 - 2020
(dalam Satuan Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2016	PERUBAHAN APBD TAHUN 2017	TAHUN ANGGARAN 2018	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2019	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	220,315,848,525	218,085,185,000	217,823,794,000	231,614,204,000	231,614,204,000
1.1.1	Hasil Pajak daerah	25,974,837,133	29,821,800,000	30,096,800,000	30,684,300,000	30,684,300,000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6,663,308,913	5,422,657,000	4,780,203,000	4,944,048,000	4,944,048,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	6,182,279,953	7,710,904,000	7,458,617,000	9,982,607,000	9,982,607,000
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	181,495,422,703	175,129,824,000	175,488,174,000	186,003,294,000	186,003,294,000
1.2	Dana Perimbangan	567,636,707,545	576,667,228,000	582,806,750,000	579,168,157,000	579,168,157,000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	30,333,059,082	33,063,552,000	29,517,443,000	25,878,850,000	25,878,850,000
1.2.2	DAU	447,909,575,000	440,041,244,000	440,041,244,000	440,041,244,000	440,041,244,000
1.2.3	DAK	89,394,073,463	103,562,432,000	113,248,063,000	113,248,063,000	113,248,063,000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	52,090,070,278	132,893,466,000	82,128,757,000	75,062,175,000	75,062,175,000
1.3.1	Hibah	0	23,985,271,000	16,768,200,000	16,768,200,000	16,768,200,000
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	37,179,177,579	51,494,329,000	47,110,557,000	40,043,975,000	40,043,975,000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	18,250,000,000	18,250,000,000	18,250,000,000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	14,146,495,000	47,039,466,000	0	0	0
1.3.6	Pendapatan Lainnya	764,397,699	10,374,400,000	0	0	0
	PENDAPATAN DAERAH	840,042,626,525	927,645,879,000	882,759,301,000	885,844,536,000	885,844,536,000

Adapun beberapa asumsi yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan Prediksi kemampuan keuangan daerah pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah diperkirakan naik, dengan optimalisasi Penggunaan e-tax (pajak online), Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah out of date menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
2. Pajak Restoran diperkirakan akan naik dengan memperluas tax basis dan melakukan intensifikasi serta ekstensifikasi berupa pengawasan dan monitoring hasil pajak restoran yang memiliki cash register.

3. Pajak Bumi dan Bangunan diperkirakan akan naik dengan adanya 1. Penilaian kembali atas tanah dan bangunan. 2. Verifikasi piutang PBB yang dapat ditagih.
4. Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diperkirakan mengalami kenaikan.
5. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak diasumsikan sebesar 85% dari pagu tahun sebelumnya.
6. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya.
7. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya diasumsikan sebesar 85% dari pagu tahun sebelumnya.

3.3.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penguatan kapasitas fiskal daerah, Pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian keuangan melalui desentralisasi fiskal yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan yang terkait langsung dengan hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting, baik dari sisi pendapatan (revenue), maupun dari sisi pengeluaran (expenditure) agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakatnya masing-masing.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola dirinya sendiri. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus kreatif agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah. Hingga saat ini, pajak dan retribusi masih menjadi andalan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD. Di banyak daerah, kontribusi pajak dan retribusi daerah bisa mencapai lebih dari 50 persen dari PAD. Tidak mengherankan mengapa kemudian pemerintah daerah sangat tertarik pada dua komponen tersebut. sebagai salah satu dampak dari ketertarikan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan. Upaya peningkatan PAD hingga saat ini masih jauh dari optimal dan proporsinya masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan struktur pengeluaran.

Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini pemerintah daerah masih mengandalkan dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 60 persen dari total pendapatan APBD, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (KUD), yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Magelang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, trend kenaikan peran atau kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan tahun 2016 meningkat dan diharapkan tahun-tahun berikutnya akan terus meningkat, akan tetapi posisi terbesar dalam struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber pendapatan dari Dana Perimbangan, sehingga dalam rangka membentuk landasan yang kuat bagi proses konsolidasi fiskal daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kota Magelang selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada. Selama kurun waktu 2013-2017 kemampuan pendapatan daerah sesuai dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Magelang adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3-7
Struktur Pendapatan APBD Pemerintah Kota Magelang
Selama Tahun 2013-2017 (dalam rupiah)

No	Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)
01.	2013	107,739,838,961.00	431,113,288,290.00	95,906,857,889.00	634,759,985,140.00
02.	2014	164,927,631,230.00	459,785,205,171.00	110,403,278,006.00	735,116,114,407.00
03.	2015	186,677,410,081.00	462,804,716,465.00	131,853,672,963.00	781,335,799,509.00
04.	2016	220,315,848,702.00	567,636,707,545.00	52,090,070,278.00	840,042,626,525.00
05.	2017	218,085,185,000.00	576,667,228,000.00	132,893,466,000.00	927,645,879,000.00

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013 – 2016 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2017

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Magelang selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kota Magelang.

Gambaran pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3.3.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1, angka 18 dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 6, ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, Pasal 22, ayat (1), Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- (i) Pajak Daerah;
- (ii) Retribusi Daerah;
- (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), masuk dalam komponen Pendapatan Asli Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa jenis Pajak Daerah kabupaten/kota terdiri atas: (i) Pajak Hotel; (ii) Pajak Restoran; (iii) Pajak Hiburan; (iv) Pajak Reklame; (v) Pajak Penerangan Jalan; (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (vii) Pajak Parkir; (viii) Pajak Air Tanah; (ix) Pajak Sarang Burung Walet; (x) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (xi) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Peranan pajak dan retribusi daerah sangat penting dalam membiayai pembangunan di Kota Magelang, oleh karena itu pemerintah Kota Magelang harus terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Penggalian potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada studi potensi yang sudah dibuat, bekerja sama dengan Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang.
- b. Memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayaran pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- c. Melakukan Penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya pajak bagi pembangunan daerah sehingga secara politis dapat diterima oleh masyarakat, yang kemudian akan menimbulkan motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- d. Memperkuat proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif,

khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.

- e. Melaksanakan tertib administrasi pungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan administrasi harus fleksibel artinya sederhana dan mudah dihitung.
- f. Penggunaan e-tax (Pajak Online) dalam pelayanan pajak daerah, untuk mempercepat, mempermudah dan menyederhanakan prosedur melalui sarana teknologi informasi berbasis "web service" sehingga Wajib pajak dapat mengakses pembayaran pajak dengan mudah, murah dan cepat.
- g. Menyederhanakan prosedur pengelolaan Pajak dan Retribusi menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik/wajib pajak.
- h. Meningkatkan pengawasan, dengan melakukan audit wajib pajak sebagai dasar optimalisasi penerimaan pendapatan melalui laporan keuangan.
- i. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan pajak. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
- j. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kota Magelang.

Pemerintah Kota Magelang dalam melakukan penggalian potensi dan penetapan obyek-obyek pajak baru harus selalu memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang kurang menguntungkan saat ini, disarankan agar pengadaaan pajak dan retribusi baru perlu dipertimbangkan secara hati-hati sehingga tidak menimbulkan gejolak dimasyarakat yang pada gilirannya akan mendistorsi kegiatan perekonomian di Kota Magelang. Penciptaan suatu jenis pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum juga perlu mempertimbangkan ketepatan suatu jenis pajak sebagai pajak daerah, karena pajak daerah yang baik akan mendorong peningkatan pelayanan publik yang pada gilirannya akan meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Magelang.

Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan trend yang cukup positif. Walaupun sumbangan PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun kenaikannya masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dalam APBD secara keseluruhan. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2013-2017 di Kota Megelang, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3-8
Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2013-2017 (dalam Rupiah dan %)

No.	Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)	Proporsi PAD thd Pendapatan APBD (%)
01.	2013	107,739,838,961.00	634,759,985,140.00	16.97

No.	Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)	Proporsi PAD thd Pendapatan APBD (%)
02.	2014	164,927,631,230.00	735,116,114,407.00	22,44
03.	2015	186,677,410,081.00	781,335,799,509.00	23,89
04.	2016	220,315,848,702.00	840,042,626,525.00	26,22
05.	2017	218,085,185,000.00	927,645,879,000.00	23,50

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013 - 2016 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang perubahan APBD Kota Magelang TA. 2017

Gambaran secara rinci obyek PAD berdasarkan kontribusi obyek pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-9
Kontribusi Pajak Terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2013-2017 (dalam Rupiah dan %)

No.	Tahun	Pajak (Rp)	PAD (Rp)	Proporsi Pajak thd PAD (%)
01.	2013	18,829,673,340.00	107,739,838,961.00	17,48
02.	2014	22,107,435,949.00	164,927,631,230.00	13,40
03.	2015	26,185,301,675.00	186,677,410,081.00	14,02
04.	2016	25,974,837,133.00	220,315,848,702.00	11,78
05.	2017	29,821,800,000.00	218,085,185,000.00	13,67

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2017 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2017

Tabel 3-10
Kontribusi Retribusi Terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2013-2017 (dalam Rupiah dan %)

No.	Tahun	Retribusi (Rp)	PAD (Rp)	Proporsi Retribusi thd PAD (%)
01.	2013	7,357,207,773.00	107,739,838,961.00	6,83
02.	2014	6,058,580,948.00	164,927,631,230.00	3,67
03.	2015	6,999,474,592.00	186,677,410,081.00	3,74
04.	2016	6,663,308,913.00	220,315,848,702.00	3,02
05.	2017	5,422,657,000.00	218,085,185,000.00	2,48

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2016 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2017

Tabel 3-11
Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013-2017 (dalam Rupiah dan %)

No.	Tahun	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (Rp)	PAD (Rp)	Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan thd PAD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	2013	5,872,500,274.00	107,739,838,961.00	5,45
02.	2014	6,242,609,307.00	164,927,631,230.00	3,79
03.	2015	6,598,774,537.00	186,677,410,081.00	5,53
04.	2016	6,182,279,953.00	220,315,848,702.00	2,80
05.	2017	7,710,904,000.00	218,085,185,000.00	3,53

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2016 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2017

Tabel 3-12
Kontribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2013-2017 (dalam Rupiah dan %)

No.	Tahun	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Rp)	PAD (Rp)	Proporsi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah thd PAD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	2013	75,680,457,574.00	107,739,838,961.00	70,24
02.	2014	130,519,005,026.00	164,927,631,230.00	79,14
03.	2015	146,893,859,277.00	186,677,410,081.00	78,68
04.	2016	181,495,422,703.00	220,315,848,702.00	82,37
05.	2017	175,129,824,000.00	218,085,185,000.00	80,30

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2016 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2017

Pajak Daerah menduduki posisi yang paling penting peranannya dalam membiayai pembangunan di Kota Magelang, meskipun yang memberikan kontribusi paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, namun sebagian besar merupakan pendapatan BLUD yang penggunaannya adalah untuk operasional BLUD itu sendiri. Oleh karena itu Peran Pajak Daerah di Kota Magelang terhadap PAD idealnya semakin tahun semakin membaik, karena Kota Magelang sebagai daerah perkotaan mengandalkan jasa sebagai salah satu sumber penghasil PAD. Jika dilihat dari realisasi pendapatan Pajak Daerah di Kota Magelang selama lima tahun terakhir cenderung mengalami perkembangan yang cukup baik. Selama tahun 2013-2017 tingkat kontribusinya mengalami

fluktuasi (naik dan turun), pada tahun 2013 kontribusinya mengalami kenaikan, akan tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan, diharapkan tahun-tahun berikutnya akan naik kembali, baik besarnya maupun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3.3.2.2 Dana Perimbangan

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena dana perimbangan merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan antar Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan APBD selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2016) rata-rata berkisar 60 - 70 persen dari total Pendapatan Daerah. Data selengkapnya adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-13
Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013-2017 (dalam rupiah dan %)

No.	Tahun	Dana Perimbangan (Rupiah)	Pendapatan APBD (Rupiah)	Proporsi Dana Perimbangan thd Pendapatan APBD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2013	431,113,288,290.00	634,759,985,140.00	67,92
02.	2014	459,785,205,171.00	735,116,114,407.00	62,55
03.	2015	462,804,716,465.00	781,335,799,509.00	59,23
04.	2016	567,636,707,545.00	840,042,626,525.00	67,57
05.	2017	576,667,228,000.00	927,645,879,000.00	62,16

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2016 merupakan realisasi anggaran.
6. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA 2017

Gambaran Dana Perimbangan berdasarkan Kontribusi Obyek Pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-14
Kontribusi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Dana Perimbangan Tahun 2013-2017 (dalam rupiah dan %)

No.	Tahun	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (Rupiah)	Dana Perimbangan (Rupiah)	Proporsi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Thd Dana Perimbangan (%)
01.	2013	24,609,560,290.00	431,113,288,290.00	5,71
02.	2014	20,207,973,171.00	459,785,205,171.00	4,40
03.	2015	18,772,034,465.00	462,804,716,465.00	4,05

No.	Tahun	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (Rupiah)	Dana Perimbangan (Rupiah)	Proporsi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Thd Dana Perimbangan (%)
04.	2016	30,333,059,082.00	567,636,707,545.00	5,34
05.	2017	33,063,552,000.00	576,667,228,000.00	5,73

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2016 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA 2017

Tabel 3-15
Kontribusi Dana Alokasi Umum
terhadap Dana Perimbangan Tahun 2013-2017
(dalam rupiah dan persen)

No.	Tahun	Dana Alokasi Umum (Rupiah)	Dana Perimbangan (Rupiah)	Proporsi Dana Alokasi Umum Thd Dana Perimbangan (%)
01.	2013	385,859,241,000.00	431,113,288,290.00	89,50
02.	2014	417,211,449,000.00	459,785,205,171.00	90,74
03.	2015	418,257,922,000.00	462,804,716,465.00	90,37
04.	2016	447,909,575,000.00	567,636,707,545.00	78,90
05.	2017	440,041,244,000.00	576,667,228,000.00	76,30

Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan
Tahun 2012-2016 (dalam rupiah dan %)

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2016 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA 2017

Tabel 3-16
Kontribusi Dana Alokasi Khusus
terhadap Dana Perimbangan Tahun 2013-2017
(dalam rupiah dan %)

No.	Tahun	Dana Alokasi Khusus (Rupiah)	Dana Perimbangan (Rupiah)	Proporsi Dana Alokasi Khusus Thd Dana Perimbangan (%)
01.	2013	20,644,487,000.00	431,113,288,290.00	4,79
02.	2014	22,365,783,000.00	459,785,205,171.00	4,86
03.	2015	25,774,760,000.00	462,804,716,465.00	5,56
04.	2016	89,394,073,463.00	567,636,707,545.00	15,74

No.	Tahun	Dana Alokasi Khusus (Rupiah)	Dana Perimbangan (Rupiah)	Proporsi Dana Alokasi Khusus Thd Dana Perimbangan (%)
05.	2017	103,562,432,000.00	576,667,228,000.00	17,95

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2016 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA 2017

3.3.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Magelang bersumber dari:

- (i) Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah),
- (ii) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (Bagian dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagian dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagian dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bagian dari Pajak Air Bawah Tanah (ABT), Bagian dari Pajak Air Permukaan (AP), Terakhir Bagian dari Retribusi Dispensasi kelebihan muatan dan Pemerintah Daerah Lainnya;
- (iii) Dana Penyesuaian; dan
- (iv) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima Pemerintah Kota Magelang masih relatif kecil, akan tetapi keberadaannya sangat menunjang / mendukung kemampuan pendanaan bagi Kota Magelang. Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyesuaian program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/kontijensi serta penerimaan lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan ditetapkan pengukurannya oleh provinsi.

Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap pendapatan APBD di Kota Magelang selama kurun waktu tahun 2013 – 2016 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan APBD yang mengalami kenaikan. Selanjutnya pada tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup tajam, hal ini dikarenakan Tunjangan Profesi Guru yang semula pendapatannya masuk dana penyesuaian dan otonomi khusus pada Lain-lain pendapatan daerah yang sah, pada tahun 2016 masuk Dana Alokasi Khusus pada Dana Perimbangan. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

:Tabel 3-17

Jumlah Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013-2017 (dalam rupiah dan %)

No.	Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Pendapatan APBD (Rupiah)	Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah terhadap Pendapatan APBD (%)
01.	2013	95,906,857,889.00	634,759,985,140.00	15.11

No.	Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Pendapatan APBD (Rupiah)	Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah terhadap Pendapatan APBD (%)
02.	2014	110,403,278,006.00	735,116,114,407.00	15,02
03.	2015	131,853,672,963.00	781,335,799,509.00	16,87
04.	2016	52,090,070,278.00	840,042,626,525.00	6,20
05.	2017	132,893,466,000.00	927,645,879,000.00	14,32

- Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2016 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2017

Gambaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berdasarkan Kontribusi Obyek Pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-18
Kontribusi Pendapatan Hibah
Terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Pendapatan Hibah (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Proporsi Pendapatan Hibah terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
01.	2013	0.00	95,906,857,889.00	0,00
02.	2014	0.00	110,403,278,006.00	0,00
03.	2015	0.00	131,853,672,963.00	0,00
04.	2016	0.00	52,090,070,278.00	0,00
05.	2017	23,985,271,000.00	132,893,466,000.00	18,04

- Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2016 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2017

Tabel 3-19
Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya
Terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2012-2016 (dalam rupiah dan %)

No.	Tahun	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Proporsi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
01.	2013	19,546,928,516.00	95,906,857,889.00	20,38
02.	2014	26,421,159,000.00	110,403,278,006.00	23,93
03.	2015	36,869,367,174.00	131,853,672,963.00	27,96

No.	Tahun	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Proporsi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
04.	2016	37,179,177,579.00	52,090,070,278.00	71,37
05.	2017	51,494,329,000.00	132,893,466,000.00	38,74

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2016 merupakan realisasi anggaran.
3. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2017

Tabel 3-20
Kontribusi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2013-2017 (dalam rupiah dan %)

No.	Tahun	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan yang Daerah Sah (Rupiah)	Proporsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2013	63,049,373,000.00	95,906,857,889.00	65,74
02.	2014	74,974,179,000.00	110,403,278,006.00	67,91
03.	2015	79,988,204,000.00	131,853,672,963.00	60,66
04.	2016	0.00	52,090,070,278.00	0,00
05.	2017	0.00	132,893,466,000.00	0,00

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2016 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2017

Tabel 3-21
Kontribusi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
Terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Proporsi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
01.	2013	13,310,556,373.00	95,906,857,889.00	13,88
02.	2014	9,007,940,006.00	110,403,278,006.00	8,16
03.	2015	14,964,620,257.00	131,853,672,963.00	11,34
04.	2016	14,146,495,000.00	52,090,070,278.00	27,15

No.	Tahun	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Proporsi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
05.	2017	47,039,466,000.00	132,893,466,000.00	35,39

Tabel 3-22
Kontribusi Pendapatan Lainnya
Terhadap Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Pendapatan Lainnya (Rupiah)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rupiah)	Proporsi Pendapatan Lainnya terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2013	0,00	95,906,857,889.00	0,00
02.	2014	0.00	110,403,278,006.00	0.00
03.	2015	31,481,532.00	131,853,672,963.00	0,02
04.	2016	764,397,699.00	52,090,070,278.00	1,46
05.	2017	0.00	132,893,466,000.00	0,00

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2016 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2017

Dari berbagai pertimbangan di atas, prediksi Pendapatan Daerah di Kota Magelang selama kurun waktu 2017-2020, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3-23
Realisasi dan Prediksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kota Magelang Tahun 2016 - 2020
(dalam Satuan Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2016	PERUBAHAN APBD TAHUN 2017	TAHUN ANGGARAN 2018	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2019	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2020
1.1	Pendapatan Asli Daerah	220,315,848,525	218,085,185,000	217,823,794,000	231,614,204,000	231,614,204,000
1.1.1	Hasil Pajak daerah	25,974,837,133	29,821,800,000	30,096,800,000	30,684,300,000	30,684,300,000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6,663,308,913	5,422,657,000	4,780,203,000	4,944,048,000	4,944,048,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	6,182,279,953	7,710,904,000	7,458,617,000	9,982,607,000	9,982,607,000
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	181,495,422,703	175,129,824,000	175,488,174,000	186,003,294,000	186,003,294,000
1.2	Dana Perimbangan	567,636,707,545	576,667,228,000	582,806,750,000	579,168,157,000	579,168,157,000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	30,333,059,082	33,063,552,000	29,517,443,000	25,878,850,000	25,878,850,000
1.2.2	DAU	447,909,575,000	440,041,244,000	440,041,244,000	440,041,244,000	440,041,244,000
1.2.3	DAK	89,394,073,463	103,562,432,000	113,248,063,000	113,248,063,000	113,248,063,000

1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	52,090,070,278	132,893,466,000	82,128,757,000	75,062,175,000	75,062,175,000
1.3.1	Hibah	0	23,985,271,000	16,768,200,000	16,768,200,000	16,768,200,000
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	37,179,177,579	51,494,329,000	47,110,557,000	40,043,975,000	40,043,975,000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	18,250,000,000	18,250,000,000	18,250,000,000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	14,146,495,000	47,039,466,000	0	0	0
1.3.6	Pendapatan Lainnya	764,397,699	10,374,400,000	0	0	0
	PENDAPATAN DAERAH	840,042,626,525	927,645,879,000	882,759,301,000	885,844,536,000	885,844,536,000

Mendasarkan capaian kinerja pendapatan daerah Tahun 2011-2016, maka pendapatan sampai dengan tahun 2020 diharapkan dapat meningkat lebih tinggi. Kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi system pajak on line dengan menambahkan peralatan berupa tapping box (alat perekam transaksi) atau instrument lain yang dapat digunakan untuk merekam trnsaksi dalam rangka meminimalisir penyimpangan data transaksi oleh wajib pajak daerah.
- b. Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemeriksaan (audit) terhadap laporan keuangan wajib pajak daerah. Sehingga apabila ditemukan kekurangan bayar pajak daerah akan segera dikeluarkan Surat Ketetapan Kurang Bayar kepada wajib pajak.
- c. Penegakkan law enforcement berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayarannya.
- d. Optimalisasi SDM pajak daerah (fiskus) melalui diklat pajak daerah, yaitu lanjutan diklat audit pajak dan pemeriksaan pajak maupun diklat yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas SDM perpajakan.
- e. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah.
- f. Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah out of date menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
- g. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) penghasil lain dan BUMD untuk optimalisasi pendapatan daerah.
- h. Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka optimalisasi penerimaan dari PBB perdesaan dan perkotaan.
- i. Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang PBB yang masih ada tunggakan.
- j. Penerapan konsep "Ear marking" dalam pendapatan daerah dimana setiap pungutan dari masyarakat (Pajak Daerah, Retribusi Daerah) akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan secara menyeluruh di Kota Magelang.

3.3.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Pengelolaan Belanja Daerah memiliki ciri; hemat, tepat guna dan tepat sasaran, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap OPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

3.3.3.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, Kota Magelang tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.

- c. Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, pemerintah daerah hendaknya melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran. Dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, maka pemerintah Kota Magelang tidak menganggarkan belanja subsidi.
- d. Belanja Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- e. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- f. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki. Pemerintah Kota tidak menganggarkan Belanja Bagi Hasil.
- g. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan/ pemerintah desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah pemerintah kelurahan/pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan di kelurahan/desa. Pemerintah Kota Magelang tidak menempuh pemberian belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.
- h. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

3.3.3.2 Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai; merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- b. Belanja barang dan jasa; merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja ini merupakan pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Yang termasuk dalam kategori belanja barang/jasa adalah Belanja Pengadaan barang/jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.
- c. Belanja modal; merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila :
 1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan asset tetap atau asset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.
 2. pengeluaran tersebut melebihi minimum kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
 3. perolehan asset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
 4. pengeluaran tersebut dilakukan sesudah perolehan asset tetap atau asset lainnya dengan syarat pengeluaran mengakibatkan masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume asset yang dimiliki bertambah serta pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi asset tetap/asset lainnya.

Gambaran perkembangan Belanja Daerah di Kota Magelang Tahun 2013-2017, selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3-24
Struktur Belanja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013-2017 (dalam rupiah dan %)

No.	Tahun	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Belanja APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) + (4))
01.	2013	313,072,355,985.00	317,778,361,372.00	630,850,717,357.00
02.	2014	340,526,165,129.00	341,697,705,278.00	682,223,870,407.00
03.	2015	357,657,431,281.00	378,683,006,469.00	736,340,437,750.00
04.	2016	350,201,266,658.00	521,657,863,945.00	871,859,130,603.00
05.	2017	380,992,740,000.00	694,630,381,000.00	1,075,623,121,000.00

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2016 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang perubahan APBD Kota Magelang TA. 2017

Proporsi belanja pegawai cukup besar terhadap total belanja, hal ini disebabkan karena kemampuan pendanaan yang terbatas tidak dapat mengimbangi kebijakan kenaikan belanja pegawai baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3-25
Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2013-2017 (dalam rupiah dan %)

No.	Tahun	Belanja Pegawai (Rupiah)	Total Belanja (Rupiah)	Persentase Belanja Pegawai thd Total Belanja (%)
02.	2013	304,116,683,985.00	630,850,717,357.00	48,21
03.	2014	333,318,007,729.00	682,223,870,407.00	48,86
04.	2015	345,555,340,681.00	736,340,437,750.00	46,92
05.	2016	344,173,396,158.00	871,859,130,603.00	39,47
06.	2017	341,922,387,000.00	1,075,623,121,000.00	31,78

Sumber : 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2013-2016 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang perubahan APBD Kota Magelang TA. 2017

Penganggaran Belanja langsung terbagi dalam 2 (dua) urusan, yaitu: Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam menjalankan Urusan Wajib, daerah diminta untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sedangkan Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah (core competence), serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Gambaran Prediksi Belanja di Kota Magelang selama kurun waktu 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3-26
Realisasi dan Prediksi Belanja Daerah Dalam APBD Kota Magelang Tahun 2016 - 2020
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2016	PERUBAHAN APBD TAHUN 2017	TAHUN ANGGARAN 2018	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2019	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2020
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	350,201,266,658	380,992,740,000	326,136,404,000	389,186,199,000	389,186,199,000
	Belanja Pegawai	344,173,396,158	341,922,387,000	310,620,578,000	327,260,301,000	327,260,301,000
	Belanja Bunga	0				

Belanja Subsidi	0				
Belanja Hibah	1,486,806,000	9,902,833,000	9,181,194,000	52,865,195,000	52,865,195,000
Belanja Bantuan Sosial	3,192,264,000	5,834,156,000	3,556,255,000	6,000,000,000	6,000,000,000
Belanja Bantuan Keuangan	641,828,500	560,703,000	560,703,000	560,703,000	560,703,000
Belanja Tak Terduga	706,972,000	22,772,661,000	7,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000
2.2 BELANJA LANGSUNG	521,657,863,945	694,630,381,000	643,080,477,000	579,801,337,000	579,801,337,000
BELANJA DAERAH	871,859,130,603	1,075,623,121,000	969,216,881,000	968,987,536,000	968,987,536,000
Surplus/Defisit	-31,816,504,078	-147,977,242,000	-86,457,580,000	-83,143,000,000	-83,143,000,000

Pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (input) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang tahun 2018 masih tetap diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung per-tumbuhan ekonomi Kota Magelang dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.
3. Tolok Ukur dan Target Kinerja. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) OPD.
4. Optimalisasi Belanja Langsung. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
5. Transparan dan Akuntabel. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Selain arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang secara umum seperti yang disebutkan di atas, pada tahun 2019 juga akan ditempuh kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

1. Membiayai Program dan Kegiatan yang Menjadi Prioritas Kota Magelang;
2. Membiayai Program dan Kegiatan yang Mendukung Tercapainya Visi dan Misi Walikota Magelang;
3. Memenuhi Pelaksanaan Program Prioritas Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang Harus Dilaksanakan;
4. Memenuhi Pelaksanaan Program yang Berstandar Pelayanan Minimal dan Operasional;
5. Mengedepankan Program-program yang menunjang Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Penyediaan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan;
6. Belanja Yang Bersifat Wajib dan Mengikat Guna menjamin Kelangsungan Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat;
7. Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Total Belanja Daerah;
8. Alokasi Belanja Urusan Kesehatan Minimal 10% dari Total Belanja APBD diluar Gaji Mematuhi Ketentuan Penggunaan Transfer ke Daerah Yang Penggunaannya Bersifat Umum untuk Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Minimal 25% dari DAU dan DBH setelah dikurangi 10% Alokasi Dana Desa (ADD). Belanja Infrastruktur Daerah merupakan Belanja yang Langsung terkait dengan Percepatan Pembangunan Fasilitas Pelayanan Publik dan Ekonomi dalam Rangka Meningkatkan Kesempatan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Mengurangi Kesenjangan Penyediaan Pelayanan Publik antar Daerah yang dihitung dari Total Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan namun tidak termasuk Belanja Modal dan Pemeliharaan untuk Aparatur seperti Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Gedung Pemerintahan yang Fungsi Utamanya untuk Pelayanan Administrasi dan Kendaraan Dinas.
9. Mematuhi Pelaksanaan Penggunaan Transfer ke Daerah yang sudah ditentukan Penggunaannya sesuai dengan Peraturan dan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan seperti DBHCHT, Dana Transfer Khusus dan Dana Otonomi Khusus.
10. Pelaksanaan Bantuan Keuangan dan Dana Bagi Hasil dari Provinsi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
11. Mengupayakan Percepatan Pelaksanaan Belanja Daerah agar tidak menumpuk di akhir Tahun Anggaran sebagai Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2016 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam Bentuk Nontunai yang bertujuan untuk mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien, dan efektif, mendorong penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu, dan mengurangi uang kas dan/atau simpanan Pemerintah Daerah di Bank dalam jumlah tidak wajar.

3.3.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
6. Penerimaan Piutang Daerah;
7. Penerimaan Dana Bergulir; dan
8. Penerimaan Hasil Penarikan

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui:

1. Pembentukan dana cadangan;
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
3. Pembayaran pokok utang; dan
4. Pemberian pinjaman daerah;
5. Pemberian Dana Bergulir.

Gambaran realisasi dan prediksi Pembiayaan Daerah di Kota Magelang selama kurun waktu 2016 -2018 dan prediksi 2019-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3-27
Realisasi dan Prediksi Pembiayaan Daerah Dalam APBD Kota Magelang
Tahun 2016-2020 (dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2016	PERUBAHAN APBD TAHUN 2017	TAHUN ANGGARAN 2018	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2019	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2020
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	201,248,404,030	165,144,899,000	107,520,354,000	103,728,000,000	103,728,000,000
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sblmnya	201,227,094,865	162,344,899,000	103,642,354,000	100,000,000,000	100,000,000,000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		0			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah					
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah					
3.1.7	Penerimaan Dana Bergulir	21,309,165	150,000,000	150,000,000	0	0

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2016	PERUBAHAN APBD TAHUN 2017	TAHUN ANGGARAN 2018	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2019	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2020
3.1.8	Penerimaan Hasil Penarikan		2,650,000,000	3,728,000,000	3,728,000,000	3,728,000,000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7,078,000,000	17,167,657,000	21,062,774,000	20,585,000,000	20,585,000,000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		3,000,000,000			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7,078,000,000	14,167,657,000	21,062,774,000	20,585,000,000	20,585,000,000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang					
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah					
3.2.5	Pemberian Dana Bergulir					
	Pembiayaan netto	194,161,404,030	147,977,242,000	86,457,580,000	83,143,000,000	83,143,000,000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	162,344,899,952	0	0	0	0

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Magelang untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang untuk tahun 2019 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.
- c. Optimalisasi Penerimaan Investasi Daerah dari Dana Bergulir.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Magelang selama tahun 2019 diarahkan untuk Meningkatkan performance dan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara Bertahap. Penyertaan Modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Selain Penyertaan Modal kepada BUMD, Pemerintah Kota Magelang menempatkan modal disetor ke dalam PT. Bank Jateng guna meningkatkan struktur permodalan dan meningkatkan sharing kepemilikan saham Pemerintah Kota Magelang pada PT. Bank Jateng sehingga deviden yang diterima Pemerintah Kota Magelang tidak mengalami penurunan.

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Visi Misi Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Jangka Menengah

4.1.1 Visi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

RKPD Kota Magelang Tahun 2019 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Kota Magelang Tahun Ketiga, yaitu tahun perencanaan 2018 untuk dilaksanakan pada tahun 2019. Visi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah :

“MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS”.

Makna yang termuat dalam Visi tersebut adalah :

Visi Pembangunan Kota Magelang ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Magelang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Magelang sebagai kota jasa yang modern dan cerdas sekaligus masyarakat yang sejahtera dan religius. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4-1
Penjelasan Visi

UNSUR VISI	PENJELASAN
Kota Jasa yang Modern dan Cerdas	<p>Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan.</p> <p>Modern adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan jaman, yang berarti suatu kondisi lebih maju daripada daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada. Kota modern adalah kota yang mampu menyelaraskan sosial, fisik, dan ekonomi dengan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota tersebut, dengan karakteristik: (a) Masyarakat sejahtera dalam financial; (b) Kota terdepan dalam pelayanan (kota modern menyediakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan para pengguna kota atau masyarakat umum); (c) Visual kota mengundang pesona (kota modern dapat dilihat dari fisiknya, secara visual kota terlihat tertata, menarik, mengundang kenyamanan untuk tinggal dan berkarya).</p> <p>Kota cerdas adalah kota yang dikelola secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan konektivitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi yang dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah. Unsur-unsur Kota Cerdas: (1) Smart Governance yaitu: pengembangan e-governance, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; (2) Smart infrastructure yaitu: pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT; (3) Smart Economy, yaitu: pengembangan city branding, pengembangan kewirausahaan, pengembangan e-commerce, dan ekonomi kreatif; (4) Smart environment yaitu: pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis IT, pemanfaatan sumber energi terbarukan; (5) Smart people yaitu: pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dan dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat; serta (6) Smart Living yaitu: kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media, dan kemudahan akses terhadap jaminan keamanan.</p>
Sejahtera	<p>Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan dan pemantapan upaya menyejahterakan masyarakat secara adil merata tanpa diskriminasi melalui: (1) Optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (2) Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (3) Tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri.</p>
Religius	<p>Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan ketaqwaan kepada ketuhanannya dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dalam masyarakat religius dijamin kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan kecukupan ketersediaan tempat ibadah.</p>

Sumber : RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

4.1.2 Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini mengarahkan pada upaya peningkatan kualitas, profesionalitas, integritas, produktivitas, responsifitas, dan etos kerja aparatur di jajaran Pemerintah Kota Magelang dengan cara melaksanakan reformasi birokrasi secara berkesinambungan yang mencakup: (a) Organisasi (Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*)); (b) Tatalaksana (Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*); (c) Peraturan Perundang-undangan (Regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan); (d) Sumber daya manusia aparatur (SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera); (e) Pengawasan (Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN); (f) Akuntabilitas (Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi); (g) Pelayanan Publik (Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha); dan (h) Pola pikir (*mindset*) dan Budaya Kerja (*culture set*) (Aparatur Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi sesuai dengan bahasa budaya kerja).

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi (penggunaan internet) di lingkungan pemerintah dan masyarakat, maka upaya reformasi birokrasi juga harus disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana teknologi sebagai alat untuk memperlancar dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah di Kota Magelang. Pengembangan dan aplikasi E-Government melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah (seperti *Wide Area Network*, *Internet*, *Mobile Computing*, dan sebagainya) sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan guna mendukung jalannya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Dengan pemanfaatan TI akan memungkinkan pemerintah untuk: (a) mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak yang berkepentingan dalam suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, tepat, bersifat transparan, akuntabel, dan bebas korupsi (*Good Corporate Governance*); (b) memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja, efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan; dan (c) mengurangi secara signifikan total biaya administrasi relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.

Pada aspek organisasi perlu dilakukan langkah-langkah penguatan yang meliputi: struktur organisasi, prosedur dan mekanisme pekerjaan, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan dan jaringan organisasi. Selain itu, perlu pula dilakukan pembenahan terhadap sistem, yang terdiri dari: kerangka kerja yang berhubungan dengan peraturan, kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu. Juga diperlukan komitmen bersama (*collective commitments*) yang mencakup seluruh komponen yang ada dalam organisasi tersebut. Pengaruh komitmen bersama sangat besar, karena faktor ini menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan dan tujuan yang akan dicapai bersama; dan kepemimpinan yang kondusif (*condusif leadership*), kepemimpinan yang kondusif merupakan kepemimpinan yang dinamis yang membuka kesempatan luas bagi setiap elemen organisasi yang dapat menyelenggarakan suatu pengembangan kapasitas dan reformasi keputusan.

Dengan dukungan partisipasi masyarakat, pada giliran berikutnya, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik yang mampu untuk memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya, serta memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Dalam perspektif ini, good corporate governance juga akan mengarahkan kepada pengembangan inovasi daerah dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Setidaknya terdapat 4 (empat) kategori inovasi, yakni: (1) tata kelola pemerintahan; (2) pelayanan publik; (3) pemberdayaan masyarakat; dan (4) peningkatan daya saing daerah.

2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana perkotaan dan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan lainnya secara lebih modern akan dilakukan disertai dengan langkah-langkah inovasi dan kreatifitas dalam mengefektifkan dan mengefisienkan sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menjamin adanya kesehatan lingkungan, mampu mensinergikan lingkungan alami dan buatan, dan pelibatan aktif masyarakat sebagai "komunitas hijau", dengan mendasarkan kepada perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (lingkungan, sosial, dan ekonomi). Misi ini mengamanatkan adanya pengelolaan isu lingkungan hidup, sosial-budaya, dan ekonomi dapat ditangani dengan seimbang, sehingga pertumbuhan kota dapat terkendali dan tertata dengan baik dengan pelibatan partisipasi masyarakat dan seluruh stakeholder. Kesadaran masyarakat akan pentingnya peran ruang tata hijau dan penerapan gaya hidup ramah lingkungan demi keberlangsungan sebuah kota perlu terus ditingkatkan melalui sosialisasi oleh pemerintah dan komunitas. Masyarakat dan pemerintah harus dapat berjalan beriringan dan memiliki visi yang sama dalam pelestarian lingkungan.

3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur perkotaan menjadi faktor utama untuk mendukung keberlangsungan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pada misi ini, pemenuhan ketersediaan infrastruktur perkotaan di seluruh wilayah Kota Magelang, baik yang berlokasi di jantung kota, pinggir kota maupun terutama di lokasi-lokasi sekitar perbatasan dengan Kabupaten Magelang merupakan hal sangat urgen demi terpenuhinya aspek pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari pembangunan adalah kemakmuran bersama, maka dari itu pemerataan pendapatan (redistribusi pendapatan/ distribution of income) menjadi hal yang krusial untuk dilakukan pemerintah agar pendapatan masyarakat terbagi semerata mungkin diantara warga masyarakat. Pengertian merata di sini tidak berarti bahwa semua warga masyarakat pendapatannya dibuat sama, tetapi kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk memperoleh pendapatan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan dan kecemburuan sosial yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas daerah.

Selain penyediaan infrastruktur, upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilakukan antara lain dengan cara: (a) Pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah; (b) kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas; (c) padat karya dan pengembangan usaha atau industri kecil; (d) bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program corporate social responsibility (CSR), sehingga golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan, bukan segelintir pengusaha yang mendapat perlakuan khusus (corner of privilege); dan sebagainya.

Lebih dari itu, pembangunan ekonomi daerah harus diarahkan untuk: (a) mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial; (b) memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri; (c) berbasis kerakyatan dan kekeluargaan; (d) koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat; (e) menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan dalam bidang ekonomi adalah satu keadaan atau situasi di mana setiap orang (tanpa diskriminasi) memperoleh apa yang menjadi haknya. Ini lantas berarti bahwa keadilan dalam bidang ekonomi adalah perlakuan yang adil bagi setiap orang untuk mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasi golongan miskin merupakan modal awal, sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Kota Magelang. Semua itu dilakukan secara berkesinambungan (sustainable) dan diupayakan mereduksi dan mengeliminasi adanya dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.

4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.

Misi ini mengarahkan pada upaya pelestarian budaya dan kesenian tradisional daerah secara berkelanjutan, sekaligus juga mencakup langkah-langkah penggalian dan pengembangan budaya kreatif dan kesenian kontemporer sesuai dengan perkembangan zaman sebagai salah satu potensi kekayaan dan keanekaragaman pariwisata di Kota Magelang. Termasuk dalam kaitan ini adalah industri kreatif dan inovatif yang tengah marak berkembang di Kota Magelang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang telah merasuk ke hampir seluruh relung sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Pengembangan dalam rangka pelestarian budaya dan kesenian merupakan gerakan sosial dan moral yang dilakukan oleh segenap pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk menumbuhkembangkan kembali budaya daerah dalam rangka mewujudkan identitas dan jatidiri yang bermartabat. Berkembangnya kebudayaan daerah dapat menumbuhkan kearifan lokal dan memperkaya peradaban umat manusia. Terpeliharanya khazanah sejarah dan budaya akan berkontribusi kepada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perjuangan dan tanggung jawab masa depannya. Dalam konteks pembangkitan spiritualitas masyarakat, perlu dibangun cara pandang bahwa pariwisata merupakan jendela mensyukuri nikmat Tuhan, pusat-pusat keagamaan dapat menjadi obyek kunjung yang memiliki daya tarik, dan upacara-upacara keagamaan sebagai atraktif yang dapat mengundang pesona.

Upaya pemberdayaan budaya dan kesenian dapat disarikan antara lain: (a) Meningkatkan pengelolaan kebudayaan daerah meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya untuk peningkatan kualitas hidup; (b) Meningkatkan industri dan karya budaya yang mengacu pada nilai-nilai luhur budaya bangsa; (c) Meningkatkan daya internalisasi dan penerapan nilai luhur budaya bangsa dalam perilaku masyarakat; (d) Mengikuti event-event regional, nasional, dan internasional dalam rangka memupuk persahabatan dan promosi kebudayaan; (e) Meningkatkan penelitian dan pengembangan serta pengembangan sistem informasi kebudayaan; dan (f) Mengembangkan SDM bidang kebudayaan dan kepariwisataan serta sumber daya budaya itu sendiri. Sementara itu, pengembangan industri kreatifitas masyarakat dalam berbagai segi kehidupan diarahkan kepada upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan sanggar-sanggar seni budaya, bermunculannya pusat-pusat kerajinan tangan, berkembangnya dapur-dapur kreatif yang membuat aneka jenis makanan daerah dan tradisional, terciptanya suasana yang kondusif bagi kreatifitas kaum muda yang kreatif, dan terbinanya berbagai keahlian yang menopang langsung terhadap perkembangan pariwisata

Dalam perspektif ini, maka pariwisata (seni budaya daerah) dan industri kreatif bisa dijadikan sebagai unsur utama perekonomian daerah, apalagi bila kita ingin mengembangkan industri pariwisata sebagai alat dukung untuk

meningkatkan harkat dan martabat daerah di tengah pergaulan di tingkat regional, nasional, dan dunia internasional yang memiliki daya saing.

5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Secara umum toleransi umat beragama di Kota Magelang telah berjalan dengan baik. Sikap tenggang rasa yang berarti rukun dan tidak menyimpang dari aturan dimana seseorang harus saling menghargai dan saling menghormati antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya sudah menjadi salah satu karakter masyarakat Kota Magelang. Toleransi beragama sangat diperlukan pada kehidupan sehari-hari untuk menjalin hubungan yang harmonis, rukun dan sejahtera. Modal sosial kerukunan antara umat beragama itu harus dijaga dan dipelihara, serta ditingkatkan intensitasnya sehingga bisa memberi sumbangan yang lebih nyata bagi kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan daerah di Kota Magelang.

Misi ini mengarahkan pada langkah-langkah guna memupuk dan memperkuat jiwa toleransi beragama dan membudidayakan hidup rukun antar umat beragama melalui sikap dan tindakan seperti: (1) Menonjolkan segi-segi persamaan dalam agama; tidak memperdebatkan segi-segi perbedaan agama; (2) Melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama yang berbeda; (3) Meningkatkan pembinaan individu yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur dan akhlakul karimah; (4) Dalam pergaulan sosial, menghindari jauh-jauh sikap egoisme dan fanatisme dalam beragama sehingga menyalahkan pemeluk agama atau penganut kepercayaan yang lain; (5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan; dan (6) Peningkatan sarana-prasarana peribadatan. Terlebih, guna meredam radikalisme yang mengatasnamakan agama (termasuk terorisme), dalam toleransi beragama perlu diadakannya dialog dengan cendekiawan dan para tokoh agama dan merangkul mereka untuk melakukan reinterpretasi atas doktrin-doktrin keagamaan ortodoks yang sementara ini dijadikan dalih untuk bersikap eksklusif sehingga konsep multikulturalisme dapat diterima dengan baik di tengah masyarakat.

Sikap toleransi dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat dalam suasana kehidupan yang harmonis, rukun dan sejahtera merupakan pijakan untuk mewujudkan masyarakat madani akan mengarahkan kepada sikap dan perilaku yang saling menjaga keseimbangan untuk menegakkan hukum yang sehat dan demokrasi guna mewujudkan stabilitas dan kondusifitas daerah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Magelang selama kurun waktu 2016-2021. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut:

1. Misi 1: Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan:

1. Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan aparatur profesional dan berintegritas;
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi;

3. Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara partisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan;
4. Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam rangka memajukan kualitas hidup masyarakat.

Sasaran :

- 1) Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur;
 - 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif;
 - 3) Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsive;
 - 4) Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik;
 - 5) Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel;
 - 6) Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - 7) Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan;
 - 8) Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 - 9) Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional.
2. Misi 2: Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Tujuan :

- a. Meningkatkan sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia;
- b. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju smart environment;

Sasaran :

- 1) Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing;
 - 2) Meningkatnya kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat;
 - 3) Meningkatnya kontribusi sektor industri usaha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah;
 - 4) Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju mendukung kota magelang modern;
 - 5) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - 6) Meningkatnya ruang terbuka hijau;
 - 7) Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana;
 - 8) Pemanfaatan lahan berkelanjutan sesuai regulasi tata ruang.
3. Misi 3: Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan :

- a. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan pemerataan aksesibilitas;

- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian laju inflasi mendukung penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan;
- c. Menurunkan pengangguran dan kemiskinan;
- d. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk kesejahteraan masyarakat;
- e. Meningkatkan kesetaraan gender.

Sasaran :

- 1) Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat;
- 2) Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan;
- 3) Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan;
- 4) Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- 5) Meningkatnya produktivitas daerah dan ekonomi kreatif;
- 6) Meningkatnya ketahanan pangan;
- 7) Meningkatnya lapangan kerja;
- 8) Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS;
- 9) Terkendalinya Laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan;
- 10) Menurunnya kesenjangan gender.

4. Misi 4: Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.

Tujuan :

- a. Mewujudkan pelestarian budaya dan kesenian daerah;
- b. Mengembangkan dan mengelola destinasi wisata.

Sasaran :

- 1) Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan;
- 2) Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial.

5. Misi 5: Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Tujuan :

- a. Menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai religious;
- b. Mewujudkan kondusivitas iklim kebebasan beragama dan beribadat menuju tata kehidupan kota yang tertib, aman, dan nyaman.

Sasaran :

- 1) Terbentuknya karakter religius masyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan;
- 2) Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat;
- 3) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan.

Dalam pencapaian Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021, pencapaian tujuan hingga indikator sasaran saling terhubung secara hirarkis sebagaimana ditunjukkan Tabel 4-2. Sedangkan keterkaitan Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi RPJMD ditunjukkan pada Tabel 4-3.

Tabel 4-2

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, Realisasi dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Magelang 2016-2021
pada Perencanaan Tahun Ketiga (RKPD Kota Magelang tahun 2019)

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat												
1	1 Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan aparatur profesional dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	1 Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	1 Persentase pegawai berkinerja baik	96%	98%	97%	97%	97,5%	97,9%	98%	98%	
				2 Capaian SPM Kota Magelang	89,09%	50%	60%	70%	80%	100%	100%	100%	
				3 Persentase pengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar	43%	45%	48%	52%	65%	68%	72%	72%	
			2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi	1 Nilai Opini BPK atas LKPD	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	
				2 Indeks EKPPD	2,92	2,95	3	3,1	3,12	3,13	3,14	3,14	
				3 Hasil implementasi SAKIP	CC	CC (53,00)	CC (54,00)	CC (56,00)	CC (58,00)	CC (59,00)	B (60,00)	B (60,00)	
	2 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsif	1 Persentase PD dengan nilai pelayanan baik	24,24%	36,36%	48,48%	60,60%	72,72%	84,84%	1000%	1000%	
				2 Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik	1 Persentase PD menerapkan e-Gov	NA	60%	80%	90%	100%	100%	100%	100%
					2 Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi	NA	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
			3 Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	1 Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	85%	88%	90%	93%	95%	98%	100%	100%	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021		
				2	Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	60%	60%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
3	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara patisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	1 Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan asset daerah	1	Derajat Otonomi Fiskal	23,89%	21,40%	25,86%	29,82%	31,96%	33,88%	35,62%	35,62%
				2	Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat	83,60 %	80,27%	73,66%	69,67%	67,45%	65,79%	63,65%	63,65%
4	Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam rangka memajukan kualitas hidup masyarakat	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	1 Meningkatkan kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	1	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	52%	55%	60%	62%	65%	68%	70%	70%
				2	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	44,83	51,72	58,62	65,52	75,86	82,76	89,66	89,66
				3	Persentase perkembangan kerjasama daerah	1,05%	2,08%	3,06%	3,96%	4,76%	5,45%	6,03%	6,03%
		Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	1 Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1	Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	45%	45%	46%	47%	48%	49%	50%	50%
			2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional	1	Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional	5	6	6	7	7	8	8	8
					a. Regional	4	4	4	5	5	6	6	6
					b. Nasional	1	2	2	2	2	2	2	2
					c. International	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	Jumlah prestasi Olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	14	17	17	17	17	17	20	20
					a. Regional	8	10	10	10	10	10	11	11
					b. Nasional	4	5	5	5	5	5	6	6
					c. International	2	2	2	2	2	2	3	3

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021		
2	Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan												
2	1	Indek Pembangunan Manusia	1 Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	1 Rata-rata lama sekolah	10,32	10,36	10,41	10,46	10,50	10,55	10,59	10,59	
				2 Persentase sekolah berstandar nasional									
				a. SD	30,66%	35,66%	40,66%	45,66%	50,66%	55,66%	60,66%	60,66%	
				b. SMP	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%	
				3 Angka Melek Huruf	97%	97,35%	97,67%	97,99%	98,31%	98,63%	98,95%	98,95%	
			4 Persentase kunjungan perpustakaan	69,37%	70,95%	72,52%	74,25%	75,47%	77,07%	78,63%	78,63%		
			5 Jumlah kunjungan perpustakaan	92.021	94.110	96.200	98.500	100.113	102.230	104.305	104.305		
			2 Meningkatkan kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat	1 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 RS, 5 Puskesmas, 1 Lab Kesda)	3 bh (23%)	5 bh (15%)	7 bh (54%)	10 bh (77%)	13 bh (100%)	13 bh (100%)	13 bh (100%)	13 bh (100%)	
			2 Angka Harapan Hidup	76,58	76,67	76,71	76,76	76,8	76,85	76,9	76,94		
			3 AKI/ 1.000 KH	187,5	135	126	120	110	95	70	70		
			4 AKB/ 1.000 KH	15,63	15	14,5	14	13,5	13	12,5	12,5		
			5 AKABA	0,63	0,16	0,155	0,15	0,145	0,14	0,135	0,135		
			6 Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31		
			7 Angka Kesakitan DBD	130,93	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50		
8 Angka Prevalensi Kasus TB	128,33	<106	<105	<104	<103	<102	<101	<101					
9 Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	0,04%	<0,05%	<0,05%	<0,05%	<0,05%	<0,05%	<0,05%	<0,05%					
10 Rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat	98%	98%	98%	98%	98%	98%	100%	100%					
3 Meningkatkan kontribusi sektor industri usha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah	1 Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	15,70%	15,88%	16,15%	16,43%	16,65%	16,85%	17,11%	17,11%				
4 Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan	1 Persentase sarana penyedia	NA	10%	20%	30%	40%	50%	60%	60%				

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021		
2	Mewujudkan perdagangan yang maju mendukung Kota Magelang modern			layanan pendidikan menuju standar inklusivitas (universal design)									
				2 Persentase sarana prasarana penyedia layanan kesehatan menuju standar inklusivitas (universal design)	NA	0%	10%	20%	30%	40%	50%	50%	
				3 Persentase sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang menuju standar inklusivitas (universal design)	NA	20%	20%	20%	40%	60%	60%	60%	
	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju smart environment	IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1 Indeks Pencemaran Air	68,9	75,6	75,65	75,7	75,8	76,79	76,84	76,84	
				2 Indeks Pencemaran Udara	45,3	50,11	61,8	70,5	77,7	77,9	79,1	79,1	
				3 Indeks Tutupan Vegetasi	48,16	48,29	48,55	48,8	49,05	49,31	49,56	49,56	
				4 Volume sampah yang dibuang ke TPSA	160,58	160,58	158,7	155,7	153,7	151,7	136,7	136,7	
			2 Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau	3 Persentase Ruang Terbuka Hijau									
				a. Privat	10	10	10	10	10	10	10	10	
			b. Publik	18,37	18,37	18,37	18,42	18,44	18,46	18,50	18,50		
			3 Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana	1 Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	1,29%	3,98%	6,68%	9,38%	12,08%	15,08%	17,48%	17,48%	
				2 Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	NA	0	5,80%	11,76%	17,64%	23,53%	35,29%	35,29%	
			4 Pemanfaatan lahan berkelanjutan sesuai regulasi tata ruang	1 Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	22%	23%	24%	25%	26%	27%	33%	33%	
			3	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat									
3	1 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan pemerataan	1. Indeks Gini 2. Indeks Williamson	1 Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat	1 Presentasi penyediaan perumahan bagi Masyarakat	12,80%	12,50%	12%	11,5%	11%	10,5%	10%	10%	
			2 Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok	1 Tercapainya 100 - 0 -100									

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	aksesibilitas		pendapatan	a. Persentase jumlah KK yang terlayani air minum	82,30%	87,30%	92,30%	97,30%	100%	100%	100%	100%
				b. Rasio Luas kawasan kumuh	121.27 Ha	69,50 Ha	39,65 Ha	12,12 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha
				c. Rasio Rumah Tangga yang masih BABS	6%	6%	3%	2%	0%	0%	0%	0%
				2 Prosentase RTLH	4,40%	3,70%	2,90%	2,30%	1,70%	1,0%	0%	0%
				3 Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan	1 Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	7,83	8	8,25	8,5	8,75	9	9,25
2 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pengendalian laju inflasi mendukung penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Laju Inflasi	1 Meningkatkan kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	1 Pertumbuhan investasi	0%	5%	5%	5%	10%	10%	15%	15%	
			a. Pertumbuhan nilai investasi PMA	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	
			b. Pertumbuhan nilai investasi PMDN	70%	75%	75%	80%	80%	80%	80%	80%	
			2 Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif	1 Prosentase sarana prasarana perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang dalam kondisi baik	26%	27%	28%	29%	30%	31%	32%	32%
			2 Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti	12.729	12.780	12.831	12.882	12.933	12.985	13.037	13.037	
3 Menurunkan pengangguran dan kemiskinan	1. TPT 2. Angka Kemiskinan	1 Meningkatnya lapangan kerja	1 Persentase penyerapan tenaga kerja	60%	60%	65%	65%	65%	70%	70%	70%	
			2 Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunannya jumlah keluarga miskin dan PMKS	1 Persentase Penurunan PMKS	14%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	19%
4 Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk kesejahteraan masyarakat	Angka Pertumbuhan Penduduk	1 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan	1 Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2	2	2	2	2	2	2	2	
5 Meningkatkan kesetaraan gender	1. IPG 2. IDG	1 menurunnya kesenjangan gender	1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	13,15%	15%	17%	20%	23%	26%	30%	30%	
			2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	15,73%	17%	20%	23%	26%	30%	35%	35%	
			2 Rasio KDRT	0,07%	0,065%	0,060%	0,055%	0,050%	0,04%	0,04%	0,04%	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA						AKHIR RPJM					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021						
4	Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang																
4	1	Mewujudkan pelestarian budaya dan kesenian daerah	Capaian pelestarian budaya dan kesenian daerah	1	Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan	1	Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	13%	13,5%	14%	14,5%	15%	15,5%	16%	16%		
						2	Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	0	0	5	10	15	20	25	25		
	2	Mengembangkan dan mengelola destinasi wisata	Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	1	Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial	1	Jumlah Wisatawan a. Nusantara b. Mancanegara	1.133.373 5.171	1.134.846 5.178	1.136.435 5.185	1.138.140 5.193	1.139.961 5.201	1.141.899 5.210	1.143.954 5.219	1.143.954 5.219		
5	Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani																
5	1	Menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai religius	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	1	Terbentuknya karakter religius masyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan	1	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	-2,13%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%		
						2	Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat	1	Angka kriminalitas	14,14	13,64	13,14	12,64	12,14	11,64	11,14	11,14
								2	Prosentase penurunan kasus narkoba	-13,04%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
								3	Angka kriminalitas yang tertangani	11,08	11,5	11,5	12	12	12,5	12,5	12,5
	4	Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
	2	Mewujudkan kondusivitas iklim kebebasan beragama dan beribadat menuju tata kehidupan kota yang tertib, aman, dan nyaman	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan	1	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,56	3	3	3	3	3	3	3		
2						Ketersediaan kelembagaan pusat – pusat keagamaan (religious centre)	NA	0	0	1	0	0	1	2			

Tabel 4-3
Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian
Misi RPJMD Kota Magelang 2016-2021 pada Perencanaan Tahun Ketiga (RKPD Kota Magelang Tahun 2019)

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 1 :Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat								
1 Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	1 Peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja pemerintahan yang profesional dan akuntabel sesuai norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	1 Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya	v	v	v	v		
2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi		2 Penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang efektif dan efisien dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	v	v	v			
		3 Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran daerah			v	v	v	v
		4 Pencegahan pelanggaran hukum berbasis partisipasi masyarakat			v	v	v	v
		5 Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat	v	v	v	v	v	v
3 Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik	2 Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat memenuhi SPM (Standar pelayanan Minimal) melalui aplikasi teknologi informasi	6 Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi teknologi informasi	v	v	v	v	v	
		7 Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi teknologi informasi	v	v	v	v	v	
4 Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah	3 Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	8 Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	v	v	v	v	v	v

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	4 Peningkatan kinerja pengelolaan BMD yang didukung oleh aparatur profesional	9 Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset dan profesionalitas aparatur pengelola aset	v	v	v	v	v	v
5 Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	5. Peningkatan partisipasi masyarakat dan demokratisasi pembangunan berbasis teknologi informasi	10 Meningkatkan akses informasi, komunikasi, partisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota	v	v	v	v	v	v
6 Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan								
7 Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional								
Misi 2 :Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan								
1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	6 Peningkatan akses sumber ilmu pengetahuan masyarakat dan kualitas layanan pendidikan PAUD, Dasar, dan Non Formal	11 Peningkatan kemitraan pemerintah - Swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan yang PAUD, Dasar, non formal, dan perpustakaan daerah/wilayah		v	v	v	v	v
2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	7 Peningkatan kualitas layanan kesehatan berkeadilan dan pemasyarakatan budaya perilaku hidup sehat	12 Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat	v	v	v	v	v	v
		13 Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan	v	v	v	v	v	v
3 Meningkatnya kontribusi sektor industri usaha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah	8 Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor industri usaha mikro dan perdagangan dan sektor jasa kota lainnya	14 Peningkatan sarana prasarana pelayanan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan		v	v	v	v	
4 Terwujudnya sarana prasarana perdagangan yang maju mendukung kota magelang modern	9 Pengembangan infrastruktur perdagangan, kesehatan, pendidikan yang maju , inklusif dan berwawasan lingkungan							
5 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	10 Pengendalian pemanfaatan ruang dan aktivitas pembangunan untuk pelestarian kualitas lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan dan antisipasi resiko bencana	15 Pengembangan pola sinergitas kebijakan dan program pembangunan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan pemukiman, pemberdayaan masyarakat, persampahan, penanggulangan bencana untuk		v	v	v		
6 Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau								

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
7 Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana		menghasilkan lingkungan sehat, aman, berkelanjutan							
8 Pemanfaatan lahan sesuai regulasi tata ruang									
Misi 3 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat									
1 menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	11 Pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang secara merata dan berkeadilan	16 Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan	v	v	v	v	v	v	
2 Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang sesuai rasio kebutuhan masyarakat									
3 Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik dan ramah lingkungan									
4 Terjaganya kondusifitas kesejahteraan ekonomi masyarakat	12 Peningkatan investasi, daya saing produk/jasa, dan kontribusi sektor sektor-ekonomi bagi perekonomian daerah	17 Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan.	v	v	v	v			
5 Meningkatnya ketahanan pangan	13 Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan penurunan kemiskinan secara berkeadilan	18 Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: ketahanan pangan, peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan PMKS, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengarusutamaan gender	v	v	v	v	v	v	
6 Meningkatnya kesejahteraan sosial									
7 Meningkatnya lapangan kerja									
8 Menurunnya angka kemiskinan									
9 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan									

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Tahun						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
10	Menurunnya kesenjangan gender								
Misi 4 : Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang									
1	Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan	14 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kreativitas seni budaya daerah, kearifan lokal, dan inovasi destinasi pariwisata	19 Pengembangan sistem Komunikasi, informasi dan edukasi pada semua komponen pemerintah dan masyarakat untuk membangun kesadaran pelestarian nilai seni budaya dan daya saing pariwisata			v	v	v	v
2	Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata baik alam maupun sejarah yang potensial								
Misi 5 : Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani									
1	Terbentuknya karakter religius masyarakat landasan moral dan etika pembangunan	15 Internalisasi kesadaran religius pada Aparatur dan masyarakat untuk bermitra menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama menuju lingkungan masyarakat kota Magelang yang kondusif, tertib, aman, nyaman, dan antisipatif terhadap konflik sosial	20 Penguatan model kemitraan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban lingkungan mengantisipasi resiko bencana konflik SARA, sosial, ekonomi, dan politik		v	v	v	v	v
2	Mewujudkan lingkungan yang kondusif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat								
3	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam kebebasan beribadah dan pemilikan tempat peribadatan sesuai standar								

4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2019

4.2.1 Tema Pembangunan Tahun 2019

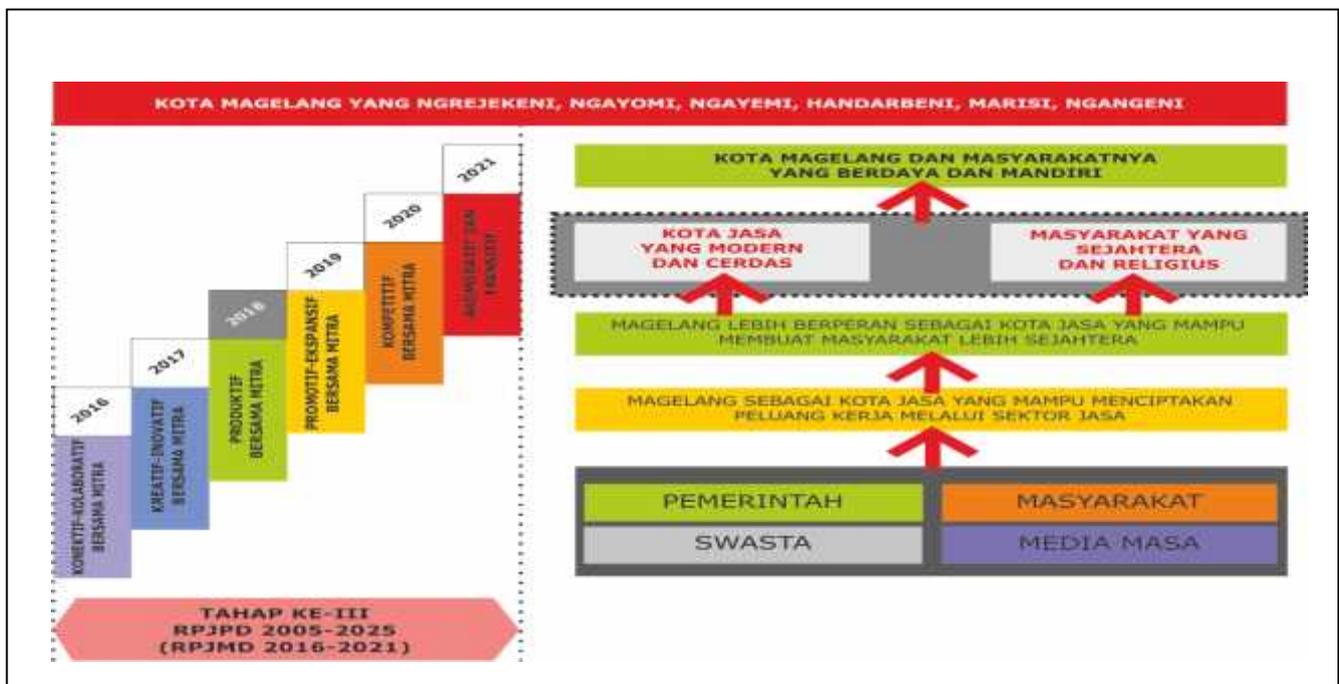
Dalam RKP Tahun 2019, tema pembangunan yang diusung adalah Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas. Untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana tema tersebut maka pendekatan substansi pembangunan yang dilakukan adalah pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial.

Sedangkan dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah, tema pembangunan pada tahun 2019 adalah Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berdikari. Tema dimaksudkan untuk mencapai Visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari Mboten Korupsi Mboten Ngapusi.

Dengan pendekatan yang sama tema pembangunan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2019 adalah Produktif Bersama Mitra Tema ini sebagai dasar perencanaan pembangunan yang disusun tahun 2018 untuk diimplementasikan melalui RKPD tahun 2019. Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya penyusunan rencana aksi kemitraan antar pelaku pembangunan menyiapkan Kota Magelang sebagai kota Jasa Modern dan Cerdas. Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah rancangan kreativitas dan inovasi yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan selanjutnya. Pada tahun 2017-2018 ini diasumsikan:

- (i) Sudah terbentuk tata kelola organisasi pemerintahan dan manajemen kepegawaian sesuai amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- (ii) Sudah terbentuk rencana aksi kemitraan.

. Deskripsi komprehensif atas Tema RKPD Kota Magelang Tahun 2019 nampak pada gambar berikut :



Gambar 4-1
Gambar Tema dan Arah kebijakan Tahun 2019

Selain itu Kota Magelang berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dan mendorong serta selaras dengan pencapaian tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah maupun nasional . Gambaran keselarasan antar tema pembangunan nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4-4

Keterkaitan antar tema Pembangunan dalam RKP, RKPD Provinsi Jawa Tengah dan RKPD Kota Magelang Tahun 2019

Tema RKP Tahun 2019	Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	Tema RKPD Kota Magelang Tahun 2019	Benang Merah keterkaitan
Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas	Pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Jawa Tengah yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, infrastruktur wilayah yang makin berkualitas dan kondusivitas wilayah yang makin mantap serta kemampuan IPTEK yang makin meningkat	Produktif Bersama Mitra	Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya eksekusi kemitraan antar pelaku pembangunan guna menyiapkan Kota Magelang sebagai Kota Jasa Modern dan Cerdas yang dilandai masyarakat yang sejahtera dan religius. Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah hasil kreativitas dan inovasi tahun lalu diupayakan untuk naik pada level produktif yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan selanjutnya dengan memberi daya dorong pada perwujudan tema pembangunan provinsi Jawa Tengah maupun pada RKP Tahun 2019

4.2.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2019

4.2.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2014-2019

Memperhatikan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 bahwa di dalam Buku I RPJM Nasional disebutkan bahwa dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi misi nasional tersebut dan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Mempertegas kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kesembilan agenda prioritas tersebut diimplementasikan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu :

- a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif.

Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan

paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:

- 1) Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.
- 2) Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.
- 3) Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
- 4) Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Pemerataan antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa dan kawasan timur. Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2019, antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% (5,4-5,8%);
2. Laju inflasi sebesar 3,5% (2,5-4,5%);
3. Indeks Gini sebesar 0,38;
4. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 - 8,0%;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,98;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,3%

4.2.2.2 Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2019

Secara lebih spesifik dalam RKP Tahun 2019, tema yang diusung adalah Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas. Untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana tema tersebut maka pendekatan pembangunan yang dilakukan adalah pendekatan holistic, tematik, integratif dan spasial.

Tema dimaksud untuk menjawab beberapa isu strategis yang harus di solusikan pada tahun 2019 antara lain :

- 1) Penurunan tingkat kemiskinan menjadi 1 digit
- 2) Pengurangan kesenjangan antara wilayah melalui pembangunan konektivitas dan sektor unggulan
- 3) Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industry, pariwisata, dan ekonomi kreatif
- 4) Pemenuhan kebutuhan energy primer, pangan dan sumber daya air
- 5) Pertahanan dan keamanan wilayah nasional serta penyelenggaraan pemilu yang demokratis

Oleh karena itu pada tahun 2019 Pemerintah menempatkan 5 prioritas nasional adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
- 2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
- 3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif
- 4) Pemantapan ketahanan energi pangan dan sumber daya air
- 5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu

4.2.2.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Tahun 2018 yang merupakan tahun kelima RPJMD, menjadi tahun yang strategis untuk melihat ketercapaian pembangunan daerah jangka menengah Jawa Tengah. Memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, dengan berbagai permasalahan dan isu strategis, maka upaya pencapaian target pembangunan daerah tahun 2019 dilakukan melalui berbagai strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk "Pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Jawa Tengah yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, infrastruktur wilayah yang makin berkualitas dan kondusivitas wilayah yang makin mantap serta kemampuan IPTEK yang makin meningkat",

Tema tersebut sebagai pendekatan solusi atas 7 (tujuh) isu strategis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Kemiskinan
2. Daya saing ekonomi
3. Kualitas dan daya saing Sumber daya manusia
4. Kedaulatan pangan dan energy
5. Kesenjangan wilayah
6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
7. Tata Kelola Pemerintahan

Dengan mendasarkan pada pemecahan isu tersebut maka prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah diprioritaskan pada :

1. Penanggulan kemiskinan, dengan fokus pada :
 - a. Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan : akses rumah layak, layanan akses dasar menyeluruh air bersih, sanitasi, listrik; penanganan kawasan permukiman kumuh; akses pendidikan, kesehatan, dan pangan; perlindungan sosial bagi masyarakat; dan fasilitasi kepemilikan sertifikat lahan.
 - b. Penguatan sustainable livelihood melalui : fasilitasi akses terhadap aset, modal, manajemen dan pasar; peningkatan start up wirausaha baru; peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 - c. Perkuatan basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan swasta dan pihak lainnya dalam mengatasi kemiskinan.
2. Penguatan daya saing ekonomi daerah, dengan fokus pada :

- a. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan melalui: peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah; pemberian bibit, benih, pupuk; asuransi petani; penyediaan alsintan; peningkatan prasarana irigasi; pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perkebunan; pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (*corporate farming*),
 - b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui: peningkatan keterampilan nelayan; penyediaan prasarana dan sarana perikanan tangkap (kapal, TPI); pemberian benih dan pakan ikan; dan penyediaan lahan budidaya perikanan.
 - c. Optimalisasi potensi sumber daya hutan melalui : peningkatan kualitas tata kelola kehutanan; penerapan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dan SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu); peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha kehutanan (hutan tanaman rakyat, hutan adat, hutan rakyat); penyediaan bibit tanaman hutan; peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengolahan hasil hutan; serta pemanfaatan sumber daya hutan non kayu.
 - d. Meningkatkan produksi dan produktivitas industri kecil, mikro, dan menengah melalui: peningkatan nilai tambah diversifikasi produk; mengembangkan inovasi teknologi; memfasilitasi akses modal dari perbankan dan lembaga keuangan non perbankan; peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi; pengembangan industri besar dengan pengembangan kawasan industri, serta kemitraan UMKM dan industri besar; peningkatan infrastruktur jaringan distribusi perdagangan antar daerah provinsi di Indonesia serta fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk UMKM.
 - e. Mendorong pariwisata berbasis masyarakat melalui : perbaikan prasarana dan sarana, serta manajemen pengelolaan daerah wisata, dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata; meningkatkan promosi wisata; meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata; meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata.
 - f. Perbaiki iklim investasi yang semakin kondusif melalui: pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan); perbaikan sistem dan layanan perijinan; kebijakan investasi padat karya; pengembangan digital investment promotion; pengembangan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan kabupaten/kota; mendorong perwujudan investasi hijau.
3. Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM, dengan fokus pada :
- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui : peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan; pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude; pengembangan learning culture; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi standar nasional dan/atau standar internasional; meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik; meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan; mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan; mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan; pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan; dan peningkatan pengembangan pendidikan inklusi.
 - b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif lebih diprioritaskan, di samping tetap memperbaiki upaya kuratif dan rehabilitatif melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, peningkatan dan

- pemerataan prasarana dan sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan serta peningkatan capaian wilayah Open Defecation Free (tidak buang air besar sembarangan).
- c. Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui : penguatan program pendidikan link and match berbasis demand-driven; mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi); sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan/atau internasional bagi lulusan pendidikan vokasi; memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung demand tenaga kerja ke depan; mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru; mengembangkan budaya inovatif; dan mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal.
4. Pengelolaan Sumberdaya Alam – Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, dengan fokus pada :
 - a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui : pengelolaan hutan dan lahan dengan rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, konservasi daerah hulu dan tangkapan air; pengembangan kelembagaan KTH (Kelompok Tani Hutan) dan perkuatan LMDH; Pengelolaan air dengan konservasi sumber air, pengendalian banjir, pengendalian pemanfaatan air tanah; pengelolaan Minerba dengan reklamasi lahan bekas pertambangan, perijinan dan pengawasan usaha pertambangan; pengendalian pencemaran tanah; pengelolaan wilayah pesisir dengan rehabilitasi kawasan mangrove, terumbu karang dan pesisir; pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara, pengelolaan limbah secara komunal berbasis kawasan dan masyarakat, serta peningkatan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Meningkatkan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas dalam menghadapi resiko bencana dan menurunnya kerentanan bencana alam dengan memperkuat kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana, pengembangan sistem informasi penanggulangan bencana, penanganan tematik rawan bencana, efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta mengembangkan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.
 5. Ketahanan Pangan dan Energi, dengan fokus pada :
 - a. Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dan daya saing pangan melalui: peningkatan ketersediaan pangan dengan mempertahankan luasan lahan pertanian, penyediaan infrastruktur pengolahan, penyimpanan, meningkatkan kewirausahaan, manajemen dan bisnis petani serta distribusi pangan; peningkatan aksesibilitas pangan dengan menjaga stabilitas harga dan pasokan; peningkatan konsumsi pangan yang bergizi, beragam dan berimbang dengan pengembangan diversifikasi pangan, membangun kesadaran masyarakat terhadap pangan beragam, serta peningkatan kuantitas, nilai tambah dan keragaman produk pangan; peningkatan mutu pangan yang berkualitas serta memenuhi standar, sertifikat aman dan layak pasar; pengembangan dan penerapan inovasi teknologi paska panen.

- b. Mewujudkan pemerataan akses energi dan listrik melalui penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dengan meningkatkan koordinasi dengan PLN sebagai penyedia jaringan listrik dan pengembangan listrik perdesaan; Pengembangan Listrik Murah dan Hemat; Pengembangan Energi Baru Terbarukan dengan pemanfaatan biogas, biomassa, gas rawa, mikro hidro dan tenaga surya.
6. Kesenjangan Wilayah, dengan fokus pada :
- a. Penguatan infrastruktur konektivitas melalui: peningkatan kehandalan dan keselamatan jalan - jembatan yang menghubungkan pantura – pansela dan daerah perbatasan; pengembangan angkutan umum lintas regional, perkotaan - perdesaan; peningkatan sarana prasarana simpul dan pepaduan moda transportasi (terminal, pelabuhan, bandara, dan stasiun).
 - b. Pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi melalui penyediaan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah; peningkatan jaringan air minum layak berbasis kawasan dan masyarakat; meningkatkan kualitas dan kapasitas pasar, pusat perdagangan, dan pusat jasa lainnya.
 - c. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan, barat dan timur yang diwujudkan dengan penetapan kawasan peruntukan industri baru wewenang provinsi dalam RTRWP dan dukungan dana untuk pengembangannya serta meningkatkan peran dan fungsi perkotaan yang semula PKL menjadi PKWp.
 - d. Mengoptimalkan potensi kelautan dengan penerapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)
7. Tata kelola pemerintahan, dengan fokus pada :
- a. Peningkatan pelayanan publik dengan membangun pemerintah yang melayani melalui upaya penguatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik;
 - b. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan ASN yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; meningkatkan pengawasan melalui penguatan kapabilitas APIP dan penguatan SPIP; meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan perda; meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;
 - c. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi; peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja; peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya - upaya clean and clear government dan menerapkan “keperantaraan dan enterpreneur” dalam tata kelola pemerintahan.
 - d. Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondusivitas wilayah Jawa Tengah.

4.2.2.4 Prioritas Pembangunan Kota Magelang Tahun 2019

Tema Tahun perencanaan 2018 yang merupakan tahun ketiga RPJMD Kota Magelang adalah Produktif Bersama Mitra. Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya eksekusi

kemitraan antar pelaku pembangunan guna menyiapkan Kota Magelang sebagai Kota Jasa Modern dan Cerdas yang dilandai masyarakat yang sejahtera dan religius. Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah rancangan kreativitas dan inovasi yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan selanjutnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2017-2018 diasumsikan bahwa :

- a. sudah terbentuk sistem basis data terpadu untuk perencanaan pembangunan, pelaksanaan rencana aksi daerah dan pengukuran kinerja terintegrasi.
- b. sudah terbentuk kesediaan kerjasama kemitraan: dengan dunia usaha, media, forum warga masyarakat.

Tema tersebut mencoba untuk mengatasi berbagai isu strategis pada tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi);
- c. Penguatan reformasi birokrasi;
- d. Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri;
- e. Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- f. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal;
- g. Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan;
- h. Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah.

Jika disandingkan antara isu strategis level nasional, provinsi dan kota Magelang pada tahun 2019 akan nampak koneksitas isu strategis sebagai berikut :

Tabel 4-5

Koneksitas antar isu strategis Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang

No	Isu Strategis		
	Nasional	Provinsi Jawa Tengah	Kota Magelang
1	Penurunan tingkat kemiskinan menjadi 1 digit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemiskinan ▪ Kualitas dan daya saing Sumber daya manusia 	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar
2	Pengurangan kesenjangan antara wilayah melalui pembangunan konektivitas dan sektor unggulan	Kesenjangan wilayah	Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi);
3	Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industry, pariwisata, dan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daya saing ekonomi ▪ Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri ▪ Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ▪ Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal ▪ Pengembangan dan pelestarian

4	Pemenuhan kebutuhan energy primer, pangan dan sumber daya air	Kedaulatan pangan dan energy	kesenian dan kebudayaan ▪ Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
5	Pertahanan dan keamanan wilayah nasional serta penyelenggaraan pemilu yang demokratis	Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan reformasi birokrasi Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah

Sedangkan fokus prioritas tahap ini:

- 1) Penambahan aktor swasta dalam penyelenggaraan:
 - a. lapangan usaha dan kegiatan ekonomi,
 - b. pendidikan,
 - c. kesehatan
- 2) Operasionalisasi ruang komunikasi, informasi, dan promosi kota secara rutin melalui media massa, media tradisional, maupun jurnalisme warga.
- 3) Awal pelembagaan konsultasi publik rutin antara OPD dengan forum warga komunitas.
- 4) Pelembagaan tinjau lanjut hasil inovasi dan kreasi masyarakat Kota Magelang menjadi produk terapan yang diimplementasikan.
- 5) Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah.
- 6) Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi menjajargapencapaian indikator kinerja ekonomi masyarakat Kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah.
- 7) Review akurasi dan kecocokan dokumen perencanaan pembangunan dan produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Dengan demikian dapat diilustrasikan keterkaitan antar fokus prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang

Tabel 4-6
Keterkaitan antara Fokus prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota Magelang
1	Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan	Penanggulangan kemiskinan dan Penguatan daya saing	Operasionalisasi ruang komunikasi, informasi, dan promosi kota secara rutin

	peningkatan pelayanan dasar	ekonomi daerah	melalui media massa, media tradisional, maupun jurnalisme warga
2	Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	Tata kelola pemerintahan	
3	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian industri dan jasa produktif	Kesenjangan Wilayah Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM	Penambahan aktor swasta Pelebagaan tinjau lanjut hasil inovasi dan kreasi masyarakat Kota Magelang menjadi produk terapan yang diimplementasikan
4	Pementapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air	Ketahanan pangan dan energi	Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja ekonomi masyarakat Kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah
5	Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu	Pengelolaan Sumberdaya Alam – Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	

4.2.2.4.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2019

Arah kebijakan pembangunan tahap ini untuk menjawab pencapaian prioritas pembangunan fokus pada:

- 1) Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya.
- 2) Penataan organisai perangkat daerah (SOTK) yang efektif dan efisien dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur.
- 3) Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran daerah.
- 4) Pencegahan pelanggaran hukum berbasis partisipasi masyarakat.
- 5) Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat.
- 6) Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi teknologi informasi.
- 7) Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi teknologi informasi.
- 8) Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 9) Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset dan profesionalitas aparatur pengelola asset.

- 10) Meningkatkan akses informasi, komunikasi, partisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota.
- 11) Peningkatan kemitraan pemerintah - Swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan yang PAUD, Dasar, non formal, dan perpustakaan daerah/wilayah.
- 12) Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat.
- 13) Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan.
- 14) Peningkatan sarana prasarana pelayanan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan.
- 15) Pengembangan pola sinergitas kebijakan dan program pembangunan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan pemukiman, pemberdayaan masyarakat, persampahan, penanggulangan bencana untuk menghasilkan lingkungan sehat, aman, berkelanjutan.
- 16) Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan.
- 17) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan.
- 18) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan PMKS, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengarusutamaan gender.
- 19) Pengembangan sistem komunikasi, informasi dan edukasi pada semua komponen pemerintah dan masyarakat untuk membangun kesadaran pelestarian nilai seni budaya dan daya saing pariwisata.
- 20) Penguatan model kemitraan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban lingkungan mengantisipasi resiko bencana konflik SARA, sosial, ekonomi, dan politik.

Perbedaan arah kebijakan perencanaan tahun 2018 dengan tahun sebelumnya adalah pada tahapan aksi pencapaian kinerja sasaran. Tahun 2019 sudah mulai dilakukan eksekusi program kegiatan yang merupakan implementasi rencana aksi yang dihasilkan pada tahun 2018.

Hubungan antara fokus prioritas dengan arah kebijakan dapat disampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4-7
Keterkaitan antara Fokus Prioritas dengan Arah Kebijakan Tahun 2019

FOKUS PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
Penambahan aktor swasta dalam penyelenggaraan: a. lapangan usaha dan kegiatan ekonomi,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan. ▪ Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah ▪ Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset dan

b. pendidikan,
c. kesehatan

profesionalitas aparatur pengelola asset

- Peningkatan kemitraan pemerintah - Swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan yang PAUD, Dasar, non formal, dan perpustakaan daerah/wilayah.
- Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat.
- Peningkatan sarana prasarana pelayanan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan.
- Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan.
- Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan PMKS, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengarusutamaan gender.
-

Operasionalisasi ruang komunikasi, informasi, dan promosi kota secara rutin melalui media massa, media tradisional, maupun jurnalisme warga

- Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya
- Penataan organisai perangkat daerah (sotk) yang efektif dan efisien dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur
- Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi teknologi informasi.
- Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi teknologi informasi
- Meningkatkan akses informasi, komunikasi, partisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota.
- Pengembangan sistem komunikasi, informasi dan edukasi pada semua komponen pemerintah dan masyarakat untuk membangun kesadaran pelestarian nilai seni budaya dan daya saing pariwisata.
-

Awal pelembagaan konsultasi publik rutin antara OPD dengan forum warga komunitas.

- Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi teknologi informasi.
- Pencegahan pelanggaran hukum berbasis partisipasi masyarakat

Pelembagaan tinjau lanjut hasil inovasi dan kreasi masyarakat Kota Magelang menjadi produk terapan yang diimplementasikan.

- Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan.

Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah.

- Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan.

Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja ekonomi masyarakat Kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah.

Review akurasi dan kecocokan dokumen perencanaan pembangunan dan produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman

- Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan.
- Pengembangan pola sinergitas kebijakan dan program pembangunan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan pemukiman, pemberdayaan masyarakat, persampahan, penanggulangan bencana untuk menghasilkan lingkungan sehat, aman, berkelanjutan.
- Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terintegrasi antara perencanaan dan anggaran daerah.
- Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat.

Jika dikaitkan dengan isu strategis, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2019 ini akan mampu menjawab isu strategis dengan keterkaitan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4-8
Konsistensi Fokus Prioritas dalam Menjawab Isu Strategis

FOKUS PRIORITAS	ISU STRATEGIS TAHUN 2019
Penambahan aktor swasta dalam penyelenggaraan: a. lapangan usaha dan kegiatan ekonomi, b. pendidikan, c. kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar ▪ Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi) ▪ Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh dan mandiri
Operasionalisasi ruang komunikasi, informasi, dan promosi kota secara rutin melalui media massa, media tradisional, maupun jurnalisme warga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan reformasi birokrasi ▪ Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal ▪ Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan ▪ Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi)
Awal pelebagaan konsultasi publik rutin antara OPD dengan forum warga komunitas.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi) ▪ Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal
Pelebagaan tindak lanjut hasil inovasi dan kreasi masyarakat Kota Magelang menjadi	<ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah ▪ Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan

produk terapan yang diimplementasikan.	keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi)
Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan reformasi birokrasi ▪ Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja ekonomi masyarakat Kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ▪ Penguatan reformasi birokrasi
Review akurasi dan kecocokan dokumen perencanaan pembangunan dan produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan reformasi birokrasi ▪ Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal

4.2.2.4.2 Prioritas Urusan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2019

Prioritas urusan yang mendukung arah kebijakan perencanaan tahun 2018 untuk diimplementasikan tahun 2019 adalah:

- a. Fungsi penunjang urusan pemerintahan;
- b. Urusan pendidikan;
- c. Urusan kesehatan
- d. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- f. Urusan sosial;
- g. Urusan penanaman modal;
- h. Urusan komunikasi dan informatika;
- i. Urusan perdagangan;
- j. Urusan perindustrian;
- k. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. Urusan kebudayaan;
- m. Urusan pariwisata;

4.2.2.4.3 Program Unggulan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2019

Sedangkan Program unggulan sebagai prioritas pada perencanaan tahun 2018 untuk dilaksanakan tahun 2019 adalah:

- a. Program peningkatan kualitas sumber daya pemerintah;
- b. Program peningkatan daya saing daerah;
- c. Program kota cerdas;
- d. Program pemerintahan responsif dan partisipatif;
- e. Program pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan;
- f. Program pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan;
- g. Program penguatan pertumbuhan ekonomi;
- h. Program perluasan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
- i. Program masyarakat religius menuju masyarakat madani.

Selain berpedomanan pada tema pembangunan Tahun 2019 yang merupakan tema pentahapan pencapaian Visi Walikota Magelang, Prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan provinsi dan nasional serta perkembangan ekonomi regional.

4.3 Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target SDGs Kota Magelang

4.3.1 Sustainable Development Goals (SDGs)

Millenium Development Goals (MDGs) telah berakhir Tahun 2015. Setelah tahun 2016 yang merupakan transisi post MDGs menuju Sustainable Development Goals (SDGs), maka Proposal SDGs 2015-2030 melibatkan 17 Goals dan 169 indikator. Ketujuh belas tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan dan ketahanan pangan dan peningkatan nutrisi serta mengembangkan pertanian berkelanjutan.
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kehidupan yang layak di segala umur.
4. Memastikan kualitas pendidikan yang setara dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
5. Mencapai kesetaraan gender memberdayakan perempuan dan remaja perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan manajemen berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua.
7. Memastikan akses atas energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, angkatan kerja yang produktif dan lapangan kerja layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkesinambungan serta mendukung berkembangnya inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara.

11. Membangun kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, berdaya tahan dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola-pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil langkah-langkah yang urgen untuk memerangi perubahan iklim dan akibat-akibatnya.
14. Melestarikan dan penggunaan yang berkelanjutan sumber daya kelautan untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan penggunaan yang berkelanjutan atas ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi dan menghentikan, mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan musnahnya keanekaragaman hayati.
16. Meningkatkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, menyediakan akses pada keadilan untuk semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat upaya implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkesinambungan.

4.3.2 Pendekatan Kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs)

Sebagai milestones baru menuju SDGs, persiapan implementasi SDGs di Kota Magelang harus dilakukan dengan baik dan melalui pendekatan perencanaan yang tepat dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pencapaian target MDGs di Kota Magelang sampai dengan tahun 2015. Beberapa pendekatan kebijakan dan strategi SDGs dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun

Tujuan memberantas kemiskinan didekati antara lain melalui : a) Peningkatan kemampuan dan keterampilan penduduk miskin guna meningkatkan akses kesempatan kerja dan usaha, b) peningkatan kemandirian UMKM, IKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah serta koperasi guna peningkatan daya saing produk unggulan daerah dengan pemanfaatan SDM dan bahan baku lokal, c) pemberian akses permodalan, d) perluasan akses pasar/promosi, e) peningkatan akses pada pelayanan dasar seperti papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan

2. Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan dan ketahanan pangan dan peningkatan nutrisi serta mengembangkan pertanian berkelanjutan.

Dilaksanakan melalui program : a) Peningkatan ketahanan pangan, b) Program peningkatan produksi pertanian melalui pola urban farming, serta c) peningkatan penerapan teknologi pangan, peternakan dan perikanan.

3. Tujuan 3: Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kehidupan yang layak di segala umur.

Dilaksanakan melalui program : a) Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat, b) Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta gizi balita, c) peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan, d) Pelayanan kesehatan masyarakat; e) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan; f) penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah.

4. Tujuan 4: Memastikan kualitas pendidikan yang setara dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua

Program yang dilakukan antara lain : a) Peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), b) pendidikan Dasar, pendidikan menengah, Non formal dan Informal, dan pendidikan Khusus terutama untuk kelompok masyarakat yang miskin dan rentan, c) peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, d) perbaikan manajemen pendidikan, serta e) Peningkatan minat baca masyarakat

5. Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender memberdayakan perempuan dan remaja perempuan
Pendekatan program yang dilakukan melalui pendekatan: a) Peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan Dasar, pendidikan menengah, Non formal dan Informal, dan pendidikan Khusus terutama untuk kelompok masyarakat yang miskin dan rentan, b) Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
6. Tujuan 6: Memastikan ketersediaan dan manajemen berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua.
Hal ini dapat dilakukan melalui : a) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, b) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), c) Program Peningkatan Pengendalian Polusi; Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, d) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dan d) Program Lingkungan Sehat Perumahan.
7. Tujuan 7: Memastikan akses atas energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
Upaya upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui: a) perkuatan sistem inovasi daerah, b) fasilitasi riset unggulan daerah terkait energi alternatif dan terbarukan.
8. Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, angkatan kerja yang produktif dan lapangan kerja yang layak untuk semua.
Program peningkatan kesempatan kerja; b) Perlindungan Pengembangan Lembaga Kesempatan Kerja, c) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; Peningkatan Promosi dan Investasi, d) Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, e) Pengembangan Destinasi Wisata, f) Pengembangan Pemasaran Wisata, g) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM, h) Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
9. Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkesinambungan serta mendukung berkembangnya inovasi.
Untuk mencapai tujuan ini dilakukan dengan cara : a) Program pembangunan jalan dan jembatan, b) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh, c) program pembangunan infrastruktur pedesaan, d) Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.
10. Tujuan 10: Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara.
Di level daerah kombinasi pendekatan di tujuan ke delapan dan ke sembilan akan cukup memberikan akselerasi dalam mengurangi ketimpangan. Perkuatan SDM dan perhatian kepada kesamaan pendidikan juga akan mampu mengurangi kesenjangan. Index Gini dan Index Williamson yang berkualitas untuk pertumbuhan dan pemerataan.
11. Tujuan 11: Membangun kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, berdaya tahan dan berkelanjutan.
Pendekatan pembangunan menuju smart city menjadi bagian penting pada perencanaan tahun 2016. Perlu dirancang sebuah masterplan membangun kota yang cerdas ditinjau dari berbagai aspek. Program konvensional yang sudah ada sebelumnya perlu dilakukan intensifikasi misalnya: a) Program Pengembangan Perumahan, b) Program Lingkungan sehat perumahan, c) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum perumahan
12. Tujuan 12: Memastikan pola-pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
Pendekatan secara makro dan strategis terhadap keseimbangan antara produksi dan konsumsi hingga mencapai kondisi yang surplus untuk pertumbuhan ekonomi perlu terus diupayakan.
13. Tujuan 13: Memastikan pola-pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Pendekatan secara makro dan strategis terhadap keseimbangan antara produksi dan konsumsi hingga mencapai kondisi yang surplus untuk pertumbuhan ekonomi perlu terus diupayakan.

14. Tujuan 14: Melestarikan dan penggunaan yang berkelanjutan sumber daya kelautan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk sumber daya kelautan Kota Magelang tidak memiliki keunggulan komparatif. Namun demikian pengembangan perikanan darat masih terus diupayakan melalui : a) program Pengembangan budidaya perikanan, b) Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

15. Tujuan 15: Melindungi, merestorasi dan meningkatkan penggunaan yang berkelanjutan atas ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi dan menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan musnahnya keanekaragaman hayati.

Dapat dilaksanakan melalui: a) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, b) Program rehabilitasi hutan dan lahan, Program konservasi sumber daya alam.

16. Tujuan 16: Meningkatkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, menyediakan akses pada keadilan untuk semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan.

Pendekatan reformasi birokrasi secara komprehensif, pengembangan e-governance yang menjamin transparansi, serta penciptaan keamanan.

17. Tujuan 17: Memperkuat upaya implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkesinambungan.

Dapat dilakukan melalui peningkatan kerjasama antar daerah antar negara, pemanfaatan kerjasama secara sister city serta peningkatan menjalin networking dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN yang melibatkan ke empat pilar pembangunan terutama pemerintah, swasta, perguruan tinggi.

4.4 Arah Pengembangan Wilayah Terpadu Kota Magelang

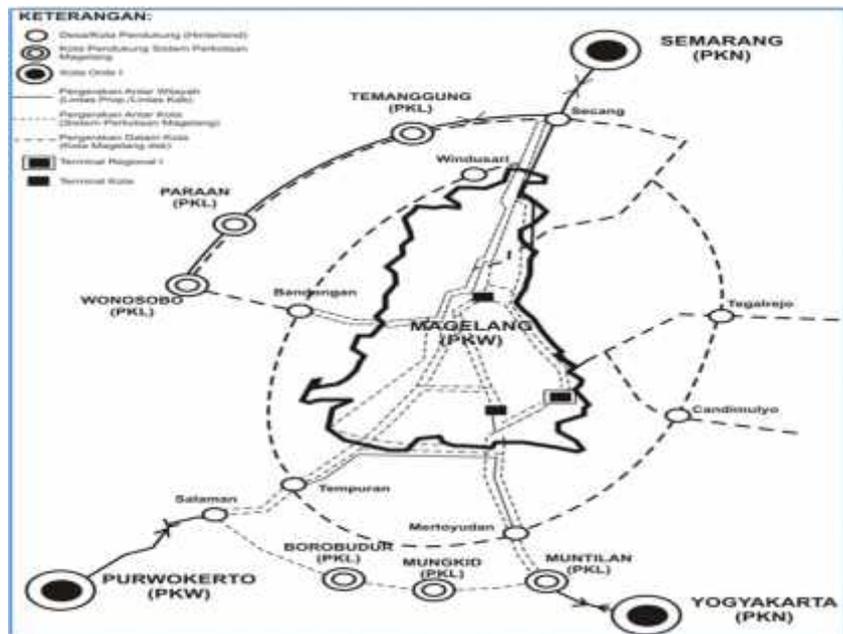
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang tidak terlepas dari sudut pandang Pengembangan Wilayah. Berdasar dokumen Pengembangan Wilayah Terpadu Kota Magelang Tahun 2015-2020, pengembangan wilayah pada hakekatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya peningkatan keterpaduan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor yang berdimensi keruangan Kota Magelang..

4.3.1. Arah Pengembangan Eksternal Wilayah

Mengacu pada UU Penataan Ruang No. 26/ 2007, secara umum telah ditetapkan istilah baku untuk pusat-pusat perkotaan mulai dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kota-kota, baik yang mempunyai status otonomi maupun tidak, merupakan pusat kegiatan bagi wilayah di sekelilingnya, yang sering disebut dengan beberapa istilah seperti wilayah pengaruh, wilayah pelayanan, hinterland, dan lain-lain.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2009-2029, Kota Magelang mempunyai kedudukan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Adapun Gambaran mengenai Sistem Perwilayahan Eksternal Kota Magelang dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 4-2

Konstelasi Kota Magelang Terhadap Kawasan Sekitarnya

Beberapa daerah yang berada di PKW Kota Magelang antara lain Kawasan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung yang diistilahkan sebagai Kawasan PURWOMANGGUNG. Kota Magelang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Pusat pelayanan keuangan/bank yang melayani beberapa kabupaten;
- b. Pusat pengolahan/pengumpul barang yang melayani beberapa kabupaten;
- c. Simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten;
- d. Pusat pemerintahan yang melayani beberapa kabupaten;
- e. Pusat pendidikan yang melayani beberapa kabupaten;
- f. Pusat kesehatan yang melayani beberapa kabupaten; dan
- g. Pusat Perdagangan dan Jasa umum lain yang melayani beberapa kabupaten;

Arah pengembangan Kota Magelang untuk meningkatkan fungsi kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), diantaranya:

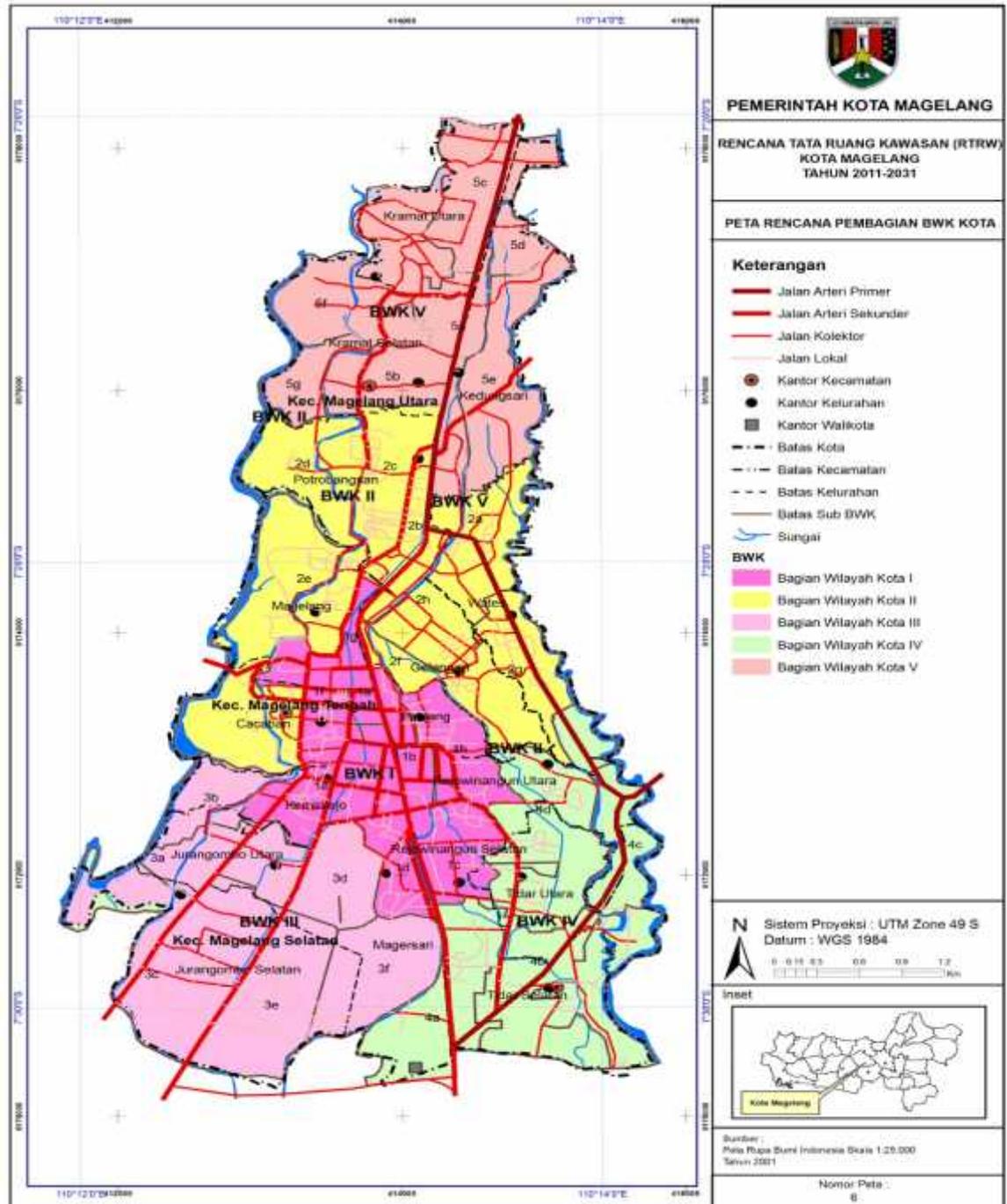
- a. pengembangan secara vertikal kawasan komersial 10 lantai;
- b. alokasi ruang pada kawasan strategis Daerah (jalur utama pergerakan transportasi Semarang-Yogyakarta), yaitu untuk perdagangan-jasa skala kota dan regional (Purwomanggung), meliputi blok peruntukan ruang di Jalan Pemuda, Jalan A.Yani, Jalan Sudirman, sebagian Jalan Urip Sumohardjo, dan sebagian Jalan Sukarno Hatta, Jalan Tentara Pelajar, dan Jalan Pahlawan.

- c. pengembangan sarana perekonomian daerah, berupa hipermarket, supermarket, perkantoran, perbankan, perhotelan, pasar tradisional, jasa hiburan, rumah makan, dan kawasan mix use (campuran) berupa rumah-toko (ruko) dan rumah kantor.
- d. Pengembangan kawasan perdagangan-jasa yang layak dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan estetika lingkungan khususnya penyediaan ruang terbuka publik berupa ruang hijau dan non hijau.
- e. pengembangan pariwisata dipusatkan pada BWK III, dan pengembangan potensi wisata pada kawasan lain sebagai pendukung wisata kota.
- f. Pengembangan pendidikan menengah dan tinggi, dengan peningkatan kualitas dan keberagaman jurusan/keahlian, dengan tetap mendukung keberadaan Akademi Militer.
- g. Pengembangan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan.

4.3.2. Arah Pengembangan Internal Wilayah

Dalam rangka optimalisasi pengembangan, kemudahan pengelolaan, peningkatan fungsi pelayanan, pengurangan kesenjangan, serta penentuan kawasan-kawasan yang akan dilakukan pengembangan, maka di Kota Magelang dilakukan pembagian wilayah kota dalam unit-unit lingkungan atau kedalam kawasan fungsional yang lebih kecil. Unit lingkungan perkotaan yang lebih kecil tersebut dikenal sebagai Bagian Wilayah Kota (BWK). Pertimbangan dalam Penetapan BWK di Kota Magelang berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Adanya kesamaan fungsi (homogenitas) dan dominasi kegiatan tertentu, dimana pengelompokan kegiatan-kegiatan tersebut dalam satu satuan wilayah akan lebih menguntungkan baik dalam segi pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, interaksi antar kegiatan sejenis maupun pengawasan segala kegiatan yang terjadi.
- b. Batasan kemampuan jangkauan pelayanan (radius pelayanan) fasilitas sosial ekonomi skala BWK.
- c. Adanya batas fisik yang jelas seperti jalan, sungai dan lain-lain.
- d. Kekompakan wilayah terhadap daerah-daerah yang akan dikembangkan, sehingga tercapai efisiensi .
- e. Kemudahan hubungan antar bagian wilayah, tercapainya keserasian, dan integrasi antara kota lama dengan kawasan pengembangan (efisiensi sistem pergerakan).
- f. Memantapkan peran BWK dengan meningkatkan sarana-prasarana yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya (efisiensi pelayanan sarana umum).
- g. Kemudahan dalam pengawasan dan pengelolaan masing-masing wilayah fungsional.



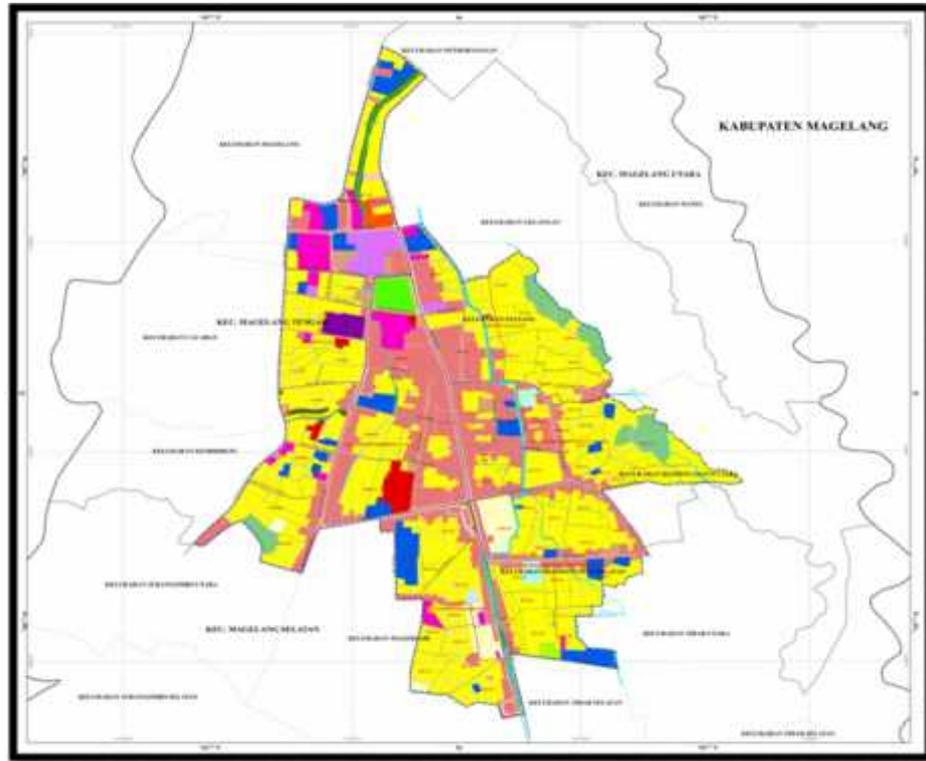
Gambar 4-3
Peta Rencana Pembagian BWK

Pada setiap BWK dialokasikan pusat-pusat kegiatan dengan pengarahannya. Adapun pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK) dan unit lingkungan yang ada di Kota Magelang adalah sebagai berikut:

4.3.2.1 Bagian Wilayah Kota I (BWK I)

Dengan luas kurang lebih 255 Ha, BWK I memiliki fungsi utama sebagai kawasan pusat pelayanan sosial-ekonomi skala kota, rekreasi wisata perkotaan, dan permukiman dengan kepadatan tinggi, dan terdiri dari seluruh Kelurahan Panjang, sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara, seluruh Kelurahan Rejowinangun Selatan, sebagian Kelurahan Magelang, sebagian Kelurahan Kemirirejo, sebagian Kelurahan Magersari, dan sebagian Kelurahan Cacaban.

Karakteristik BWK Pusat Kota adalah lokasi di tengah wilayah kota dan mempunyai daya jangkau yang relatif merata dari semua sudut kota. Fasilitas pelayanan dasar khususnya fasilitas ekonomi dan sosial kota, tersedia dan tersebar cukup merata di BWK I. Kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan sangat tinggi, sehingga dimasa yang akan datang harus diantisipasi dalam pola pemanfaatan lahan secara vertikal.



Gambar 4-4

Peta Pola Ruang BWK I

Sedangkan Arahan Pengembangan BWK I adalah sebagai berikut:

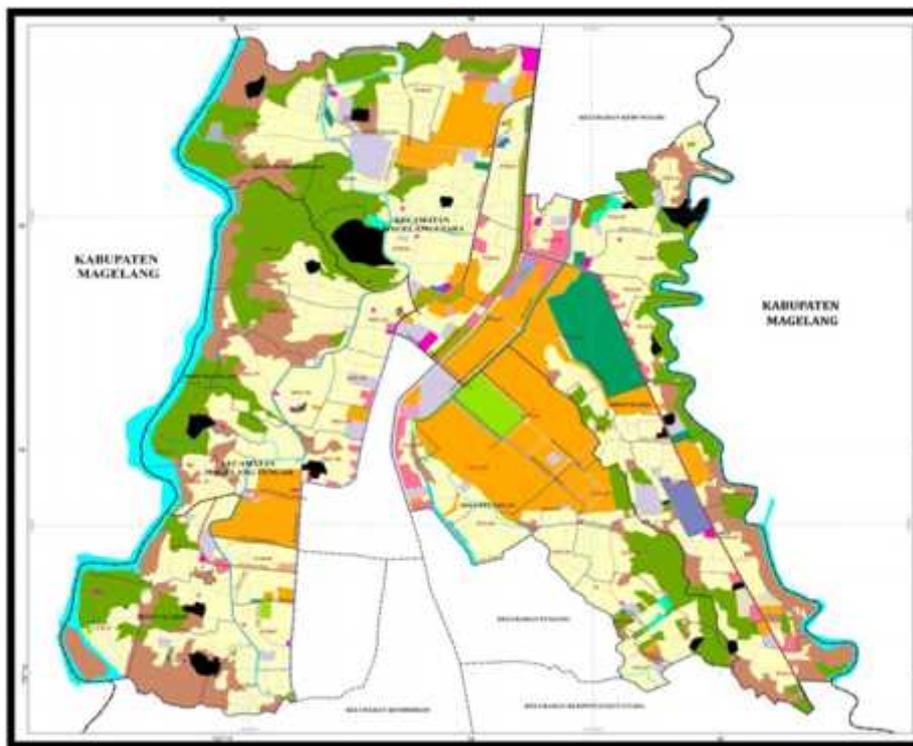
- a. mewujudkan pusat perdagangan modern dan tradisional dengan skala pelayanan daerah dan/atau regional;
- b. mewujudkan kelengkapan fasilitas pendukung perdagangan dan jasa;
- c. mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
- d. mewujudkan infrastruktur perkotaan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan jasa;
- e. mewujudkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata;
- f. mewujudkan RTH taman kota yang memberikan kenyamanan dalam mendukung aktivitas kawasan; dan
- g. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas perdagangan dan jasa, permukiman, pariwisata, serta ruang kegiatan sektor informal dan ruang terbuka non hijau

Di BWK I ada beberapa Kawasan Startegis yang diprioritaskan untuk dikembangkan di Tahun 2016 hingga 2021 sebagai generator pertumbuhan ekonomi dalam skala kawasan yang lebih luas yang masuk dalam kategori berpotensi dalam pengembangan pusat pelayanan perekonomian yang mempunyai jangkauan pelayanan skala kota / regional, yaitu:

1. Kawasan Alon Alon dan sekitarnya. sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dan perkantoran, Kawasan Alun-Alun juga sebagai kawasan pusat kota yang mewadahi kegiatan rekreasi masyarakat dengan skala pelayanan daerah dan regional. Dengan rencana penanganan yang dilakukan berupa:
 - a. penataan RTH Taman Kota;
 - b. penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima;
 - c. penataan jaringan pergerakan di seluruh kawasan dan sekitarnya;
 - d. penataan lalu lintas;
 - e. penataan papan reklame pada zona perdagangan.
2. Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dengan skala pelayanan daerah dan regional. Rencana penanganan yang dilakukan berupa:
 - a. pembangunan selter Pedagang Kaki Lima;
 - b. pembangunan terminal tipe c;
 - c. pengembangan pasar Sidomukti;
 - d. Penataan RTH kawasan.

4.3.2.2 Bagian Wilayah Kota II (BWK II)

Dengan luas kurang lebih 370 Ha, BWK II berfungsi konsentrasi kegiatan permukiman, pendidikan tinggi, dan militer. Pada beberapa simpul lokasi di BWK II, terutama kawasan-kawasan yang bersinggungan langsung dengan kawasan pusat kota harus diantisipasi perkembangan fasilitas perdagangan dengan skala pelayanan lokal dan regional. Wilayah BWK I meliputi seluruh wilayah Kelurahan Potrobangsari; sebagian wilayah Kelurahan Wates, Gelangan, Cacaban dan Magelang.



Gambar 4-5

Pola Ruang BWK II

Arahan Pengembangan BWK II :

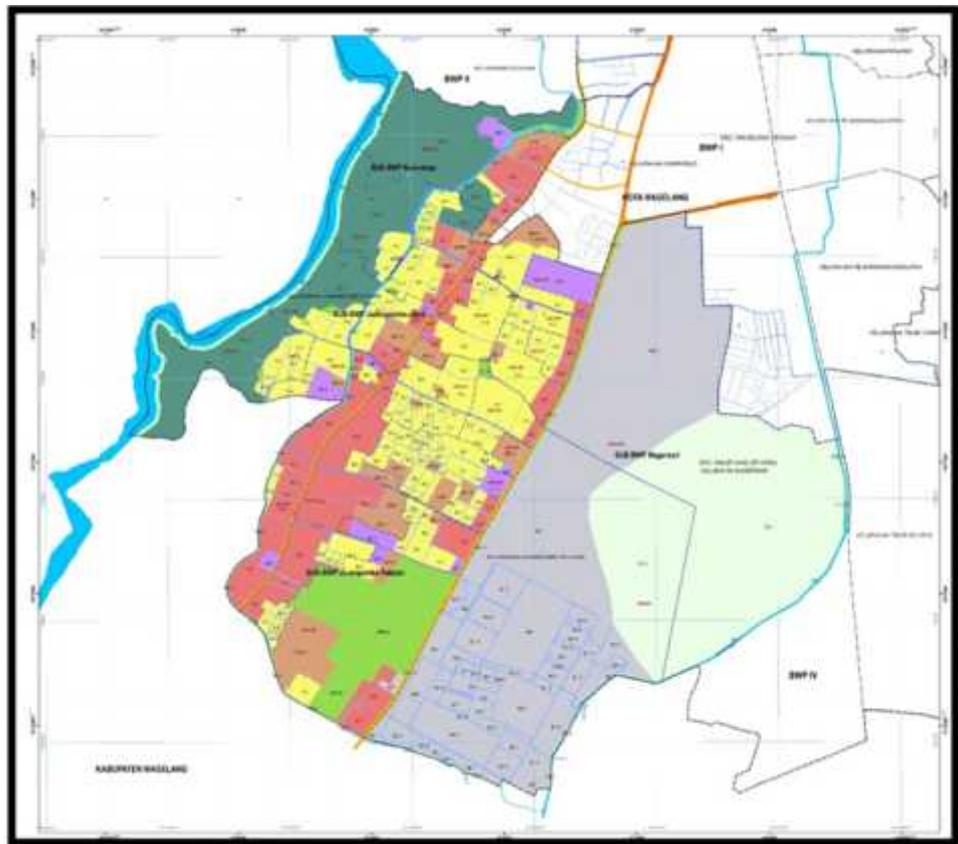
- a. mewujudkan pusat pelayanan permukiman kepadatan tinggi dan sedang, perguruan tinggi, dan pendidikan angkatan darat;
- b. mewujudkan kelengkapan fasilitas pendukung perdagangan dan jasa;
- c. mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
- d. mewujudkan infrastruktur perkotaan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan jasa;
- e. mewujudkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata;
- f. mewujudkan RTH Taman Kota yang memberikan kenyamanan dalam mendukung aktivitas kawasan; dan
- g. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas perdagangan dan jasa, permukiman, pariwisata, serta ruang kegiatan sektor informal dan ruang terbuka non hijau.

Di BWK II ada Kawasan Strategis yang diprioritaskan untuk dikembangkan di Tahun 2016 hingga 2021 sebagai pusat pelayanan pariwisata dan kebudayaan yang mempunyai jangkauan pelayanan skala kota / regional, yaitu: Kawasan Mantiyasih. Yang berfungsi sebagai kawasan sejarah cikal bakal Magelang yang dikembangkan sebagai pusat pelayanan pariwisata dan kebudayaan dengan skala pelayanan daerah dan regional. Dengan rencana penanganan yang dilakukan berupa:

- a. Penataan kawasan Mantiyasih;
- b. Peningkatan aksesibilitas kawasan;
- c. Pengembangan destinasi pariwisata.

4.3.2.3 Bagian Wilayah Kota III (BWK III)

BWK III dengan luas kurang lebih 383 Ha, dengan arahan fungsi dengan fungsi pusat pelayanan rekreasi kota/wisata alam skala regional, pelestarian alam, pendidikan angkatan darat, dan permukiman dengan kepadatan rendah, dan terdiri dari seluruh Kelurahan Jurangombo Utara dan Jurangombo Selatan, sebagian Kelurahan Magersari dan Kelurahan Kemirirejo, Kawasan perkotaan pada BWK III harus dipertahankan rasio antara ruang terbangun dan ruang terbuka hijau. Prediksi pemanfaatan lahan dimasa depan tidak begitu banyak bergeser dari alokasi lahan saat ini. Sedangkan pengembangan bidang kepariwisataan sangat potensial untuk diarahkan di kawasan BWK III tersebut. Gunung Tidar yang merupakan hutan lindung kota berlokasi di BWK III. Kekuatan pasar akan mendesak penggunaan lahan Gunung Tidar atau sebagian lahan gunung tersebut untuk kegiatan ekonomi dan wisata



Gambar 4-6

Peta Pola Ruang BWK III

Arahan Pengembangan BWK III :

- mewujudkan pusat pelayanan permukiman kepadatan rendah dan sedang, rekreasi kota/wisata alam, dan pendidikan angkatan darat
- mewujudkan kelengkapan fasilitas pendukung perdagangan dan jasa;
- mewujudkan kawasan Gunung Tidar sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan

hutan kota;

- d. mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
- e. mewujudkan infrastruktur perkotaan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan jasa;
- f. mewujudkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata;
- g. mewujudkan RTH Taman Kota yang memberikan kenyamanan dalam mendukung aktivitas kawasan; dan
- h. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas perdagangan dan jasa, permukiman, pariwisata, serta ruang kegiatan sektor informal dan ruang terbuka non hijau.

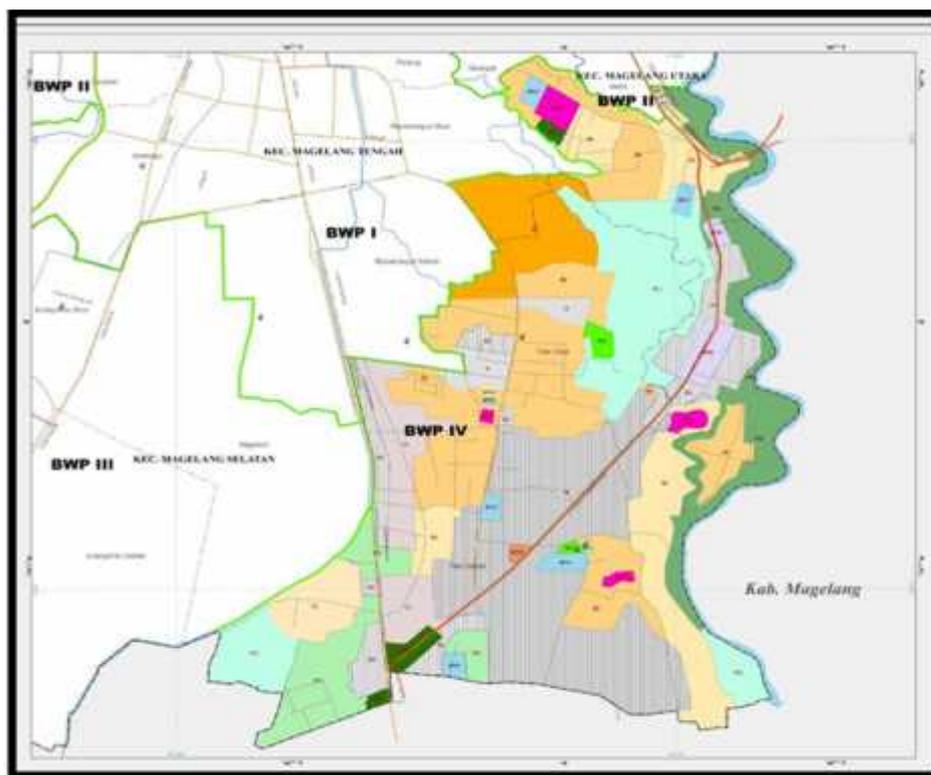
Di BWK III ada Kawasan Strategis yang diprioritaskan untuk dikembangkan sebagai Kawasan Strategis Kota Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, yaitu: Kawasan Gunung Tidar, Fungsi kawasan adalah sebagai kawasan plasma nutfah Daerah dan pengembangan destinasi pariwisata untuk wisata religi dan objek studi ilmu pengetahuan alam.

Rencana penanganan kawasan prioritas kawasan Gunung Tidar dilakukan dengan:

- a. penegasan batas kawasan lindung Gunung Tidar dengan kawasan budidaya yang ada di seputar kawasan;
- b. revitalisasi kawasan Gunung Tidar sebagai kawasan plasma nutfah Daerah;
- c. reboisasi pohon di Kawasan Gunung Tidar secara bertahap dan berkala;
- d. pengembangan kawasan sebagai kawasan pariwisata untuk wisata religi dan objek studi ilmu pengetahuan alam masih dimungkinkan selama tidak mengganggu dan mengurangi fungsi kawasan sebagai kawasan lindung; dan
- e. pengembangan secara terbatas sarana dan prasarana pendukung seperti jaringan air bersih, jaringan listrik, dan jalan setapak dan harus mempunyai kejelasan fungsi dari pembangunan sarana dan prasarana tersebut.

4.3.2.4 Bagian Wilayah Kota IV (BWK IV)

BWK IV dengan luas kurang lebih 437 Ha, dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan kota, industri kecil dan menengah, simpul pergerakan barang, jasa dan orang, dan permukiman kepadatan tinggi, dan terdiri dari sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara, sebagian Kelurahan Magersari, dan sebagian Kelurahan Wates, dan seluruh Kelurahan Tidar Utara dan seluruh Kelurahan Tidar Selatan. Keberadaan Terminal Tidar ikut menjadi faktor pengungkit/pendorong perkembangan di kawasan tersebut. Peningkatan kegiatan perdagangan di BWK IV dimasa yang akan datang akan menjadi dominan, terutama dengan berkembangnya Kawasan Soekarno-Hatta; Kawasan Canguk, serta berkembangnya Kawasan Mertoyudan (kawasan perbatasan) yang berada di wilayah Kabupaten Magelang sebagai kawasan perkotaan dengan dominasi kegiatan perdagangan dan perkantoran. Pada BWK IV ini terdapat simpul-simpul kawasan yang merupakan gerbang pintu masuk kota dari arah selatan dan timur. Sehingga penataan ruang pada kawasan tersebut memerlukan prioritas yang harus dilaksanakan dalam rangka menjaga kualitas ruang kota.



Gambar 4-7

Peta Pola Ruang BWK IV

Arahan Pengembangan BWK IV :

- a. Mewujudkan jaringan prasarana dan sarana yang memadai untuk mewujudkan fungsi BWK IV Kota Magelang sebagai subpusat pelayanan kota;
- b. Mewujudkan jaringan prasarana dan sarana bagi pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan baik antara pusat kota dengan hinterlandnya, sehingga dapat melayani dan mencakup aktifitas perdagangan masyarakat Kota Magelang.
- c. Mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
- d. Mewujudkan kegiatan industri rumah tangga yang berbasis kerakyatan untuk mendukung perdagangan jasa dan permukiman;
- e. Mewujudkan tersedianya fungsi-fungsi ekologis yang cukup untuk pengendalian banjir dan kekeringan serta tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mewujudkan tersedianya peraturan zonasi yang operasional dan sesuai dengan karakteristik BWK IV Kota Magelang untuk mengendalikan alih fungsi lahan. Mewujudkan jaringan prasarana dan sarana yang memadai untuk mewujudkan fungsi BWK IV Kota Magelang sebagai sub pusat pelayanan kota;
- g. Mewujudkan jaringan prasarana dan sarana bagi pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan baik antara pusat kota dengan hinterlandnya, sehingga dapat melayani dan mencakup aktifitas perdagangan masyarakat Kota Magelang.
- h. Mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
- i. Mewujudkan kegiatan industri rumah tangga yang berbasis kerakyatan untuk mendukung perdagangan jasa dan permukiman;

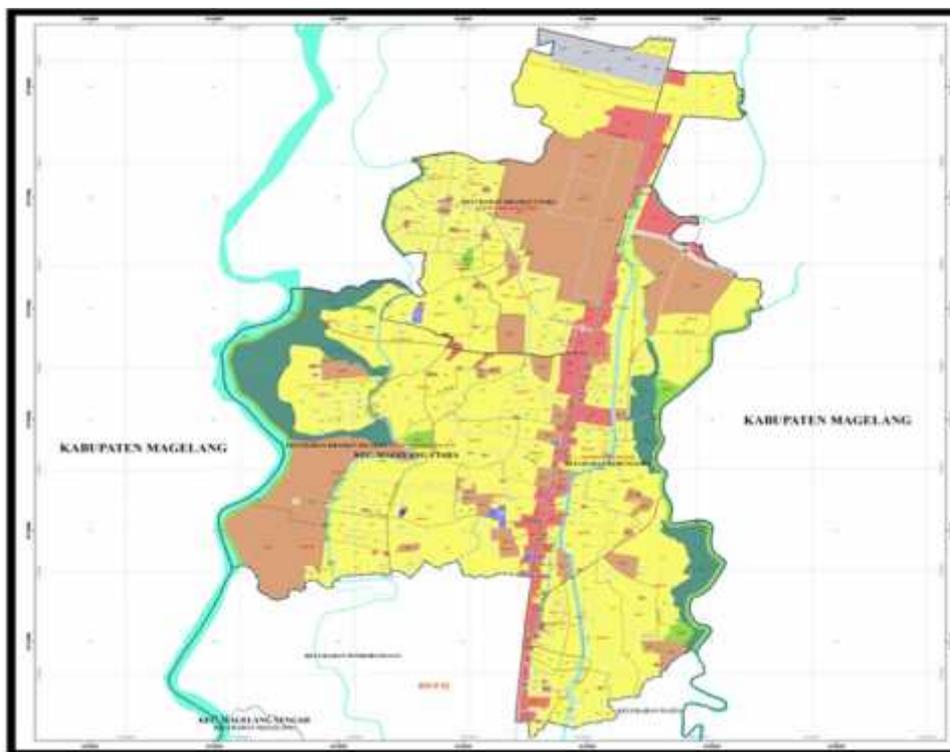
- j. Mewujudkan tersedianya fungsi-fungsi ekologis yang cukup untuk pengendalian banjir dan kekeringan serta tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Mewujudkan tersedianya peraturan zonasi yang operasional dan sesuai dengan karakteristik BWK IV Kota Magelang untuk mengendalikan alih fungsi lahan.

Di BWK IV ada Kawasan Startegis yang diprioritaskan untuk dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan jasa dan pergudangan dengan skala pelayanan daerah dan regional yaitu: Kawasan Sukarno Hatta . Dengan rencana penanganan yang dilakukan berupa:

- a. Pengembangan Terminal Bongkar Muat;
- b. Pembangunan fasilitas pergudangan;
- c. Penataan RTH kawasan;

4.3.2.5 Bagian Wilayah Kota V (BWK V).

BWK V dengan luas kurang lebih 365 Ha, dengan arahan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan perguruan tinggi, perbelanjaan toko modern, kawasan pengembangan sosial-budaya, olahraga, dan rekreasi. BWK V terdiri dari seluruh Kelurahan Kramat Utara, seluruh Kelurahan Kramat Selatan, dan seluruh Kelurahan Kedungsari. BWK V mempunyai 2 (dua) kawasan strategis yaitu Kawasan Sidotopo yang diarahkan sebagai salah satu kawasan yang mampu kegiatan ekonomi skala kota dan regional dan Kawasan GOR Samapta yang mempunyai arahan pengembangan sebagai pusat kegiatan olah raga dan rekreasi kota, regional, dan nasional.



Gambar 4-8

Peta Pola Ruang BWK V

Arahan Pengembangan BWK V:

- a. mewujudkan pusat perdagangan modern dan tradisional dengan skala pelayanan daerah dan/atau regional;
- b. mewujudkan kelengkapan fasilitas pendukung kegiatan pariwisata, olahraga, pendidikan, dan perdagangan dan jasa;
- c. mewujudkan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
- d. mewujudkan infrastruktur perkotaan untuk mendukung kegiatan pariwisata, olahraga, pendidikan, dan perdagangan dan jasa;
- e. mewujudkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata;
- f. mewujudkan RTH Taman Kota yang memberikan kenyamanan dalam mendukung aktivitas kawasan; dan
- g. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas pariwisata, olahraga, pendidikan, dan perdagangan dan jasa, serta ruang kegiatan sektor informal dan ruang terbuka non hijau.

Dari 2 (dua) kawasan strategis di BWK V, Kawasan startegis Gor Samapta yang akan dilakukan pengembangan di Tahun 2016- 2021, dengan rencanan pengembangan sebagai berikut:

- a. penyelesaian pembangunan Stadion Moch. Subroto;
- b. revitalisasi Gor Samapta dan sekitarnya;
- c. penataan RTH Kawasan.

4.5 Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 juga memasukkan Pokok –pokok Pikiran DPRD Kota Magelang sebagai bagian tidak terpisahkan dari pendekatan politis Penyusunan RKPD. Pokok pokok pikiran DPRD ini setelah melalui penelaahan baik oleh Bappeda Kota Magelang maupun perangkat Daerah terkait, kemudian dimasukkan dalam skenario Rencana Kerja OPD.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 memuat program-program prioritas sebagaimana tema yang diusung. Program prioritas merupakan program utama yang diselenggarakan oleh OPD. Program ini secara langsung dalam bentuk outcome mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

5.1 Kategorisasi Rencana Program Prioritas

Dalam implementasinya, mengingat urgensi dan kapasitas keuangan daerah maka program-program yang telah dijabarkan dibagi menjadi tiga porsi utama, yaitu Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III. Definisi masing-masing prioritas dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5-1
Kategorisasi Program Prioritas

No	Prioritas	Terminologi
1	Prioritas I	merupakan program prioritas pembangunan daerah tahun 2019 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau program unggulan kepala daerah, Kesepakatan Hasil Musrenbang, Hasil Telaahan Pokok Pikiran Dewan serta Program Inter5ensi yang bersifat Nasional/Pro5insi, dan hasil hasil Focuss Group Discussion (FGD)
2	Prioritas II	Merupakan program daerah dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019 dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021
3	Prioritas III	merupakan prioritas program ditingkat OPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap OPD

5.1.1 Program Prioritas I

5.1.1.1 Program Prioritas Tema Perencanaan Tahun 2019

Merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2019 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021. Tema dasar perencanaan tahun ketiga adalah Produktif Bersama Mitra.

Program yang sesuai dengan Tema ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5-2
Program Prioritas Tema Perencanaan Tahun 2019

No	Program Unggulan	Program Prioritas	Indikator	Perangkat Daerah
1	Peningkatan	Program Peningkatan disiplin	Persentase penanganan	Badan Kepegawaian

	kualitas sumber daya aparatur pemerintah	aparatur	pelanggaran disiplin ASN	Pendidikan dan Pelatihan
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural	
			Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	
			Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan: - S1 - S2	
		Program Pendidikan kedinasan	Persentase ASN yang mengikuti diklat fungsional dan teknis	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
			Persentase ASN yang mengikuti diklat kepemimpinan	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah	Persentase ASN yang mengikuti diklat prajabatan	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan		
2	Peningkatan daya saing daerah	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	DPU PR
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase kawasan strategis yang terbangun	DPU PR
		Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	Dinas Perhubungan
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	Setda
		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase pertumbuhan PAD	BPKAD
		Program peningkatan pelayanan kesehatan	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Terakreditasi	
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Prosentase sekolah melaksanakan CBT	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan jumlah pemuda berprestasi tingkat regional, nasional, dan internasional	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Peningkatan cabang olahraga tingkat regional, nasional, dan internasional	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/dibina dan dikembangkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Kota cerdas	Program sarana dan prasarana bidang tehnologi informatika	Cakupan data yang terpusat dan terkendali	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
			Persentase PD yang menerapkan e-g05ernment	
			Interoperabilitas antar system informasi	
			Cakupan WAN (Wide Area Network) Kota	
		Program Pemanfaatan Ruang	Persentase infrastruktur yang	DPU-PR

			memenuhi standar aksesibilitas untuk semua	
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan jenis usaha ekonomi kreatif	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Pemerintahan responsif dan partisipatif	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah KIM per kelurahan	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
			Pertumbuhan jumlah ruang media yang digunakan interaksi	
		Program perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	Bappeda
5	Pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/SDLB/MI/Paket A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			APM SD/SDLB/MI/Paket A	
			APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	
			APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Dinas Sosial
			Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian	
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Penyandang Cacat tidak potensial yang menerima bantuan sosial	Dinas Sosial
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	Dinas Sosial
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	Satpol PP
			cakupan peningkatan penanggulangan bencana	
	Cakupan penanganan korban bencana			
	Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana			
6	Pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	Dinas Lingkungan Hidup
		Perlindungan dan Konser5asi Sumber Daya Alam	Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonser5asi	Dinas Lingkungan Hidup
		Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Berkurangnya 5olume Sampah dari sumbernya	Dinas Lingkungan Hidup
			Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	Dinas Lingkungan Hidup
		Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah akses informasi lingkungan hidup dan data sda dan lingkungan hidup yang tersedia	Dinas Lingkungan Hidup
		Program peningkatan pengendalian polusi	Jumlah pemantauan gerakan di lima sektor	Dinas Lingkungan Hidup
		Program peningkatan	Luas RTH kota	Dinas Lingkungan Hidup

		pengelolaan RTH		
7	Program Kemitraan pemerintah, swasta, masyarakat nadani dan media massa dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan			

5.1.1.2 Akomodasi Hasil Musrenbang

Salah satu prioritas yang harus diakomodir adalah Prioritas Hasil Musrenbang. Makna Musrenbang Kota Magelang dari waktu ke waktu semakin dipersepsikan baik oleh masyarakat dibuktikan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pada setiap level Musrenbang

5.1.1.3 Prioritas Program Hasil FGD

Dalam penyusunan Program, salah satu upaya pendalaman berbagai isu strategis adalah melalui Focus Group Discussion (FGD). FGD dilaksanakan dengan melibatkan OPD terkait bersama stakeholders, LSM dan delegasi masyarakat dari kelurahan dan kecamatan.

Dalam Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 beberapa FGD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-3

Tema FGD dalam Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2019

No	FGD	Isu yang dibahas
1	Penanggulangan Kemiskinan	Membahasn langkah langkah yang bersifat perencanaan dan e5aluasi upaya penanggulangan kemiskinan di bawah angka saat ini 9,05 %
2	Magelang sebagai Kota Layak Anak	Memperkuat Kota Magelang sebagai Kota yang nyaman dan layak bagi anak
3	Penguatan Implementasi Manajemen Persampahan	Meningkatkan implementasi manajemen persampahan untuk mengatasi permasalahan persampahan kota
4	Penguatan implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga	Memperkuat implementasi atas Masterplan MKSB dari hasil e5aluasi pelaksanaan yang telah dilakukan
5	Implementasi RAD Masyarakat Ekonomi ASEAN	Menggagas positioning Kota dalam memberikan langkah antisipatif dan kontributif dalam skema kebebasan arus barang, arus jasa, arus modal, arus SDM dari dan ke Kota Magelang dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN
6	Implementasi Smart City	Upaya meningkatkan eksekusi atas Smary city Model yang dikembangkan di Kota Magelang agar meningkat dari Scattered ke le5el berikutnya
7	Program 100-0-00	Bagaiman upaya agar target 100-0-100 pada tahun 2019 dapat tercapai

8	Memperkuat implementasi Kemitraan	Pola kemitraan dan skenario yang sudah disusun untuk dapat dioptimalkan
9	Percepatan Pencapaian Indikator Makro Daerah	Cukup strategis untuk pengendalian pencapaian indikator makro daerah
10	Sustainable Development Goals.	Mencari format terbaik bagi upaya mendukung pencapaian target indikator SDGs

Program program yang diprioritaskan berdasarkan tema FGD yang akan dilaksanakan pada RKP Kota Magelang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

5.1.1.3.1 Penanggulangan Kemiskinan

Tabel berikut menunjukkan rencana program penanggulangan kemiskinan dalam RKP Kota Magelang Tahun 2019 dengan indikasi program :

Tabel 5-4
Program Penanggulangan Kemiskinan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian 2. Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompk sosial ekonomi sejenis lainnya 	Dinas Sosial
2	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan 2. Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin 3. Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin 	Dinas Kesehatan
3	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA	Dinas Sosial
4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 2. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 3. Pre5alensi Balita Gizi Buruk 	Dinas Kesehatan
5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. APM SD/SDLB/MI/Paket A 2. APK SD/SDLB/MI/Paket A 3. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B 4. APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B 5. Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12 6. Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Rasio guru SD terhadap murid SD 8. Rasio guru SMP terhadap murid SMP 9. Angka Putus Sekolah SD/MI 10. Angka Putus Sekolah SMP/MTs 11. Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun 12. Angka Melanjutkan SD ke SMP 13. Angka Melanjutkan SMP ke SMA 14. Persentase sekolah yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa 15. Penurunan jumlah kenakalan pelajar 16. Adanya kebijakan muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa 17. Prosentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang di implementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan 18. Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah 19. Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi uni5ersal design 	
6	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan pengawasan obat dan makanan	Dinas Kesehatan
7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
8	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase kesediaan obat dan 5aksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan
9	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase alat laboratorium terkalibrasi 2. Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan 3. Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun 	Dinas Kesehatan
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan UCI (Uni5ersal Child Immunization) 2. Penemuan dan Penanganan Penderita DBD 3. Angka Kesakitan DBD 4. Angka Pre5alensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB 5. Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB 6. Pre5alensi HI5 dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun 7. Penemuan kasus HI5 8. Klien HI5-AIDS yang mendapatkan penanganan HI5-AIDS 9. Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HI5/AIDS 	Dinas Kesehatan
11	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar 2. Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah terakreditasi 3. Persentase nakes, sarkes dan sarana penunjang 	Dinas Kesehatan

		<p>yang memiliki ijin</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan 5. Persentase kecamatan yg memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi 6. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 	
12	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif tigtak mandiri	Dinas Kesehatan
13	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya 2. Cakupan Puskesmas Ramah Lansia 	Dinas Kesehatan
14	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K – 4 2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 3. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN) 4. Cakupan Pelayanan Nifas 	Dinas Kesehatan
15	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
16	Program Lingkungan Sehat Perumahan Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	<p>Tersedianya perumahan dengan lingkungan sehat</p> <p>Persentase kawasan strategis yang terbangun</p>	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
17	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos 2. Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 	Dinas Sosial
18	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia	Dinas Sosial
19	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif 2. Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial 3. Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 	Dinas Sosial
20	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase wirausaha baru 2. Persentase pencari kerja yang ditempatkan 3. Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan 	Dinas Tenaga Kerja
21	Program Pendidikan Non Formal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun 2. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A 3. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 4. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 5. Persentase lembaga PNF yang terakreditasi 6. Jumlah Juara FASI 7. Jumlah Juara MTQ 	Dinas Pendidikan
22	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	Dinas Lingkungan Hidup
23	Program Pengembangan	Persentase (%) calon transmigrasi yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja

	Wilayah Transmigrasi		
24	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah regulasi ketahanan pangan 2. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%) 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%) 	Dinas Pertanian dan Pangan
25	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lahan pertanian organik 2. Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian 	Dinas Pertanian dan Pangan
26	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase peningkatan kualitas pelaku UKM 2. Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI 	SEKDA
27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penduduk berakses air minum 2. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai 3. Tersedianya Sistem Air Limbah Skala kawasan 	Dinas Lingkungan Hidup
28	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan 2. Jumlah festival seni dan budaya. 3. Cakupan gelar seni 75% 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah re5iew PERDA/PERWAL 2. Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang in5estasi 3. Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS 	Sekretariat Daerah
30	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
31	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos 2. Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 	Dinas Sosial
32	Program peningkatan peran serta kepemudaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi 2. Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi 3. Persentase pengangguran pemuda 	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
33	Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
34	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat 2. LPM berprestasi <p>Tingkat kota Tingkat provinsi</p> <p>Tingkat nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang 4. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

35	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	1. Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat 2. Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
36	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	PKK Aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
37	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	1. Persentase peningkatan kualitas pelaku UKM 2. Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	Sekretariat Daerah
38	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
40	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	Dinas Kesehatan
41	Program perencanaan sosial budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	Bappeda
42	Dst....		

5.1.1.3.2 Program Kota Layak Anak

Kepala Daerah berkomitmen untuk menjadikan Kota Magelang sebagai Kota Layak Anak, tujuan kota layak anak ini adalah agar dapat membangun anak-anak yang berkualitas dengan berusaha untuk memenuhi hak sesuai dengan kebutuhan serta perlindungan anak.

Kebutuhan anak yang harus dipenuhi tak hanya dari sisi pendidikan, tetapi juga fisik mau pun non fisik. Dari sedikitnya 31 hak anak, ada empat hal utama yang harus menjadi perhatian ekstra, yakni hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak mendapat perlindungan dan hak untuk berpartisipasi, dan keterlibatan unsur anak harus dimulai sejak proses perencanaan, untuk itu program prioritas Magelang menuju Kota Layak Anak yang akan dilaksanakan di Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5-5
Program Kota Layak Anak

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan	1. APM SD/SDLB/MI/Paket A 2. APK SD/SDLB/MI/Paket A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
	Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 3. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B 4. APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B 5. Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12 6. Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15 7. Rasio guru SD terhadap murid SD 8. Rasio guru SMP terhadap murid SMP 9. Angka Putus Sekolah SD/MI 10. Angka Putus Sekolah SMP/MTs 11. Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun 12. Angka Melanjutkan SD ke SMP 13. Angka Melanjutkan SMP ke SMA 14. Persentase sekolah yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa 15. Penurunan jumlah kenakalan pelajar 16. Adanya kebijakan muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa 17. Prosentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang di implementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan 18. Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah 19. Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi uni5ersal design 	
2	Program Pendidikan Anak Usia Dini	<ol style="list-style-type: none"> 1. APK PAUD 2. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Program Pendidikan Non Formal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun 2. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A 3. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 4. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 5. Persentase lembaga PNF yang terakreditasi 6. Jumlah Juara FASI 7. Jumlah Juara MTQ 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase peningkatan judul buku 2. Persentase peningkatan jumlah buku 3. Prosentase SDM pengelola perpustakaan yang berkompeten 4. Presentase perpustakaan aktif 5. Cakupan pelayanan melalui e-Library 6. Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan 	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional <ol style="list-style-type: none"> a. Propinsi b. Nasional 2. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 3. Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B 4. Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs 5. Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
7	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-15 2. Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik 3. Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-15 4. Persentase Guru SD bersertifikat pendidik 5. Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-15 6. Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik 7. Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi 8. Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
11	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase kesediaan obat dan 5aksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan
12	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase alat laboratorium terkalibrasi 2. Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan 3. Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun 	Dinas Kesehatan
13	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 2. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 3. Pre5alensi Balita Gizi Buruk 	Dinas Kesehatan
14	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar 2. Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah terakreditasi 3. Persentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin 4. Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan 5. Persentase kecamatan yg memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi 6. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 	Dinas Kesehatan
15	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif tingkat mandiri	Dinas Kesehatan
16	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 2. Cakupan Kunjungan Bayi 3. Cakupan Pelayanan Anak Balita 4. Cakupan Puskesmas Ramah Anak 	Dinas Kesehatan
17	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K – 4 2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 3. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN) 	Dinas Kesehatan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		4. Cakupan Pelayanan Nifas	
18	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos 2. Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 	Dinas Sosial
19	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Penyandang Cacat tidak potensial yang menerima bantuan sosial	Dinas Sosial
20	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase rumah sehat	Dinas Kesehatan
21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan UCI (Uni5ersal Child Imunization) 2. Penemuan dan Penanganan Penderita DBD 3. Angka Kesakitan DBD 4. Angka Pre5alensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB 5. Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB 6. Pre5alensi HI5 dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun 7. Penemuan kasus HI5 8. Klien HI5-AIDS yang mendapatkan penanganan HI5-AIDS 9. Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HI5/AIDS 	Dinas Kesehatan
22	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan 2. Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin 3. Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin 	Dinas Kesehatan
23	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	Dinas Lingkungan Hidup
24	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum 2. Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi 	Dinas Perhubungan
25	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penanganan penyakit masyarakat 2. Perda yang mengatur kontrol tempat hiburan 3. Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras dan tindak prostitusi 4. Jumlah kampung bebas narkoba 5. Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN 	Satuan Polisi Pamong praja
26	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana 2. Cakupan tim relawan siaga bencana 3. Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana 4. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana 5. Cakupan penanganan korban bencana 	Satuan Polisi Pamong praja
27	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
28	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 2. Jumlah pengunjung museum 3. Jumlah koleksi museum 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29	Program peningkatan peran serta kepemudaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi 2. Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi 3. Persentase pengangguran pemuda 	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
30	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kriminalitas yang tertangani 2. Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila 3. Perda pelarangan peredaran narkoba 4. Jumlah Kampung Bebas Narkoba 5. Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN 6. Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HI5/AIDS 7. Rasio jumlah siskamling aktif 8. Frekuensi Patroli Satpol PP 9. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 	Badan Kesbangpolinmas
31	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional 2. Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional <ul style="list-style-type: none"> - Peringkat di POPDA SD - Peringkat di POPDA SMP - Peringkat di POPDA SMA - Peringkat di Dulongmas - Peringkat di PORPRO5 3. Jumlah klub olah raga 4. Jumlah organisasi olah raga 	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
32	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah re5iew PERDA/PERWAL 2. Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang in5estasi 3. Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS 	Sekretariat Daerah
33	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase lapangan olahraga yang dire5italisasi 2. Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik 	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
34	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
35	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio KDRT 2. Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 4. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu 5. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS 6. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu 	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu 8. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 9. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 10. Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas 	
36	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
37	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi 2. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%) 3. Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%) 4. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan 5. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan 6. Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun 7. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun 8. Partisipasi laki-laki dalam ber-KB 9. Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri 10. Persentase peserta KB yang putus pakai (drop out) 11. Persentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun 12. Persentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) 13. Persentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR) 14. Persentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif 15. Persentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif 16. Prosentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun 17. Persentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun 18. Persentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro 19. Persentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga 20. Persentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan 21. Persentase Peningkatan jumlah keluarga sejahtera 22. Rasio kesesuaian kegiatan Bina Keluarga dengan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah 	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
38	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
39	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
40	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
41	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
42	Program perencanaan sosial budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	Bappeda
43	Dst....		

5.1.1.3.3 Manajemen Persampahan

Sampah menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat perkotaan khususnya Kota Magelang. Keterbatasan lahan dan masa hidup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banyuurip yang secara teknis berakhir mendorong pemerintah dan seluruh elemen mencari inovasi dari permasalahan tersebut. Dapat dikatakan pada sejak tahun 2019 ini Kota Magelang sudah darurat sampah. FGD Manajemen Persampahan dilaksanakan sebagai salah satu upaya menghimpun usulan dan inovasi dari berbagai pihak. Selain strategi 3 R (Reduce, reuse dan recycle) yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif masyarakat, terobosan yang tak kalah penting adalah dengan pengembangan kampung-kampung organik. Kampung organik ini dimaksudkan sebagai upaya lebih lanjut atas bagaimana manajemen persampahan berbasis masyarakat dapat menjangkau aspek ekonomi sosial serta lingkungan hidup. Sejak tahun 2019 hingga ke depan seluruh Kelurahan di Kota Magelang ditargetkan telah semakin intensif mengembangkan secara baik kampung-kampung organik dimaksud. Program-program prioritas mendukung Manajemen Persampahan berbasis masyarakat antara lain sebagai berikut:

Tabel 5-6
Program Manajemen Persampahan

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Berkurangnya 50 volume Sampah dari sumbernya 2. Prosentase sampah perkotaan yang ditangani 3. Berkurangnya 50 volume Sampah dari sumbernya	Dinas Lingkungan Hidup
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	Dinas Lingkungan Hidup
3	Program Perlindungan	1. Indeks Kualitas Air,	Dinas Lingkungan

	dan Konser5asi Sumber Daya Alam	<ol style="list-style-type: none"> 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Tutupan Hutan 4. Jumlah SDA yang terkonser5asi Jenis flora Jenis fauna	Hidup
4	Program Pengelolaan Pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penurunan kejadian kriminal di lingkungan pasar 2. Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisional 3. Cakupan pedagang pasar yang dibina 4. Persentase pasar tradisional yang dikelola 	Dinas Perindag

5.1.1.3.4 Penguatan Implementasi Magelang Kota Sejuta Bunga

Penetapan branding Kota Magelang dengan “Kota Sejuta Bunga” sejak tahun 2011 berdampak pada perwujudan branding tersebut sampai saat ini. Makna Kota Sejuta Bunga sebagai identitas atau branding Kota Magelang dalam mengemas Kota Magelang sebagai Kota Jasa. Adapun bentuk nyata dari Kota Sejuta Bunga ini adalah terwujudnya Kota Magelang sebagai kota yang bersih, indah, tertib, dan nyaman dengan bunga sebagai ikon utama.

Dengan kota yang lebih menarik maka akan semakin terbuka peluang usaha dan investasi, yang pada akhirnya akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota. Dan seiring dengan peningkatan peran dan fungsi sebagai kota jasa, maka akan memberi peningkatan kepada kesejahteraan masyarakat.

Di Tahun 2019, penguatan implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga , dengan program-program prioritas yang mendukung adalah:

Tabel 5-7
Program Penguatan Implementasi MKSB

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 2. Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir 3. Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir 4. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik 5. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir 	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	Dinas Perhubungan
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkurangnya 5olume Sampah dari sumbernya 2. Prosentase sampah perkotaan yang 	Dinas Lingkungan Hidup

	Persampahan	ditangani 3. Berkurangnya 50lume Sampah dari sumbernya	
4	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	Dinas Lingkungan Hidup
5	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH Kota	Dinas Lingkungan Hidup
6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	1. Jumlah regulasi ketahanan pangan 2. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%) 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	Dinas Pertanian dan Pangan
7	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	1. Prosentase Petani yang melaksanakan GHP 2. Pertumbuhan jumlah komoditas agribisnis pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
8	Program Perlindungan dan Konser5asi Sumber Daya Alam	1. Indeks Kualitas Air, 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Tutupan Hutan 4. Jumlah SDA yang terkonser5asi Jenis flora Jenis fauna	Dinas Lingkungan Hidup
9	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah pemantauan gerakan di lima sektor	Dinas Lingkungan Hidup
10	Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas	1. Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum 2. Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	Dinas Perhubungan
11	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Dinas Pertanian dan Pangan
12	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1. Frekuensi Patroli Satpol PP 2. Tingkat Penyelesaian pelanggaran perda 3. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 4. Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat 5. Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum (K3) 6. Cakupan Linmas per 10.000 penduduk 7. Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah	Satuan Polisi Pamong Praja

		petugas Linmas 8. cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	
13	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 2. Jumlah pengunjung museum 3. Jumlah koleksi museum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1. Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan 2. Jumlah festival seni dan budaya. 3. Cakupan gelar seni 75%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15	Program Pemberdayaan Penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	1. Prosentase Petani yang melaksanakan GAP 2. Rasio petani terlatih	Dinas Pertanian dan Pangan
16	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Lama Kunjungan Wisatawan 2. Persentase TIC yang representatif 3. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 4. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
17	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Destinasi Wisata Unggulan 2. Persentase destinasi wisata yang memenuhi sapta pesona	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
18	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
20	Program Pengembangan Nilai Budaya	1. Jumlah gedung kesenian 2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 3. Cakupan kajian seni 50% 4. Cakupan fasilitas seni 30% 5. Cakupan sumber daya manusia kesenian 25% 6. Cakupan tempat 100% 7. Cakupan organisasi 34%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21	dst		

5.1.1.3.5 Penguatan Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Dalam rangka menghadapi yang berlangsung mulai akhir tahun 2015, Kota Magelang telah secara antisipatif menyiapkan RAD menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, dimana terdapat kebebasan arus barang, jasa, investasi dan tenaga kerja, diperlukan kesiapan dalam menghadapinya agar pasar bebas tersebut dapat kita

manfaatkan untuk kemajuan daerah. Untuk penguatan implementasinya pada tahun 2019 beberapa program prioritas yang mendukung antara lain:

Tabel 5-8

Penguatan Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program perencanaan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 2. Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir 3. Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir 4. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik 5. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir 	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase peserta pelatihan tersertifikasi 2. Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kompetensi 3. Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP 	Dinas Tenaga Kerja
3	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase peningkatan kualitas pelaku UKM 2. Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI 	Sekretariat Daerah
4	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan 2. Jumlah festival seni dan budaya. 3. Cakupan gelar seni 75% 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Cakupan pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri	Sekretariat Daerah
6	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah revisi PERDA/PERWAL 2. Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi 3. Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS 	Sekretariat Daerah
7	Program Perencanaan Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	Bappeda
8	dst		

5.1.1.3.6 Penguatan Implementasi Menuju Smart City

Dalam rangka penguatan implementasi atas Masterplan Smart City Kota Magelang, hasil FGD menunjukkan beberapa pendekatan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 5-9

Penguatan Implementasi Smart City

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
2	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah		Dinas Tenaga Kerja
3	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional <ol style="list-style-type: none"> a. Propinsi b. Nasional 2. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 3. Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B 4. Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs 5. Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 2. Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik 3. Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 4. Persentase Guru SD bersertifikat pendidik 5. Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 6. Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik 7. Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi 8. Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa 	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
5	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan 2. Rasio KBWU yang tidak melakukan pengujian 	Dinas Perhubungan
6	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah re5iew PERDA/PERWAL 2. Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang in5estasi 3. Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS 	Sekretariat Daerah
7	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statitika
8	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase LKJIP OPD dengan nilai baik 2. Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh OPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah 3. Perjanjian Kinerja yang memenuhi kriteria standar 4. Persentase LKJIP OPD dengan nilai baik 5. Penurunan kasus temuan LKPD 6. Rasio laporan APBD, DAK dan Bantuan Keuangan tepat waktu 	Semua Perangkat Daerah

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh OPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah 8. Nilai survey kepuasan penggunaan layanan PD 9. Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP 	
9	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 2. Jumlah pengunjung museum 3. Jumlah koleksi museum 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: <ol style="list-style-type: none"> a. Radio b. Media cetak 2. Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin 3. Jumlah KIM 4. Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. 5. Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa 6. Peningkatan teknologi komunikasi dan informasi 	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
11	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lama Kunjungan Wisatawan 2. Persentase TIC yang representatif 3. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 4. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
12	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
13	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi SIPID (Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah) 2. Implementasi pemanfaatan SPIPISE 	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
14	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik 2. Jumlah Sub terminal (TERMINAL Tipe C) yang tertata 3. Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik 4. Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum 5. Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte) 	Dinas Perhubungan
15	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	Dinas Kesehatan
16	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: <ol style="list-style-type: none"> a. Radio b. Media cetak 	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin 3. Jumlah KIM 4. Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. 5. Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa 6. Peningkatan teknologi komunikasi dan informasi 	
17	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase OPD yang telah melaksanakan arsip baku 2. Persentase arsip dan risalah 3. Persentase Penyelamatan Arsip 	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 2. Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir 3. Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir 4. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik 5. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir 	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
19	Dst		

5.1.1.3.6 Sustainable Development Goals (SDGs)

Agenda paska MDGS yang diratifikasi oleh Indonesia adalah Sustainable Development Goals. Kota Magelang dalam rangka mendukung pencapaian gloab SDGS telah menetapkan titik berat program yang akan ditempuh sebagai berikut :

Tabel 5-10
Program Prioritas SDGs

No	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Program Kesehatan Promosi dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. APM SD/SDLB/MI/Paket A 2. APK SD/SDLB/MI/Paket A 3. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B 4. APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B 5. Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12 6. Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15 7. Rasio guru SD terhadap murid SD 8. Rasio guru SMP terhadap murid SMP 9. Angka Putus Sekolah SD/MI 10. Angka Putus Sekolah SMP/MTs 11. Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun 12. Angka Melanjutkan SD ke SMP 13. Angka Melanjutkan SMP ke SMA 14. Persentase sekolah yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		<p>dan pendidikan karakter bagi siswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 15. Penurunan jumlah kenakalan pelajar 16. Adanya kebijakan muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa 17. Prosentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang di implementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan 18. Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah 19. Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi uni5ersal design 	
3	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase kesediaan obat dan 5aksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan
4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos 2. Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 	Dinas Sosial
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase alat laboratorium terkalibrasi 2. Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan 3. Proporsi Kasus Diabetes Militus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun 	Dinas Kesehatan
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	<ol style="list-style-type: none"> 1. APK PAUD 2. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan UCI (Uni5ersal Child Immunization) 2. Penemuan dan Penanganan Penderita DBD 3. Angka Kesakitan DBD 4. Angka Pre5alensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB 5. Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB 6. Pre5alensi HI5 dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun 7. Penemuan kasus HI5 8. Klien HI5-AIDS yang mendapatkan penanganan HI5-AIDS 9. Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HI5/AIDS 	Dinas Kesehatan
8	Program Pendidikan Non Formal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun 2. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A 3. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 4. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 5. Persentase lembaga PNF yang terakreditasi 6. Jumlah Juara FASI 7. Jumlah Juara MTQ 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif tigkat mandiri	Dinas Kesehatan
11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional <ol style="list-style-type: none"> a. Propinsi 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		<p>b. Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 3. Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B 4. Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/MTs 5. Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi 	
12	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 2. Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik 3. Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 4. Persentase Guru SD bersertifikat pendidik 5. Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-I5 6. Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik 7. Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi 8. Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang	Dinas Pertanian dan Pangan
14	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lahan pertanian organic 2. Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian 	Dinas Pertanian dan Pangan
15	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pelaku usaha peternakan organik: Peternak ayam buras/ ayam broiler Peternak kelinci Peternak kambing/domba 2. Rasio peternak terlatih 	Dinas Pertanian dan Pangan
16	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta 3. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan 	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 2. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 3. Pre5alensi Balita Gizi Buruk 	Dinas Kesehatan
18	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K – 4 2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 3. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN) 4. Cakupan Pelayanan Nifas 	Dinas Kesehatan
19	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

			Berencana
20	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio KDRT 2. Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 4. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu 5. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS 6. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu 7. Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu 8. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 9. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum 10. Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas 	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
21	Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
22	Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan peserta KB aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah regulasi ketahanan pangan 2. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%) 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%) 	Dinas Pertanian dan Pangan
24	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	Dinas Kesehatan
25	Program perencanaan sosial budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	Bappeda
dst			

Dan program program yang mendukung dan mengarah pada FGD FGD pada tema yang lain, akan tersaji pada Rancangan RKPD Kota Magelang Tahun 2019.

5.1.1.4 Prioritas Program Akomodasi Pokok Pokok Pikiran DPRD

Pokok pokok Pikiran DPRD Kota Magelang disampaikan bersamaan dengan Penyusunan Rancangan RKPD Kota Magelang. Melalui hasil telaahan baik oleh Bappeda maupun oleh perangkat Daerah terkait maka dapat ditampilkan program yang merupakan akomodasi Pokok Pikiran Dewan

5.1.2 Program Prioritas II

Merupakan program daerah dalam rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD serta pencapaian indikator daerah.

5.1.3 Program Prioritas III

Merupakan prioritas program ditingkat OPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/ fungsi tiap OPD.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimulai sejak penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, Penetapan Indikator Kinerja Daerah dipertegas dalam bab tersendiri. Hal ini yang menjadi salah satu faktor pembeda dari regulasi sebelumnya.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Hal ini menjadi dasar penilaian kinerja baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun setelahnya sekaligus sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.

Indikator tersebut akan menjadi parameter prioritas pembangunan sekaligus sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun terkait. Pada dasarnya penyusunan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan tujuan pembangunan, yang merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan daerah (terutama menyangkut pelayanan dasar), serta penjabaran strategi yang diturunkan dari visi dan misi kepala daerah, tanpa mengabaikan kebijakan eksternal yang termuat dalam RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJM Provinsi Jawa Tengah dan RPJP Kota Magelang 2005-2025.

Tabel penetapan Indikator Kinerja Daerah Indikator Kinerja Utama Kota Magelang dalam rangka pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Magelang sebagaimana tertuang pada Tabel 6-1 dan 6-2 sebagai berikut :

Tabel VI.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD	
			2016	2017	2018	2019	2020		2021
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,07%	5,18% ± 0,25%	5,04% ± 0,25%	5,05% ± 0,25%	5,11% ± 0,25%	5,21% ± 0,25%	5,33% ± 0,25%	5,33% ± 0,25%
2	PDRB per Kapita (tahundasar 2010, Rp/kapita/tahun)	53.543.836,59*	58.309.122,98	63.394.588,17	68.656.817,64	74.314.414,01	80.296.686,81	86.475.098,49	86.475.098,49
3	Laju Inflasi	2,7%	3,57% - 5,15%	3,36% - 4,94%	3,15% - 4,73%	2,93% - 4,51%	2,72% - 4,30%	2,51% - 4,09%	2,51% - 4,09%
4	Indeks Gini	0,3438 - 0,3762	0,3435-0,3637	0,343-0,3569	0,3421-0,3523	0,341-0,3489	0,3397-0,3461	0,338-0,3438	0,338-0,3438
5	Indeks Williamson	0,0806	0,0892	0,0804	0,0725	0,0653	0,0588	0,0530	0,0530
2	Fokus Kesejahteraan Sosial								
1	Tingkat Kemiskinan/ Angka Kemiskinan	9,05%	8,36% – 8,89%	7,41% – 8,09%	6,98% – 7,38%	6,65% - 6,90%	6,42% - 6,61%	6,12% - 6,40%	6,12% - 6,40%
2	Indeks Pembangunan Manusia	76,39	76,61	76,9	77,26	77,61	78	78,37	78,37
a	Rata-rata lama sekolah	10,32 Tahun	10,36 Tahun	10,41 Tahun	10,46 Tahun	10,50 Tahun	10,55 Tahun	10,59 Tahun	10,59 Tahun
b	Harapan Lama Sekolah	13,08 Tahun	13,27 Tahun	13,45 Tahun	13,63 Tahun	13,82 Tahun	14 Tahun	14,19 Tahun	14,19 Tahun
c	Angka Harapan Hidup	76,58 Tahun	76,67 Tahun	76,71 Tahun	76,76 Tahun	76,8 Tahun	76,85 Tahun	76,9 Tahun	76,9 Tahun
d	Pengeluaran per Kapita (Rp.)	10.793.000	10.886.000	11.083.570	11.281.140	11.478.710	11.676.290	11.873.860	11.873.860
3	Indeks Pembangunan Gender	95,66	95,79	95,9	95,99	96,08	96,16	96,23	96,23
4	Indeks Pemberdayaan Gender	78,83	78,96	79,2	79,35	86,3	86,95	87,15	87,15
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,43%	6,43% - 6%	6% - 5%	5,8% - 5%	5,5% - 5%	5,2% - 5%	5% - 4,5%	5% - 4,5%
6	Angka Pertumbuhan Penduduk	0,337%	0,353%	0,244%	0,384%	0,199%	0,137%	0,133%	0,133%
B	ASPEK PELAYANAN UMUM								

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD	
			2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	FokusUrusanPemerintahanWajibPelayananDasar								
a	Pendidikan								
1	Rata-rata lama sekolah	10,32 Tahun	10,36 Tahun	10,41 Tahun	10,46 Tahun	10,50 Tahun	10,55 Tahun	10,59 Tahun	10,59 Tahun
2	Persentase sekolah berstandar nasional								
	- SD	30,66%	35,66%	40,66%	45,66%	50,66%	55,66%	60,66%	60,66%
	- SMP	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
3	APM SD	96,51%	96,91%	97,31%	97,71%	98,11%	98,51%	98,91%	98,91%
4	APK SD	108,15%	110%	112%	114%	116%	118%	120%	120%
5	APM SMP	74,62%	75%	76%	78%	80%	82%	84%	84%
6	APK SMP	81,92%	82%	85%	88%	90%	96%	100%	100%
7	Angka Melek Huruf	97%	97,35%	97,67%	97,99%	98,31%	98,63%	98,95%	98,95%
8	Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design)	NA	10%	20%	30%	40%	50%	60%	60%
b	Kesehatan								
1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 RS, 5 Puskesmas, 1 Lab Kesda)	0	3 buah(23%)	5 buah(15%)	7 buah(54%)	10 buah (77%)	13 buah(100%)	13 buah(100%)	13 buah(100%)
2	Angka KematianIbu/ 100.000 KH	187,5	135	126	120	110	95	70	70
3	Angka Kematian Bayi/ 1.000 KH	15,63	15	14,5	14	13,5	13	12,5	12,5
4	Angka Kematian Balita/ 1.000 KH	0,63	0,16	0,155	0,15	0,145	0,14	0,135	0,135
5	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
7	Angka Kesakitan DBD	130.93	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
8	Angka Prevalensi TB	128.33	<106	<105	<104	<103	<102	<101	<101
9	Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	0,04%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%
10	Persentase rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat	96%	96%	97%	97%	98%	98%	98%	98%
11	Persentase sarana prasarana penyedia layanan kesehatan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design)	NA	0%	10%	20%	30%	40%	50%	50%

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	
c	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
	1. Persentase Ruang Terbuka Hijau							
	- Privat	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	- Publik	18,37%	18,37%	18,37%	18,42%	18,44%	18,46%	18,50%
	2. Rasi obangunan ber IMB persatuan bangunan	22%	23%	24%	25%	26%	27%	33%
d	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
	1 Presentasi penyediaan perumahan bagi Masyarakat	12,80%	12,50%	12%	11,5%	11%	10,5%	10%
	2 Persentase jumlah Kepala Keluarga yang terlayani air minum	82,30%	87,30%	92,30%	97,30%	100%	100%	100%
	3 Luas kawasan kumuh	121,27 Ha	69,50 Ha	39,65 Ha	12,12 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha
	4 Rasio Rumah Tangga yang masih BABS	7%	6%	3%	2%	0%	0%	0%
	5 Prosentase RTLH	4,40%	3,70%	2,90%	2,30%	1,70%	1,0%	0%
e	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
	1 Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	1,29%	3,98%	6,68%	9,38%	12,08%	15,08%	17,48%
	2 Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	NA	0	5,80%	11,76%	17,64%	23,53%	35,29%
	3 Prosentase penurunan penyakit masyarakat	-2,13%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
	4 Angka kriminalitas	14,14%	13,64%	13,14%	12,64%	12,14%	11,64%	11,14%
	5 Angka kriminalitas yang tertangani	11,08%	11,50%	11,50%	12%	12%	12,50%	12,50%
	6 Prosentase penurunan kasus narkoba	-13,04%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
f	Sosial							
	1 Persentase Penurunan PMKS	14%	14%	15%	16%	17%	18%	19%
	2 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,56%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
	3 Ketersediaan kelembagaan pusat – pusat keagamaan (religious centre)	NA	0	0	1	0	0	1
2	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar							
a	Tenaga Kerja							

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	1 Persentase penyerapan tenaga kerja	60%	60%	65%	65%	65%	70%	70%	70%
b	PemberdayaanPerempuanandanPerlindunganAnak								
	1 Rasio KDRT	0,07%	0,065%	0,060%	0,055%	0,050%	0,04%	0,04%	0,04%
	2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	13,15%	15%	17%	20%	23%	26%	30%	30%
	3 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	15,73%	17%	20%	23%	26%	30%	35%	35%
c	Pangan								
	1 Ketersediaan pangan utama beras	12.729 Ton	12.780 Ton	12.831 Ton	12.882 Ton	12.933 Ton	12.985 Ton	13.037 Ton	13.037 Ton
d	LingkunganHidup								
	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54,12	58	62	65	67,51	68	68,5	68,5
	2 Indeks Pencemaran Air	68,9	75,6	75,65	75,7	75,8	76,79	76,84	76,84
	3 Indeks Pencemaran Udara	45,3	50,11	61,8	70,5	77,7	77,9	79,1	79,1
	4 Indeks Tutupan Vegetasi	48,16	48,29	48,55	48,8	49,05	49,31	49,56	49,56
	5 Volume sampah yang dibuangke TPSA	160,58	160,58	158,7	155,7	153,7	151,7	136,7	136,7
e	PemberdayaanMasyarakatdanDesa								
	1 Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	44,83%	51,72%	58,62%	65,52%	75,86%	82,76%	89,66%	89,66%
	2 Persentase swadaya masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	45%	45%	46%	47%	48%	49%	50%	50%
f	Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana								
	1 Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak
g	Perhubungan								
	1 Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	7,83	8	8,25	8,5	8,75	9	9,25	9,25

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
h	Komunikasi dan Informatika								
1	Persentase PD menerapkan e-Gov	NA	60%	80%	90%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi	NA	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
i	Penanaman Modal								
1	Pertumbuhan nilai investasi PMA	0%	5%	5%	5%	10%	10%	15%	15%
2	Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
j	Kepemudaan dan Olahraga								
1	Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional	5buah	6buah	6buah	7buah	7buah	8buah	8buah	8buah
	- Regional	4buah	4buah	4buah	5buah	5buah	6buah	6buah	6buah
	- Nasional	1buah	2buah	2buah	2buah	2buah	2buah	2buah	2buah
	- internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	14buah	17buah	17buah	17buah	17buah	17buah	20buah	20buah
	- Regional	8buah	10buah	10buah	10buah	10buah	10buah	11buah	11buah
	- Nasional	4buah	5buah	5buah	5buah	5buah	5buah	6buah	6buah
	- internasional	2buah	2buah	2buah	2buah	2buah	2buah	3buah	3buah
k	Statistik								
1	Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	60%	60%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
l	Kebudayaan								
1	Capaian pelestarian budaya dan kesenian daerah	13%	13,5%	14%	14,5%	15%	15,5%	16%	16%
2	Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	13%	13,5%	14%	14,5%	15%	15,5%	16%	16%
3	Perlindungan situs a tau bangunan cagar budaya	0	0	5	10	15	20	25	25

N O	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	
m	Perpustakaan							
1	Persentase kunjungan perpustakaan	69,37%	70,95%	72,52%	74,25%	75,47%	77,07%	78,63%
2	Jumlah kunjungan perpustakaan	92.021	94.110	96.200	98.500	100.113	102.230	104.305
n	Kearsipan							
1	Persentase pengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar	43%	45%	48%	52%	65%	68%	72%
3	Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan							
a	Pariwisata							
1	Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	3,20%	3,40%	3,60%	3,80%	4,00%	4,20%	4,40%
2	Jumlah Wisatawan							
	- Nusantara (orang)	1.133.373	1.134.846	1.136.435	1.138.140	1.139.961	1.141.899	1.143.954
	- Mancanegara (orang)	5.171	5.178	5.185	5.193	5.201	5.210	5.219
b	Perdagangan							
1	Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	15,70%	15,88%	16,15%	16,43%	16,65%	16,85%	17,11%
2	Persentase sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang menuju standar Inklusivitas (universal design)	NA	20%	20%	20%	40%	60%	60%
3	Prosentase sarana prasarana perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang dalam kondisi baik	70%	75%	75%	80%	80%	80%	80%
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
a	Perencanaan							
1	Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	85%	88%	90%	93%	95%	98%	100%
2	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	52%	55%	60%	62%	65%	68%	70%

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
b	Keuangan								
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,40%	19,73%	26,34%	30,33%	32,55%	34,21%	36,35%	36,35%
2	Derajat Otonomi Fiskal	23,89%	21,40%	25,86%	29,82%	31,96%	33,88%	35,62%	35,62%
3	Rasio ketergantungan Keuangan Daerah terhadap dana pusat	83,60%	80,27%	73,66%	69,67%	67,45%	65,79%	63,65%	63,65%
4	Nilai Opini BPK atas LKPD	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
c	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan								
1	Persentase pegawai berkinerja baik	96%	98%	97%	97%	97,5%	97,9%	98%	98%
d	Penelitian dan Pengembangan								
1	Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti	26%	27%	28%	29%	30%	31%	32%	32%
e	Fungsi Lain								
1	Capaian SPM Kota Magelang	89,09%	50%	60%	70%	80%	100%	100%	100%
2	Indeks EKPPD	2,92	2,95	3	3,1	3,12	3,13	3,14	3,14
3	Hasil implementasi SAKIP	CC	CC (53,00)	CC (54,00)	CC (56,00)	CC (58,00)	CC (59,00)	B (60,00)	B (60,00)
4	Persentase pelaksanaan PATEN di kecamatan	NA	30%	45%	55%	65%	75%	85%	85%
5	Persentase perkembangan kerja sama daerah	1,05%	2,08%	3,06%	3,96%	4,76%	5,45%	6,03%	6,03%
6	Persentase PD dengan nilai pelayanan baik	24,24%	36,36%	48,48%	60,60%	72,72%	84,84%	100%	100%
7	Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

N O	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
C	APEK DAYA SAING DAERAH								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	50,26	56,21	57,00	57,51	58,00	58,51	59,00	59,00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	74,71 (B)	74,80 (B)	75 (B)	77 (B)	78 (B)	79 (B)	80 (B)	80 (B)
3	Rasio Infrastruktur Perkotaan dalam kondisi baik	79%	79%	82%	83%	84%	85%	86%	86%
4	Tingkat Kematangan Kota Cerdas	Scattered (48,89)	Scattered (48,90 – 51,5)	Scattered (51,6 – 54,5)	Scattered (54,6 – 57,5)	Scattered (57,6 – 59,9)	Integrative (60 – 62,5)	Integrative (62,6 – 65)	Integrative (62,6 – 65)
5	Tingkat Kerukunanhidup umat antar suku, adat, ras dan agama	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 6-2
Indikator Kinerja Utama

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan menuju cerdas dan berdaya saing.	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	Banyaknya murid (SD/MI) dibagi banyaknya penduduk usia (7-12 th) X 100%	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Daftar/Data murid (SD/MI) yang berasal dari Kota Magelang - Data penduduk usia 7-12 th
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	Banyaknya murid usia (7-12 th) dibagi banyaknya penduduk usia (7-12 th) X 100%	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Daftar/Data murid usia (7-12 th) yang berasal dari Kota Magelang - Data penduduk usia 7-12 th
	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	Banyaknya murid (SMP/MTs) dibagi banyaknya penduduk usia (12-15 th) X 100%	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Daftar/Data murid (SMP/MTs) yang berasal dari Kota Magelang - Data penduduk usia 12-15 th
	4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	Banyaknya murid usia (12-15 th) dibagi banyaknya penduduk usia (12-15 th) X 100%	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Daftar/Data murid usia (12-15) yang berasal dari Kota Magelang - Data penduduk usia 12-15 th
	5. Rata-rata lama sekolah	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Data IPM
	6. Harapan Lama Sekolah	Tahun	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa mendatang	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Data IPM
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.	1. Angka Harapan Hidup	Tahun	Angka perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk (dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur)	- Dinas Kesehatan	- Data IPM

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	2. AKI/ 1.000 KH	Angka	Jumlah kematian ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dibagi Jumlah kelahiran hidup x 100.000	- Dinas Kesehatan	- Data Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)
	3. AKB/ 1.000 KH	Angka	Jumlah kematian bayi dibagi Jumlah kelahiran hidup x 1.000	- Dinas Kesehatan	- Data Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)
	4. AKABA	Angka	Jumlah kematian balita dibagi Jumlah kelahiran hidup x 1.000	- Dinas Kesehatan	- Data Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)
	5. Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	Jumlah balita penderita gizi buruk berdasarkan pengukuran Berat Badan Menurut Umur serta Berat Badan Menurut Tinggi Badan berada di bawah garis merah Grafik Pertumbuhan Balita pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah Balita yang ditimbang x 100%	- Dinas Kesehatan	- Data F3 Gizi
	6. Angka Kesakitan DBD	Angka	Jumlah penderita DBD dalam satu tahun dibagi Jumlah penduduk dalam kurun waktu yang sama x 10.000	- Dinas Kesehatan	- Laporan Kewaspadaan Dini RS
	7. Angka Prevalensi Kasus TB	Angka	Jumlah pasien TB yang ditemukan dan diobati selama setahun dibagi Jumlah penduduk yang ada dalam wilayah dan kurun waktu yang sama x 100.000	- Dinas Kesehatan	- Laporan Sistem Informasi TB Terpadu
	8. Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	%	Jumlah penderita HIV usia 15-49 tahun yang ditemukan selama setahun dibagi Jumlah estimasi populasi kunci dalam wilayah dan kurun waktu yang sama x 100%	- Dinas Kesehatan	- Laporan Sistem Informasi HIV-AIDS
Meningkatnya kontribusi sektor, perdagangan bagi perekonomian daerah	1. Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	%	PDRB sektor perdagangan/Total PDRB	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	- Data PDRB
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	Indeks kualitas lingkungan hidup diukur dengan 3 Indeks yaitu: Indeks pencemaran air, Indeks	- Dinas Lingkungan Hidup	- Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			pencemaran udara dan Indeks tutupan vegetasi; Indeks Pencemaran Air sbb: $P_i = (C_i/L_i)_{\max} + (C_i/L_i)_{\text{rata-rata}}$ Indeks Pencemaran Udara sbb: IP NO ₂ +IP SO ₂ Indeks Tutuan Vegetasi sbb: LHP + LHS		
Meningkatnya kualitas infrastruktur Kota Magelang	1. Rasio Infrastruktur Perkotaan Dalam Kondisi Baik	%	Panjang jalan, panjang seluruh jembatan, panjang trotoar dan panjang drainase dalam kondisi baik	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Data Infrastruktur Jalan, Jembatan, Drainase, Trotoar
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman Kota Magelang	1. Luas Kawasan Kumuh	ha	Rasio Luas kawasan kumuh (Luas Kawasan Kumuh dalam Ha)	- Dinas Perumahan dan Permukiman	- Data Kondisi Kawasan Kumuh per Kelurahan
	2. Prosentase Rumah Tidak Layak Huni	%	Jumlah RTLH dibagi Jumlah total rumah x 100%	- Dinas Perumahan dan Permukiman	- Data Kondisi Perumahan per Kelurahan
Meningkatnya keamanan, dan keselamatan transportasi di Kota Magelang	1. Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Angka	Tingkat keselamatan lalu lintas tiap km per 100.000 penduduk per 100.000	- Dinas Perhubungan	- Data Keselamatan Lalu Lintas
Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	1. Jumlah Investor	Investor	Jumlah investor	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Data Investor
	2. Pertumbuhan nilai investasi PMA	%	$\{(\text{nilai investasi PMA th n} - \text{nilai investasi PMA th n-1}) \text{ dibagi nilai investasi th n-1} \} \times 100 \%$	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Data Investasi
	3. Pertumbuhan nilai investasi PMDN	%	$\{(\text{nilai investasi PMDN th n} - \text{nilai investasi PMDN th n-1}) \text{ dibagi nilai investasi th n-1} \} \times 100 \%$	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Data Investasi
Meningkatnya ketahanan pangan	1. Ketersediaan pangan utama beras (ton)	ton	Jumlah Stok Beras (Ton)	- Dinas Pertanian dan Pangan	- Data Ketersediaan Pangan
Meningkatnya daya saing tenaga kerja Kota Magelang	1. Persentase penyerapan tenaga kerja	%	$(\text{Jumlah pengangguran terbuka} / \text{Jumlah angkatan kerja}) \times 100 \%$	- Dinas Tenaga Kerja	- Data Ketenagakerjaan
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1. Persentase Penurunan PMKS	%	$(\text{Jumlah PMKS tahun n-1} - \text{jumlah PMKS tahun n} / \text{jumlah PMKS tahun n-1}) \times 100 \%$	- Dinas Sosial	- Data Kesejahteraan Sosial
	2. Pendapatan Perkapita	Rupiah	Pendapatan yang diterima oleh masing-masing kepala penduduk. Pendapatan perkapita	- OPD Lintas Sektor	- Data PDRB

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			tersebut dihasilkan dengan membagi pendapatan regional bruto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun		
	3. Angka Kemiskinan	%		- OPD Lintas Sektor	- Data Kemiskinan
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan	1. Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	Angka	Jumlah anak dibandingkan dengan jumlah keluarga	- DP4KB	- Data pertumbuhan penduduk
Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan	1. Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	Indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	- DP4KB	- Data IPG
	2. Rasio KDRT	%	Jumlah KDRT dibagi Jumlah Rumah Tangga x 100%	- DP4KB	- Data KDRT
Meningkatnya pelestarian budaya Kota Magelang	1. Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/dibina dan dikembangkan	%	Jumlah kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan dibandingkan jumlah kelompok seni budaya di Kota Magelang dikalikan 100%	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Data Sarana Prasarana Kebudayaan - Data Pelaku Budaya - Data Jenis Adat Budaya
	2. Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	situs/bcb	Dihitung berdasarkan jumlah situs dan bangunan cagar budaya yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Data Situs dan Bangunan Cagar Budaya
Meningkatnya daya tarik wisata Kota Magelang	1. Jumlah Wisatawan	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	- Data Kunjungan Wisatawan
	a. Nusantara	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	- Data Kunjungan Wisatawan
	b. Mancanegara	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	- Data Kunjungan Wisatawan
	2. Lama Tinggal Wisatawan	hari	Lama Tinggal Wisatawan di Kota Magelang	- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	- Data Lama Tinggal Wisatawan
Meningkatnya toleransi antar umat beragama	1. Prosentase penurunan penyakit masyarakat	%	$((\text{Jumlah penyakit masyarakat tahun } n-1) - (\text{Jumlah penyakit masyarakat tahun } n)) / (\text{Jumlah penyakit masyarakat tahun } n-1)$	- Badan Kesbangpolinmas - Satpol PP - Dinas Sosial	- Data Penyakit Masyarakat

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			dikalikan 100%		
	2. Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	%	Komponen dari indikator adalah kerukunan hidup antar suku, adat, ras dan agama. Masing - masing komponen bernilai 25%. Rumus 100% - (% komponen konflik)	- Badan Kesbangpolinmas	- Data Konflik Masyarakat
Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat	1. Angka kriminalitas	Angka	(Jumlah tindak kriminalitas yang terjadi selama 1 tahun/jumlah penduduk) dikalikan 10.000	- Badan Kesbangpolinmas - Satpol PP	- Data Kriminalitas
	2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda	%	(Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan dibagi dengan jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan) dikalikan 100%	- Satpol PP	- Data Pelanggaran Perda
	3. Prosentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	%	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 dibagi dengan jumlah pelanggaran K3 dikalikan 100%	- Satpol PP	- Data Pelanggaran K3

BAB VII P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2019 merupakan perencanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang memuat kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2019.

Sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RKPD Kota Magelang merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD Kota Magelang Tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019 memerlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (stakeholders) melalui Forum OPD dan FGD serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyesuaian rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kota Magelang ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kota Magelang, juga diusulkan ke APBD Propinsi Jawa Tengah dan ke Pemerintah Pusat melalui APBN.

Keberhasilan pembangunan di Kota Magelang selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kota Magelang juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kota Magelang sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kota Magelang menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Kota Magelang Tahun 2019, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2. Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program RKPD Kota Magelang Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya.
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun 2019, RKPD ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Magelang, APBD Propinsi Jawa Tengah maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2019 sebagai penjabaran dari Rencana Starategik Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD).
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Forum OPD serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
6. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan. Program tersebut direncanakan berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/ kegiatan pembangunan di Kota Magelang.
7. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, Badan Perencanaan Kota Magelang berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2019 ke dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) dan Kebijakan Umum APBD 2019 serta Prioritas dan Pagu Indikatif OPD 2019.

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

Lampiran 2

PENYAJIAN DOKUMEN RENJA

(Sesuai dengan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada poin C.5)

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.1 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)*
Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Perangkat Daerah :

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan									
1 01	Bidang Urusan									
1 01 01	Program									
1 01 01 01	Kegiatan.....									
1 01 01 02	Kegiatan.....									
1 01 01 03	Dst....									
1 01 02	Program									
1 01 02 01	Kegiatan.....									
1 01 02 02	Kegiatan.....									
1 01 02 03	Dst									
1 01 03	Program									
1 01 03 01	Kegiatan.....									
1 01 03 02	Kegiatan.....									
1 01 03 03	Dst									

....., 20....
Kepala Perangkat Daerah *)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.2 sebagai berikut:

Tabel T-C.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPDP

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPd dengan hasil analisis kebutuhan Perangkat Daerah dengan mengacu pada Renstra OPD dan memperhatikan dinamika terkini;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPd, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPd, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel berikut, 0:

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPd tahun
Provinsi/Kabupaten/Kota*

Nama Perangkat Daerah:.....

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan oleh OPD					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- b. Pencapaian SDGs,
- c. Pengentasan kemiskinan,
- d. Pencapaian NSPK dan SPM,
- e. Pdayagunaan potensi ekonomi daerah,
- f. Pengembangan daerah terisolir,
- g. Dsb.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan T.C33 yaitu sebagai berikut:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
 dan Prakiraan Maju Tahun.....
 Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Perangkat Daerah :

lembar dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			(Tahun Rencana)					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	(8)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			

Catatan:

- Isikan angka tahun rencana, nama provinsi, nama Perangkat Daerah, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.